



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, serta target prioritas pembangunan Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 perlu dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
 - c. bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018, dan Rancangan APBD 2018 harus mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

- Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 824);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 825);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2018 yang dimulai dari 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

- (2) RKPD Tahun 2018 disusun dalam sistematika sebagai berikut:
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
 - Bab III : Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
 - Bab IV : Prioritas dan sasaran pembangunan
 - Bab V : Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
 - Bab VI : Penutup
- (3) RKPD Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD 2018, selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Kabupaten Magetan tahun 2018.

Pasal 3

RKPD Tahun 2018 merupakan acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja Triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 46 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 Oktober 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras baik antara pusat dengan daerah, dan daerah dengan daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Pemerintah Daerah dituntut dapat menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka panjang, menengah maupun jangka pendek, sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 (dua puluh) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta jangka pendek 1 (satu) tahun yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran rencana penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai visi dan misi daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang menjadi landasan serta pedoman dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat, yang tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Proses pembangunan dirancang agar dalam implementasinya dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten/ kota, provinsi maupun nasional akan sangat menentukan arah pembangunan yang ingin dicapai dan dijalankan. Perencanaan pembangunan di Kabupaten/ Kota harus terjadi keselarasan dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi dan pusat. Oleh karena itu Penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota harus mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional.

RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan tahun 2009 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2013 – 2018, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antarwilayah serta penjangkaran aspirasi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, teknokratis, *Top-Down Planning* dan *Bottom-up Planning* serta politik.

Memperhatikan ketentuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka penyusunan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2018 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perumusan Rancangan awal RKPD

Dilaksanakan evaluasi kinerja RKPD tahun 2016, permasalahan pembangunan yang dihadapi tahun 2016, perumusan sasaran, arah kebijakan, program prioritas tahun 2018 untuk memberikan panduan

kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah (Renja PD). Perumusan Rancangan awal RKPD dilaksanakan tim Kabupaten pada Minggu I – IV Januari 2017.

2. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/ Kelurahan

Merupakan tahap penggalan dan penjaringan aspirasi/ usulan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat desa/ kelurahan untuk diusulkan dalam APBD Kabupaten, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat Desa/ kelurahan, meliputi unsur Pemerintah Desa, BPD, LPM, Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, dan lainnya yang koordinasikan dari unsur Kecamatan. Musrenbang tingkat desa/ Kelurahan dilaksanakan pada Minggu III – IV Januari 2017.

3. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk menginventarisasi, membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan dari kecamatan hasil kompilasi usulan kegiatan pembangunan hasil musrenbang seluruh Kelurahan/desa dalam satu wilayah Kecamatan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magetan. Unsur yang dilibatkan meliputi unsur Kecamatan, Lurah/Kepala Desa beserta Perwakilan perangkat kelurahan/desa, Bappeda Litbang Kab. Magetan, Anggota DPRD Asal Dapil Kecamatan bersangkutan, Perangkat Daerah (PD) Kabupaten yang melaksanakan tupoksi program prioritas daerah DITATA INDAH plus INSANI, Tokoh Perempuan/PKK, Organisasi Masyarakat tingkat kecamatan (Ormas Keagamaan, KNPI, dll), LSM, dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. Kebijakan perencanaan pembangunan Kab. Magetan tahun 2018 memberikan anggaran khusus untuk mengakomodir usulan hasil Musrenbang Kecamatan. Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan pada Minggu IV Januari s/d Minggu II Pebruari 2017.

4. Koordinasi program prioritas daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Merupakan pembahasan dan penyepakatan bersama arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2018 antara TAPD dengan SKPD pemangku program prioritas pembangunan daerah, sehingga diperoleh kesepakatan yang komprehensif dan melibatkan

berbagai satuan perangkat daerah. Koordinasi program prioritas daerah bersama TAPD dilaksanakan pada Minggu III Pebruari 2017.

5. Konsultasi Publik

Merupakan forum konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan aspirasi terutama secara teknokratis (keilmuan), dengan mengundang akademisi, organisasi profesi, pengusaha, LSM, Ormas, insan pers dan lainnya, diharapkan diperoleh rumusan untuk penyempurnaan sasaran dan program prioritas yang telah disusun agar lebih tepat sasaran. Konsultasi publik dilaksanakan pada Minggu III Pebruari 2017

6. Pra-Musrenbang Kabupaten

Forum ini dikoordinasikan oleh Bappeda Litbang dengan mempertemukan seluruh Kecamatan dengan SKPD dalam membahas dan mencermati usulan-usulan hasil musrenbang kecamatan untuk dapat atau tidaknya ditetapkan dalam usulan program dan kegiatan SKPD tahun anggaran 2018, berdasarkan kesesuaian dengan program prioritas pembangunan Daerah maupun program prioritas serta kewenangan SKPD. Pra-Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada Minggu IV Pebruari s/d Minggu I Maret 2017.

7. Forum Perangkat Daerah

Tahap ini mempertemukan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) dengan tim Bappeda Litbang, yang dipimpin Kepala Bidang Bappeda Litbang guna dilakukan sinkronisasi dan verifikasi seluruh usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) dalam rancangan Renja PD dan usulan hasil Musrenbang tingkat kecamatan, untuk menyelaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu II Maret 2017.

8. Rakor penyepakatan Program prioritas pembangunan daerah dengan Kepala Daerah

Merupakan pembahasan dan penyepakatan bersama arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah bersama TAPD dipimpin Bupati Magetan, untuk memperoleh rumusan yang komprehensif program pembangunan tahun 2018. Rakor dilaksanakan pada Minggu 13 Maret 2017.

9. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Dokumen rancangan awal RKPD merupakan kompilasi hasil forum PD, Pra-Musrenbang, Konsultasi Publik dan pokok-pokok pikiran DPRD,

sebagai materi yang akan dibahas dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, sehingga wajib disiapkan saat pelaksanaan Musrenbang kabupaten.

10. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Instansi vertikal, Unsur Pemerintah Provinsi, seluruh Perangkat Daerah (PD), Desa/ Kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan lainnya dalam forum musyawarah bersama untuk memperoleh masukan dan aspirasi dari seluruh peserta musrenbang, dan nantinya untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Musrenbang Kabupaten Magetan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2017.

11. Sinkronisasi terhadap RKPD Provinsi Jatim dan RKP Nasional

Tahap sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas pembangunan dalam Rancangan RKPD Kab. Magetan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan provinsi Jawa Timur dalam Musrenbang RKPD Provinsi, sehingga terjadi keselarasan program pembangunan. Sinkronisasi dilaksanakan pada Minggu IV April 2017.

12. Verifikasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan Penajaman dan verifikasi lanjutan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) dalam rancangan Renja PD oleh Bidang pada Bappeda Litbang terhadap indikator/ target kinerja, capaian kinerja RPJMD dan pagu anggaran kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Verifikasi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan pada Minggu I – IV Juli 2017.

13. Perumusan dan penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Merupakan tahapan lanjutan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD, pengintegrasian dengan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD beserta pagu indikatifnya. Selanjutnya juga dilaksanakan harmonisasi dan sinergi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Penyusunan rancangan akhir RKPD ini dilakukan oleh Kepala Bappeda Litbang beserta tim, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, dilaksanakan pada Minggu I – IV September 2017.

14. Koordinasi Rancangan akhir RKPD bersama Kepala SKPD.

Rancangan Akhir RKPD dikoordinasikan bersama Kepala PD, untuk memastikan program prioritas Pemerintah Daerah dan seluruh program/kegiatan SKPD yang merupakan hasil kompilasi pembahasan dalam tahapan-tahapan penyusunan RKPD yang telah dilalui, telah ditampung dalam rancangan akhir RKPD. Koordinasi oleh Bappeda Litbang bersama Kepala PD dilaksanakan pada Minggu IV September s/d Minggu I Oktober 2017.

15. Reviu Rancangan Akhir RKPD

Sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, mengamanatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dilaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Kab. Magetan tahun 2018 oleh Inspektorat Kab. Magetan pada Minggu I – II Oktober 2017.

16. Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD

Penyempurnaan dokumen rancangan akhir RKPD tahun 2018 dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi Rancangan Akhir RKPD dengan Kepala Perangkat Daerah dan menindaklanjuti hasil reviu oleh Inspektorat sebelum ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Penyempurnaan dokumen dilaksanakan oleh tim Bappeda Litbang Kab. Magetan, dilaksanakan pada Minggu II Oktober 2017.

17. Penetapan dokumen RKPD

Tahap akhir dari kegiatan penyusunan RKPD adalah penyajian rancangan akhir RKPD menjadikan dokumen final RKPD, untuk selanjutnya di tetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan, yang memuat seluruh rencana program dan kegiatan Pembangunan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran 2018.

Secara sederhana, tahapan penyusunan RKPD Kab. Magetan tahun 2018 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Dokumen RKPD Kab. Magetan tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magetan, menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2018, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD tahun 2018.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 824)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 825);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019.
 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2012 – 2032. (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2012 Nomor 15,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2012 Nomor 24)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

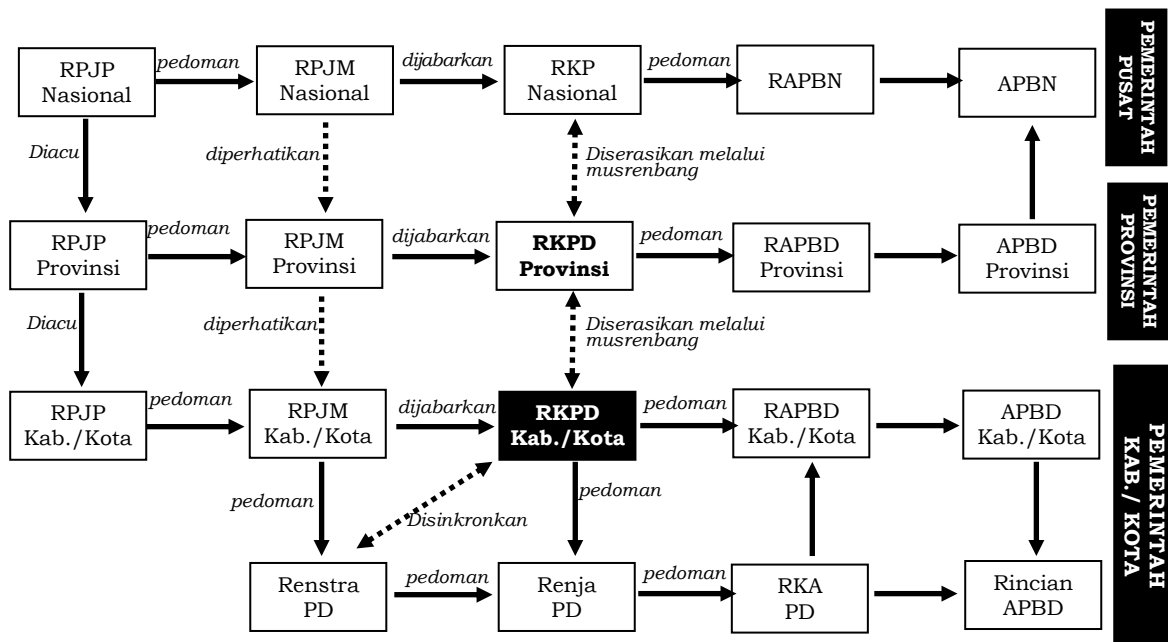
RKPD Sebagai produk perencanaan tidak dapat berdiri sendiri dan atau dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara hierarkis RKPD merupakan penjabaran dari Renstra PD dan RPJMD, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun Provinsi, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran di Daerah meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 20 tahunan,
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 tahunan,
- 3) Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) periode 5 tahunan,
- 4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 tahunan , dan
- 5) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) periode 1 tahunan.

Seluruh dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan dokumen perencanaan yang membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :

GAMBAR 1.2
HUBUNGAN KETERKAITAN ANTARA RKPД DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN LAINNYA



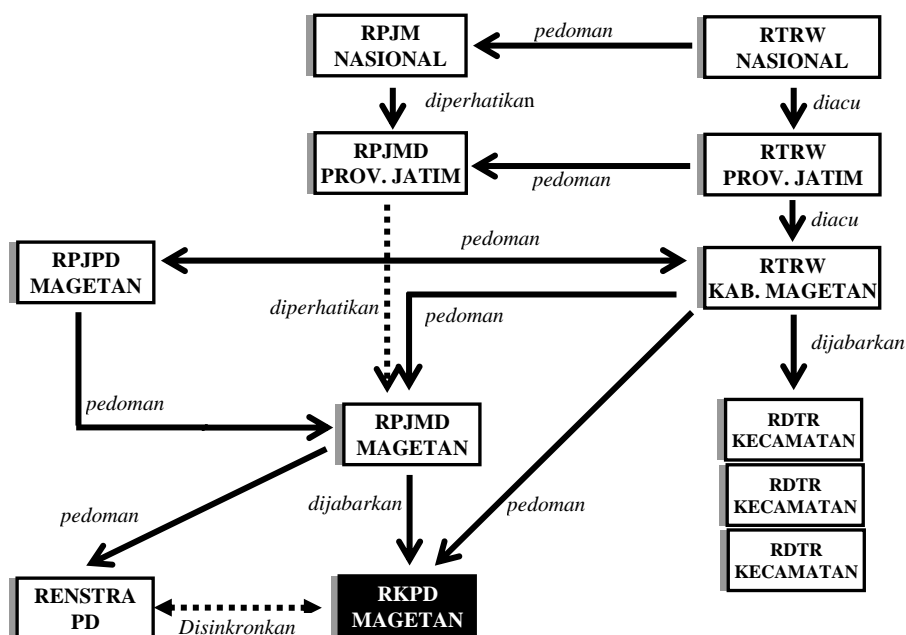
Mengacu pada Gambar diatas dapat diketahui bahwa secara rinci Hubungan RKPД dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPД Kab./ Kota disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional dan RKPД Provinsi melalui mekanisme Musrenbang RKPД.
- RKPД Kab./ Kota disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
- RKPД Kab./ Kota disusun dengan memperhatikan Renstra PD (Perangkat Daerah), terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja.
- RKPД Kab./ Kota menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD dan RKA PD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran yang tersedia, sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing - masing PD.
- Selanjutnya RKPД Kab./ Kota dijadikan acuan dalam penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD dengan memperhatikan Renja PD dan kemampuan keuangan daerah.

Pembangunan daerah sebagai upaya yang sistematis untuk mengubah kondisi menuju arah lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien dan efektif melalui proses yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pelaksanaan

pembangunan di Kab. Magetan harus diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, mengembangkan potensi lokal agribisnis, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan (alam). Maka, perencanaan pembangunan senantiasa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2012 – 2032.

GAMBAR 1.3
HUBUNGAN KETERKAITAN ANTARA RKPD DENGAN DOKUMEN TATA TUANG



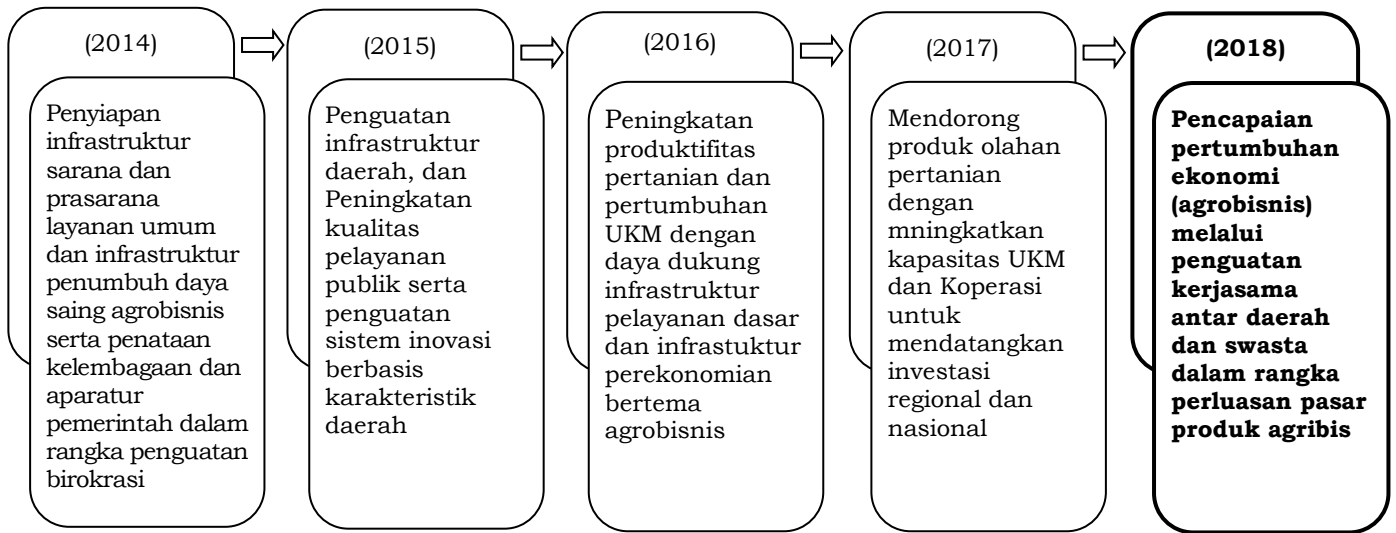
Mengacu pada Gambar diatas dapat diketahui bahwa hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan tata ruang, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan mempedomani RPJMD, dengan RPJMD memperhatikan dan mengacu Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
- RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan.

RKPD Kab. Magetan tahun 2018 merupakan Arah kebijakan pembangunan daerah tahun kelima dari perodesasi RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018, diprioritaskan dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi (agrobisnis) melalui penguatan kerjasama antar daerah dan swasta dalam rangka perluasan pasar produk agribis. Indikasi capaian dalam arah kebijakan adalah meningkatnya kemampuan pasar produk agrobisnis.

GAMBAR 1.4

ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN SELAMA 5 TAHUN MASA RJPMD



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Merujuk pada lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyajian dokumen RKPD Kab. Magetan tahun 2018 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, kedudukan RKPD dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD.
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3.	Hubungan antar Dokumen	hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kab, Renstra SKPD, Renja SKPD, RTRW Kab.) beserta penjelasannya.
1.4	Sistematika Dokumen RKPD	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan RKPD
1.5	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	Menjelaskan dan meyajikan dasar-dasar analisis, kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	Menjelaskan kondisi geografi dan demografi daerah, dan analisis kaitannya terhadap perencanaan pembangunan
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Berisi pengantar analisis dan penjasalan kondisi umum aspek kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	Berisi pengantar analisis dan penjesalan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan

2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	Berisi pengantar analisis dan penjesalan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPDP sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	Mencakup evaluasi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/ pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja, keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu dan tahun berjalan terhadap RPJMD.
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD, serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi dan kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD - Menggambarkan kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah	Menggambarkan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun (tahun 2012 s/d 2016) dan Indikator Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang tersedia di Daerah.
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	Menjelaskan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman) terhadap pencapaian pembangunan daerah (Tahun 2017 s/d 2018)
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kapasitas keuangan daerah dengan kerangka pendanaan yang disusun dalam RPJMD (Pendapatan, Belanja, Pembiayaan) - Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan (Tahun 2014 s/d 2018) - Arah Kebijakan Keuangan Daerah (Arah Kebijakan Pendapatan Daerah; Arah Kebijakan Belanja Daerah; Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah) tahun 2018

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	Menjelaskan tentang hubungan visi/ misi dan tujuan/ sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD
4.2	Prioritas dan Pembangunan	Gambaran Prioritas pemb daerah dan kaitannya dengan RPJMD
4.2.1	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD yang terkait dengan arahan prioritas program/ kegiatan untuk tahun yang direncanakan
4.2.2	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas pemb daerah korelasinya dg prioritas dan sasaran pemb. Nasional dan regional, pengembangan sektor unggulan daerah, dan isu strategis daerah, serta review (dibandingkan) dg prioritas pemb dlm RPJMD tahun rencana, dan target capain kinerja tahun direncanakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

	Memberikan informasi program & kegiatan tahun rencana setiap SKPD, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya
--	---

BAB VI PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2018 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk jangka 1 (satu) tahun.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur.
- b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan.
- e. Memberikan arah dan menyatukan tujuan kegiatan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Magetan dan SKPD dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2018, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 :

- a. Sebagai acuan bagi Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Magetan tahun anggaran 2018.
- b. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Magetan merupakan Kabupaten terkecil ke dua se-Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo, terletak di ujung barat Propinsi Jawa Timur, dan berada di ketinggian antara 60 s/d 1.660 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah 688,85 km², terbagi dalam 18 Kecamatan, dengan Kecamatan Parang merupakan Kecamatan terluas dengan luas 71,64 km², sedang Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 Km² merupakan kecamatan dengan luas terkecil, dengan rata-rata luas tiap kecamatan sebesar 38,27 Km². Jarak antar Ibu kota kecamatan yang tidak terlalu jauh merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk pelaksanaan pembangunan. Jarak terpendek adalah kecamatan Poncol dan Plaosan yang berjarak 3,4 Km dan jarak terjauh kecamatan Parang – Kartoharjo sejauh 41 Km. Sedang jarak terpendek dari Ibu kota kabupaten ke Kecamatan, adalah dengan kecamatan Magetan sejauh 2 Km dan jarak terjauh dengan kecamatan Kartoharjo dengan jarak 26 Km. Terletak di sekitar 7 ° 38' 30" LS dan 111 ° 20' 30" BT bujur timur, dengan suhu udara berkisar antara 16° - 20° C di daerah pegunungan dan 22° - 26° C di dataran rendah, Magetan merupakan daerah yang berpotensi di bidang Pertanian dan Pariwisata, dengan memiliki curah hujan mencapai 1.481 – 2.345 mm per tahun di dataran tinggi dan 867 – 1.551 mm per tahun untuk dataran rendah.

Secara geografis Kabupaten Magetan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah tepatnya di sebelah selatan dengan Kabupaten Wonogiri dan sebelah barat dengan Kabupaten Karanganyar. Sedangkan disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, sebelah Timur dengan Kabupaten Madiun dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo.

GAMBAR 2.1
PETA WILAYAH KABUPATEN MAGETAN



b. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Magetan bervariasi, dengan kedudukan tanah terletak pada ketinggian antara 25 sekitar 100 meter di atas permukaan air laut sekitar 20,28% dari luas wilayah; ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut ssazekitar 49,47% dari luas wilayah; sedangkan ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut luasnya sekitar 16,27% dari luas wilayah, serta ketinggian di atas 1000 meter diatas permukaan laut luasnya 13,44% dari luas wilayah

Selain itu Kabupaten Magetan mempunyai topografis sebagai berikut:

- a. Wilayah pegunungan dengan kondisi subur di Kecamatan Plaosan, kondisi sedang berada di Kecamatan Panekan, Kecamatan Poncol bagian barat dan Kecamatan Sidorejo, wilayah sedang di Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan termasuk daerah pegunungan yang kurang subur.
- b. Wilayah dataran rendah dengan kondisi subur di Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Barat, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Takeran. Kondisi sedang berada di Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan Sukomoro. Sedangkan sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro termasuk daerah dataran rendah yang kurang subur.

Dilihat dari luas wilayah Magetan 68.884,74 ha, terbagi atas 28.297,24 hektar tanah sawah dan 39.587,50 hektar tanah kering. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan karena sebagian besar penduduk Magetan hidup dari bidang bercocok tanam. Komoditas tanaman bahan makanan, utamanya padi masih merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan.

c. Kondisi Geologi

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di kaki Gunung Lawu. Selain itu endapan batuan vulkanik Kwartir juga ditempati oleh gunung-gunung lain yang berada di Kabupaten Magetan seperti Gunung Lumpang, Gunung Bulusungsang, Gunung Banyuurip, Gunung Puntukpelok, Gunung Sidoramping, Gunung Jobolarangan, Gunung Cemoropenganten, sedangkan Gunung Blego dan Gunung Butak di daerah perbatasan Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Poncol. Keberadaan Gunung Bancak dan Gunung Bungkuk di Kecamatan Parang mewakili batuan gunung api pada jaman Tersier. Gunung Lawu merupakan jenis gunungapi Kwartir yang sudah tidak aktif atau dalam fase istirahat. Oleh sebab itu, bahaya yang dapat ditimbulkan dengan keberadaan gunung-gunung tersebut adalah aliran lahar. Aliran lahar merupakan hasil rombakan batuan dan tanah yang berasal dari gunungapi tersebut. Bahan rombakan tersebut diangkut ke bawah melalui aliran sungai yang mempunyai hulu di gunung-gunung tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, aliran sungai yang mengalir ke arah timur laut merupakan sungai yang banyak membawa aliran lahar dari Gunung Lawu.

d. Kondisi Potensi Rawan Bencana

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di kaki Gunung Lawu. Selain itu endapan batuan vulkanik Kwartir juga ditempati oleh gunung-gunung lain yang berada di Kabupaten Magetan seperti Gunung Lumpang, Gunung Bulusungsang, Gunung Banyuurip, Gunung Puntukpelok, Gunung Sidoramping, Gunung Jobolarangan, Gunung Cemoropenganten, sedangkan Gunung Blego dan Gunung Butak di daerah perbatasan Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Poncol. Keberadaan Gunung Bancak dan Gunung Bungkuk di Kecamatan Parang mewakili batuan gunung api pada zaman Tersier.

TABEL 2.1
PETA DAERAH RAWAN BENCANA KAB. MAGETAN

No	TITIK LOKASI LOKASI BENCANA ALIRAN LAHAR LEWAT MEDIA SUNGAI
1.	Kali Gonggang, Desa Tunggur, Kecamatan Lembeyan
2.	Kali Gonggang Kecamatan Poncol dan Kecamatan Parang
3.	Gunung Bancak, Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, dan Kecamatan Kawedanan
4.	Perpotongan Sungai Trinil, Desa Taji, Kecamatan Sukomoro
5.	Jembatan Ginuk, Desa Ginuk, sungai Trinil, Kecamatan Sukomoro
6.	Jembatan Sedran, Kali Trinil, Desa Sedran, Kecamatan Panekan
7.	Kali Trinil Kecamatan Karas
8.	Kali Ginuk, Desa Ginuk, Kecamatan Karas
9.	Jembatan Milangasri, Kali Catur, Desa Milangasri, Kecamatan Panekan

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan

Sebagian wilayah Kabupaten Magetan adalah wilayah yang rawan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung dengan tingkatan rendah, menengah dan tinggi. Rawan tanah longsor disebabkan karena kondisi topografi sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan adalah pegunungan dengan kontur yang cukup rapat sehingga wajar apabila bencana tanah longsor lebih intens terjadi di kabupaten Magetan. Di beberapa wilayah dengan topografi rendah berpotensi terjadi bencana banjir dengan kategori rendah dan menengah saat terjadi hujan dengan intensitas sangat tinggi. Di beberapa wilayah lain merupakan jalur angin puting beliung.

TABEL 2.2
PEMETAAN KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN MAGETAN

NO	KECAMATAN	ANCAMAN BENCANA	TINGKAT KERAWANAN		
			TINGGI	SEDANG	RENDAH
1	PONCOL	tanah longsor	4 desa/kel	4 desa/kel	-
2	PLAOSAN	tanah longsor	8 desa/kel	2 desa/kel	2 desa/kel
3	SIDOREJO	tanah longsor	2 desa	3 desa	-
4	PANEKAN	tanah longsor	1 desa	4 desa	-
5	NGARIBOYO	tanah longsor	-	2 desa	-
6	PARANG	tanah longsor	-	2 desa	-
7	KARTOHARJO	banjir	2 desa	2 desa	-
8	LEMBEYAN	banjir	-	2 desa	-
9	PANEKAN	puting beliung	-	4 desa	-
10	SUKOMORO	puting beliung	-	7 desa	-
11	KARAS	puting beliung	-	2 desa	-
12	BENDO	puting beliung	-	5 desa	-
13	TAKERAN	puting beliung	-	5 desa	-
14	NGUNTORONADI	puting beliung	-	4 desa	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan

Kekeringan lahan merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh daerah tersebut kekurangan suplai air permukaan baik dalam bentuk sungai maupun saluran irigasi. Kekeringan lahan di daerah tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya suplai air dari daerah lain. Suplai air dari daerah lain dapat dilakukan dengan melakukan pemboran air tanah atau pengambilan air bawah tanah. Faktor-faktor penyebab

kekeringan lahan tersebut adalah keterbatasan aliran permukaan (sungai dan irigasi), keterbatasan mata air, dan curah hujan kecil.

Berdasarkan hasil analisis, kecamatan di Kabupaten Magetan yang termasuk dalam klas kekeringan lahan rendah adalah Kecamatan Barat, Kecamatan Bendo, Kecamatan Karas, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Maospati, Kecamatan Panekan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Poncol, dan Kecamatan Plaosan.

TABEL 2.3
KEJADIAN BENCANA DAERAH KAB. MAGETAN TAHUN 2014 - 2016

NO	TAHUN	KEJADIAN	JUMLAH	KERUGIAN	
				JIWA	MATERI (Rp.)
1	2014	Angin Puting beliung	3 kali	-	67.009.000
		Banjir	1 kali	-	550.000.000
		Kebakaran	13 kali	-	1.025.000.000
		Tanah Longsor	5 kali	-	72.100.000
		Rumah Roboh	15 Kali	-	455.000.000
2	2015	Angin Kencang/ puting beliung	13 kali	-	80.000.000
		Tanah Longsor	7 kali	-	Tidak ada laporan
		Kebakaran rumah	18 kali	-	1.375.000.000
		Kebakaran lahan/ hutan	2 kali	ada	Tidak ada laporan
3	2016	Tanah longsor	20 kali	-	1.332.500.000
		Angin Kencang/ puting beliung	9 kali	-	71.500.000
		Banjir	6 kali	-	295.000.000
		Kebakaran	4 kali	-	10.025.000.000

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Magetan tahun 2017

e. Kondisi Penggunaan Lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah

Di Kabupaten Magetan kawasan yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan adalah ibukota Kabupaten Magetan, Kota Maospati, Kecamatan Plaosan serta kecamatan sesuai dengan peraturan daerah tentang penetapan batas wilayah kota di lingkungan Kabupaten Magetan. Pada wilayah yang didominasi kegiatannya untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan bagi penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya.

Lahan yang termasuk dalam kategori subur di perbukitan terdapat di Kecamatan Plaosan, sedangkan lahan subur yang berada di dataran rendah terdapat di Kecamatan Karangmojo, karangrejo, Barat, Karas, Kartoharjo, dan Takeran. Lahan yang termasuk dalam kategori kesuburan sedang yang berada di perbukitan terdapat di Kecamatan Panekan dan Kecamatan Poncol bagian barat. Sementara itu, lahan dengan tingkat kesuburan sedang yang berada di dataran rendah terdapat di Kecamatan

Magetan, Maospati, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Sukomoro, dan sebagian Kecamatan Kawedanan.

Lahan yang termasuk dalam kategori kurang subur/kritis di perbukitan terdapat di Kecamatan Parang, kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian timur dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan. Sementara itu, di dataran rendah, lahan yang termasuk dalam kategori kurang subur/kritis terdapat di Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro. Ditinjau dari segi karakteristik tanah wilayah dengan potensi sebagai kawasan budidaya pengembangan tanaman perkebunan, Kabupaten Magetan cukup mempunyai andil dalam meningkatkan pemasukan daerah apabila dikelola secara berkelanjutan. Adapun jenis tanaman yang mempunyai potensi sebagai produk unggulan di wilayah ini adalah:

- Budidaya tanaman tahunan tebu (Karangrejo, Karas, Sukomoro, Kawedanan, Takeran)
- Budidaya tanaman jeruk pameo (Bendo, Takeran, Sukomoro, Kawedanan)
- Budidaya kopi (Poncol, Plaosan)
- Budidaya tembakau (Plaosan, Poncol)
- Budidaya kelapa (Parang, Poncol)
- Budidaya jambu mente (Poncol)
- Budidaya tanaman sayur dan buah durian tawin (Plaosan, Poncol, dan Panekan)

Budidaya jeruk pameo berkembang pada daerah dengan istilah BETASUKA yang diuraikan menjadi kawasan dengan potensi unggulan jeruk/sebagai sentra pengembangan di mana wilayahnya adalah Kecamatan Bendo, Takeran, Sukomoro dan Kawedanan. Sebenarnya penyebaran tanaman jeruk tersebut banyak terdapat di wilayah Kabupaten Magetan

Kawasan yang banyak digali dalam pengembangan hasil tambang batu adalah di sekitar Plaosan, Poncol, Parang, Sukomoro, dan Bendo yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, tapi pemanfaatan/ pengelolaan hasil tambang tersebut masih dilakukan secara sederhana oleh masyarakat, sehingga sulit untuk dipantau keberadaannya. Untuk pengembangan bahan galian C diharapkan adanya pemantauan secara berkala untuk menghindari pelongsoran tanah yang dapat menyebabkan melebarnya sungai, begitu juga dengan proses pembuatan batu bata yang memanfaatkan tanah dimana pada tanah tersebut memiliki unsur kesuburan, maka apabila tanah tersebut terus digali sebagai bahan pembuatan batu bata dan tidak mengindahkan

kaidah kelestarian lingkungan akan menimbulkan kerusakan tatanan tanah dan lingkungan, seperti pada kawasan Bendo.

f. Kondisi Demografi

Kabupaten Magetan terbagi dalam 18 Kecamatan, 207 Desa, 28 Kelurahan, 1.048 RW dan 4.653 RT, yang berdasarkan klasifikasinya seluruh Desa/Kelurahan berklasifikasi swadaya. Jumlah penduduk Kabupaten Magetan tahun 2015 sebanyak 677.703 jiwa, jumlah penduduk yang tertinggi di Kecamatan Panekan 56.934 jiwa dan terendah di Kecamatan Nguntoronadi 20.578 Jiwa.

Secara umum kepadatan penduduk di kabupaten Magetan tahun 2015 adalah 989 Jiwa/ Km², sedang Kecamatan yang paling jarang penduduknya di Kecamatan Poncol dengan kepadatan 594 jiwa/ Km² dan penduduk paling padat adalah di Kecamatan Magetan dengan kepadatan penduduk 2.121 Jiwa/ Km².

Dari data kependudukan yang ada, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kab. Magetan tahun 2015 mengalami minus, sebesar -0,026%, dibandingkan dengan tahun 2014 yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,07%. Data kependudukan Kabupaten Magetan lebih rinci tersaji dalam tabel berikut:

TABEL 2.4
PENDUDUK AKHIR TAHUN MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2014 - 2016

No.	Kecamatan	Penduduk			Pertumbuhan		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Poncol	30.414	30.501	30.612	150	87	111
2	Parang	46.482	44.524	44.927	-1	-1.958	403
3	Lembeyan	41.439	42.218	42.218	146	302	477
4	Takeran	39.510	38.908	39.124	127	-602	216
5	Nguntoronadi	24.151	42.978	21.227	98	18.827	-21.751
6	Kawedanan	46.006	45.391	43.058	-63	-615	-2.333
7	Magetan	47.683	51.429	45.511	-12	3.746	-5.918
8	Ngariboyo	40.372	56.943	39.272	81	-16.562	-17.662
9	Plaosan	53.657	32.904	51.731	59	-20.753	18.827
10	Sidorejo	28.942	42.286	28.129	85	13.344	-14.157
11	Panekan	56.529	46.856	57.338	117	-9.673	10.482
12	Sukomoro	34.479	31.348	33.029	-27	-3.131	1.681
13	Bendo	40.943	24.564	42.324	-31	-16.379	17.760
14	Maospati	46.763	35.776	46.734	56	-10.987	10.958
15	Karangrejo	26.133	25.549	24.970	-76	-584	-579
16	Karas	33.038	38.121	36.575	369	5.083	-1.546
17	Barat	33.174	20.578	31.335	-109	-12.596	10.757
18	Kartoharjo	26.409	27.315	25.939	-3	906	-1.376
Jumlah		696.124	677.703	684.053	966	-18.4214	6.350

Sumber : Kabupaten Magetan Dalam Angka tahun 2017 (BPS Kab. Magetan 2017)

Penduduk Kabupaten Magetan mayoritas memeluk agama Islam. Namun demikian ada juga pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik,

Hindu dan Budha. Kerukunan umat beragama sebagai landasan utama kegotongroyongan, senantiasa terbina sehingga gesekan dan permasalahan antar umat beragama hampir tidak pernah terjadi.

TABEL 2.5
KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG DIANUT
TAHUN 2014 – 2016

No.	Uraian	Tahun (Jiwa)			Prosentase		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.	Islam	690.897	723.539	676.542	99,00 %	98,56%	98,90%
2.	Kristen	2.651	4.243	5.147	0,38 %	0,58%	0,75%
3.	Katholik	3.389	5.370	1.637	0,49 %	0,73%	0,24%
4.	Hindu	155	202	111	0,02 %	0,03%	0,02%
5.	Budha	676	758	558	0,10 %	0,10%	0,08%
6.	Lain-lain	34	0	58	0,01 %	0%	0,01%
JUMLAH		697.802	734.112	684.053	100%	100%	100%

Sumber : Kabupaten Magetan Dalam Angka tahun 2017 (BPS Kab. Magetan 2017)

Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan merupakan kawasan pedesaan. Masyarakatnya masih merupakan masyarakat homogen yang didominasi berasal dari suku Jawa. Interaksi sosial masih sangat tinggi. Kondisi sosial budaya Kabupaten Magetan sangat kondusif, dimana rasa kegotongroyongan dan toleransi masih sangat dijunjung tinggi. Oleh sebab itu rasa aman, damai, guyub rukun dan saling menghormati antar masyarakat dan antar pemeluk agama sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan mampu memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Magetan.

Budaya masyarakat Magetan sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan kegotongroyongan, serta Juga dipengaruhi oleh adat Kejawen yang masih diwarnai kepercayaan-kepercayaan kepada hal-hal gaib, sehingga beberapa budaya leluhur masih tetap lestari, seperti upacara labuhan sarangan, ledhug suro, acara bersih desa, prosesi pernikahan dan pemakaman, acara napak tilas dan lainnya. Hal tersebut justru menjadikan kekayaan budaya daerah yang mampu dijadikan sajian wisata budaya menarik dan bernilai ekonomi.

Jumlah pekerja menurut lapangan usaha hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor pertanian masih mendominasi sebesar 41,88 % dari total pekerja, sektor lain yang juga cukup besar ditekuni oleh 22,93 % pekerja adalah sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, sedang sektor jasa sosial kemasyarakatan menempati urutan ke tiga sebesar 13,90 % pekerja , lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

TABEL 2.6
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2013 – 2015

NO.	KETERANGAN	TAHUN (JIWA)			TAHUN (%)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.	Pertanian	198.789	208.728	138.836	62,38	67,74	41,88
2.	Pertambangan dan penggalian	21	22	2.067	0,06	0,01	0,62
3.	Industri pengolahan	25.124	2.640	32.304	7,88	0,86	9,75
4.	Listrik, gas dan air minum	391	411	1.620	0,12	0,13	0,49
5.	Konstruksi	9.831	10.323	21.884	3,06	3,35	6,60
6.	Perdagangan, hotel & rumah makan	49.371	51.840	76.015	15,49	16,82	22,93
7.	Angkutan dan komunikasi	4.798	4.702	8.989	1,51	1,53	2,71
8.	Keuangan, asuransi dan usaha persewaan bangunan	952	1.001	3.686	0,30	0,32	1,11
9.	Jasa sosial kemasyarakatan	28.593	27.735	46.092	8,97	9,00	13,90
10.	Lain-lain	791	751	-	0,25	0,24	-
JUMLAH		318.661	308.153	331.493	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2016; (Suvei angkatan kerja nasional 2015)

Selama tiga (3) tahun terakhir telah terjadi pergeseran struktur angkatan kerja, dengan semakin bergesernya pekerja di bidang pertanian ke bidang lain yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu perdagangan, hotel dan rumah makan, industri pengolahan konstruksi dan jasa sosial kemasyarakatan.

Komposisi penduduk menurut pendidikan merupakan isu sentral, karena dengan pembangunan Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sumber daya manusia.

TABEL 2.7
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2012 – 2016

No	Tingkat Pendidikan	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1.	Tidak Sekolah	16,91	15	22,24	17,21	16,59
2.	SD/ MI	40,85	39	30,74	30,31	32,01
3.	SMP/ MTs	16,69	16	18,95	20,83	16,86
4.	SMA/ SMK/ MA	21,12	22	21,47	25,64	21,03
5.	D1/ D3	1,21	2	} 6,59	1,41	1,19
6.	DIV/ S1	3,09	4		4,41	3,46
7.	S2/ S3	0,13	0,21		0,18	0,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Sosial

2.1.2.1. Kondisi Perekonomian

a. Struktur Perekonomian

Untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah dapat diketahui dari distribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Tiga sektor utama : Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan administrasi pemerintahan menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Magetan

dengan kontribusi sebesar 58,06 % pada tahun 2016. Sedangkan Kontribusi seluruh kelompok sektor terhadap PDRB dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung stagnan (stabil), baik sektor primer (sektor pertanian, pertambangan dan penggalian) dikisaran sebesar 35 % lebih, sektor sekunder (sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor konstruksi) di kisaran 17%, dan sektor tersier stagnan dikisaran 46% - 47%.

TABEL 2.8
STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2016

Sektor	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
PRIMER					
1. Pertanian	34,32	34,44	34,59	34,28	33,65
2. Pertambangan dan penggalian	1,67	1,59	1,65	1,61	1,55
SEKUNDER					
3. Industri Pengolahan	9,64	9,58	9,65	9,62	9,65
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
5. Air Bersih	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18
6. Konstruksi	7,77	7,77	7,91	7,71	7,78
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	13,96	14,18	13,98	14,21	14,76
8. Transportasi dan Pergudangan	1,19	1,24	1,32	1,37	1,40
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32	2,51	2,60	2,65	2,71
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,72	3,88	4,10	4,20	4,37
11. Informasi dan Komunikasi	6,40	6,48	6,31	6,34	6,42
12. Real Estate	1,37	1,39	1,37	1,39	1,37
13. Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33
14. Administrasi Pemerintahan	9,10	8,48	7,79	7,72	7,67
15. Jasa Pendidikan	4,11	4,08	4,18	4,15	4,08
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	0,76	0,78	0,83	0,85	0,85
17. Jasa – jasa lainnya	3,06	3,03	3,15	3,23	3,18
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan Tahun 2016; (SNA 2010)

Perekonomian Kabupaten Magetan yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 pada tahun 2015 sebesar Rp.10.824 Milyard dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 11.398 Milyard atau naik sebesar 5,31 %.

TABEL 2.9
NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 TAHUN 2014 – 2016

Sektor	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2015	2016
PRIMER					
1. Pertanian	3.271.262,6	3.372.496,4	3.484.867,9	3,09	3,33
2. Pertambangan dan penggalian	166.163,0	170.388,4	173.937,6	2,54	2,08
SEKUNDER					
3. Industri Pengolahan	1.003.981,8	1.056.521,1	1.116.905,4	5,23	5,72
4. Pengadaan Listrik dan Gas	7.175,5	7.105,9	7.352,5	-0,97	3,47
5. Pengadaan air, Pengelolaan sampah	24.400,5	25.358,6	26.094,2	3,93	2,90
6. Konstruksi	819.750,6	852.908,8	899.507,5	4,04	5,46
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	1.527.098,3	1.645.809,4	1.767.679,7	7,77	7,40

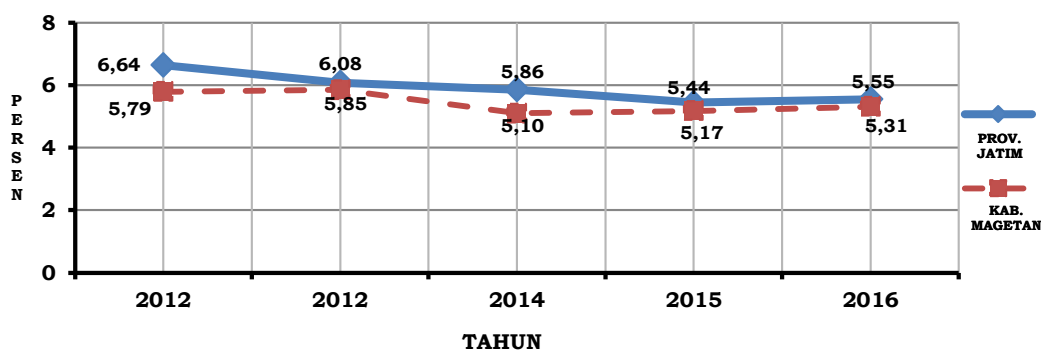
Sektor	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2015	2016
8. Transportasi dan Pergudangan	144.829,0	156.281,6	168.914,9	7,91	8,08
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	264.278,3	283.860,3	305.588,5	7,41	7,65
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	415.213,2	447.684,8	485.198,7	7,82	8,38
11. Informasi dan Komunikasi	771.782,5	837.717,1	904.583,7	8,54	7,98
12. Real Estate	150.562,3	158.337,3	166.684,8	5,16	5,27
13. Jasa Perusahaan	34.757,3	36.843,0	38.799,4	6,00	5,31
14. Administrasi Pemerintahan	828.707,5	858.292,3	887.961,6	3,57	3,46
15. Jasa Pendidikan	423.471,5	450.392,4	476.552,9	6,36	5,81
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	88.651,7	93.889,3	98.820,2	5,91	5,25
17. Jasa – jasa lainnya	349.598,0	370.032,3	388.681,9	5,85	5,04
PDRB	10.291.83,5	10.823.919,1	11.398.131,4	5,17	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2016; (tahun dasar 2010)

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik) kabupaten Magetan cenderung stabil dan fluktuasinya searah dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur meskipun selalu lebih rendah dibandingkan Jawa Timur, sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

GRAFIK 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI MAGETAN DAN JAWA TIMUR TAHUN 2012 - 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017 (tahun dasar 2010)

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 – 2016 Kab. Magetan, sektor primer menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang stabil tiap tahun, sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung mengalami penurunan walaupun nilainya sangat tipis. Dengan demikian, sektor primer mampu bertahan pada tingkat pertumbuhannya, ditengah kondisi sektor sekunder dan tersier yang cenderung turun selama lima tahun terakhir, sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL 2.10
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2012 – 2016

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
PRIMER					
1. Pertanian	4,42	3,28	3,03	3,09	3,33
2. Pertambangan dan penggalian	0,98	1,46	3,01	2,54	2,08
SKUNDER					
3. Industri Pengolahan	4,43	5,94	5,48	5,23	5,72
4. Listrik dan Gas	10,39	6,06	8,79	-0,97	3,47
5. Air Bersih	4,72	4,23	2,65	3,93	2,90
6. Konstruksi	6,30	6,26	6,73	4,04	5,46
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	8,47	8,61	6,24	7,77	7,40
8. Transportasi dan Pergudangan	6,84	10,46	11,00	7,91	8,08
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,77	13,90	8,24	7,41	7,65
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,01	9,08	8,56	7,82	8,38
11. Informasi dan Komunikasi	13,21	12,17	8,11	8,54	7,98
12. Real Estate	6,64	7,44	7,23	5,16	5,27
13. Jasa Perusahaan	4,43	6,41	9,40	6,00	5,31
14. Administrasi Pemerintahan	1,57	1,33	0,47	3,57	3,46
15. Jasa Pendidikan	5,60	6,54	6,63	6,36	5,81
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	7,09	7,06	13,43	5,91	5,25
17. Jasa – jasa lainnya	4,08	6,88	7,44	5,85	5,04
PDRB	5,79	5,85	5,10	5,17	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

c. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Magetan terjadi fluktuatif, terendah tahun 2014 sebesar 5,67% membaik pada tahun 2016 menjadi sebesar 3,94%. Fluktuasi inflasi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pusat seperti kenaikan harga BBM, harga komoditas sembako dan kewajiban perpajakan yang menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga juga menaikkan harga jual produk.

Sektor perdagangan mempunyai laju inflasi tertinggi, disusul sektor perdagangan, administrasi pemerintahandan penyediaan akomodasi dan makan minum. Laju inflasi menurut sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.11
LAJU INFLASI MENURUT SEKTOR TAHUN 2012 – 2016

No	Sektor	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1.	Pertanian	6,05	7,89	8,25	6,19	4,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,46	3,96	11,91	5,04	3,62
3.	Industri Pengolahan	3,84	4,07	6,08	4,71	3,80
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,94	-5,26	5,94	6,61	3,62
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah	0,12	-3,45	2,28	2,06	2,40
6.	Konstruksi	2,55	4,49	5,93	3,44	4,71
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	2,36	3,78	3,13	4,89	5,15
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,11	4,20	7,06	6,12	3,68
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,23	6,13	7,95	5,02	5,05
10.	Informasi dan Komunikasi	0,74	0,20	0,02	2,42	2,53

No	Sektor	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,75	5,68	6,21	4,99	3,97
12.	Real Estate	1,58	5,27	1,67	6,87	2,58
13.	Jasa Perusahaan	5,48	5,69	2,35	5,24	4,83
14.	Administrasi Pemerintahan	7,40	2,04	1,48	5,77	5,07
15.	Jasa Pendidikan	6,53	3,41	6,72	3,16	1,78
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosi	3,18	6,11	5,07	5,69	3,94
17.	Jasa lainnya	0,54	2,74	7,61	7,06	2,40
Inflasi		4,35	4,88	5,67	5,04	3,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

a. Pendidikan

Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Magetan tiap tahun terus mengalami peningkatan, ditandai dengan terus meningkatnya jumlah lulusan dari strata pendidikan yang lebih tinggi. Sarana dan prasarana pendidikan tiap tahun terus ditingkatkan, terutama melalui renovasi gedung sekolah dan peningkatan prasarana penunjang, peningkatan kualitas tenaga pengajar dari semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemerataan akses pendidikan terutama di daerah-daerah pinggiran. Namun demikian, angka hanya lulus di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) masih cukup tinggi.

Pembangunan pendidikan di kabupaten Magetan telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya indeks pendidikan kabupaten Magetan. Keberhasilan ini karena telah dilakukan upaya untuk menekan angka putus sekolah antara lain dengan memberikan bantuan kepada siswa miskin dan memberikan penyuluhan berkelanjutan mengenai pentingnya pendidikan serta siswa diberikan bekal pelajaran ketrampilan dan memberikan tambahan mata pelajaran *life skill* (kecakapan hidup) agar siswa memiliki daya saing manakala tidak mampu melanjutkan pendidikan berikutnya.

TABEL 2.12
PROSENTASE JUMLAH LULUSAN SEKOLAH TAHUN 2014 - 2016

No	Jenis Sekolah	Banyaknya Peserta Ujian			Prosentase Lulus			
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	SD	a. Negeri	7.424	6.923	7.330	100 %	100 %	100 %
		b. Swasta	349	411	1.285	100 %	100 %	100 %
2.	SLTP	a. Negeri	6.245	6.744	7.386	100 %	100 %	100 %
		b. Swasta	235	226	1.596	100 %	100 %	100 %
3.	SLTA	a. SMU Negeri	2.363	2.239	2.504	100 %	100 %	100 %
		b. SMU Swasta	72	79	720	100 %	100 %	100 %
		c. SMK Negeri	1.857	2.035	2.029	100 %	100 %	100 %
		d. SMK Swasta	1.866	1.865	1.806	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Magetan tahun 2017

b. Kesehatan

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Magetan secara terus menerus dan berkesinambungan membangun program meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik dengan pengembangan sarana & prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik), dan juga peningkatan sistem pelayanan kesehatan yang mengutamakan kemudahan, pelayanan murah dan berkualitas. Penyediaan akses kesehatan sampai dengan tingkat desa terus ditingkatkan dengan menempatkan tenaga medis di tiap desa dan pembangunan Poskedes. Juga dengan memperbanyak tenaga medis dengan berbagai spesialisasi, baik di Rumah Sakit maupun puskesmas.

Perkembangan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indeks kesehatan masyarakat sebagai pembangunan pelayanan dasar kesehatan yang terus meningkat tiap tahun, sebagaimana data berikut:

TABEL 2.13
PERKEMBANGAN INDEKS KESEHATAN MASYARAKAT KAB. MAGETAN
TAHUN 2012 – 2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Harapan Hidup (dalam tahun)	71,79	71,87	71,91	72,01	72,09
2.	Angka Kematian bayi (Per 1000 kelahiran)	12	11,15	10,35	10,53	10,89
3.	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran)	35,3	89,2	113,79	59,8	106,55
4.	Status Gizi Buruk (%)	0,32	0,43	0,51	0,59	0,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magetan tahun 2017

c. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Magetan cukup tinggi, hal ini memunculkan masalah tersendiri, dimana jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan kesempatan/ lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat tiap tahun. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat

menyerap pertambahan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Magetan tahun 2012 – 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.14
RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA TAHUN 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk yang bekerja	360.098	318.661	308.153	331.493	
2.	Angka pengangguran Terbuka	3,16%	3,86 %	3,02 %	4,28 %	3,02%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2016

TABEL 2.15
JUMLAH PENCARI KERJA, PENEMPATAN DAN PERMINTAAN KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pencari Kerja	9.350	5.463	4.135	5.391	4.478
2.	Penempatan	1.436	1.591	1.338	3.296	1.579
3.	Penghapus Pencari Kerja	5.158	0	0	0	-
4.	Pencari Kerja yang belum ditempatkan	7.914	3.872	2.819	3.211	1.909
5.	Permintaan lowongan kerja	1.436	1.591	1.338	3.296	1.579
6.	Dipenuhi	1.436	1.591	1.338	3.296	1.579

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

d. Aspek Daya Beli

Pertumbuhan ekonomi selain ditentukan oleh peningkatan pengeluaran pemerintah, investasi, juga dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, dimana peningkatan konsumsi akan meningkat jika daya beli masyarakat juga meningkat. Pengeluaran perkapita masyarakat Magetan meningkat dari Rp.10,4 juta di tahun 2012 menjadi Rp.11 juta pada tahun 2016. Hal ini juga dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan.

Keberhasilan dalam pembangunan manusia, ditunjukkan besaran Indeks Pembangunan manusia (IPM). IPM berdasarkan standart perhitungan tahun dasar 2010 dibangun atas 4 komponen yakni Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

TABEL 2.16
REALISASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,79	71,87	71,91	72,01	72,09
2. Harapan lama Sekolah (Tahun)	12,54	12,57	12,77	13,60	13,71
3. Rata2 Lama Sekolah (Tahun)	7,33	7,43	7,55	7,65	7,66
4. Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	10.375	10.484	10.539	10.594	10.988
IPM Kab. Magetan	69,56	69,86	70,29	71,39	71,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan 2013 – 2018, selain menggerakkan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui upaya: revitalisasi pertanian, peningkatan nilai tambah industri, peningkatan investasi, dan peningkatan pariwisata, maka kebijakan dan program yang lain untuk mendukung pemerataan pembangunan baik aspek ekonomi maupun aspek sosial, antara lain adalah Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Gambaran umum bidang kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi Kab. Magetan, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial, seni budaya dan olahraga serta pembangunan ekonomi juga tersaji dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.17
GAMBARAN UMUM BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERATAAN EKONOMI TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
Otoda					
Pertumbuhan ekonomi	5,79%	5,85%	5,10%	5,17%	5,31%
Pertumbuhan PDRB	5,79%	5,85%	5,10%	5,17%	5,31%
PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)	16,32	18,08	20,05	22,12	24,19
PDRB perkapita ADHK (Th. 2010 Rp. juta)	14,81	15,65	16,42	17,25	18,15
Laju Inflasi	4,35%	4,88%	5,67%	5,04%	3,94%
Angka kemiskinan	11,45%	12,14%	11,8%	11,35%	11,03%
Angka pengangguran terbuka	3,86%	3,02%	4,28%	6,05%	3,02%
IPM	69,56	69,86	70,29	71,39	71,94
Fokus Kesejahteraan Sosial					
Pendidikan					
Angka melek huruf	91,03%	97,82%	99,37%	99,46%	99,35
Angka rata-rata lama sekolah			6,29 Tahun	6,73 Tahun	6,73
Angka partisipasi kasar					
- Anak usia dini			46,65%	47,54%	96,67
- SD/MI	111,04%	111,39%	112,01%	105,73%	108,4
- SMP/MTs	100,02%	101,24%	102,00%	104,11%	115,6
- SMA/SMK/MA			94,92%	86,65%	-
Angka Partisipasi Murni					

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
- SD/MI	97,51%	98,03%	98,49%	98,86%	98,96
- SMP/MTs	91,11%	91,81%	92,46%	92,61%	92,82
- SMA/SMA/SMK/MA	75,84%	76,59%	77,18%	77,24%	-
Angka putus sekolah					
- SD/MI	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01
- SMP/MTs	0,09%	0,07%	0,08%	0,06%	0,06
- SMA/SMK/MA	0,21%	0,19%	0,26%	0,27%	-
Kesehatan					
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	12	11,15	10,35	10,53	10,89
Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	5,17	6,87	7,17	7,53	8,05
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	35,3	89,2	113,79	59,8	106,55
Angka usia harapan hidup	71,79	71,87	71,91	72,01	
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	13,53	11,93	11,26	11,72	12,2
Persentase balita gizi buruk	0,61	0,57	0,509	0,37	0,67
Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97,22	99,01	95,36	96,25	103
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kelahiran terlatih	85,52	91,87	91,29	95,00	97,58
FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA					
Kebudayaan					
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2	2	2	2	2
Pemuda dan olah raga					
Jumlah klub olah raga	21	21	21	21	21
Jumlah gedung olah raga	35	35	35	35	36

2.1.3.Kondisi Pelayanan Umum

a. Pendidikan

1. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah dasar dengan jumlah ketersediaan sekolah dasar yang ada. Adapun rasio ketersediaan sekolah dasar Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut.

TABEL 2.18
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH DASAR KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2012 – 2016

No	Tahun	Pendidikan Dasar (SD/MI)			Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTS)			Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA)		
		Jml gedung sekolah	Jumlah murid	Rasio	Jml gedung sekolah	Jumlah murid	Rasio	Jml gedung sekolah	Jumlah murid	Rasio
1	2012	573	56.233	98,14	88	29.195	331,76	58	21.756	375,10
2	2013	574	55.036	95,88	86	29.124	338,65	58	22.366	385,62
3	2014	572	54.294	94,92	87	30.016	345,01	58	22.684	391,10
4	2015	569	56.073	98,55	87	32.453	373,02	58	26.666	459,76
5	2016	572	54.342	95,00	69	30.259	438,54	67	23.472	350,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2017

2. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid atau siswa yang ada dalam suatu wilayah, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa efektif jumlah guru yang ada dalam meningkatkan mutu pendidikan disuatu wilayah tersebut. Adapun rasio antara guru dan murid di Kabupaten Magetan dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

TABEL 2.19
RASIO JUMLAH GURU DAN MURID KABUPATEN MAGETANTAHUN 2012 – 2016

No	Tahun	Pendidikan Dasar (SD/MI)			Pendidikan Menengah Pertama (SMP/MTs)			Pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA)		
		Jml Guru	Jumlah murid	Rasio	Jml Guru	Jumlah murid	Rasio	Jml Guru	Jumlah murid	Rasio
1	2012	5.524	56.233	10,18	2.608	29.195	11,19	2.890	21.756	7,56
2	2013	5.389	55.036	10,21	2.513	29.124	11,59	1.972	22.366	11,34
3	2014	5.158	54.294	10,53	2.486	30.016	12,07	1.929	22.684	11,76
4	2015	4.993	56.073	11,23	2.481	32.453	13,08	1.889	26.666	14,12
5	2016	5.815	54.342	9,35	2.843	30.259	10,64	2.142	23.472	10,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan 2017

b. Kesehatan

1. Infrastruktur pelayanan kesehatan

Infrastruktur pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan jaringannya serta Posyandu. Untuk Posyandu, idealnya satu Posyandumelayani 100 balita. Perkembangan infrastruktur kesehatan tahun 2012 – 2016 Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.20
INFRASTRUKTUR PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah rumah sakit	5	5	6	6	6
2.	Jumlah poliklinik	9	10	12	12	12
3.	Jumlah Puskesmas	22	22	22	22	22
4.	Jumlah Puskesmas pembantu	59	59	59	59	59
5.	Jumlah posyandu	920	920	920	929	929
6.	Rasio posyandu per 100 balita	2,58	2,04	2,07	2,07	2,26

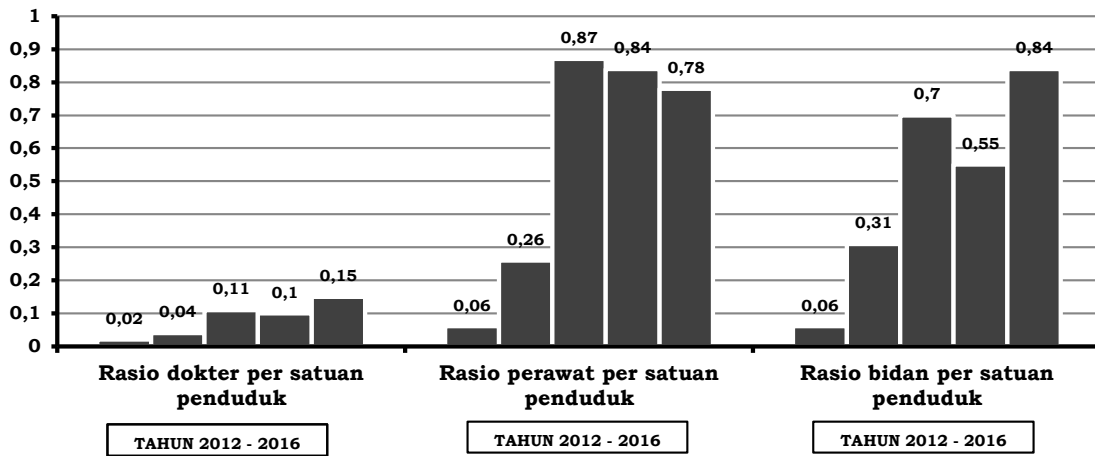
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magetan tahun 2017

2. Tenaga medis

Tenaga medis yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat memberikan gambaran seberapa besar ketersediaan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepadapenduduk. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnyasatu orang doktermelayani 2.500 penduduk. Perkembangan ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

GRAFIK 2.2
RASIO TENAGA KESEHATAN PER SATUAN PENDUDUK KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2012- 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Magetan tahun 2017

c. Perikanan

Pembangunan urusan Perikanan di Kabupaten Magetan mengemban sasaran “meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan” untuk mendukung tujuan strategik berupa pengembangan kegiatan perikanan yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, pendapatan pembudidaya ikan, dan daya saing produk perikanan.

Wilayah Kabupaten Magetan yang berada di daerah pegunungan memungkinkan berkembangnya budidaya ikan air tawar. Gambaran produksi ikan di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.21
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 - 2016

No.	Uraian	Tahun			Naik / Turun	
		2014	2015	2016	2014/2015	2015/2016
1	Ikan Tombro (ton)	7,97	8,26	7,00	0,29	-1,26
2	Ikan Patin (ton)	24,7	24,83	27,25	0,13	2,42
3	Ikan Nila (ton)	12,98	13,75	10,21	0,77	-3,54
4	Ikan Gurami (ton)	63,98	41,25	42,12	- 22,73	0,87
5	Ikan Lele (ton)	5,26	5,59	5,70	0,33	0,11
Jumlah (ton)		114,89	93,68	92,28	-21,21	-1,4

Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magetan Tahun 2017

d. Pertanian

Sektor Pertanian adalah salah satu urusan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pengembangan kegiatan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, pendapatan petani dan daya saing produk pertanian, dengan mengembangkan usaha pertanian terpadu (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan).

Sektor pertanian di Kabupaten Magetan merupakan penyumbang terbesar terhadap total PDRB Kabupaten. Hasil-hasil pertanian utama di Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.22
JUMLAH PRODUKSI HASIL PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN
TAHUN 2012 – 2016

No	Jumlah Produksi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi (kw)	2.890.076	3.053.592	3.034.718	3.101.112	3.370.713
2	Jagung (kw)	768.675	767.369	792.142	897.605	1.042.721
3	Kedelai (kw)	54.809	33.020	64.218	53.644	33.757
4	Tebu (kw)	494.387,15	502.122,26	509.427,00	484.641,70	484.641,64
5	Wortel (kw)	214.650	115.925	119.450	146.870	194.300
6	Strowbery (kw)	121	469	120	156	175
7	Bawang merah (kw)	14.027	9.951	14.665	24.536	28.275
8	Jeruk (kw)	253.988	195.872	418.360.	82.653	181.570
9	Mangga (kw)	233.275	107.811	202.648	236.488	62.730
10	Sapi potong (ekor)	114.630	96.185	106.913	107.683	110.228
11	Kambing& domba (ekor)	65.745	69.107	67.987	72.637	71.756
12	Ayam (ekor)	6.000.008	7.259.699	12.715.402	12.806.999	17.146.235
13	Telur (kg)	16.420540	18.977.959	17.783.444	29.215.600	20.534.558

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2017

e. Pariwisata dan Kebudayaan

Pembangunan Kepariwisataan masih menjadi primadona penyumbang pendapatan daerah, dan masih sangat prospektif untuk dikembangkan, diarahkan pada program pengembangan wisata sebagai tujuan wisata populer, terutama wisata alam di lereng gunung lawu, sehingga dapat menunjang gerak perekonomian daerah. Program prioritas bidang kepariwisataan diarahkan pada pengembangan kawasan wisata sarangan dan pengembangan kawasan wisata alam penunjang, seperti telaga wahyu, air terjun pundak kiwo, waterfall, mojosemi, area outbond. Jumlah kunjungan wisata maupun kontribusi terhadap pendapatan asli daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Obyek wisata sarangan sebagai penopang utama sektor pariwisata Magetan

Urusan Kebudayaan berkaitan dengan sasaran terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah. Tanggung jawab dan wewenang dalam urusan ini meliputi pembinaan dan pengembangan budaya daerah serta penyusunan kebijakan teknis urusan kebudayaan. Sasaran yang ingin dicapai adalah capaian Jumlah kegiatan festival seni dan budaya yang terlaksana dalam satu tahun.

f. Industri

Pembangunan bidang perindustrian dilakukan dalam rangkamengembangkan kegiatan usaha industri kecil dan menengah,

dengan sasaran meningkatnya produksi dan desain produk industri yang berdaya saing tinggi ini.

Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2012 - 2016 cenderung stagnan, yaitu dikisaran 9,62%. Pertumbuhan industri periode tahun 2012- 2016 menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 1,11 %. Selama 5 tahun terakhir perkembangan industri-industri baru sangat fluktuatif, karena sangat dipengaruhi kondisi perekonomian nasional, namun pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan yang sangat positif. Sedangkan kontribusi terhadap PDRB juga mengalami kenaikan dan penurunan sangat kecil, yaitu dalam 4 tahun terakhir rata-rata 0,02%.

TABEL 2.23
PERKEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN RAKYAT TAHUN 2012 - 2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah kerajinan rakyat	14.471	14.849	14.492	15.247	15.325
2.	Tenaga kerja (orang)	33.808	38.218	39.602	39.082	39.852
3.	Hasil produksi (Rp.000)	636.817.691	645.742.145	758.822.429	667.650.035	699.907.338

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2017

g. Perdagangan

Pembangunan perdagangan meliputi memantapkan distribusi barang intra dan inter wilayah, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan kepada konsumen. Pencapaian sasaran yang hendak diraih adalah perkembangan jumlah usaha perdagangan baru terus meningkat, karena adanya keuntungan usaha yang tentunya didukung oleh daya beli masyarakat, dan adanya fasilitasi ketersediaan pasar secara fisik, pameran dagang dan pasar lelang di propinsi, serta kemudahan perijinan, akhirnya akan menjadikan sektor perdagangan sebagai sektor primadona pertumbuhan.

Infrastruktur perdagangan difasilitasi dengan ketersediaan berbagai pasar daerah, pasar tradisional dan pasar wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Magetan. Keberadaan pasar tradisional dan wisata sangat mendukung mewujudkan Magetan sebagai Kota Agrowisata dan kota agropolitan.

Gambaran umum bidang pelayanan umum, meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup,

kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.24
GAMBARAN UMUM BIDANG PELAYANAN UMUM
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Pelayanan Urusan Wajib					
Pendidikan					
Ruang kelas kondisi baik :					
- SD/MI	63,97%	67,21%	76,15%	70,28%	67,14%
- SMP/MTs	76,26%	80,38%	82,12%	89,09%	85,73%
- SMA/SMK/MA	86,98%	87,48%	82%	93,45%	94,84%
Angka putus sekolah					
- SD/MI	0,02%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01
- SMP/MTs	0,09%	0,12%	0,08%	0,06%	0,06
- SMA/SMK/MA	0,32%	0,34%	0,26%	0,27%	-
Angka kelulusan					
- SD/MI	100%	100%	100%	100%	99,99%
- SMP/MTs	100%	99,90%	100%	100%	99,92%
- SMA/SMK/MA	100%	100%	100%	99,95%	99,19%
Angka melanjutkan					
- Dari SD/MI ke SMP/MTs	99,76%	97,89%	108,90%	111,95%	117,3%
- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	75,20%	75,28%	86,85%	90,01%	92,44%
Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	85,41%	87,92%	91,19%	92,63%	94,52%
Jumlah gedung SMP/MTs yang memiliki Lab. IPA	71,00%	76,00%	80,00%	80,55%	79,10%
Kesehatan					
Persentase balita gizi buruk	0,32	0,43	0,51	0,59	0,76
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	66,17%	64,96%	51,7%	48,29	45,23
Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	66,89	68,81	108	153	222
Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	94,46	91,95	95,15%	98%	94
Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	73,36	136,19	106%	87,76%	68,11
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun	1	7	4	5	9
Cakupan Penemuan dan Penanganan pneumonia balita	17,38	31,45	33%	71%	46,37
Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk	0	0	0,0048	0	0
Prevalensi HIV/AIDs (%) dari total populasi	0,006	0,009	2,8%	0,04	0,007
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	53,30%	61,72%		67,19	100

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
Rasio dokter per satuan penduduk	0,02	0,04	0,11	0,10	0,15
Rasio tenaga medis persatuan penduduk :					
Perawat	0,06	0,26	1,58	0,60	0,78
Bidan	0,06	0,31	0,75	0,80	0,84
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	100%	44,44	100%	
Cakupan Desa/kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100
Cakupan Desa Siaga Aktif		100%	85,01%	100%	100
Cakupan kunjungan bayi	97,70%	95,64%	95%	96%	85,84
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	91,38%	90,39%	90,59%	91,83	90,65
<u>Rumah Sakit Umum Daerah</u>					
<u>Gawat Darurat</u>					
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	100%	87%	94,60%
Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24	24	24	24	24 jam
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	Dokter 70% perawat 85%	80%	100%	Perawat 65%, dokter 56%	Perawat 59%, dokter 60%
Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Belum ada	1	1	1	Ada (1 tim)
Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	6 menit	5 menit	8 menit	2,35	2,61 menit
Kepuasan Pelanggan	-	-	77%	74,05	74,12%
Kematian pasien ≤ 24 jam	-	-	6 jam	9,43	16/1000
Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%
<u>Rawat Jalan</u>					
Dokter Spesialis pemberi pelayanan di Poliklinik	75%	70%	34%	76%	51,43%
Ketersediaan Pelayanan	10 klinik	10 klinik	11	13	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum
Jam buka Pelayanan	100	100	100	100	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 07.30 - 10.30 WIB
Waktu tunggu di rawat jalan	50 menit	40,5 menit	40 menit	62,87 menit	50 menit
Kepuasan Pelanggan	73%	73,30%	79%	72,55%	70,07%
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	30%	30,89%		52%	14,17%
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	50%	100%	36%	60%	100%
<u>Rawat inap</u>					
Pemberi Palayanan di Rawat Inap	100%	100%	70%	100%	100%
Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%
Jam Visite Dokter Spesialis	93%	90%	80%	76%	85%
Kejadian Infeksi Pasca Operasi	0%	0%	0%	0,38%	2,82%
Kejadian Infeksi Nosokomial	0%	0,50%	2%	0,79%	2%
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%	100%	100%	100%	100%
Kematian pasien > 48 jam	2,05%	1,98%	2,00%	2,17%	1,34%
Kejadian Pulang Paksa	1,5%	1%	1%	3,63%	3,10%

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
Kepuasan Pasien	73%	73,52%	74%	74,25%	71,97%
Rawat Inap TB:				47,25%	
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	15%	21%	36%	47%	11,81%
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	45%	45%	70%	73,89%	67,86%
<u>Bedah Sentral</u>					
Waktu tunggu operasi elektif	1 hari	2 hari	1 hari	1 hari	1 hari
Waktu tunggu operasi cito	45 menit	40 menit	50 menit	45,46 menit	56 menit
Kejadian Kematian di meja operasi	0	0	0	0	0,04%
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100%
Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100%
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100%
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100%
Komplikasi anaestesi karena overdosis, reaksi anaestesi dan salah penempatan endotracheal tube	0%	0%	3%	0,04%	0%
<u>Persalinan dan Perinatologi</u>					
Kejadian kematian ibu karena persalian, a.pendarahan b.pre-eklamsia c.sepsis	a. 0% b. 0% 0%	a. 0% c. b. 0% 0%	0 % c. 0,54 % 0 %	a. 0% b. 0% 0%	a. 0% b. 0% c. 0%
Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	51%	100%	100%
Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	100%	100%	4		100%
Pemberi pelayanan persalinan dengan operasi	92%	92%	92%	100%	100%
Kemampuan menangani BBLR (\leq 2500 gr)	88%	89,4%	97%	76%	93%
Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	16%	11%	43%	51%	42%
<u>Keluarga Berencana:</u>					
a. Presentase KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten (dr SpOG, dr SpB, dr SpU, dr umum terlatih)	100%	100%	100%	100%	100%
b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%
Kepuasan Pelanggan	-	-	72%	75,98%	77,54%
<u>Intensif</u>					
Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	0%	0,39%	0,85%
Pemberi pelayanan Unit Intensif pelayanan Unit Intensif a. dokter spesialis b.perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU	a. 0% b.30%	a. 0% b.30%	a. 100% b.56%	a. 100% b.44%	100%
<u>Radiologi</u>					
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	25 menit	12,6 menit	1 jam	59,44 menit	1,5 jam
Pelaksana Ekspertisi	40%	100%	75%	100%	87,34%
Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	1,1%	1,02%	1,00%	1,9%	2%
Kepuasan Pelanggan	85%	86%	78%	72,98%	74,60%
<u>Laboratorium Patologi Klinik</u>					
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	168 menit	136 menit	150 menit	180 menit	119 menit
Pelaksana Ekspertisi	0%	0%	100%	100%	100%
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%
Kepuasan pelanggan	85,5%	88%	100%	72,85%	78,97%
<u>Rehabilitasi Medik</u>					
Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	0%	0%	0%	0%	0%
Tidak adanya kejadian kesalahan	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
tindakan rehabilitasi medik					
Kepuasan Pelanggan	80%	98%	78%	74,18%	78,36%
<u>Farmasi</u>					
Waktu tunggu pelayanan					
a. Obat Jadi	18menit	26,93 menit	14 menit	25,8 menit	26 menit
b. Obat Racikan	28menit	36,12 menit	35 menit	51,32 menit	52 menit
Tidak adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	100%	100%	100%	100%	99,80%
Kepuasan Pelanggan	75%	74%	96%	66,78%	70,45%
Penulisan resep sesuai dengan formularium	100%	100%	100%	75,13%	80,24%
<u>PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)</u>					
Ada anggota Tim PPI yang terlatih	5%	5%	5%	25%	95%
Tersedia APD di setiap instalasi/ departement	75%	100%	100%	93%	80%
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infections) di RS (minimum 1 parameter)	100%	100%	37%	100%	100%
<u>Gizi</u>					
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	100%	94%
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	-	20,9%	20%	1,08%	12,37%
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	99,80%	100%
<u>Transfusi Darah</u>					
Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%	100%	98,98%	92%
Kejadian reaksi transfusi	0%	0%	6%	0,40%	0,82%
<u>Pelayanan GAKIN</u>					
Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	71%	100%	100%
<u>Rekam Medis</u>					
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	83%	100%	99%	99,23%	97,59%
Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	40%	73%	92%	94,41%	85,82%
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	10menit	8menit	5 menit	8,81 menit	13 menit
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	25menit	14 menit	12 menit	13,69 menit	14 menit
<u>Limbah Pengelolaan</u>					
Baku mutu limbah cair		100%	100%	BOD = 4,10 COD = 10,9 TSS = 0,400 PH = 8	BOD = 7,95 COD = 19,84 TSS = 14,85 PH = 6,86
Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100%
<u>Administrasi dan Manajemen</u>					
Tindak Lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	90%	100%	100%	100%	91,84%
Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	99%	98%	17%	100%	92,55%
Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	34%	100%	100%
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	20%	55%	3%	5,80%	96,15%
Cost Recovery	89%	104,1%	125%	117%	95,09%
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	25%	25%	67%	23,08%	86,96%
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	2jam	1,9jam	1 jam	2,82 jam	0,33 jam
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%
<u>Ambulance/ Mobil Jenazah</u>					

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
Waktu Pelayanan ambulance/mobil jenazah	24jam	24jam	24 jam	24 jam	24 jam
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di Rumah Sakit	45menit	40menit	35 menit	12,01 menit	21 menit
Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	-	-	21	33,61 menit	1 jam
<u>Pemulasaran Jenazah</u>					
Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	1jam 45menit	1,6jam	1,5 jam	1 jam 54 menit	2,25 jam
<u>Laundry</u>					
Tidak Adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100%
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	77%	100%	76,92%
<u>PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT</u>					
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	45 menit	46,7% ditanggapi +- 1hari	64%	34,75 menit	18 jam
Ketepatan waktu pemeliharaan alat	80%	80%	75%	150%	63,13%
Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	71%	100%	58,33%
<u>Pekerjaan Umum</u>					
Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	65,51%	71,54%	73,55%	75,54%	85,07%
Jumlah jembatan kondisi baik	230	230	236	237	282
Rasio jaringan irigasi kondisi baik	69,25%	77%	79%	72,45	72,65%
<u>Perumahan</u>					
Rumah tangga pengguna air bersih	62,65%	53%	85,37%	86,3%	90,87%
Rumah tangga bersanitasi	62,65%	62,65%	81,57%	81,70%	81,77%
Prosentase rumah layak huni			97,02%	99,78%	96,88%
Prosentase permukiman layak huni	98,79%	98,79%	97,02%	99,78%	99,99%
Persentase luas kawasan kumuh			0,0048	0,0048	0,004%
<u>Penataan Ruang</u>					
Dokumen RTRW		Ada	ada	Ada	Ada
Dokumen RDTRK		4	10	10	11
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	10,39	10,82%	11,07	11,07%	42,91%
<u>Perencanaan pembangunan</u>					
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	-	-	Terjadi masa transisi antara RPJMD periode 2009-2014 dan RPJMD periode 2013-2018, sehingga terdapat indikator kinerja yang tertuang pada tahun 2014 kurang sesuai	100%	100%
<u>Perhubungan</u>					
Load factor	0,55	0,55	0,54	0,54	0,55
Jumlah uji kir angkutan umum	2574	2850	3091	2267	Blm ada data
Prosentase uji kir angkutan umum	84,15	91,09	85,93	75,80%	81,59%
Prosentase pemasangan rambu lalu lintas	59,38	60,27	64,9	68,61%	70%
Prosentase pemasangan marka jalan	8,21	12,63	14,25	15,60%	18,89%
Penerangan jalan umum	50,28	60,52%	69,12%	74,22%	77,16%
<u>Lingkungan hidup</u>					
Persentase penanganan sampah perkotaan	62,5%	67,5%	70%	75%	81,82%
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	28%	Blm ada data
Luas lahan kritis/lahan kritis tertangani	-	-	5.879,91	5.153,91	Blm ada data

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
Pertanahan					
Kependudukan dan catatan sipil					
Prosentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	100%	100%	100%	96%	99,6%
Presentase penduduk berakta kelahiran	21,86%	24,03%	36,5%	41%	29,93%
Presentase anak berakte kelahiran			98		80,76
Persentase keluarga ber KK	100%	100%	100%	100%	99,95%
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
Rasio KDRT	0,03%	0,05%	0,10%	0,02%	0,07
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	63,5%	40,76	100%	100%	Blm ada data
Partisipasi angkatan kerja perempuan	84,21	84,61	85,71	98,93	80,30
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%	95,10%
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera					
Rasio akseptor KB	74,37	74,99	73,98	77,62	76,05
Cakupan peserta KB aktif	74,37	74,99	73,98	77,62	76,05
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	31,32%	30,42%	31%	30,70%	
Anmetneed kebutuhan Keluarga berencana (KB) yang tidak terpenuhi	12,81%	12,62%	13%	11,42	12,54%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	96,93	94,69	96,10	95,10	95,10%
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	78%	80%	79%	74%	100%
Sosial					
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	36,93	45,00	54,11	54,46	0,16%
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	-	-	0,45	1,16	0,02
Ketenagakerjaan					
Angka partisipasi angkatan kerja	68,07	68,63	69,14	69,14	
Tingkat pengangguran terbuka	3,86	2,48	4,28	4,28	3,02
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	-	-	30,45	53,92	100%
Koperasi, usaha kecil dan menengah					
Persentase koperasi aktif	76,59	76,87	78,63	91,87	82%
Jumlah UKM non BPR/KLM	399	566	842	973	1.275
Jumlah BPR/LKM	46	93	119	134	134
Penanaman modal					
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0	0	0	1	1
Jumlah nilai investasi berskala lokal (non PMDN/PMA) dalam juta	132.276	920.472	148.916	190.078	242.565
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	13	15	17	17	40
Kebudayaan					
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	9	7	7	5	5
Kepemudaan dan olah raga					
Jumlah organisasi pemuda aktif	2	2	2	2	2
Jumlah kegiatan/ kompetisi olah raga	13	13	13	13	8
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri					
Persentase LSM, Ormas, dan OKP yang dibina	95%	95,2%	96,3%	100%	71,4%
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	6	6	6	6	6
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,					

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
Kepegawaian dan persandian					
Peringkat kinerja penyelenggaraan otoda	-	-	50	82	48
Hasil evaluasi Lakip	D	C	C +	CC	B
Hasil predikat pemeriksaan/ pengawasan pengelolaan keuangan daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
Skor Indeks Kepuasan masyarakat	-	70,57	71	75,35	76
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	452	389	389	446	196
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	43	76	41	79	217
Prosentase pejabat yang mengikuti fit and proper test	0	0	0	27	66
Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar/ ijin belajar	169	266	420	519	629
Rasio Poskamling per desa/kelurahan	5,82	5,91	5,91	5,93	5,49
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01	1,6
Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%
Rasio penegakan perda/jumlah pelanggaran perda	60%	60%	71%	71%	100%
Jumlah lembaga/kelompok masyarakat siaga bencana terlatih (orang)	50	0	99	99	Blm ada data
Ketahanan pangan					
Ketersediaan energi dan protein perkapita	42	43	42,14%	65%	100%
Penguatan cadangan pangan	43	45	50%	34,56	42,7%
Skor pola pangan harapan	65,26	66,20	62%	89,70%	88%
Pemberdayaan masyarakat desa					
Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	207	207	207	207	207
Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK	252	252	252	252	252
Statistik					
Buku kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB kabupaten magetan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kecamatan dalam angka	18	18	18	18	18
Kearsipan					
Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	78,18	82,45	61 %	70%	79%
Komunikasi dan informatika					
Jumlah pemberitaan melalui					
- Media massa	17	17	18	18	Blm ada data
- Media luar ruang	8	10	12	12	Blm ada data
Prosentase SKPD yang menyediakan data di website resmi	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah pertunjukan rakyat	-	1	1	-	0
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan telecenter	7	8	9	10	9
Perpustakaan					
Jumlah perpustakaan			765	887	889
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	23.929	23.669	23.736	24.277	25.163
Koleksi buku yang tersedia	51.925	53.261	57.500	58.397	59.864
PELAYANAN URUSAN PILIHAN					
Kelautan dan perikanan					
Budidaya ikan (ton)	614.00	937.86	1,152	1.242,81	1.253,92
Konsumsi ikan (Kg/Kapita/th)	9.85	10.34	12.14	12.14 *	13,80
Pembudidaya ikan (orang)	2.500	2.600	2,625	2.650	2.526
Jumlah unit pembenihan (UPR)	41	45	46	55	54
Produksi Perikanan Tangkap (PUD) (ton)	35.50	36.35	36.71	37,66	37,50

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
Pertanian					
Jumlah produksi hasil pertanian :					
- Padi (kw)	2.890.076	3.053.952	3.034.720	3.101.110	3.370.710
- Jagung (kw)	768.675	767.368	792.140	897.600	1.042.720
- Kedelai (kw)	54.809	33.020	64.220	53.640	33.950
- Tebu (kw)	494.387,15	502.122,26	509.427,00	484.641,60	484.464
Jumlah produksi peternakan :					
- Sapi (ekor)	114.630	96.185	107.104	107.881	110.464
- Kambing (ekor)	36.801	39.418	37.918	41.747	38.376
- Ayam (ekor)	6.034.693	6.549.186	12.751.175	12.806.999	17.146.235
- Telur (Kg)	16.420.540	18.365.642	17.780.121	21.191.069	20.608.998
Kehutanan					
Jumlah produksi hasil hutan (kayu jati, m3)	1.624,84	1.586,00	1.605	1.864,33	
Kerusakan Kawasan Hutan	23.55	6.9	5	186	186
Luas kawasan hutan	7.265	7.265	7.263	7.265	7.265
Energi dan sumber daya mineral					
Jumlah titik pemasangan energi alternatif terbarukan (biogas)			5 titik	19 titik	46 titik
Pariwisata					
Angka kunjungan wisata	528.046	577.373	673.703	866.978	968.225
Jumlah PAD sektor wisata (Rp ribu)	4.099.829.500	4.902.613.000	5.357.537.500	6.425.779,500	7.411.404
Perdagangan					
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	-	-	8,39%	6,29%	7,6
persentase pasar tradisional kondisi baik	-	-	40%	50%	23,8%
Perindustrian					
Pertumbuhan industri	14.473	14.849	15.037	14.849	15.149
Cakupan bina kelompok pengrajin	-	-	532	585	1,3
Ketransmigrasian					
Jumlah transmigran ditempatkan (KK)	49	50	35	25	10

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota disusun menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota masing-masing. Beberapa Indikator variabel aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut :

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dikur dari tingkat pendapatan yang ditunjukkan oleh tingkat pengeluaran per kapita sebagai proxi pendapatan. Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan prosentase pengeluaran non pangan. Semakin tinggi pengeluaran non pangan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan.

a. Sumber Daya manusia

Salahsatu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) . Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerjasi dalam negeri dan diluar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Komposisi masyarakat Magetan masih didominasi masyarakat berpendidikan tingkat dasar, utamanya kelompok masyarakat usia diatas 50 tahun, dan bekerja di sektor primer. Sedangkan pada usia produktif dan usia remaja menunjukkan peningkatan tingkat pendidikan, minimal berpendidikan sederajat SLTA sampai dengan sarjana, dengan kecenderungan bergerak di sektor sekunder dan tersier perekonomian daerah.

b. Penanaman Modal

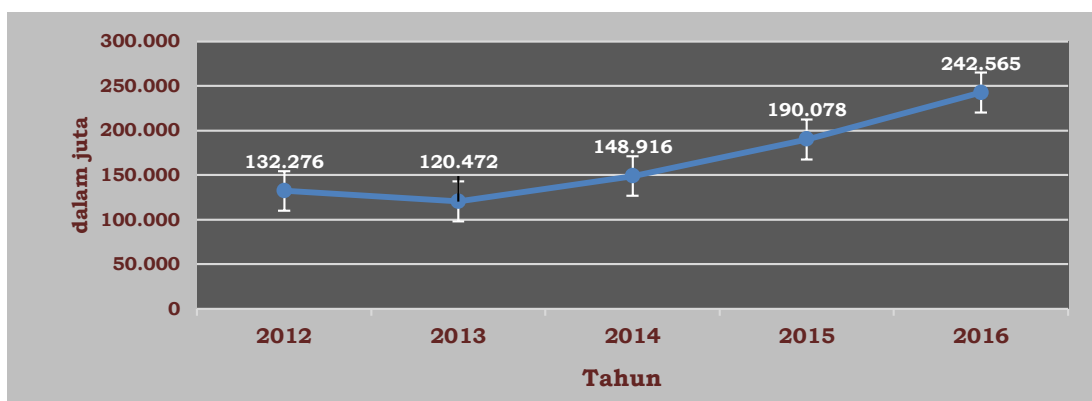
a. Investor berskalanasional(PMDN/PMA)

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Namun hingga saat ini investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Magetan belum ada, sehingga kedepan perlu usaha yang keras untuk menarik investor. Masuknya investor berarti akan menambah total PDRB sekaligus mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

b. Investor skala lokal (non PMDN/PMA)

Perkembangan investasi skala lokal (non PMDN/PMA) adalah sebagai berikut :

GRAFIK 2.3
PERKEMBANGAN INVESTASI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2016



Sumber : Bagian Adm. Perekonomian Setdakab. Magetan tahun 2017

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah (Infrastruktur)

Pembangunan infrastruktur daerah mutlak diperlukan guna menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan aktifitas masyarakat di berbagai bidang. Pembangunan infrastruktur transportasi melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta peningkatan fasilitas umum lainnya (seperti tempat ibadah, sarana olahraga, terminal, taman kota dan lain-lain), penyediaan prasarana penyedia kebutuhan barang dan jasa masyarakat, dan peningkatan prasarana pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan masyarakat lebih optimal, menjadi sangat penting dalam kesuksesan pembangunan.

Secara umum kondisi infrastruktur daerah terus mengalami peningkatan dengan kegiatan peningkatan dan pembangunan infrastruktur daerah yang

2.1.4.3 Potensi Unggulan Daerah

a. Bidang Pariwisata

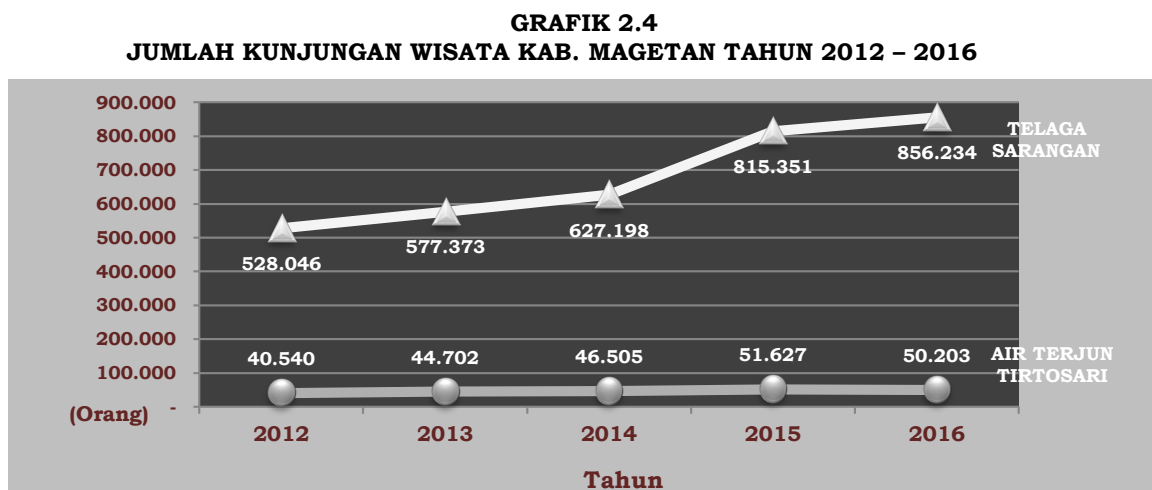
Pariwisata di Kabupaten Magetan khususnya sarangan telah memberikan lapangan kerja jasa wisata seperti pemandu wisata, pedagang kaki lima, tukang kuda/perahu, pengusaha hotel restoran. Tercatat saat ini jumlah pemandu wisata sebanyak 25 orang, tukang perahu 60 orang, tukang kuda 40 orang, pedagang kaki lima 618 orang.

Obyek wisata andalan Kabupaten Magetan adalah telaga Sarangan. Namun pemerintah Kabupaten Magetan juga terus mengembangkan obyek wisata lainnya sebagai pendukung obyek wisata Telaga Sarangan antara lain pengembangan agrowisata strowberry dan jeruk pamelu,

pengembangan wisata budaya labuhan sarangan di telaga Sarangan serta Ledug Suro di alon-alon kota Magetan.

Upayapenyediaan akomodasi beserta fasilitas dan pelayanan perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan khususnya kepariwisataan di Kabupaten Magetan. Jumlah hotel di Kabupaten Magetan tahun 2015 sebanyak 109 hotel, terdiri dari hotel bintangf sebanyak 2 hotel, hotel Melati sebanyak 75 hotel dan 32 Pondok Wisata. Kondisi tersebut tergambar selalu ada peningkatan akomodasi penginapan setiap tahun.

Banyak pengunjung yang datang ke tempat wisata Telaga Sarangan dan air terjun masih cukup banyak :



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Magetan tahun 2017

b. Industri

Jumlah Industri Kecil formal Kabupaten Magetan tahun 2015 sebanyak 808 unit, beberapa jenis industri kecil (kerajinan rakyat) yang memberikan andil cukup besar bagi perindustrian di kabupaten Magetan berupa Genteng menghasilkan produksi sebesar Rp.49,289 milyar, Industri penyamakan kulit sebesar Rp.76,462 milyar, Batu bata Rp. 55,525 milyar, Anyaman Bambu Rp.72,663 milyar dan Kerajinan kulit menghasilkan Rp.75,709 milyar.

c. Pertanian

Luas wilayah Magetan 68.884,74 Ha, terbagi atas 28.297,24 Hektar tanah sawah dan 39.587,50 hektar tanah kering. Pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kabupaten Magetan, karena sebagian besar penduduk Magetan hidup bercocok tanam. Komoditas

tanaman bahan makanan, utamanya padi masih merupakan produk yang besar peranannya bagi masyarakat Magetan.

Lahan pertanian di kabupaten Magetan penggunaannya didominasi oleh produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu, dengan volume produksi diutamakan dikirm keluar daerah. Selain tanaman pangan, produksi hasil sayur mayur sangat berlimpah seperti, kubis, wortel, kentang, sawi, cabe, tomat, buncis dan lainnya, menjadikan Magetan sebagai sentra produksi sayuran dan tujuan wisata agrowisata sayuran. Juga terdapat komoditas buah-buahan seperti mangga, jeruk, pisang, rambutan, klengkeng, nangka, namun secara umum masih terbatas untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam daerah.

Kondisi bidang peternakan di Kabupaten Magetan sangat menunjang perekonomian daerah, didominasi peternakan sapi, kambing, dan ayam serta kelinci, dengan populasi sangat menjanjikan sebagai lumbung daging nasional.

Gambaran umum bidang daya saing daerah, meliputi aspek kemampuan ekonomi daerah, insfrastruktur, iklim investrasi, dan sumber daya manusia dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.25
GAMBARAN UMUM DAYA SAING DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
ASPEK DAYA SAING					
Kemampuan Ekonomi Daerah					
Pengeluaran per kapita (Rp.)	508.447	560.215	648.153	711.740	765.820
Pengeluaran pangan (Rp.)	247.183	278.815	314.962	333.702	360.408
Pengeluaran non pangan (Rp.)	261.264	281.400	333.191	378.038	405.412
Prosentase Pengeluaran pangan	48,62%	49,77%	48,59%	46,89%	47,06%
Prosentase Pengeluaran non pangan	51,38%	50,23%	51,41%	53,11%	52,94%
Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur					
Proporsi panjang jalan kondisi baik	65,51%	73,54%	73,55%	75,54%	85,67%
JEMBATAN					
Jembatan kondisi Baik (buah)	230	230	236	275	282
Jembatan kondisi Sedang (buah)	64	64	62	64	62
Jembatan kondisi Rusak (buah)	28	28	24	22	23
Jaringan irigasi kondisi baik	69,25%	77%	79%	72,25%	72,65%
Prosentase pemasangan rambu lalu lintas	59,4%	60,27%	64,90%	68,61%	70%
Prosentase pemasangan marka jalan	8,20%	12,63%	14,25%	15,60%	18,89
Penerangan jalan umum	50,28%	60,52%	69,12%	74,22%	77,16%
luas wilayah perkotaan	5.222,13 ha	5.222,13 ha	5.222,13 ha	5.222,13 ha	
jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	Bintang : 2 Melati : 72 Homestay : 28	Bintang : 2 Melati : 74 Homestay : 30	Bintang : 2 Melati : 75 Homestay : 32	Blm ada data	Blm ada data
Fokus Iklim Berinvestasi					
Jumlah investasi (Rp. Juta)	132.276	920.472	148.916	190.078	242.565
angka kriminalitas			277	Blm ada data	Blm ada data

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	9 pajak, 28 retribusi	9 pajak, 28 retribusi	9 pajak, 28 retribusi	9 pajak, 28 retribusi	9 pajak, 28 retribusi
jumlah perda yang mendukung iklim usaha	-	-	-	-	-
fokus sumber daya manusia					
Jumlah penduduk usia tidak produktif	229.274	214.661	207.882	211.442	471.602
Jumlah penduduk Usia Produktif 15-64 tahun	465.257	485.160	468.835	466.261	216.451
Rasio ketergantungan	0,49	0,44	0,44	0,45	0,46
Kualitas Pencari Kerja :					
- Tamat SD	30	32	49	9	112
- Tamat SLTP	231	1.123	898	81	Blm ada data
- Tamat SLTA	1.668	2.234	2.554	728	
- SMU	775	1.080	1.009	-	Blm ada data
- SMK	943	1.154	1.545	-	Blm ada data
- Tamat akademi/diploma	275	931	152	1.501	Blm ada data
- Universitas (S1/S2/S3)	550	1.139	503	537	Blm ada data

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RPKD tahun 2016 dan Realisasi RPJMD

Evaluasi RKPD tahun 2016 dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan anggaran tahun 2016. Evaluasi mencakup realisasi target capaian kinerja keluaran program dan kegiatan tahun 2016 terhadap RPJMD, yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan realisasi Renstra SKPD, menurut kategori urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah. Target kinerja yang dicapai seluruh SKPD merupakan indikator capaian pelaksanaan pembangunan daerah.

Evaluasi RKPD tahun 2016 dijadikan dasar penyusunan RKPD tahun 2018, dengan memperhatikan realisasi anggaran dan realisasi target capaian kinerja SKPD. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun 2016 antara lain untuk :

1. Mengetahui realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target capaian kinerja yang direncanakan, beserta faktor penyebabnya.
2. Mengetahui Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
3. Dasar kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan untuk menjalankan fungsi urusan Pemerintahan Daerah, dialokasikan anggaran

dalam APBD Kabupaten Magetan. Besaran pengalokasian anggaran bagi tiap urusan mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2018. SKPD yang melaksanakan program prioritas pembangunan daerah sesuai arah kebijakan pembangunan tahun 2018 dalam RPJMD harus memperoleh alokasi anggaran yang memadai, agar target capaian kinerja prioritas pembangunan dapat tercapai.

Berikut disajikan tabel hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2015 dan 2016 yang dikelompokkan menurut kategori urusan Wajib dan Pilihan Pemerintahan Daerah, dan dikompilasikan dengan realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan terhadap Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018.

TABEL 2.26
EVALUASI HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2015 DAN 2016 SERTA TARGET TAHUN 2017

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANNGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd TAHUN BERJALAN		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
INDIKATOR MAKRO										
Pertumbuhan ekonomi	5,4	5,15	5,2	5,31	over target		5,3	5,4		
PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)	26,62	22,19	17,748	24,19	over target		25,12	26,11		
PDRB per kapita ADHK 2010 (Rp. Juta)	18,75		18,00	18,15	over target		18,50	18,50		
PDRN perkapita ADHK (Th. 2000 Rp. juta)	7,401		6,205							
Tingkat inflasi (%)	4 s/d 5	5,04	<5	3,94	On target		4 s/d 5	4 s/d 5		
Angka kemiskinan (%)	7,17	11,35	12,14	11,03	Over target		7,91	10,87		
Angka pengangguran terbuka (%)	2,56	6,05	4,28	3,02	Over target		2,77	2,77		
IPM	71,56	71,39	70,56	71,94	Over target		71,06	72,29		
INDIKATOR PELAYANAN UMUM										
Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
Pendidikan										
Angka melek huruf	100	99,46	99,15	99,83	100,69%	Dinas Pendidikan	99,55	99,55	100,00%	Dinas Dikpora
Angka rata-rata lama sekolah	12 thn	6,73 Tahun	10 thn	8,15 thn	81,50%	Dinas Pendidikan	11 thn	11 thn	100,00%	Dinas Dikpora
Angka partisipasi kasar										
- Anak usia dini	55,68%	47,54%	50,83%	96,67%	190,18%	Dinas Pendidikan	53,76%	53,76%	100,00%	Dinas Dikpora
- SD/MI	111,62	105,73%	111,58	108,4	97,15%	Dinas Pendidikan	111,61	111,61	100,00%	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	101,37	104,11%	101,32	115,63	114,12%	Dinas Pendidikan	101,35	101,35	100,00%	Dinas Dikpora
- SMA/SMK/MA	-	86,65%	96,8	87,05	89,93%	Dinas Pendidikan				Dinas Dikpora
Angka Partisipasi Murni										
- SD/MI	100	98,86%	99,24	98,96	99,72%	Dinas Pendidikan	99,66	99,66	100,00%	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	95	92,61%	93,75	92,82	99,01%	Dinas Pendidikan	94,38	94,38	100,00%	Dinas Dikpora
- SMA/SMK/MA	-	77,24%	79,35	97,64	123,05%	Dinas Pendidikan	79,85	79,85	100,00%	Dinas Dikpora
Angka putus sekolah										
- SD/MI	0,02	0,01%	0,02%	0,01	over target	Dinas Pendidikan	0,02	0,02	100,00%	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	0,02	0,06%	0,04%	0,06	under target	Dinas Pendidikan	0,03	0,03	100,00%	Dinas Dikpora
- SMA/SMK/MA	-	0,27%	0,12%	0,81	under target	Dinas Pendidikan				Dinas Dikpora
Angka kelulusan										
- SD/MI	100%	100%	100%	99,99%	99,99%	Dinas Pendidikan	100%	100%	100,00%	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	100%	100%	100%	99,92%	99,92%	Dinas Pendidikan	100%	100%	100,00%	Dinas Dikpora

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANNGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKPD 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			TAHUN BERJALAN		
								REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
- SMA/SMK/MA Angka melanjutkan	100%	99,95%	100%	99,19%	99,19%	Dinas Pendidikan	100%	100%	100,00%	Dinas Dikpora
- Dari SD/MI ke SMP/MTs	100%		98,75%	117,3%	118,78%	Dinas Pendidikan	99,55%	99,55%	100,00%	Dinas Dikpora
- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Ruang kelas kondisi baik :	95%	90,01%	80,25%	92,44%	115,19%	Dinas Pendidikan	82,45%	82,45%	100,00%	Dinas Dikpora
- SD/MI	85,00%	70,28%	80,72%	92%	113,97%	Dinas Pendidikan	82,45%	82,45%	100,00%	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	100%	89,09%	89%	97%	108,99%	Dinas Pendidikan	95%	95%	100,00%	Dinas Dikpora
- SMA/SMK/MA	100%	93,45%	92%	97%	105,43%	Dinas Pendidikan	96%	96%	100,00%	Dinas Dikpora
Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	100%	92,63%	92%	94,52%	102,74%	Dinas Pendidikan	95%	95%	100,00%	Dinas Dikpora
Jumlah gedung SMP/MTs yang memiliki Lab. IPA	90%	80,55%	85,75%	91%	106,12%	Dinas Pendidikan	88,45%	88,45%	100,00%	Dinas Dikpora
Persentase SD/ MI berakreditasi B (RPJMN)	78%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinas Pendidikan	72%	72%	100,00%	Dinas Dikpora
Persentase SMP/ MTs berakreditasi B (RPJMN)	75%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinas Pendidikan	68%	68%	100,00%	Dinas Dikpora
Kesehatan										
Angka usia harapan hidup	72	72,1	72	72,09	100,01%	Dinas Kesehatan	72	72	100,00%	Dinas Kesehatan
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	23	10,53	23	10,89	Over target	Dinas Kesehatan	23	23	100,00%	Dinas Kesehatan
Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	14	7,53	14	8,05	Over target	Dinas Kesehatan	14	14	100,00%	Dinas Kesehatan
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	102	59,8	102	106,55	Under target	Dinas Kesehatan	102	102	100,00%	Dinas Kesehatan
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	32	11,72	32	12,2	Over target	Dinas Kesehatan	32	32	100,00%	Dinas Kesehatan
Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	88	96,25%	88%	93,86%	107,00%	Dinas Kesehatan	88	88	100,00%	Dinas Kesehatan
Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (RPJMN)	92,5	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinas Kesehatan	92	92	100,00%	Dinas Kesehatan
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kelahiran terlatih	90	Blm ada data	90	97,58	108,42%	Dinas Kesehatan	90	90	100,00%	Dinas Kesehatan
Prevalensi stunting (pendek/ sangat pendek) anak baduta (bawah 2 th)	27,9	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinas Kesehatan	27,9	27,9	100,00%	Dinas Kesehatan
Jumlah Kecamatan yang memiliki Puskesmas yang terakreditasi (RPJMN)	18	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinas Kesehatan	16	16	100,00%	Dinas Kesehatan
Jumlah Kecamatan memiliki Puskesmas minimal 5 jenis tenaga kesehatan (RPJMN)	22	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinas Kesehatan	22	22	100,00%	Dinas Kesehatan
Prevelansi Tuberculosis / TB (RPJMN)										
Persentase balita gizi buruk	0,46	0,59	0,46	0,76	100,00%	Dinas Kesehatan	0,46	0,46	100,00%	Dinas Kesehatan

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPD 2016	REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			TAHUN BERJALAN		
								REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	90	48,29	90	45,23	50,26%	Dinas Kesehatan	90	90	100,00%	Dinas Kesehatan
Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	224	153	224	304	135,71%	Dinas Kesehatan	224	224	100,00%	Dinas Kesehatan
Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	88	98%	88	88	100,00%	Dinas Kesehatan	88	88	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	100	87,76%	100%	1	100,00%	Dinas Kesehatan	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100%	100%	1	100,00%	Dinas Kesehatan	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2	5	≥ 2	≥ 2	100,00%	Dinas Kesehatan	≥ 2	≥ 2	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan dan Penanganan pneumonia balita	100	71%	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan
Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	100,00%	Dinas Kesehatan	0	0	100,00%	Dinas Kesehatan
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk	<1	0	<1	<1	100,00%	Dinas Kesehatan	<1	<1	100,00%	Dinas Kesehatan
Prevalensi HIV/AIDs (%) dari total populasi	<0,5	0,04	<0,5	<0,5	100,00%	Dinas Kesehatan	<0,5	<0,5	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	67,19%	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk	0,3	0,1	0,3	0,15	50,00%	Dinas Kesehatan	0,3	0,3	100,00%	Dinas Kesehatan
Rasio tenaga medis persatuan penduduk:										
Perawat	0,84	0,6	0,84	0,78	92,86%	Dinas Kesehatan	0,84	0,84	100,00%	Dinas Kesehatan
Bidan	0,55	0,8	0,55	0,84	152,73%	Dinas Kesehatan	0,55	0,55	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100%	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100	100%	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan	100	100	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif	85	100%	82%	100%	122,00%	Dinas Kesehatan	83	83	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi	90	96%	90	93,21	103,57%	Dinas Kesehatan	90	90	100,00%	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95	91,83	95	90,65	95,42%	Dinas Kesehatan	95	95	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart pelayanan antenatal	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RPKD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RPKD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RPKD TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RPKD 2016	REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standart pelayanan persalinan	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart pelayanan kesehatan bayi baru	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan balita sesuai standart pelayanan balita	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standart pelayanan skrining kesehatan usia pendidikan dasar	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standart skrining kesehatan usia produktif	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standart skrining kesehatan usia lanjut	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standart pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes militus sesuai standart pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa sesuai standart pelayanan kesehatan kesehatan jiwa	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standart pelayanan kesehatan TB	80%				-	Dinas Kesehatan	80%	80%	100,00%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standart pelayanan pemeriksaan HIV	100%				-	Dinas Kesehatan	100%	100%	100,00%	Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Gawat Darurat										
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	87%	100%	94,60%	94,60%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24	24 jam	24 jam	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	24 jam	24 jam	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	ATLS & ACLS (Dokter 100%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	Perawat 65%, dokter 56%	ATLS & ACLS (Dokter 95%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	100	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	ATLS & ACLS (Dokter 100%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	ATLS & ACLS (Dokter 100%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			TAHUN BERJALAN		
								REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
								ADA (Tim Disaster RS)		
Ketersediaan tim penanggulangan bencana	ADA (Tim Disaster RS)	1	ADA (Tim Disaster RS)	Ada (1 tim)	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	ADA (Tim Disaster RS)	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	
Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	4 menit	2,35	4 menit	2,61 menit	Over target	RSUD Dr. Sayidiman	4 menit	4 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	100%	74,05	95%	0,7412	78,02%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kematian pasien ≤ 24 jam	1/1000	9,43	3/1000	0,16	under target	RSUD Dr. Sayidiman	2/1000	2/1000	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	90%	100%	90%	100%	111,11%	RSUD Dr. Sayidiman	90%	90%		RSUD Dr. Sayidiman
Rawat Jalan								100,00%		
Dokter Spesialis pemberi pelayanan di Poliklinik	100%	76%	100%	51,43%	51,43%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketersediaan Pelayanan	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. Umum K. VCT K. DOTS K. THT	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. THT	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. THT	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	K. Saraf K.Paru K. DOTS K. VCT K. Umum K. THT K. Kulit & Kelamin K. Gigi dan Mulut K.Kebidanan K.Mata K.Anak K.Bedah K.Dalam	K. Saraf K.Paru K. DOTS K. VCT K. Umum K. THT K. Kulit & Kelamin K. Gigi dan Mulut K.Kebidanan K.Mata K.Anak K.Bedah K.Dalam	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Jam buka Pelayanan	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	100%	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 07.30 - 10.30 WIB	on target	RSUD Dr. Sayidiman	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu tunggu di rawat jalan	± 20 menit	62,87 menit	± 20 menit	50 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman	± 20 menit	± 20 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RPKD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RPKD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RPKD TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RPKD 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Kepuasan Pelanggan	95%	72,55%	90%	85,02%	94,47%	RSUD Dr. Sayidiman		100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%	52%	100%	52%	52,00%	RSUD Dr. Sayidiman	95%	95%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	100%	60%	100%	60%	60,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Rawat inap										
Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Jam Visite Dokter Spesialis	07.30-14.00	76%	07.30-14.00	85%	85,00%	RSUD Dr. Sayidiman	07.30-14.00	07.30-14.00	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Infeksi Pasca Operasi	0	0,38%	0	2,82%	under target	RSUD Dr. Sayidiman	0	0	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Infeksi Nosokomial	0	0,79%	0	2%	under target	RSUD Dr. Sayidiman	0	0	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%	100%	100%	100%	on target	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kematian pasien > 48 jam	0,24%	2,17%	1,00%	0,217%	Over target	RSUD Dr. Sayidiman	0,25%	0,25%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Pulang Paksa	1%	3,63%	1%	03,63%	under target	RSUD Dr. Sayidiman	1%	1%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pasien	95,00%	74,25%	85,00%	80,32%	94,49%	RSUD Dr. Sayidiman	90,00%	90,00%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Rawat Inap TB:										
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%	47,25%	100%	11,81%		RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	75%	73,89%	75%	67,86%	90,48%	RSUD Dr. Sayidiman	75%	75%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Bedah Sentral										
Waktu tunggu operasi elektif	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	1 hari	1 hari	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu tunggu operasi cito	30 menit	45,46 menit	45 menit	56 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman	30 menit	30 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Kematian di meja operasi	0%	0	0%	0,04%	under target	RSUD Dr. Sayidiman	0%	0%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2016	REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Komplikasi anaestesi karena overdosis, reaksi anaestesi dan salah penempatan endotracheal tube	0%	0,04%	0%	0%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	0%	0%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Persalinan dan Perinatologi</u>										
Kejadian kematian ibu karena persalian	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	a. 0% b. 0% c. 0%	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	a. 0% b. 0% c. 0%	Over target	RSUD Dr. Sayidiman	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	70%		50%	60%	120,00%	RSUD Dr. Sayidiman	60%	60%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan persalinan dengan operasi	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kemampuan menangani BBLR (\leq 2500 gr)	100%	76%	100%	93%	93,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	20%	51%	20%	51%	255,00%	RSUD Dr. Sayidiman	20%	20%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Keluarga Berencana:										
a. Presentase KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten (dr SpOG, dr SpB, dr SpU, dr umum terlatih)	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	80%	75,98%	80%	80,44%	100,55%	RSUD Dr. Sayidiman	80%	80%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Intensif</u>										
Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0,39%	0%	0%	on target	RSUD Dr. Sayidiman	0%	0%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan Unit Intensifi pelayanan Unit Intensifi	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
	85%	44%	70%	53%	75,71%	RSUD Dr. Sayidiman	75%	75%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPD 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			TAHUN BERJALAN		
								REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
<u>Radiologi</u>										
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	45 menit	59,44 menit	45 menit	1,5 jam	under target	RSUD Dr. Sayidiman	45 menit	45 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pelaksana Ekspertisi	95%	100%	90%	87,34%	97,04%	RSUD Dr. Sayidiman	92%	92%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	0,70%	1,90%	0,70%	2%	under target	RSUD Dr. Sayidiman	0,70%	0,70%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	80%	72,98%	80%	0,81	101,25%	RSUD Dr. Sayidiman	80%	80%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Laboratorium Patologi Klinik</u>										
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	130 mnt	180 menit	140 mnt	119 mnt	over target	RSUD Dr. Sayidiman	135 mnt	135 mnt	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. PK.	100%	Dokter Sp. PK	Dokter Sp	on target	RSUD Dr. Sayidiman	Dokter Sp. PK.	Dokter Sp. PK.	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	1	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan pelanggan	90%	72,85%	90%	82%	91,11%	RSUD Dr. Sayidiman	90%	90%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Rehabilitasi Medik</u>										
Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	0%	0%	0%	0%	on target	RSUD Dr. Sayidiman	0%	0%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	85%	74,18%	85%	80,5%	94,71%	RSUD Dr. Sayidiman	85%	85%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Farmasi</u>										
Waktu tunggu pelayanan						RSUD Dr. Sayidiman				RSUD Dr. Sayidiman
a. Obat Jadi	25 menit	25,8 menit	25 menit	25 menit	on target	RSUD Dr. Sayidiman	25 menit	25 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
b. Obat Racikan	45 menit	51,32 menit	45 menit	52 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman	45 menit	45 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	80%	66,78%	78%	80%	102,56%	RSUD Dr. Sayidiman	79%	79%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Penulisan resep sesuai dengan formularium	98%	75,13%	95%	80,24%	84,46%	RSUD Dr. Sayidiman	96%	96%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)</u>										
Ada anggota Tim PPI yang terlatih	65%	25%	45%	95%	211,11%	RSUD Dr.	55%	55%	100,00%	RSUD Dr.

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2016	REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Tersedia APD di setiap instalasi/ departement	60%	93%	60%	80%	133,33%	Sayidiman RSUD Dr. Sayidiman	60%	60%	100,00%	Sayidiman RSUD Dr. Sayidiman
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infections) di RS (minimum 1 parameter)	65%	100%	45%	100%	222,22%	RSUD Dr. Sayidiman	50%	50%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Gizi										
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	100%	94%	94,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	18%	1,08%	15%	12,37%	82,47%	RSUD Dr. Sayidiman	17%	17%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	99,80%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Transfusi Darah										
Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi	98,98%	100% terpenuhi	92%	92,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100% terpenuhi	100% terpenuhi	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian reaksi transfusi	0%	0,40%	0%	0,82%	under target	RSUD Dr. Sayidiman	0%	0%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pelayanan GAKIN										
Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Rekam Medis										
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	99,23%	100%	97,59%	97,59%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	98%	94,41%	92%	0,95	103,26%	RSUD Dr. Sayidiman	95%	95%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	7 menit	8,81 menit	7 menit	13 menit	under target	RSUD Dr. Sayidiman	7 menit	7 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	14 menit	13,69 menit	14 menit	13,69	over target	RSUD Dr. Sayidiman	14 menit	14 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Limbah Pengelolaan										
Baku mutu limbah cair	20,3% 65% 15 6,79	BOD = 4,10 COD = 10,9 TSS = 0,400 PH = 8	21,2% 69% 15 7,08	BOD = 7,95 COD = 19,54 TSS = 14,85 PH = 6,86		RSUD Dr. Sayidiman	20,80% 67% 15 6,94	20,80% 67% 15 6,94	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Administrasi dan Manajemen										
Tindak Lanjut penyelesaian hasil	95%	100%	92%	100%	108,70%	RSUD Dr.	93%	93%	100,00%	RSUD Dr.

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPD 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			TAHUN BERJALAN		
								REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
pertemuan direksi						Sayidiman				Sayidiman
Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	100%	92,55%	92,55%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	57%	5,80%	50%	96,15%	192,30%	RSUD Dr. Sayidiman	55%	55%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Cost Recovery	100%	117%	100%	117%	117,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	23,08%	100%	86,96%	86,96%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	1 jam	2,82 jam	1 jam	0,33 jam	Over target	RSUD Dr. Sayidiman	1 jam	1 jam	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Ambulance/ Mobil Jenazah</u>										
Waktu Pelayanan ambulance/mobil jenazah	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	on target	RSUD Dr. Sayidiman	24 jam	24 jam	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di Rumah Sakit	30 menit	12,01 menit	30 menit	15 menit	Over target	RSUD Dr. Sayidiman	30 menit	30 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	33,61 menit	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	on target	RSUD Dr. Sayidiman	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Pemulasaran Jenazah</u>										
Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	1 jam	1 jam 54 menit	1 jam 60 menit	1 jam 50 menit	Over target	RSUD Dr. Sayidiman	1 jam 50 menit	1 jam 50 menit	122,32%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Laundry</u>										
Tidak Adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	81,25%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT</u>										
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	30 menit	34,75 menit	30 menit	30 menit	on target	RSUD Dr. Sayidiman	30 menit	30 menit	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	150%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman	100%	100%	100,00%	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPD 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			TAHUN BERJALAN		
								REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
ketentuan kalibrasi										
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	81,54%	75,54%	77,54%	0,8507	109,71%	Dinas PU BMCK	79,54%	79,54%	100,00%	Dinas PU PR
Jumlah jembatan kondisi baik	233	237 Unit	232	282	121,55%	Dinas PU BMCK	233	285	100,00%	Dinas PU PR
Rasio jaringan irigasi kondisi baik	72,25%	72,45%	71,25%	72,65%	101,96%	Dinas PU Pengairan	71,75%	71,75%	100,00%	Dinas PU PR
Dokumen RTRW	ada	Ada	Ada	ada	100,00%	Bappeda	Ada	Ada	100,00%	Dinas PU PR
Dokumen RDTRK	18	10	14	11	78,57%	Bappeda	16	13	81,25%	Dinas PU PR
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
Rumah tangga pengguna air bersih	75%	86,30%	65%	90,87%	139,80%	Dinas PU BMCK	70%	70%	100,00%	Dinas Perkim
Rumah tangga bersanitasi	90%	81,70%	85%	81,77%	96,20%	Dinas PU BMCK	98%	97%	98,98%	Dinas Perkim
Prosentase rumah layak huni	100%	99,78%	100%	96,88%	96,88%	Dinas PU BMCK	100%	99,99%	99,99%	Dinas Perkim
Prosentase permukiman layak huni	100%	99,78%	100%	96,88%	96,88%	Dinas PU BMCK	100%	100%	100%	Dinas Perkim
Persentase luas kawasan kumuh	0,6	0,00483	0,68	00,4%	Over target	Dinas PU BMCK	0,66	0,44%	66,67%	Dinas Perkim
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	16%	42,64%	14%	42,91%	306,50%	Dinas PU BMCK	15%	15%	100,00%	Dinas Perkim
Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan	24%	Blm ada data	23%	Blm ada data	-	BLH	25%	25%	100,00%	Dinas Perkim
Ket entraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
Rasio Poskamling per desa/kelurahan	6,4	0,20%	6,2	5,49	89%	Kantor Sat Pol PP	6,30%	6,30%	100,00%	Sat Pol PP& Damkar
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	0,01%	0,01%	0,01%	1,6%	Over target	Kantor Sat Pol PP	0,01%	0,01%	100,00%	Sat Pol PP& Damkar
Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentrangan, keindahan)	95%	75%	85%	100%	117,65%	Kantor Sat Pol PP	90%	90%	100,00%	Sat Pol PP& Damkar
Rasio penegakan perda/jumlah pelanggaran perda	98%	93,33%	94%	100%	106,38%	Kantor Sat Pol PP	97%	97%	100,00%	Sat Pol PP& Damkar
Jumlah lembaga/kelompok masyarakat siaga bencana terlatih (orang)	1.920	99	1.920	368	19,17%	BPBD	1.920	1.920	100,00%	BPBD
Rasio penegakan perda/jumlah Cakupan layanan bencana Kebakaran (SPM)	80%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinas PU BMCK	80%	80%	100,00%	Sat Pol PP& Damkar
Tingkat Respon Time Kebakaran (SPM)	75%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinas PU BMCK	75%	75%	100,00%	Sat Pol PP& Damkar
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri										
Persentase LSM, Ormas, dan OKP yang dibina	100%	100%	100%	100%	100,00%	Bakesbangpol	100	100	100,00%	Bakesbangpol
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	6	6	6	6	100,00%	Bakesbangpol	6	6	100,00%	Bakesbangpol
Sosial										

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2016	REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,64%	0,14%	4,20%	18,99%	452,14%	Dinsos Nakertrans	4,45%	4,45%	100,00%	Dinsos
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	4,57%	0%	3,99%	19,8%	496,24%	Dinsos Nakertrans	4,32%	4,32%	100,00%	Dinsos
Prosentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	65%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinsos Nakertrans	68%	68%	100,00%	Dinsos
Prosentase korban bencana yang mendapat bantuan social (SPM)	100%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinsos Nakertrans	100%	100%	100,00%	Dinsos
Prosentase korban bencana yang dievakuasi (SPM)	100%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinsos Nakertrans	100%	100%	100,00%	Dinsos
Pelayanan Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar										100,00%
Tenaga Kerja										
Angka partisipasi angkatan kerja	70,11%	69,14%	69,98%	91,7%	131,04%	Dinsos Nakertrans	69,96%	69,96%	100,00%	Disnaker
Tingkat pengangguran terbuka	3	4,28	3,25	3,02	Over target	Dinsos Nakertrans	3,1	3,1	100,00%	Disnaker
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	56,21%	53,92	54,85%	74%	134,91%	Dinsos Nakertrans	55,11%	55,11%	100,00%	Disnaker
Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	3,50%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinsos Nakertrans	2,50%	2,50%	100,00%	Disnaker
Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM)	2,50%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinsos Nakertrans	2%	2%	100,00%	Disnaker
Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (SPM)	7,50%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinsos Nakertrans	7%	7%	100,00%	Disnaker
Prosentase Pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan (SPM)	70%	Blm ada data	Blm ada data	57,8%	-	Dinsos Nakertrans	67%	67%	100,00%	Disnaker
Besaran pemeriksaan perusahaan (SPM)	100%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinsos Nakertrans	100%	100%	100,00%	Disnaker
Besaran pengujian peralatan perusahaan (SPM)	3,50%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Dinsos Nakertrans	3%	3%	100,00%	Disnaker
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak										
Rasio KDRT	0,1	0,02	0,11	0,0007	Over target	Badan PP & KB	0,10%	0,10%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	0,7062	70,62%	Badan PP & KB	100%	100%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Partisipasi angkatan kerja perempuan	88	79,86	88	80,3	91%	Badan PP & KB	88	88	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Penyelesaian pengaduan perlindungan	100%	94,49%	100%	95,10%	95,10%	Badan PP & KB	100%	100%	100,00%	Dinas PPKB &

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANNGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKPD 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			TAHUN BERJALAN		
								REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
perempuan dan anak dari tindak kekerasan										PPPA
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	100%	65,35%	70,62%	70,62%	100,00%	Badan PP & KB	100%	100%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit	25%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Badan PP & KB	23,52%	23,52%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan layanan rehabilitasi soaial yang diberikan petugas bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	25%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Badan PP & KB	23,52%	23,52%		Dinas PPKB & PPPA
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	26%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Badan PP & KB	17,64%	17,64%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Pangan										100,00%
Ketersediaan energi dan protein perkapita	65%	46,25%	55%	100%	181,82%	BKP	60%	60%	100,00%	Dinas TPHPKP
Penguatan cadangan pangan	70%	34,56	60%	61%	101,67%	BKP	65%	65%	100,00%	Dinas TPHPKP
Skor pola pangan harapan	90%	82,40%	80%	83%	103,75%	BKP	85%	85%	100,00%	Dinas TPHPKP
Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	80%	100%	72%	100%	138,89%	BKP	76%	100%	131,58%	Dinas TPHPKP
Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	74%	100%	68%	87,5%	128,68%	BKP	71%	87,5%	123,24%	Dinas TPHPKP
Penanganan kerawanan pangan	65%	34,52%	55%	51,2%	93,09%	BKP	60%	60%	100,00%	Dinas TPHPKP
Pertanahan										
Persentase rekomendasi 95%asi yang diberikan	100%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data			100%	100%	100,00%	Dinas Perkim
Lingkungan hidup										
Persentase penanganan sampah perkotaan	90%	75%	80%	81,82%	102,28%	BLH	85%	85%	100,00%	Dinas LH
Ruang terbuka hijau perkotaan	25%	62.683	23%	18,02%	78,35%	BLH	24%	24%		Dinas Perkim
Luas lahan kritis/lahan kritis tertangani	2.614	529,8	4.014,05	5.388,91	134,25%	BLH	3.314,05	3.314,05	100,00%	Dinas LH
Prosentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara	37,50%	Blm ada data	Blm ada data	26,67%	-	BLH	37,50%	37,50%	100,00%	Dinas LH

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANNGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKPD 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			TAHUN BERJALAN		
								REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Prosentase usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang menaati persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara	100%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	BLH	100%	100%	100,00%	Dinas LH
Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	Blm ada data	Blm ada data	1	-	BLH	100%	100%	100,00%	Dinas LH
Kependudukan dan catatan sipil										
Prosentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	100%	96%	100%	99,6%	99,60%	Dispendukcapil	100	100	100,00%	Dispendukcapil
Presentase penduduk berakta kelahiran	80	23,34%	60%	29,93%	49,88%	Dispendukcapil	70	70	100,00%	Dispendukcapil
Presentase penduduk usia 0 – 18 tahun berakte kelahiran	85		98,70%	80,76%	81,82%	Dispendukcapil	80	80	100,00%	Dispendukcapil
Persentase keluarga ber KK	100	100%	99%	100%	101,01%	Dispendukcapil	100	100	100,00%	Dispendukcapil
Pemberdayaan masyarakat desa										
Rata – rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	207	207	207	207	100,00%	Bapermas & Pemdes	207	207	100,00%	Dinas PMD
Rata – rata jumlah kelompok binaan PKK	252	252	252	252	100,00%	Bapermas & Pemdes	252	252	100,00%	Dinas PMD
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera										
Laju pertumbuhan penduduk	<1,19%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Badan PP & KB	<1,19%	<1,19%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Angka Kelahiran	<2,3%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	Badan PP & KB	<2,3%	<2,3%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Rasio akseptor KB	74,65	77,62	74,6	76,05	101,94%	Badan PP & KB	74,62	74,62	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan peserta KB aktif	74,65	77,62	74,6	76,05	101,94%	Badan PP & KB	74,62	74,62	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	28%	30,70%	30%	No data	-	Badan PP & KB	28%	28%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Anmetneed kebutuhan Keluarga berencana (KB) yang tidak terpenuhi	10%	11,42%	11%	11%	100,00%	Badan PP & KB	11%	11%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	77%	95,10%	77%	95,1%	123,51%	Badan PP & KB	77%	77%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	77%	74%	77%	1	129,87%	Badan PP & KB	77%	77%	100,00%	Dinas PPKB & PPPA
Perhubungan										
Load factor	0,56	0,54	0,56	0,56	100,00%	Dishubkominfo	0,56	0,56	100,00%	Dishub
Jumlah uji kir angkutan umum	1460	2267	1440	8.159	566,60%	Dishubkominfo	1450	1450	100,00%	Dishub
Prosentase uji kir angkutan umum	92	75,80%	91,50%	81,59%	89,17%	Dishubkominfo	91,7	91,7	100,00%	Dishub

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPD 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Prosentase pemasangan rambu lalu lintas	85,4	68,61%	75,40%	78,51%	104,12%	Dishubkominfo	80,4	80,4	100,00%	Dishub
Prosentase pemasangan marka jalan	24,6	15,60%	20,19%	20,41%	101,09%	Dishubkominfo	22,39	22,39	100,00%	Dishub
Penerangan jalan umum	80%	74,22%	70%	77,16%	110,23%	DPU BMCK	75%	75%	100,00%	Dinas PU PR
Komunikasi dan informatika										
Jumlah pemberitaan melalui										
- Media massa	230	18	225	256	113,78%	Bag. Humas & Protokol	230	230	100,00%	Dinas Kominfo
- Media luar ruang	60	12	60	68	113,33%	Bappeda	60	60	100,00%	Dinas Kominfo
Prosentase SKPD yang menyediakan data di website resmi	100%	100%	90%	40,4%	44,89%	Bappeda	100%	100%	100,00%	Dinas Kominfo
Jumlah pertunjukan rakyat	6	-	6	6	100,00%	Bag. Humas & Protokol	6	6	100,00%	Dinas Kominfo
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan telecenter	10	10	8	9	112,50%	Dishubkominfo	9	9		Dinas Kominfo
Desiminasi Informasi (SPM) :										
- media cetak	30	112	189	112	59,26%	Dishubkominfo	20	20	100,00%	Dinas Kominfo
- Radio	60	24	24	24	100,00%	Dishubkominfo	50	50	100,00%	Dinas Kominfo
- Televisi	15	8	12	8	66,67%	Dishubkominfo	10	10	100,00%	Dinas Kominfo
- Media online	365	58	365	104	28,49%	Dishubkominfo	365	365	100,00%	Dinas Kominfo
- pertunjukan rakyat	6	-	6	0	0,00%	Bag. Humas & Protokol	6	6	100,00%	Dinas Kominfo
- media tatap muka	36						35	35	100,00%	Dinas Kominfo
- Media luar ruang	60	12	60	Blm ada data	-	Dishubkominfo	60	60	100,00%	Dinas Kominfo
- Media tercetak/ rekam	1			Blm ada data			1	1	100,00%	Dinas Kominfo
Koperasi, usaha kecil dan menengah										
Persentase koperasi aktif	86	91,87	82	82	100,00%	Dinkop & UKM	84	84	100,00%	Dinkop & UM
Jumlah UKM non BPR/KLM	1.194	973	1.187	1.275	107,41%	Dinkop & UKM	1.187	1.187	100,00%	Dinkop & UM
Jumlah BPR/LKM	184	134	149	223	149,66%	Dinkop & UKM	164	164	100,00%	Dinkop & UM
Penanaman modal										
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	1	1	100,00%	Bag. Adm. Perekonomian	1	1	100,00%	Dinas PM & PTSP
Jumlah nilai investasi berskala lokal (non PMDN/PMA) dalam juta	960.000	190.078	140.000	140.000	100,00%	Bag. Adm. Perekonomian	142.000	142.000	100,00%	Dinas PM & PTSP
terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	40 kl	17	36 kl	40 kl	111,11%	Bag. Adm. Perekonomian	37 kl	37 kl	100,00%	Dinas PM & PTSP
Kepemudaan dan olah raga										
Jumlah klub olah raga	28	Blm ada data	28	28	100,00%	Dinas Parbudpora	28	28	100,00%	Dinas Parbud
Jumlah gedung olah raga	30	Blm ada data	30	35	116,67%	Dinas	30	30	100,00%	Dinas Parbud

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET RKPD 2016	REALISASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			REALISASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Jumlah organisasi pemuda aktif	290	2	289	289	100,00%	Parbudpora Dinas Parbudpora	289	289	100,00%	Dinas Dikpora
Jumlah kegiatan/ kompetisi olah raga	30	13	30	30	100,00%	Dinas Parbudpora	30	30	100,00%	Dinas Dikpora
Statistik										
Buku kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Ada	ada	on target	Bappeda	Ada	Ada	100,00%	Dinas Kominfo
Buku PDRB kabupaten magetan	Ada	Ada	Ada	ada	on target	Bappeda	Ada	Ada	100,00%	Dinas Kominfo
Kecamatan dalam angka	18	18	18	18	100,00%	Bappeda	18	18	100,00%	Dinas Kominfo
Kebudayaan										
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2	2	2	2	100,00%	Dinas Parbudpora	2	2	100,00%	Dinas Parbud
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	5	7	7	100,00%	Dinas Parbudpora	7	7	100,00%	Dinas Parbud
Cakupan kajian seni	50%	13%	40%	40%	100,00%	Dinas Parbudpora	40%	40%	100,00%	Dinas Parbud
Cakupan fasilitas seni	57,14%	57%	30%	85,7%	285,60%	Dinas Parbudpora	10	10	100,00%	Dinas Parbud
Cakupan gelar seni	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Parbudpora	100%	100%	100,00%	Dinas Parbud
Misi kesenian	100%	100%	100%	400%	400%	Dinas Parbudpora	100%	100%	100,00%	Dinas Parbud
Cakupan SDM kesenian	37,50%	50%	25%	37,50%	150%	Dinas Parbudpora	37,50%	37,50%	100,00%	Dinas Parbud
Cakupan tempat seni	100%	100%	100%	400%	400%	Dinas Parbudpora	100%	100%	100,00%	Dinas Parbud
Cakupan organisasi seni	100%	50%	100%	100%	100%		100%	100%	100,00%	Dinas Parbud
Perpustakaan										
Jumlah perpustakaan	845	887	803	889	110,71%	Kantor Arpus	820	820	100,00%	Dinas Arpus
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	30.000	24.277	27.000	27.168	100,62%	Kantor Arpus	28.000	28.000	100,00%	Dinas Arpus
Koleksi buku yang tersedia	83.000	58.397	68.300	59.864	87,65%	Kantor Arpus	76.000	76.000	100,00%	Dinas Arpus
kearsipan										
Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100%	70%	92%	92,98%	101,07%	Kantor Arpus	96	96	100,00%	Dinas Arpus
PELAYANAN URUSAN PILIHAN										
Kelautan dan perikanan										
Budidaya ikan (ton)	1.400	1.242,81	1.654,80	1.253,92	75,77%	Disnakan	1.300	1.300	100,00%	Disnakan
Konsumsi ikan (Kg/Kapita/th)	16.65	13	18,22	13,8	75,74%	Disnakan	15.14	15.14	100,00%	Disnakan
Pembudidaya ikan (orang)	2,8	2.526	2.700	2.782	103,04%	Disnakan	2,75	2,75	100,00%	Disnakan
Jumlah unit pembenihan (UPR)	52	53	50	54	108,00%	Disnakan	51	51	100,00%	Disnakan
Produksi Perikanan Tangkap (PUD) (ton)	40.33	37,66	38,76	37,57	96,93%	Disnakan	39.54	39.54	100,00%	Disnakan
Pertanian										

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPd TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANNGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPd 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPd		SKPD PENANNGUNG JAWAB
			TARGET RKPd 2016	REALIASASI TAHUN 2016	TINGKAT CAPAIAN			TAHUN BERJALAN		
								REALIASASI TAHUN 2017	TINGKAT CAPAIAN	
Jumlah produksi hasil pertanian										
- Padi (kw)	4.000.000	3.101.110	3.656.000	3.370.710	92,20%	Dinas Pertanian	3.860.000	3.500.000	90,67%	Dinas TPHPKP
- Jagung (kw)	800.000	897.600	778.000	1.042.720	134,03%	Dinas Pertanian	779.000	1.042.720	133,85%	Dinas TPHPKP
- Kedelai (kw)	75.000	53.640	67.000	33.950	50,67%	Dinas Pertanian	69.000	35.000	50,72%	Dinas TPHPKP
- Tebu (kw)	575.000	484.464	549.000	484.464	88,24%	Dinas Pertanian	562.000	484.464	86,20%	Dinas TPHPKP
Jumlah produksi peternakan										
- Sapi (ekor)	125.000	107.881	173.500	110.228	63,53%	Disnakan	115.000	115.000	100,00%	Disnakan
- Kambing (ekor)	45.000	41.747	45.000	38.376	85,28%	Disnakan	44.000	44.000	100,00%	Disnakan
- Ayam (ekor)	8.500.000	12.806.999	7.500.000	15.000.000	200,00%	Disnakan	8.300.000	8.300.000	100,00%	Disnakan
- Telur (Kg)	20.250.000	21.191.069	18.000.000	20.608.998	114,49%	Disnakan	20.000.000	20.000.000	100,00%	Disnakan
Kehutanan										
Jumlah produksi hasil hutan (kayu jati, m3)		1.864,33	1.600	1945,72	121,61%	Dinas Hutbun				-
Kerusakan Kawasan Hutan		235	5	2,6	52,00%	Dinas Hutbun				-
Luas kawasan hutan		7.265	6.452	7.265,24	112,60%	Dinas Hutbun				-
Energi dan sumber daya mineral										
Jumlah titik pemasangan energi alternatif terbarukan (biogas)	110	19 titik	64	46	71,88%	Bag. Adm. SDA	94	94	100,00%	Bag. Adm. SDA
Pariwisata										
Angka kunjungan wisata	956.409	866.978	752.830	968.225	128,61%	Dinas Parbudpora	818.149	818.149	100,00%	Dinas Parbud
Length of stay	2	2,1	2	2,2	110%	Dinas Parbudpora	2	2	100,00%	Dinas Parbud
Jumlah PAD sektor wisata (Rp juta)	9.251.550	6.425.779	7.347.419	7.411.404	100,87%	Dinas Parbudpora	8.811.006	8.811.006	100,00%	Dinas Parbud
Perdagangan										
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4	6,29	3	4	133,33%	Dinas Perindag	4	4	100,00%	Dinas Perindag
persentase pasar tradisional kondisi baik	80%	13,63%	70%	42,85%	61,21%	Dinas Perindag	80%	80%	100,00%	Dinas Perindag
Perindustrian										
Pertumbuhan industri	15.999	14.849	15.449	153.25	99,20%	Dinas Perindag	15.749	15.749		Dinas Perindag
Cakupan bina kelompok pengrajin	52	585	48	64	133,33%	Dinas Perindag	50	50	100,00%	Dinas Perindag
Ketransmigrasian										
Jumlah transmigran ditempatkan (KK)	90	25	80	15	18,75%	Dinsosnakertrans	85	85	100,00%	Dinas Naker
FOKUS URUSAN PENUNJANG										
Perencanaan										
Tingkat keselarasan Renstra dengan RPJMD	100%						100%	100%	100,00%	Bappeda Litbang
Tingkat keselarasan Renja dengan RKPd	100%						100%	100%	100,00%	Bappeda Litbang
Tingkat keselarasan RKPd dengan	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda	100%	100%	100,00%	Bappeda

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET AKHIR CAPAIAN KINERJA RPJMD (TAHUN 2018)	REALISASI TARGET KINERJA RKPD TAHUN 2015	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2016			SKPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD 2017	PRAKIRAAN CAPAIAN RKPD TAHUN BERJALAN		SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALIASASI	TINGKAT			REALIASASI	TINGKAT	
			RKPD 2016	TAHUN 2016	CAPAIAN			TAHUN 2017	CAPAIAN	
RPJMD										Litbang
Tingkat keselarasan Renja dengan Renstra	100%					100%	100%	100,00%		Bappeda Litbang
Keuangan										
Prosentase belanja pegawai (RPJMN)	46%	Blm ada data	Blm ada data		-	BPPKAD	46,53%	46,53%	100,00%	BPPKAD
Prosentase belanja modal (RPJMN)	13%	Blm ada data	Blm ada data		-	BPPKAD	12,14%	12,14%	100,00%	BPPKAD
Prosentase pajak/ retribusi daerah terhadap total pendapatan (RPJMN)	3,50%	Blm ada data	Blm ada data		-	BPPKAD	3,36%	3,36%	100,00%	BPPKAD
Kepegawaian										
Tingkat pendidikan aparatur (S1, S2, S3)	69%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	BKD	69%	69%	100,00%	BKD
Pendidikan dan Pelatihan										
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	260	146	175	196	112,00%	BKD	200	200	100,00%	BKD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	250	170	150	217	144,67%	BKD	200	200	100,00%	BKD
Prosentase pejabat yang mengikuti fit and proper test	975	27	600	66	11,00%	BKD	750	0	0%	BKD
Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar/ ijin belajar	1.310	519	750	629	83,87%	BKD	1000	1000	100,00%	BKD
Jumlah pejabat yang mengikuti assesment	90	27	24			BKD	70	70	100,00%	BKD
Penelitian dan Pengembangan										
Jumlh produk inovasi	15	6	3	3	100%	BAPPEDA	3	3	100,00%	Bappeda Litbang
Fungsi penunjang lainnya										
Peringkat kinerja penyelenggaraan otoda	<50	82	<50	48	on target	Bag. Adm. Pemerintahan Umum	<50	<50	100,00%	Bag. Pemerintahan
Hasil evaluasi Lakip	CC	CC	CC	B	over target	Bag. Ortala	CC	CC	100,00%	Bag. Organisasi Inspektorat
Hasil predikat pemeriksaan/ pengawasan pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	on target	Inspektorat	WTP	WTP	100,00%	
Skor Indeks Kepuasan masyarakat	75	75,35	73	76,02	104,14%	Bag. Ortala	74	74	100,00%	Bag. Organisasi
Prosentase penerapan SPM di OPD	75%	Blm ada data	Blm ada data	Blm ada data	-	-	75%	75%	100,00%	Bag. Organisasi

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang kurang diantisipasi.

Salah satu Permasalahan pembangunan yang muncul dalam RPJMD Kabupaten Magetan adalah permasalahan pembangunan daerah atau isu pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi permasalahan dalam RPJPD Kabupaten Magetan, dimana RPJMD merupakan sarana untuk pencapaian pembangunan jangka panjang. Didalam RPJPD Kabupaten Magetan beberapa isu yang perlu diperhatikan tidak terlepas dari perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan yaitu ““Terwujudnya kesejahteraan masyarakat magetan yang adil, mandiri dan bermartabat”, dari visi diatas periode 2013 -2018 diharapkan ‘Masyarakat Magetan’ dalam konteks Magetan cerdas (wasis) bisa bekerja dan mengembangkan ekonomi kabupatennya: Untuk hal ini tentu dipersyaratkan bahwa sesudah memiliki kecerdasan tertentu, masyarakat harus sehat jasmani+rohani (waras, wutuh), dan tentunya dapat mengantisipasi menghilangkan jeratan kemiskinan (wareg, widodo) memanfaatkan upaya interaksi antar kelompok masyarakat-antar bagian wilayah kabupaten dan jaringan kerjasama ekonomi kabupaten secara nasional dan internasional (waskita).

Permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 yang masih harus dihadapi dan diatasi adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana peribadatan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Belum optimalnya kinerja birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah;
3. Masih terbatasnya keterkaitan antar sektor ekonomi dan belum optimalnya iklim investasi dan usaha;

4. Masih relatif tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan rendahnya kualitas SDM tenaga kerja;
5. Rendahnya daya saing dan daya jual obyek dan daya tarik pariwisata;
6. Belum optimalnya produktivitas pertanian dalam arti luas, baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas;
7. Kurangnya kualitas ketersediaan infrastruktur daerah, desa-desa dan wilayah perbatasan untuk menunjang perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi, kejadian atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018 adalah :

1. Menurunnya daya tampung maupun daya dukung lingkungan hidup sebagai dampak dari aktivitas ekonomi ditandai dengan terjadinya defisit sumber daya air.
2. Adanya konflik pemanfaatan ruang atau lahan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan pertanian ke non pertanian atau kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sehingga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.
3. Adanya Isu demokratisasi dan HAM yang kadangkala melebihi porsinya, dimana penghormatan terhadap hak-hak individu lebih ditonjolkan sehingga mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.
4. Pemberlakuan perdagangan bebas dimana produk-produk luar negeri bisa dengan mudah masuk dan hampir tanpa hambatan yang dapat berpotensi mengancam daya saing produk lokal.

STRATEGI

Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang dipilih untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya ketahanan moral dan mental masyarakat untuk membentengi diri dari krisis nilai sebagai akibat

dari dampak negatif perubahan dan pembangunan adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan formal dan non formal serta tenaga pembimbing keagamaan, mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan, pembinaan keagamaan terhadap aparatur pemerintah serta mengintegrasikan pengamalan ajaran agama di sekolah.

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya toleransi umat beragama adalah mengembangkan komunikasi inter dan antar umat beragama.

2. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan pelayanan publik, meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya aparatur.

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan adalah menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan berkualitas.

3. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global adalah mendorong pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang berwawasan lingkungan, mendorong tumbuhnya kluster-kluster ekonomi, Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kegiatan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal adalah memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mendorong tumbuhnya dan berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

4. Strategi untuk mencapai sasaran terwujudnya stabilitas pangan dan energi utama adalah menjamin ketersediaan stok dan kelancaran distribusi bahan pangan dan energi utama,

Strategi untuk mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka adalah memberdayakan masyarakat miskin dan PMKS, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan jaminan ekonomi sosial tenaga kerja, meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja lokal serta memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa dalam rangka penguatan pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkualitas, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan informasi, meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, anak dan keluarga sejahtera, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta memajukan olah raga daerah melalui pembinaan secara sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan.

Strategi untuk mencapai sasaran berkembangnya budaya lokal multikultur yang dapat menjadi media perekat sosial adalah melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah dari berbagai etnik dan golongan untuk menjaga pluralisme namun tetap terjaga persatuan dan kesatuan.

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak dan sehat adalah penataan ruang permukiman dan kawasan sesuai ketentuan zonasi, penyediaan sarana dan prasarana permukiman, mengendalikan pencemaran lingkungan serta meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat.

Strategi untuk mencapai sasaran terwujudnya alam dan lingkungan hidup yang lestari adalah mengelola sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan, merehabilitasi lingkungan hidup yang mengalami penurunan kualitas serta mengarahkan dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

5. Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan memadai adalah menyediakan infrastruktur jalan, jembatan beserta pendukungnya yang layak yang dapat menghubungkan antar wilayah dan permukiman penduduk serta menjangkau sentra sentra-sentra produksi pertanian dan produk unggulan daerah lainnya

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan jaringan irigasi adalah Membangun jaringan irigasi yang handal dan dapat menjangkau daerah irigasi yang seluas-luasnya

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016, disimpulkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.27
PERMASALAHAN DAN SOLUSI PEMBANGUNAN YANG DIHADAPI
DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	
		RENCANA SOLUSI	RENCANA PELAKSANAAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1. Pendidikan;	a. Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dilarang Mengadakan Pungutan kepada Orang Tua Wali Murid Dalam Penyelenggaraan Pendidikan	a. Mengajukan Alokasi Dana Bos dari APBD Kabupaten	a. Tahun 2018 dan seterusnya
	b. Kekurangan Guru PNS terutama pada Satuan Pendidikan Negeri	b. Sekolah Memanfaatkan Guru Honorer tidak tetap/Agar Pemerintah segera mengangkat/Menempatkan Guru PNS	b. Tahun 2017/2018
	c. Banyak Satuan Pendidikan SD dengan Jumlah Murid Kurang dari 60 Siswa	c. Dilakukan Penggabungan Sekolah (Regrouping) terutama pada SD	c. Tahun 2017 dan 2018
	d. Banyak Ruang Kelas Rusak Sedang/Berat Terutama Sekolah di Pinggiran	d. Memanfaatkan dan DAK APBN untuk Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak/Sedang/Berat	d. Tahun 2017 dan 2018
2. kesehatan;	a. Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	a. Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	a. Tahun 2018
	b. Standarisasi Puskesmas sesuai dengan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas	b. - Rehabilitasi berat Puskesmas Plaosan, Tebondan Tladan - Penguatan pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu Puskesmas dengan pelaksanaan Akreditasi Puskesmas	b. - Tahun 2018 - Tahun 2018
	c. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), serta meningkatnya Angka Kematian Bayi (AKB)	c. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	c. Tahun 2018
	d. Masih berkembangnya penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru	d. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	d. Tahun 2018
	e. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular seiring dengan bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik	e. Kegiatan Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular	e. Tahun 2018
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;	a. Cakupan wilayah kegiatan yang luas yang tidak sebanding dengan jumlah personil, sarpras dan anggaran yang tersedia.	a. Pengadaan sarana dan prasarana operasional bidang kebinamargaan	a. Tahun 2017 & 2018
	b. Belum optimalnya kemampuan personal di bidang teknis kebinamargaan, keciptakarya dan teknis pengairan serta di bidang administrasi kegiatan agar menghasilkan kinerja yang tertata baik dalam administratif perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.	b. Peningkatan kompetensi SDM untuk lebih mengoptimalkan kinerja, sehingga sasaran program bisa memenuhi harapan masyarakat	b. Tahun 2017
	c. Cepatnya kerusakan jalan akibat aktivitas truk muatan berat (galian C)	c. Penataan kegiatan pertambangan	c. Tahun 2017
	d. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan RTRW di Kabupaten Magetan	d. Sosialisasi Perda RTRW serta dalam hal pemberian ijin- ijin terkait, harus mengacu kepada dokumen RTRW yang telah ditetapkan	d. Tahun 2017 & 2018
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;	a. Kerawanan keamanan kawasan permukiman	a. Pembangunan/rehabilitasi pos kamling	a. Tahun 2017
	b. Kerusakan jalan lingkungan kawasan permukiman	b. Pembangunan/perbaikan jalan lingkungan kawasan permukiman	b. Tahun 2017 & 2018
	c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	c. Pembuatan tempat sampah di kawasan permukiman	c. Tahun 2017 & 2018
	d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap kawasan permukiman	d. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar peduli terhadap kawasan permukiman	d. Tahun 2017 & 2018
	e. Dibutuhkan penataan tempat pembuangan sampah (TPS) lebih optimal yang memenuhi persyaratan	e. Pengadaan lahan tempat pembuangan sampah yang permanen	e. Tahun 2018



URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	
		RENCANA SOLUSI	RENCANA PELAKSANAAN
	<p>sehingga perlu ditingkatkan</p> <p>f. Cakupan wilayah kegiatan yang luas tidak sebanding dengan jumlah personil dan anggaran yang ada</p> <p>g. Belum optimalnya kemampuan personil di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta di bidang administrasi kegiatan</p>	<p>f. Pengelolaan tenaga kerja dan anggaran yang tersedia secara lebih cermat.</p> <p>g. Peningkatan kompetensi SDM untuk lebih mengoptimalkan kinerja, sehingga sasaran program bisa memenuhi harapan masyarakat.</p>	<p>f. Tahun 2017</p> <p>g. Tahun 2017</p>
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan	<p>a. Adanya gangguan keamanan yang bersifat sporadic dan insidental.</p> <p>b. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana akibat terbatasnya sarana dan prasarana, keterampilan aparat serta peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isu-isu keagamaan yang muncul ;</p> <p>d. Semakin banyaknya ormas keagamaan yang ada, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan diantara masyarakat</p>	<p>a. Pengadaan Pendidikan dan Pelatihan aparat secara berjenjang dan terstruktur terkait materi kebencanaan.</p> <p>b. Pemenuhan kebutuhan standar sarana dan prasarana kebencanaan.</p> <p>c. Pemetaan Resiko Bencana.</p> <p>d. Melakukan pembinaan lembaga-lembaga keagamaan formal dan non formal melalui forum kerukunan umat beragama (FKUB);</p> <p>e. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat melalui pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</p> <p>f. meningkatkan koordinasi antar pihak yang berwenang untuk mencegah tindak kriminal melalui kegiatan Komunitas Intelegen Daerah (Kominda), Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan sejenisnya</p>	
6. Sosial	<p>a. Tingginya jumlah penyandang disabilitas (cacat) yang belum mendapat jangkauan pelayanan sosial, baik pelayanan primer maupun skunder, sementara anggaran itu sangat terbatas dan fasilitas pelayanan belum memadai.</p> <p>b. Terbatasnya jangkauan pelayanan social Lanjut Usia Terlantar baik yang masih produktif maupun sudah tidak produktif</p> <p>c. Belum memiliki lembaga, fasilitasi, sarana untuk pembinaan bagi anak sekolah formal yang bermasalah khususnya tingkat SD</p> <p>d. Masih tingginya keluarga rentan miskin</p> <p>e. Banyaknya wilayah yang masuk zona rawan bencana alam</p> <p>f. belum memiliki tempat penampungan sementara untuk pelayanan social bagi PMKS jalanan dan Rumah Trauma Centre (RTC) Penanganan PMKS sebagai prioritas program Provinsi Jawa Timur meliputi WTS, Gelandangan Pengemis, Anak Jalanan dan Psikotik. Sesuai dengan Perda Kabupaten.</p>	<p>a - Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga social yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan membangun kesepakatan dengan UPT baik milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi atau daerah lain</p> <p>- Usulan bantuan social Jaminan Sosial Cacat Berat dari Kemensos RI secara rutin.</p> <p>- Pemberdayaan bagi orang dengan kecacatan melalui kegiatan Loka Bina Karya (LBK)</p> <p>b - Mengusulkan bantuan social dari asisten social Lanjut Usia Terlantar Kemensos RI</p> <p>- Mengusulkan bansos pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar</p> <p>c. Bekerjasama dengan Panti Petirahan Anak Bima Sakti Batu, secara rutin mengirim anak bermasalah dalam pendidikan formal</p> <p>d - Mengusulkan bantuan program Kube Fakmis ke Kementerian Sosial</p> <p>- Mengusulkan bantuan program Kube Fakmis melalui Hibah</p> <p>e - Membentuk kampung siaga bencana di daerah rawan bencana</p> <p>- Mengusulkan program bantuan melalui kegiatan forum keserasian social dari Kementerian Sosial RI</p> <p>f. Membangu Rumah Trauma Centre (RTC) yang representatif</p>	<p>a. Setiap Tahun</p> <p>b. - Setiap Tahun</p> <p>- Tahun 2018</p> <p>c. Setiap Tahun</p> <p>d. - Setiap Tahun</p> <p>- Tahun 2018</p> <p>e. - Tahun 2018</p> <p>- Setiap Tahun</p> <p>f. Tahun 2018</p>
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
1. Tenaga kerja;	<p>a. Kurangnya personel/ staf yang mengurus seksi Hubinsyaker dan yang memiliki latar belakang jabatan mediator hubungan industrial</p>	<p>a. Penambahan personel/ staf diseksi Hubinsyaker serta mengikut sertakan staf dalam diklat mediator HI.</p>	<p>a. Tahun 2017 dan 2018</p>

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	
		RENCANA SOLUSI	RENCANA PELAKSANAAN
	<p>b. Keterbatasan personel pengantar kerja dan belum ada yang memiliki sertifikasi khusus pengantar</p> <p>c. Fasilitas gedung dan pelayanan yang tidak memadai</p> <p>d. Kurangnya pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan program kelembagaan pelatihan yaitu LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta)</p> <p>e. Waktu pelaksanaan pelatihan keterampilan kejuruan kurang efektif karena waktu pelaksanaan yang terlalu singkat, sehingga materi dan praktek kurang maksimal.</p> <p>f. Kurangnya instruktur yang berkompotensi</p>	<p>b. Mengusulkan penambahan personel dan diklat fungsional pengantar kerja</p> <p>c. Mengusulkan fasilitas gedung untuk tempat pelayanan yang layak</p> <p>d. Menganggarkan untuk tahun 2017 kegiatan koordinasi dan sinkronisasi program sehingga antara Dinas Tenaga Kerja dan LPKS dapat sinergi dan terjalin kerjasama yang baik demi meksimalnya pelayanan dan pelayihan kepada masyarakat,</p> <p>e. Menambah waktu pelatihan sehingga diharapkan peserta akan mampu lebih menguasai baik materi maupun praktek kejuruan</p> <p>f. menambah instruktur yang mempunyai skill dan telah bersertifikat kompetensi sehingga peserta akan benar- benar menguasai metodologi yang benar, baik teori yang diaplikasikan dalam praktek yang benar sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing dipasaran.</p>	<p>b. Tahun 2017 dan 2018</p> <p>c. Tahun 2017 dan 2018</p> <p>d. Tahun 2017</p> <p>e. Tahun 2017</p> <p>f. Tahun 2017</p>
2. Pangan;	<p>a. Masih dirasakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dibidang pangan;</p> <p>b. Masih adanya ego sektor antara dinas/ instansi terkait sehingga menjadi penghalang dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program/ kegiatan</p>	<p>a. Memanfaatkan SDM secara optimal melalui Training on Trainer (ToT) kepada petugas;</p> <p>b. Mengembangkan kerjasama antar instansi supaya terwujud harmonisasi dalam koordinasi pelaksanaan program/kegiatan</p>	
3. lingkungan hidup;	<p>a. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang teknis lingkungan hidup masih memadai.</p> <p>b. Belum optimalnya operasional TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah dan kurang luasnya lahan TPA.</p> <p>c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.</p> <p>d. Kesadaran masyarakat tentang perijinan yang terkait dengan lingkungan hidup masih kurang.</p>	<p>a. Mengikutsertakan SDM untuk bintek tentang lingkungan hidup.</p> <p>b. Pengadaan lahan TPA.</p> <p>c. Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan.</p> <p>d. Sosialisasi peraturan lingkungan hidup</p>	<p>a. Tahun 2017</p> <p>b. Tahun 2018</p> <p>c. Tahun 2017 & 2018</p> <p>d. Tahun 2017 & 2018</p>
4. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;	<p>a. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas</p>	<p>a. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain.</p> <p>b. Menertibkan pengelolaan database kependudukan dan penyempurnaan sistem informasi kependudukan.</p> <p>c. Menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah dan berkualitas.</p>	
5. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;	<p>a. OPD baru Dinas Pemberdayaan masyarakat memeproleh tambahan pelimpahan tupoksi dari OPD lain</p> <p>b. Kurangnya sosialisasi berbagai aturan Perundang-Undangan dari pemerintah Pusat sehingga menimbulkan berbagai tafsir dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan</p>	<p>a. Koordinasi dengan OPD lama yang melaksanakan tupoksi tersebut</p> <p>b - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat</p> <p>- Mencari referensi dengan Kabupaten/ kota lainnya</p> <p>- Mengadakan bimtek/ sosialisasi peraturan perundanga-undangan yang ada</p>	
6. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;	<p>a. Keluarga berencana dalam pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p> <p>b. Masalah pendataan; petunjuk tehknis belum memadai; distribusi alokon ke jejaring faskes mengalami kendala</p>	<p>a. Mendorong perwakilan BKKBN Provinsi agar Juknis tentang pendataan lebih jelas dan bisa diterapkan di Kabupaten</p> <p>b. Melakukan advokasi kepada Faskes induk agar jejaring faskes dapat menerima Alokon dari Dinas PPKB dan PPPA secara</p>	<p>a. Tahun 2017</p> <p>b. Tahun 2017</p>

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	
		RENCANA SOLUSI	RENCANA PELAKSANAAN
	aturan c. Rendahnya peserta KB Pria d. Masih tingginya pernikahan dini dan angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun, hal ini menunjukkan promosi, advokasi dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja belum dilakukan secara komprehensif e. Belum terlaksananya pengalihan pengolahan PKB/ PLKB dari ASN daerah ke pusat	langsung c. Memacu petugas KB di lapangan untuk meningkatkan KIE KB melalui peningkatan target/PPM KB Pria setiap Kecamatan d. Meningkatkan advokasi dan KIE tentang pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (UPP) ; Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok PIK remaja disetiap sekolah dan Desa/Kelurahan e. Melakukan advokasi kepada BKKBN Pusat untuk merealisasikan pengalihan PKB/PLKB dari ASN Daerah ke ASN Pusat	c. Tahun 2017 d. Tahun 2017 ; Tahun 2017 dan selanjutnya e. Tahun 2017
7. Perhubungan;	a. Banyaknya marka jalan khususnya menuju kawasan wisata dan jalur penyangga mulai pudar atau hilang. b. Belum optimalnya rambu- rambu lalu lintas/ RPPJ dan pagar pengaman di tempat rawan kecelakaan menuju daerah wisata. c. Banyaknya kecelakaan di lingkungan sekolah.	a. Melakukan pemeliharaan marka jalan karena umur pemakaian yang pendek (hanya 1 tahun) b. Menambah anggaran untuk pengadaan rambu lalu lintas/ RPPJ dan pagar pengaman jalan setiap tahun. c. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) disetiap lingkungan sekolah.	a. Tahun 2017 b. Tahun 2017 c. Tahun 2017
8. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;	a. koperasi sebagai badan usaha dituntut mengubah diri untuk melakukan konsolidasi bisnis dan mampu meningkatkan produktivitas b. Masih belum memadainya kemampuan teknis maupun jumlah personil untuk pembinaan kepada koperasi c. Dalam Era Globalisasi dan perkembangan teknologi berproduksi agar Usaha Mikro mampu berdaya saing, perlu ditingkatkan kemampuan SDM bagi Usaha Mikro, Permodalan, Teknologi dan Pemasaran	a. Revitalisasi usaha koperasi melalui pelatihan teknis terkait perkoperasian bagi pengelola koperasi dan pembinaan usaha koperasi secara berkala b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pembina melalui pelatihan teknis terkait perkoperasian c. Diadakan pelatihan/ pendidikan non formal tentang ketrampilan dan pengetahuan sesuai bidang usaha; Perlu ada kemitraan dengan lembaga keuangan dan koperasi; Perlu diadakan kemitraan usaha.	a. Tahun 2018 b. Tahun 2018 c. Tahun 2018
9. Statistik;	a. Lambatnya perolehan data statistik, baik dari SKPD Pemkab maupun Masyarakat.	a. Memberikan pembinaan kepada SKPD agar mendukung percepatan pemenuhan data statistik yang dibutuhkan. b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan BPS	a. Tahun 2017 dan tiap tahun
10. kebudayaan;	a. masih rendahnya inisiasi dan swadaya masyarakat dalam menggali dan mengembangkan budaya lokalnya masing-masing, sehingga lebih banyak menunggu stimulasi dari pemerintah daerah	a. mengenalkan nilai dan kreativitas budaya lokal melalui dunia pendidikan dasar dan menengah, sehingga diharapkan akan tumbuh ide-ide budaya yang berasal dari nilai-nilai lokal yang dikembangkan oleh pelajar secara rutin dan massif	a. Tahun 2017 dan tiap tahun
11. Kearsipan dan Perpustakaan	a. Belum terwujudnya payung hukum peraturan daerah di bidang Kearsipan & Perpustakaan di Kab.Magetan b. Belum adanya tertib arsip di Kabupaten Magetan c. Relatif rendahnya minat dan budaya baca masyarakat d. Kualitas & kwantitas koleksi buku perpustakaan kurang memadai e. Belum adanya program digitalisasi kearsipan f. Kondisi gedung depo arsip kurang representative, rusak berat sehingga dipandang perlu untuk pindah kantor sementara g. Kurangnya sarana dan prasarana arsip & perpustakaan terutama tingkat pedesaan h. Kurangnya kuantitas dan kwalitas SDM	a. Mengajukan draf payung hukum tentang Kearsipan & Perpustakaan (Study Banding) ke Daerah yang sudah mempunyai payung hukum b. Mangajukan Perbup tentang tata tertib Kearsipan & Perpustakaan c. Memprogramkan sosiaisasi kepada masyarakat dan sekolah- sekolah secara terus menerus di bidang Kearsipan & Perpustakaan. d. Menambah koleksi buku yang ada di Perpustakaan e. Membuat program digitalisasi kearsipan sehingga mempermudah mencari arsip yang dibutuhkan f. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Arpus seperti gedung depo arsip g. Memprogramkan sarana dan prasarana diberikan ke desa-desa h. Menambah jumlah tenaga ahli di bidang	a. Tahun 2017 & 2018 b. Tahun 2017 & 2018 c. Tahun 2017 & 2018 d. Tahun 2017 & 2018 e. Tahun 2017 & 2018 f. Tahun 2017 & 2018 g. Tahun 2017 & 2018 h. Tahun 2017 &



URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	
		RENCANA SOLUSI	RENCANA PELAKSANAAN
	di bidang Kearsipan dan Perpustakaan	kearsipan dan perpustakaan	2018
12. Penanaman Modal	<p>a. Belum ada investor berskala nasional yang menanamkan modal di Kabupaten Magetan.</p> <p>b. Belum tersedianya peta investasi</p> <p>c. Terlalu banyak perizinan yang dipersyaratkan sehingga bisa menghambat investasi</p> <p>d. Terbatasnya sarana prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga menurunkan kualitas pelayanan.</p>	<p>a. Meningkatkan usaha dalam rangka menciptakan kerjasama dengan investor berskala nasional</p> <p>b. Menyusun peta investasi sebagai sarana informasi untuk mengetahui potensi dan peluang investasi</p> <p>c. Untuk mendorong pertumbuhan investasi dan mendorong investor, diperlukan penyederhanaan perizinan melalui penyederhanaan jenis, persyaratan, dan proses perizinan dengan melibatkan seluruh SKPD terkait</p> <p>d. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten dalam rangka peningkatan kualitas PTSP</p>	<p>a. Tahun 2018</p> <p>b. Tahun 2018</p> <p>c. Tahun 2018</p> <p>d. Tahun 2018</p>
URUSAN PILIHAN			
1. Pariwisata	<p>a. Kurangnya lahan parkir di lokasi wisata, terutama di Kawasan Wisata Sarangan</p> <p>b. Lokasi kawasan pemukiman yang menyatu dengan kawasan wisata, mengakibatkan tidak maksimalnya dalam penataan kawasan wisata Sarangan, sehingga sulit untuk menyiapkan fasilitas umum pendukung pariwisata.</p>	<p>a. Pembangunan Bangunan Parkir Bertingkat (Building Multiyears Park) yang akan dimulai tahun 2017.</p> <p>b. Penambahan lahan untuk pembangunan fasilitas umum, misalnya relokasi PK5, taman wisata, toilet berstandart dan lain-lain.</p>	<p>a. Tahun 2017&2018</p> <p>b. Tahun 2017&2018</p>
2. Pertanian	<p>a. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yang cukup tinggi akan menyebabkan semakin menurunnya produksi komoditas pertanian.</p> <p>b. Tingginya fluktuasi harga produk pertanian menyebabkan petani seringkali merugi karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.</p> <p>c. Kurangnya tenaga PNS/THL yang kompeten dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang ada, yang berfungsi sebagai fasilitator.</p> <p>d. Masih banyaknya sarana prasarana pertanian, terutama jalan produksi dan jaringan irigasi tersier yang kondisinya kurang baik.</p> <p>e. Adanya kecenderungan petani menanam tanaman dengan nilai ekonomis tinggi tanpa memperhatikan kesesuaian lahan dan azas konservasi.</p>	<p>a. Mendorong masyarakat agar tetap memfungsikan lahan pertanian sebagaimana mestinya dengan harapan agar lahan pertanian tidak beralih fungsi</p> <p>b. Mendorong stake holder terkait agar tetap bisa menjaga hasil produksi panen, sehingga petani tidak dirugikan ;</p> <p>c. Fasilitas pemasaran melalui berbagai event pameran baik yang bersifat lokal, regional maupun internasional</p> <p>d. Mengusulkan perlu adanya rekrutmen PNS/tenaga kontrak pemelihara jaringan irigasi.</p>	<p>Tahun 2018</p>
3. perdagangan	<p>a. kondisi pasar daerah dan tradisional Secara fisik kurang representatif, sistem keamanan yang minim dan masih rendahnya kualitas manajemen pasar tradisional</p> <p>b. Masih kurangnya infrastruktur sarana prasarana pasar hewan di Kab. Magetan</p> <p>c. Belum dikenalnya produk unggulan Kab. Magetan di tingkat regional maupun tingkat nasional.</p> <p>d. Belum adanya jaringan pemasaran produk IKM/UKM untuk bekerja sama dengan pihak swasta</p> <p>e. Munculnya PKL baru yang berjualan ditempat yang tidak sesuai</p>	<p>a. Diperlukan perencanaan matang dan rehabilitasi sarana prasarana serta kualitas pasar daerah dan pasar tradisional; Diperlukan penataan dalam bentuk jenis komoditi yang dipasarkan/diperdagangkan</p> <p>b. Diperlukan pemeliharaan/pembangunan fasilitas fisik untuk kenyamanan, keamanan, dan ketertiban yang layak</p> <p>c. Mengikuti pameran/event-event di tingkat provinsi maupun luar pulau</p> <p>d. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Alfamart/Indomaret serta memfasilitasi IKM agar produknya mampu bersaing</p> <p>e. Sosialisasi dan penataan terhadap PKL</p>	<p>a. Tahun 2018</p> <p>b. Tahun 2018</p> <p>c. Tahun 2018</p> <p>d. Tahun 2018</p> <p>e. Tahun 2018</p>

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	
		RENCANA SOLUSI	RENCANA PELAKSANAAN
	keperuntukannya f. Belum adanya sarana dan prasarana UTTP	f. Pengadaan sarana dan prasarana UTTP dan Diklat SDM penera	f. Tahun 2018 dan 2017
4. perindustrian	<p>a. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasara IKM untuk memperoleh Merek/HAKI, sertifikat Uji Nutrisi serta sertifikat Halal serta desain kemasan.</p> <p>b. Sumber daya manusia minim untuk tenaga jahit kulit, desain serta fasilitasi peralatan.</p> <p>c. Minimnya/kurangnya tenaga muda serta desain kerajinan anyaman bambu.</p> <p>d. Kurangnya tenaga desain proses produksi meubel.</p> <p>e. Masih minimnya pengertian IKM terhadap merek/HAKI, SNI serta setifikasi Halal.</p>	<p>a. Fasilitasi peralatan pada IKM makanan olahan untuk memperoleh sertifikasi HAKI/Merek, Uji Nutrisi makanan olahan dan desain kemasan serta sertifikat Halal. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas makanan olahan.</p> <p>b. Pembinaan dan pelatihan tenaga jahit kulit serta fasilitasi peralatan IKM Kulit.</p> <p>c. Pelatihan desain anyaman bambu</p> <p>d. Pelatihan desain industri meubel</p> <p>e. Sosialisasi pengetahuan SNI, Halal dan HAKI/Merek</p>	<p>a. Tahun 2018</p> <p>b. Tahun 2018</p> <p>c. Tahun 2018</p> <p>d. Tahun 2018</p> <p>e. Tahun 2018</p>
5. transmigrasi	<p>a. Terbatasnya pembagian kuota/ alokasi dari Provinsi</p> <p>b. Banyaknya transmigran sebelum masa pembinaan selesai (5 tahun) sudah meninggalkan lokasi dan menjual lahan usaha.</p>	<p>a. Tetap melaksanakan KSAD dan penjajakan sebagai tolok ukur dalam pemberian kuota/ alokasi</p> <p>b. - Lebih mengintensifkan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca penempatan transmigran - Melaksanakan koordinasi dengan daerah penempatan terkait pembinaan transmigrasi</p>	<p>a. Tahun 2017 dan 2018</p> <p>b. Tahun 2017 dan 2018</p>
6. Peternakan	<p>a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia petani ternak.</p> <p>b. Jumlah personil yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah</p> <p>c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi hasil peternakan.</p> <p>d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal.</p>	<p>a. Melakukan Bintel dan sosialisasi kepada petani ternak.</p> <p>b. Mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan populasi dan produksi peternakan.</p> <p>c. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung meningkatkan populasi dan produksi ternak</p> <p>d. Melakukan pembinaan secara berkala dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, serta menambah persediaan obat/ vaksin</p>	<p>a. Tahun 2017 & 2018</p> <p>b. Tahun 2017 & 2018</p> <p>c. Tahun 2017 & 2018</p> <p>d. Tahun 2017 & 2018</p>
7. Perikanan	<p>a. Rendahnya Sumber Daya Manusia pembudidayaan ikan.</p> <p>b. Jumlah personil yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah</p> <p>c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi dan hasil produksi perikanan</p>	<p>a. Melakukan Bintel dan sosialisasi kepada petani/ pembudidayaan ikan</p> <p>b. Mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kopetensi petugas.</p> <p>c. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung meningkatnya produksi ikan dan melakukan promosi produk- produk perikanan</p>	<p>a. Tahun 2017 & 2018</p> <p>b. Tahun 2017 & 2018</p> <p>c. Tahun 2017 & 2018</p>
URUSAN PENUNJANG			
1. Perencanaan	a. Koordinasi seluruh SKPD terhadap kepatuhan pemenuhan sasaran strategis di dalam RPJMD yang masih lemah, sehingga berdampak terhadap nilai akuntabilitas kinerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan intensitas koordinasi antar SKPD terkait dalam rangka meningkatkan sinkronisasi program pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. - perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, akuntabel dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2017 dan seterusnya - Tahun 2017 dan seterusnya
2. Birokrasi Pemeirntahan	<p>a. Banyak SKPD yang belum memahami penyusunan SOP, hal ini sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang pentingnya penyusunan SOP di setiap tugas fungsi yang dilaksanakan.</p> <p>b. Penyusunan dokumen yang terkait</p>	<p>a. - Mendorong SKPD agar menyusun SOP. - Melaksanakan monev dan pendampingan penyusunan SOP - Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SOP</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dengan stake</p>	<p>a. - Tahun 2017 - Tahun 2017 - Tahun 2018</p> <p>b. Tahun 2017</p>

URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	
		RENCANA SOLUSI	RENCANA PELAKSANAAN
	<p>dengan SAKIP disebagian besar SKPD belum disusun secara sinkron dan runtut, sehingga harmonisasi antara dokumen belum nampak, hal ini berakibat adanya kesenjangan.</p> <p>c. Pembentukan kelembagaan UPTD belum dapat dilaksanakan secara cepat, dikarenakan menunggu terbitnya Peraturan Menteri</p>	<p>holder terkait SAKIP dan melaksanakan perbaikan, pemenuhan dan peningkatan kualitas SAKIP</p> <p>c - Permendagri tentang pembentukan UPTD saat ini baru saja ditetapkan.</p> <p>- Melaksanakan movev UPTD</p> <p>- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait serta berupaya memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk pembentukan UPTD</p>	<p>c. - Tahun 2017</p> <p>- Tahun 2017</p> <p>- Tahun 2017</p>
3. Administrasi Pembangunan	<p>a. Diperlukan adanya jalur koneksi internet/backup untuk menjaga kualitas layanan pengadaan secara elektronik kabupaten Magetan.</p> <p>b. PPK belum mengisikan data surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ) dan data kontrak pada LPSE ketika lelang telah selesai dilaksanakan</p> <p>c. Banyak SKPD yang masih mengabaikan dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD, Standart Satuan Harga barang dan Analisa Standart Biaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi</p> <p>d. SKPD kurang tertib dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pelaporan TEPR</p>	<p>a. Mengusulkan pembukaan jalur koneksi internet cadangan untuk LPSE</p> <p>b. Mendorong PPK agar melengkapi SPPBJ dan kontrak ketika lelang telah selesai dilaksanakan</p> <p>c. Mendorong SKPD agar memperhatikan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan tupoksi</p> <p>d. Peningkatan peran Admin TEPR dan Kasubag PEP dalam pelaporan PEP dan TEPR</p>	<p>a. Tahun 2017 & 2018</p> <p>b. Tahun 2017 & 2018</p> <p>c. Tahun 2017 & 2018</p> <p>d. Tahun 2017 & 2018</p>
4. Kepegawaian	<p>a. Diklat fungsional belum bisa optimal karena kurangnya penawaran dari lembaga diklat yang terakreditasi dan tidak ada pengiriman diklat di akhir tahun yang memerlukan kontribusi</p> <p>b. Pengelolaan jabatan structural kurang optimal karena seleksi terbuka JPT pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan tidak dilaksanakan karena bersamaan dengan penyusunan OPD baru berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016</p> <p>c. Program SIMPEG Online belum maksimal pengelolaannya</p> <p>d. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan SKPD menyatakan kekurangan pegawai</p>	<p>a. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga diklat tentang program diklat yang diikuti</p> <p>b. Melaksanakan kembali pelaksanaan seleksi JPT pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>c. akan dilakukan penyempurnaan Aplikasi Simpeg disesuaikan dengan adanya OPD baru</p> <p>d. akan dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat</p>	<p>a. Tahun 2017</p> <p>b. Tahun 2017</p> <p>c. Tahun 2017</p> <p>d. Tahun 2017</p>
5. Pengawasan	<p>a. Kurangnya anggaran untuk diklat atau pelatihan</p> <p>b. Jumlah personil tidak seimbang dengan banyaknya obyek pengawasan</p> <p>c. Banyaknya kegiatan bidang pengawasan diluar yang telah diprogramkan</p> <p>d. Komitmen SKPD untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan kurang dan begitu juga pemahaman SPIP di SKPD kurang</p>	<p>a. Telah diusulkan penambahan anggaran pelaksanaan pendidikan dan latihan untuk peningkatan profesionalisme aparat pengawasan</p> <p>b. Mengusulkan penambahan tenaga fungsional yang memiliki standar auditorium dan P2UPD</p> <p>c. Membagi personil dengan memetakan kegiatan pengawasan di luar program</p> <p>d. Melakukan monitoring serta pembinaan pada saat PKPT atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan melakukan Rakorwas</p>	<p>a. Tahun 2017 & 2018</p> <p>b. Tahun 2017 & 2018</p> <p>c. Tahun 2017 & 2018</p> <p>d. Tahun 2017 & 2018</p>
6. Keuangan	<p>a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah</p> <p>b. Data pajak daerah yang belum akurat</p> <p>c. Kurang atau rendahnya kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah</p> <p>d. Sebagian Dana Transfer yang tidak tersalur</p>	<p>a. Memberikan penyuluhan/ informasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik dan sebagainya</p> <p>b. Melaksanakan pendataan (pemutakhiran data) pajak</p> <p>c. Melaksanakan study komparatif, tukar informasi pengelolaan keuangan daerah</p> <p>d. Kegiatan yang dananya dari DAK fisik agar dilaksanakan terlebih dahulu untuk mempercepat penyaluran dana DAK dari</p>	<p>a. Tahun 2017 dan seterusnya</p> <p>b. Tahun 2017 dan seterusnya</p> <p>c. Tahun 2017 dan 2018</p> <p>d. Tahun 2017 dan seterusnya</p>



URUSAN	PERMASALAHAN (ISU STRATEGIS) YANG DIHADAPI	PEMECAHAN MASALAH	
		RENCANA SOLUSI	RENCANA PELAKSANAAN
		Pemerintah Pusat (agar dana DAK fisik tidak hangus)	
		Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menyalurkan DBH pajak dan bukan pajak dari pusat dan pajak-pajak daerah dari Provinsi	
	e. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia masing- masing OPD yang memahami mekanisme pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan	e. Perlu diadakan Bintek dan pembinaan Pengelolaan Keuangan	e. Tahun 2017 dan 2018
	f. Dibutuhkan SDM yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi sekaligus mahir IT	f. Penataan/ rekrutmen staf dengan kualifikasi sarjana akuntansi yang mempunyai keahlian IT untuk ditempatkan di bagian yang mengani keuangan	f. Tahun 2018 dan 2019
	g. Belum paripurna aplikasi yang tersedia untuk menyajikan laporan keuangan yang memadai	g. Perlu penyempurnaan/ pembahasan aplikasi pengelolaan keuangan	g. Tahun 2018

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian Tahun 2017 – 2018. Gambaran tentang kerangka kemampuan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah, karena sebagai sumber kekuatan untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya gambaran tersebut maka suatu daerah diharapkan bisa mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJMD 2013 - 2018. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Magetan Tahun 2018 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2018. Arah pembangunan perekonomian diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB, juga pada sektor yang memiliki prospek ke depan yang baik serta tahan terhadap gejolak ekonomi.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 arah kebijakan ekonomi daerah diprioritaskan pada arah kebijakan pembangunan tahun 2018 yang merupakan tahun kelima dari periodisasi RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 adalah “pencapaian pertumbuhan ekonomi (agrobisnis) melalui penguatan kerjasama antar daerah dan swasta dalam rangka perluasan pasar produk agribisnis”. Indikasi capaian dalam arah kebijakan ini adalah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pasar produk agrobisnis.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisi perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi daerah adalah Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB), Struktur Ekonomi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Laju Inflasi, Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan Tahun 2016 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Tahun 2015 sebesar Rp. 10,827 triliun , dan tahun 2016 sebesar Rp. 11,398 triliun atau terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 %. Hal tersebut terinci dalam tabel berikut :

TABEL 3.1
NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2014 – 2015

Sektor	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan (%)	
	2014	2015	2016	2015	2016
PRIMER					
1. Pertanian	3.271.262,6	3.372.496,4	3.484.867,9	3,09	3,33
2. Pertambangan dan penggalian	166.163,0	170.388,4	173.937,6	2,54	2,08
SEKUNDER					
3. Industri Pengolahan	1.003.981,8	1.056.521,1	1.116.905,4	5,23	5,72
4. Pengadaan Listrik dan Gas	7.175,5	7.105,9	7.352,5	-0,97	3,47
5. Air Bersih	24.400,5	25.358,6	26.094,2	3,93	2,90
6. Konstruksi	819.750,6	852.908,8	899.507,5	4,04	5,46
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	1.527.098,3	1.645.809,4	1.767.679,7	7,77	7,40
8. Transportasi dan Pergudangan	144.829,0	156.281,6	168.914,9	7,91	8,08
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	264.278,3	283.860,3	305.588,5	7,41	7,65
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	415.213,2	447.684,8	485.198,7	7,82	8,38
11. Informasi dan Komunikasi	771.782,5	837.717,1	904.583,7	8,54	7,98
12. Real Estate	150.562,3	158.337,3	166.684,8	5,16	5,27
13. Jasa Perusahaan	34.757,3	36.843,0	38.799,4	6,00	5,31
14. Administrasi Pemerintahan	828.707,5	858.292,3	887.961,6	3,57	3,46
15. Jasa Pendidikan	423.471,5	450.392,4	476.552,9	6,36	5,81
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	88.651,7	93.889,3	98.820,2	5,91	5,25
17. Jasa – jasa lainnya	349.598,0	370.032,3	388.681,9	5,85	5,04
PDRB	10.291.83,5	10.823.919,1	11.398.131,4	5,17	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

b. Struktur Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,31%. Tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, industry pengolahan, serta sektor jasa-jasa menjadi penyumbang terbesar perekonomian di Kabupaten Magetan.

Sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Magetan, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 138.836 orang atau

sebesar 22 persen dari total penduduk yang bekerja. Dengan serapan tenaga kerja yang cukup besar, serta didukung luas lahan pertanian yang mencapai 65,53 persen dari total wilayah, maka cukup wajar apabila perekonomian Kabupaten Magetan saat ini lebih bercorak agraris.

TABEL 3.2
STRUKTUR PEREKONOMIAN KAB. MAGETAN

Sektor	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
PRIMER					
1. Pertanian	34,32	34,44	34,59	34,28	33,65
2. Pertambangan dan penggalian	1,67	1,59	1,65	1,61	1,55
SKUNDER					
3. Industri Pengolahan	9,64	9,58	9,65	9,62	9,65
4. Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
5. Air Bersih	0,23	0,21	0,20	0,19	0,18
6. Konstruksi	7,77	7,77	7,91	7,71	7,78
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	13,96	14,18	13,98	14,21	14,76
8. Transportasi dan Pergudangan	1,19	1,24	1,32	1,37	1,40
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,32	2,51	2,60	2,65	2,71
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,72	3,88	4,10	4,20	4,37
11. Informasi dan Komunikasi	6,40	6,48	6,31	6,34	6,42
12. Real Estate	1,37	1,39	1,37	1,39	1,37
13. Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33
14. Administrasi Pemerintahan	9,10	8,48	7,79	7,72	7,67
15. Jasa Pendidikan	4,11	4,08	4,18	4,15	4,08
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	0,76	0,78	0,83	0,85	0,85
17. Jasa – jasa lainnya	3,06	3,03	3,15	3,23	3,18
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

c. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, modal teknologi, kebijakan pemerintah dan tentunya situasi keamanan wilayah.

Secara umum kondisi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Magetan tahun 2012 – 2016 sangat fluktuatif, mengalami pelambatan pada tahun 2014 dan 2015, namun kembali meningkat positif pada tahun 2016, karena sangat dipengaruhi kondisi perekonomian regional dan nasional.

Pertumbuhan ekonomi menurut sektor digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan setiap sektor. Dalam lima tahun terakhir, sektor dengan rata-rata pertumbuhan paling tinggi adalah sektor komunikasi dan informasi yaitu sebesar 7-10% disusul sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,79% serta penyedia akomodasi dan makanan minuman sebesar 8,37%. Sedangkan sektor pertanian, meski penyumbang terbesar PDRB, namun pertumbuhannya sangat kecil. Secara rinci

pertumbuhan ekonomi Magetan per sektor tahun 2012 – 2016 sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 3.3
PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR
TAHUN 2012 – 2016

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
PRIMER					
1. Pertanian	4,42	3,28	3,03	3,09	3,33
2. Pertambangan dan penggalian	0,98	1,46	3,01	2,54	2,08
SKUNDER					
3. Industri Pengolahan	4,43	5,94	5,48	5,23	5,72
4. Listrik dan Gas	10,39	6,06	8,79	-0,97	3,47
5. Air Bersih	4,72	4,23	2,65	3,93	2,90
6. Konstruksi	6,30	6,26	6,73	4,04	5,46
TERSIER					
7. Perdagangan Besar dan Eceran	8,47	8,61	6,24	7,77	7,40
8. Transportasi dan Pergudangan	6,84	10,46	11,00	7,91	8,08
9. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,77	13,90	8,24	7,41	7,65
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,01	9,08	8,56	7,82	8,38
11. Informasi dan Komunikasi	13,21	12,17	8,11	8,54	7,98
12. Real Estate	6,64	7,44	7,23	5,16	5,27
13. Jasa Perusahaan	4,43	6,41	9,40	6,00	5,31
14. Administrasi Pemerintahan	1,57	1,33	0,47	3,57	3,46
15. Jasa Pendidikan	5,60	6,54	6,63	6,36	5,81
16. Jasa Kesehatan dan Sosial	7,09	7,06	13,43	5,91	5,25
17. Jasa – jasa lainnya	4,08	6,88	7,44	5,85	5,04
PDRB	5,79	5,85	5,10	5,17	5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

Sejak tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan terus mengalami penurunan. Penurunan ini seiring dengan pelemahan ekonomi nasional yang juga mengalami tren penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun melihat kondisi terakhir, dimana perekonomian sudah mulai pulih, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan tahun 2017 diharapkan mampu mencapai 5,3%. Sedangkan pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 5,4%.

d. Inflasi

Laju inflasi menunjukkan perkembangan harga konsumen atau mencerminkan kestabilan nilai tukar rupiah. Perkembangan inflasi di Kabupaten Magetan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti ketersediaan bahan pokok, kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat serta kondisi Perekonomian global. Pemerintah Kabupaten Magetan selalu berusaha menjaga agar laju inflasi senantiasa terkendali sehingga kemampuan daya beli Masyarakat tetap terjaga.

Selama lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Magetan cukup stabil yaitu berada pada angka 4 – 5% sehingga laju perkembangan di

tingkat produsen cukup terkendali. Meskipun harga BBM berubah sesuai mekanisme pasar, Pemerintah Pusat masih mampu mengendalikan gejolak harga sehingga laju inflasi tidak mencapai angka dua digit. Khususnya Kabupaten Magetan, pada tahun 2016 dapat terkendali hingga mencapai 3,94%.

Selanjutnya, untuk Tahun 2017 Inflasi Kabupaten Magetan diperkirakan masih berada pada kisaran 4 – 5%. Demikian juga untuk Tahun 2018 diproyeksikan juga masih pada angka yang sama. Inflasi di Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.34
NILAI INFLASI RATA-RATA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi	4,35	4,88	5,67	5,04	3,94	4,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat. Angka PDRB perkapita sebenarnya belum bisa menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima masing-masing penduduk. Namun demikian PDRB perkapita masih cukup relevan untuk mengetahui apakah secara rata-rata pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.5
KOMPOSISI PENDAPATAN PERKAPITA BERDASARKAN PDRB AHK DAN ADHB

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	10.190.344,88	11.312.916,83	12.564.000,08	13.880.128,09	15.192.946,45
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	9.251.243,03	9.792.634,95	10.291.683,51	10.823.919,09	11.398.131,44
3. Jumlah Penduduk (Hasil Proyeksi SP 2010)	624.373	625.703	626.614	627.413	627.984
4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	16.320.924,97	18.080.330,18	20.050.621,40	22.122.793,26	24.193.206,28
5. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan	14.816.853,12	15.650.612,11	16.424.279,55	17.251.665,32	18.150.353,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

f. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Magetan pada tahun 2015 sebanyak 331.493 jiwa. Dalam kurun waktu 2011 – 2015 angka kesempatan kerja di Kabupaten Magetan selalu mengalami penurunan, yaitu dari 96,74 persen pada tahun 2011 menjadi 93,95 persen

pada tahun 2015. Ini artinya dalam kurun waktu tersebut telah terjadi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,16 persen pada tahun 2011 menjadi 6,05 persen pada tahun 2015.

g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/ masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM Kabupaten Magetan berdasarkan perhitungan standart tahun 2010 selama periode lima tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu dari 68,52 pada tahun 2010 menjadi 71,94 pada tahun 2016. IPM yang dibentuk atas 4 komponen yakni Angka Harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita ini mengalami peningkatan cukup berarti.

TABEL 3.6
REALISASI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MAGETAN

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,79	71,87	71,91	72,01	72,09
2. Harapan lama Sekolah (Tahun)	12,54	12,57	12,77	13,60	13,71
3. Rata2 Lama Sekolah (Tahun)	7,33	7,43	7,55	7,65	7,66
4. Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	10.375	10.484	10.539	10.594	10.988
IPM Kab. Magetan	69,56	69,86	70,29	71,39	71,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

Dari hasil perhitungan angka IPM se Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Magetan termasuk dalam kabupaten/kota yang mempunyai IPM diatas angka IPM Provinsi Jawa Tmur. Dalam dua tahun terakhir peringkat IPM Kabupaten Magetan menempati posisi ke 12 dan 11 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

TABEL 3.7
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MAGETAN DAN JAWA TIMUR TAHUN 2011 - 2015

No	Tahun	Magetan	Jawa Timur	Peringkat Magetan Di Jatim
1.	2012	69,56	66,74	11
2.	2013	69,86	67,55	12
3.	2014	70,29	68,14	12
4.	2015	71,39	68,95	11
5.	2016	71,94	69,74	11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Magetan tahun 2017; (tahun dasar 2010)

h. Investasi

Investasi memegang peranan penting dalam perekonomian suatu daerah namun demikian sampai dengan saat ini di Kabupaten Magetan belum ada investasi yang berasal dari PMDN maupun PMA yang ada baru investasi yang bersifat lokal.

TABEL 3.8
PERKEMBANGAN INVESTASI KAB. MAGETAN

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai investasi non PMDN/ PMA (Juta Rupiah)	132.276	120.472	148.916	190.078	242.565

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Magetan pada tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian regional Jawa Timur dan Nasional serta Global, maka perekonomian Magetan selama tahun 2017 diperkirakan mampu bertumbuh secara dinamis.

Kondisi perekonomian Kabupaten Magetan pada Tahun 2017 diprediksi sebagai berikut :

TABEL 3.9
PROYEKSI PEREKONOMIAN KAB. MAGETAN TAHUN 2017

NO	URAIAN	TAHUN 2016	PROYEKSI 2017
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,31%	5,4%
2	Laju Inflasi	3,94%	< 5%
3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (dalam Juta Rupiah)	Rp.15.192.946,45	Rp.16.300.000
4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 (dalam Juta Rupiah)	Rp.11.398.131,4	Rp.11.750.000
5	Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp.24.193.000,00	Rp.25.500.000,00
6	Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	Rp.18.150.000,00	Rp.18.700.000,00

3.2 Analisis Kebijakan Keuangan Daerah

Analisis kondisi ekonomi daerah digunakan sebagai salah satu input utama untuk membuat analisis keuangan daerah. Dalam RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 memuat proyeksi kemampuan APBD Kab. Magetan tiap tahun, meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Proyeksi kemampuan APBD dalam RPJMD dijadikan dasar analisis keuangan daerah, terutama analisis kemampuan keuangan daerah tahun direncanakan. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui.

Penghitungan kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Evaluasi penghitungan keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar perhitungan dilakukan untuk tahun rencana. Evaluasi dilakukan dengan mempelajari dokumen RPJMD pada bagian kerangka pendanaan/ penghitungan kapasitas keuangan daerah. Pemahaman atas perhitungan kapasitas keuangan daerah ini menjadi dasar penentuan dan perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana.

Kondisi keuangan daerah selama periode RPJMD Kab. Magetan, tersaji dalam tabel berikut :

TABEL 3.10
KONDISI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH TERHADAP KERANGKA PENDANAAN RPJMD

No.	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target RPJMD	APBD	Target RPJMD	APBD	Target RPJMD	Target P-APBD*	Target RPJMD	Target RKPD
I	PENDAPATAN DAERAH	1.409.442.105.436	1.544.927.313.562	1.503.698.019.504	1.778.605.341.363	1.610.404.707.621	1.713.370.762.612	1.729.450.309.489	1.558.203.321.816
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	115.836.911.000	164.564.899.426	116.151.843.630	145.800.000.000	117.578.012.066	193.686.220.710	119.037.642.186	152.454.713.498
1	Pajak daerah	31.428.000.000	33.753.964.990	31.535.000.000	33.085.000.000	32.115.000.000	37.455.000.000	32.720.000.000	40.915.000.000
2	Retribusi daerah	17.493.263.000	20.017.394.985	17.668.195.630	16.162.175.500	17.844.877.586	20.880.592.000	18.023.326.362	20.780.864.500
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.868.701.000	2.334.748.993	2.868.701.000	2.033.151.125	2.897.388.010	2.042.634.460	2.926.361.890	2.238.166.618
4	Lain-lain PAD yang sah	64.046.947.000	108.458.790.458	64.079.947.000	94.519.673.375	64.720.746.470	133.307.994.250	65.367.953.934	88.520.682.380
B	DANA PERIMBANGAN	1.029.294.462.679	985.585.834.300	1.122.755.980.408	1.089.106.637.331	1.225.468.970.625	1.231.379.507.234	1.338.357.633.785	1.111.806.018.901
1	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	46.234.225.979	49.911.643.300	46.696.568.238	59.008.831.331	47.163.533.920	55.101.037.266	47.635.169.259	43.099.302.901
3	Dana Alokasi Umum	924.095.256.700	856.278.521.000	1.016.504.782.370	916.052.436.000	1.118.155.260.607	899.395.394.631	1.229.970.786.668	899.960.340.000
4	Dana Alokasi Khusus	58.964.980.000			114.045.370.000		276.883.075.337	60.751.677.858	168.746.376.000
	- Dak fisik		79.395.670.000	59.554.629.800	114.045.370.000	60.150.176.098	69.191.369.000	60.751.677.858	0
	- DAK non-fisik	-	-	-	-	-	207.691.706.337	-	168.746.376.000
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	264.310.731.757	394.776.579.836	264.790.195.466	543.698.704.032	267.357.724.930	288.305.034.668	272.055.033.518	293.942.589.417
1	Dana bagi hasil pajak dari propinsi	47.946.370.973	78.068.418.884	48.425.834.682	63.418.964.162	48.910.093.029	97.233.400.668	49.399.193.959	69.601.855.417
2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	208.327.111.784	282.090.755.000	208.327.111.784	472.770.250.870	210.410.382.901	169.734.334.000	214.618.590.559	169.734.334.000
3	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	8.000.000.000	20.842.063.000	8.000.000.000	1.472.240.000	8.000.000.000	18.337.300.000	8.000.000.000	1.971.800.000
4	Pendapatan lainnya	37.249.000	651.782.000	37.249.000	37.249.000	37.249.000	0	37.249.000	0
5	Bagi hasil dari Pemerintah Pusat	0	9.176.560.952	0	4.000.000.000	0	0	0	0
6	Hibah	0	3.947.000.000	0	2.000.000.000	0	3.000.000.000	0	3.000.000.000
7	Dana BOS (APBN)								49.634.600.000
II	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.094.421.054	236.769.986.663	26.036.980.195	101.544.463.757	27.104.047.076	57.959.204.447	43.294.503.095	52.585.080.171
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	14.094.421.054	223.224.008.481	15.036.980.195	87.094.463.757	16.104.047.076	46.948.204.447	17.294.503.095	32.585.080.171
2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	11.000.000.000	13.545.978.182	11.000.000.000	14.450.000.000	11.000.000.000	11.011.000.000	11.000.000.000	0
3	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	20.000.000.000
Total Kapasitas Daerah		1.434.536.526.490	1.781.697.300.225	1.503.735.268.504	1.880.149.805.120	1.610.441.956.621	1.771.329.967.060	1.772.744.812.584	1.610.788.401.987

No.	Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target RPJMD	APBD	Target RPJMD	APBD	Target RPJMD	Target P-APBD*	Target RPJMD	Target RKPD
III	BELANJA TIDAK LANGSUNG	957.417.099.026	1.198.428.938.813,96	1.011.541.680.981	1.286.456.828.698	1.071.719.202.881	1.102.512.973.905	1.163.426.613.654	1.122.169.804.495
1	Gaji dan tunjangan PNSD	635.909.106.086	642.658.422.122,96	680.422.742.512	674.280.961.979	728.052.334.487	575.825.592.417	779.015.997.901	592.297.772.732
2	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.000.000.000	3.827.000.000	4.250.000.000	3.827.000.000	4.350.000.000	12.972.948.475	4.500.000.000	20.853.330.432
3	Insentif pemungutan pajak daerah	1.571.400.000	1.610.050.000	1.576.750.000	1.654.250.000	1.605.750.000	1.762.500.000	1.636.000.000	2.045.750.000
	Biaya pemungutan pajak daerah		300.000.000		300.000.000		127.500.000		300.000.000
4	Insentif pemungutan retribusi daerah	874.663.150	1.195.876.555	883.409.781	1.080.404.925	892.243.879	1.033.708.405	901.166.318	1.039.043.225
5	Tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD	208.327.111.784	349.295.936.870	208.327.111.784	346.487.635.370	210.410.382.901	195.573.240.823	214.618.590.559	168.746.376.000
6	Belanja bantuan kepada partai politik	858.048.111	1.009.492.866	900.000.000	1.009.492.866	950.000.000	1.083.449.115	1.000.000.000	1.009.492.866
7	Alokasi Dana Desa	100.876.769.895	97.294.055.400	110.181.666.904	97.506.126.779	120.458.491.614	103.929.990.650,00	131.754.858.876	100.475.550.740
	Dana Desa	0	56.708.716.000	0	127.243.618.000	0	162.234.334.000	0	162.234.334.000
	Bantuan Keuangan Kepada Desa		8.146.624.000	0	4.025.213.779	0	0	0	12.294.000.000
8	Tunjangan perangkat desa	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Belanja Hibah		32.790.765.000	0	24.022.125.000	0	32.314.610.000	0	27.387.500.000,00
	Hibah Pilkada	0	0	0	0	0	11.477.000.000	25.000.000.000	28.170.652.000
10	Belanja tak terduga	5.000.000.000	3.550.000.000	5.000.000.000	3.900.000.000	5.000.000.000	3.250.000.000	5.000.000.000	4.000.000.000
11	Belanja lainnya	0	42.000.000	0	1.120.000.000	0	928.100.020	0	816.502.500
IV	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000	25.285.000.000	14.500.000.000	17.460.000.000	10.000.000.000	23.440.000.000	2.500.000.000	7.500.000.000
	Penyertaan modal	7.500.000.000	4.617.000.000	7.000.000.000	2.260.000.000	2.500.000.000	8.240.000.000	2.500.000.000	7.500.000.000
	Pembentukan dana cadangan	0	10.000.000.000	7.500.000.000	0	7.500.000.000	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	10.668.000.000		15.200.000.000		15.200.000.000		0
	Jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama	964.917.099.026	1.223.713.938.813,96	1.026.041.680.981	1.303.916.828.698	1.081.719.202.881	1.125.952.873.905	1.165.926.613.654	1.129.669.804.495

TABEL 3.11
KONDISI KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH TERHADAP KERANGKA PENDANAAN RPJMD

Uraian	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Target RPJMD	Realisasi APBD	Target RPJMD	Realisasi APBD*	Target RPJMD	Target P-APBD	Target RPJMD	Target RKPD
Total kapasitas daerah	1.409.442.105.436	1.544.927.313.562	1.503.698.019.504	1.778.605.341.363	1.610.404.707.621	1.771.329.967.060	1.729.450.309.489	1.610.788.401.987
Dikurangi pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama	964.917.099.025,50	1.223.713.938.813,96	1.026.041.680.980,70	1.303.916.828.698	1.081.719.202.881	1.125.952.873.905	1.165.926.613.653,60	1.129.669.804.495
- Belanja tidak langsung	957.417.099.026	1.198.428.938.813,96	1.011.541.680.981	1.286.456.828.698	1.071.719.202.881	1.102.512.973.905	1.163.426.613.654	1.121.645.804.495
- Pengeluaran pembiayaan	7.500.000.000	25.285.000.000	14.500.000.000	17.460.000.000	10.000.000.000	23.440.000.000	2.500.000.000	7.500.000.000
Kapasitas riil keuangan daerah	444.525.006.410,50	321.213.374.748,04	477.656.338.523,30	474.688.512.665,00	528.685.504.740	633.900.093.155	563.523.695.835,40	481.118.597.492

Dari data kondisi keuangan daerah dalam perodesasi RPJMD diatas, diperoleh hasil evaluasi capaian keuangan daerah sebagai berikut :

TABEL 3.12
CAPAIAN KEUANGAN DAERAH DIBANDING PROYEKSI DALAM RPJMD

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	Ket.
I	PENDAPATAN DAERAH	110%	118%	106%	90%	
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142%	126%	165%	128%	
1	Pajak daerah	107%	105%	117%	125%	
2	Retribusi daerah	114%	91%	117%	115%	
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	81%	71%	70%	76%	
4	Lain-lain PAD yang sah	169%	148%	206%	135%	
B	DANA PERIMBANGAN	96%	97%	100%	83%	
1	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	108%	126%	117%	90%	
3	Dana Alokasi Umum	93%	90%	80%	73%	
4	Dana Alokasi Khusus :					
	- Dak fisik	135%	191%	115%	Blm proyeksi	
	- DAK non-fisik	-	Over Target	Over Target	Over Target	
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149%	205%	108%	108%	
1	Dana bagi hasil pajak dari propinsi	163%	131%	199%	141%	
2	Dana penyesuaian dan otsus	135%	227%	81%	79%	
3	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	261%	18%	229%	25%	
4	Pendapatan lainnya	1750%	100%	0%	0,00%	
5	Bagi hasil dari Pemerintah Pusat	Over Target	Over Target	Over Target	Over Proyeksi	
6	Hibah	Over Target	Over Target	Over Target	Over Proyeksi	
7	Dana BOS (APBN)				Over Proyeksi	in-out
II	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	944%	390%	214%	110%	
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	1584%	579%	292%	188%	
2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	123%	131%	100%	0%	
3	Pencairan dana cadangan	100%	100%	100%	133%	
Total Kapasitas Daerah		126%	125%	110%	93%	
III	BELANJA TIDAK LANGSUNG	125%	127%	103%	96%	
1	Gaji dan tunjangan	101%	99%	79%	76%	
2	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	96%	90%	298%	463%	
3	Insentif pemungutan pajak daerah	102%	105%	110%	125%	
	Biaya pemungutan pajak daerah	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
4	Insentif pemungutan retribusi daerah	137%	122%	116%	115%	
5	Tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD	168%	166%	93%	79%	
6	Belanja bantuan kepada parpol	118%	112%	114%	101%	
7	Alokasi Dana Desa	96%	88%	86%	76%	
	Dana Desa	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
	Bantuan Keuangan Kepada Desa	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
8	Tunjangan perangkat desa	100%	100%	100%	100%	
9	Belanja Hibah	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
	Hibah kepada PILKADA	100%	100%	Over Proyeksi	113%	
10	Belanja tak terduga	71%	78%	65%	80%	
11	Belanja lainnya	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
IV	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	337%	120%	262%	234%	
	Penyertaan modal	62%	32%	240%	330%	
	Pembentukan dana cadangan	Over Proyeksi	0%	67%	0%	
	Pemberian Pinjaman Daerah	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	Over Proyeksi	
Jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama		127%	127%	119%	97%	

TABEL 3.13
CAPAIAN KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH DIBANDING PROYEKSI DALAM RPJMD

No	Uraian	APBD 2015	APBD 2016	P-APBD 2017	RKPD 2018	Keterangan
1	Total kapasitas daerah	110%	118%	110%	93%	
2	Dikurangi pengeluaran wajib, mengikat serta prioritas utama	127%	127%	119%	97%	
	- Belanja tidak langsung	125%	127%	103%	96%	
	- Pengeluaran pembiayaan	337%	120%	262%	300%	
Kapasitas riil keuangan daerah		72%	99%	120%	85%	

Secara umum, capaian pendapatan daerah dan kemampuan kapasitas keuangan daerah tahun 2015 – 2017 terus mengalami peningkatan, dan selalu diatas target yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan pelampauan rata-rata sekitar 10%, juga kapasitas riil keuangan daerah pada tahun tersebut terus mengalami peningkatan namun secara prosentase terhadap RPJMD fluktuatif. Mengacu kepada asumsi realisasi APBD tahun 2017, pada proyeksi tahun 2018, maka capaian pendapatan daerah, kemampuan kapasitas keuangan daerah serta kapasitas riil keuangan daerah mengalami penurunan dibandingkan proyeksi dalam RPJMD pada tahun berkenaan dengan capaian sekitar 85%. Penurunan asumsi kemampuan keuangan daerah pada tahun 2018, mengharuskan penyusunan belanja daerah disusun sangat cermat dan hati-hati, menjaga program prioritas daerah tetap dapat berjalan dan target capaian kinerja pemerintahan daerah dapat tetap tercapai sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

Pendapatan dan struktur kapasitas keuangan daerah sangat dipengaruhi perkembangan aturan Perundang-undangan, sehingga banyak mengalami penyesuaian. Namun yang paling utama adalah kemampuan kapasitas riil keuangan daerah untuk belanja pembangunan terus meningkat, sehingga dapat dilaksanakan percepatan-percepatan pembangunan dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD, dan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kab. Magetan.

3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2017 dan Tahun 2018

Berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Magetan pada tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan perekonomian regional Jawa Timur dan Nasional, maka perekonomian Magetan selama tahun 2017 diperkirakan mampu tumbuh dengan baik.

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Magetan di tahun 2017 dan tahun 2018 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal dan nilai tukar dimana harga - harga komoditas terus berubah cenderung merangkak naik.

Kondisi perekonomian nasional secara umum pada kuartal pertama tahun 2017 menunjukkan tren membaik. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% atau lebih tinggi dibandingkan kuartal yang sama pada tahun 2016 yang hanya sebesar 4,9%. Perkembangan positif ini disebabkan adanya perbaikan kinerja ekspor dan impor serta kinerja sektoral yang semakin meningkat.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh sektor pertanian dan sektor-sektor jasa. Kinerja positif tersebut diperkirakan dapat berlanjut di tahun 2017 sejalan dengan harga komoditas yang diperkirakan membaik, serta perbaikan infrastruktur dan iklim investasi.

Dengan perkembangan itu semua, Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,2 persen dalam APBN Perubahan, atau lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan dalam APBN tahun 2017 sebesar 5,1 persen.

Namun demikian, untuk laju inflasi pada tahun 2017 diperkirakan masih tinggi yaitu berada pada angka 4,3% atau lebih tinggi dibandingkan asumsi inflasi APBN tahun 2017 sebesar 4,0%. Sedangkan untuk nilai tukar rupiah, hingga akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai rata-rata sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat. Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan asumsinya dalam APBN tahun 2017 sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat.

Selanjutnya untuk tahun 2018, sebagaimana disampaikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019), Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2018 ditargetkan sebesar 6,1 % yang mana lebih tinggi dari proyeksi Bank Indonesia yang mematok target pertumbuhan sebesar 5,1%-5,5%. Target sebaran Pertumbuhan ekonomi Nasional per wilayah : Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa sebesar 6,23 persen; Bali-Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen. Target Ekonomi 2018. Dari sisi Produksi,

Pemerintah mengandalkan kenaikan tertinggi pada sektor Informasi dan Komunikasi yang ditarget tumbuh sekitar 10,5%-11,9%

Sementara itu, untuk target inflasi 2018 ditetapkan pada kisaran angka 3,5% untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Angka tersebut sama dengan yang diproyeksikan Bank Indonesia yaitu 3,5% plus minus 1%. Kemudian untuk asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diproyeksikan masih berkisar antara 13.500-13.800.

Selanjutnya untuk tingkat regional Provinsi, Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2017 diperkirakan berada pada kisaran 5,56-5,86 atau setidaknya sedikit lebih tinggi dari capaian tahun 2016 yang berada pada angka 5,55%, angka ini juga lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,2%. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu berada di atas Pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan untuk Tahun 2018, Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditargetkan 5,61%-5,96%, sedikit lebih rendah dari Target Nasional yang mencapai 6,1%. Namun angka ini lebih realistis mengingat Prediksi yang ditetapkan Bank Indonesia untuk untuk Ekonomi Nasional hanya berkisar pada angka 5,1%-5,5%.

Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2017 dan 2018 Kabupaten Magetan diperkirakan sebagai berikut :

- a. Sektor Pertanian diperkirakan masih menjadi penopang utama dalam kontribusi PDRB Kabupaten Magetan pada tahun 2017 dan 2018, hal ini didukung dengan masih tingginya jumlah penduduk yang menggantungkan diri pada sektor tersebut serta luas lahan Pertanian yang mencapai 65% dari luas Wilayah. Sektor ini perlu menjadi perhatian khusus pembangunan kabupaten Magetan. Hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan produktifitas hasil pertanian. Kedua, membantu menjaga stabilitas harga produk sehingga harga tidak jatuh saat musim panen tiba. Ketiga, menambah nilai jual produk dengan mendorong pertumbuhan industri pengolahan.
- b. Begitu pesatnya perkembangan teknologi digital serta menjamurnya penggunaan media komunikasi berbasis internet, diperkirakan akan mendongkrak nilai perdagangan bruto melalui pasar elektronik (E-Commerce). Hal ini menjadi peluang strategis Produk Kabupaten Magetan untuk menjangkau pasar lebih luas dan lebih mudah, tidak hanya antar daerah, namun juga lintas negara.

- c. Masih berkaitan dengan perkembangan teknologi sebagaimana poin b, masifnya penggunaan media sosial di semua kalangan juga membawa angin segar untuk kemajuan sektor wisata serta industri yang mengikutinya. Media sosial secara tidak langsung ikut mempromosikan obyek-obyek wisata kepada masyarakat yang lebih luas. Hal ini tentu saja berdampak signifikan pada jumlah kunjungan wisata di wilayah kabupaten Magetan. Selain obyek wisata unggulan seperti Telaga Sarangan, obyek wisata alam lain bertema Desa Wisata perlu mendapat perhatian dan dukungan serius dari pemerintah, karena potensi dan tingkat keamajuannya beberapa tahun terakhir cukup menjanjikan sehingga akan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.
- d. Dengan berbagai prospek dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2017 dan 2018, maka Pemerintah Daerah perlu memastikan kesiapan ketrampilan masyarakat, kesiapan infrastruktur serta dukungan kebijakan pembangunan guna mewujudkan ekonomi Kabupaten Magetan yang tangguh.

3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Magetan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan. Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Magetan melalui RKPD maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah. Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing-masing susunan/struktur APBD dimaksud.

Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Magetan telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan diarahkan pada :

- a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap.
- b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya.
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah cermin pembiayaan pembangunan daerah, sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dimana semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah.

Peningkatan penerimaan Pendapatan daerah diperlukan kebijakan yang dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang dan terukur

serta mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat terhadap struktur dan kondisi masyarakat sebagai pelaku (kontributor / wajib pajak / wajib retribusi).

Sumber Pendapatan atau Penerimaan Daerah meliputi :

- a. Pajak daerah,
- b. Retribusi daerah,
- c. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Peningkatan pendapatan asli daerah terutama dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan kebijakan yang betul-betul dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang terhadap struktur dan kondisi wajib pajak dan wajib retribusi.

Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah (PAD) dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya pelaksanaan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam meningkatkan, menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah secara maksimal.

Beberapa kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 difokuskan pada :

a. *Intensifikasi*, melalui :

Pemutakhiran Data (Review Data/Updating Data) Obyek/Subyek Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat memberikan peningkatan yang dinamis (Target Pelaksanaan 5 Tahun). Sebagai salah satu langkah terobosan dalam meningkatkan PAD adlah dilakukan digitalisasi sistem pemungutan retribusi dengan penerapan *E-Ticketing* pada kawasan obyek wisata sehingga meminimalkan kebocoran dan penyalahgunaan potensi pendapatan.

b. *Ekstensifikasi*, melalui :

Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya dengan cara penyesuaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria masing-masing sektor/unsur/pos pendapatan asli daerah.

c. *Diversifikasi* (penggabungan / inovasi,) melalui :

Program kerjasama antar daerah, antar SKPD, antar pelaku usaha/swasta, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa unsur PAD baik Pajak, Retribusi maupun Pendapatan lainnya.

Pada rencana target PAD Tahun 2018 Pemerintah Daerah berupaya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, ini terbukti realisasi dari tahun ke tahun PAD selalu mengalami peningkatan.

1. Pajak Daerah

Pendapatan daerah dari sector pajak diproyeksikan mengalami kenaikan pada beberapa obyek yaitu :

a) Pajak Restoran

Meningkatnya potensi pada jasa boga / *catering*

b) PBB-P2

Program / kegiatan pemutakhiran data PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan potensi penerimaan

c) BPHTB

Adanya kerja sama dengan notaris (PPAT) Kabupaten Magetan dan perhitungan penetapan berdasarkan pada harga pasar.

2. Retribusi Daerah

Diproyeksikan meningkat dengan dilakukan pengawasan (supervisor) pemungutan, antara lain :

a) Retribusi Pelayanan Pasar Umum

Adanya penyesuaian tarif sesuai Perda.

b) Retribusi Tempat Rekreasi

Meningkatnya jumlah kunjungan di kawasan wisata Sarangan.

c) Retribusi Parkir Khusus Pasar

Dampak bertambahnya orang yang datang ke pasar akan menambah penerimaan parkir.

d) Retribusi Tempat parkir di Kawasan Wisata

Dampak jumlah kunjungan wisatawan berakibat penerimaan parkir akan meningkat.

3. Lain-lain PAD yang sah

Diproyeksikan mengalami kenaikan pada beberapa obyek yaitu :

a) Hasil usaha lembaga pembelian gabah (LPG)

Kenaikan tersebut karena adanya penambahan pinjaman (penyertaan modal).

b) Penerimaan lainnya

Kenaikan tersebut antara lain dari :

- Denda Capil.

Denda keterlambatan atas pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil baik Akta Perkawinan maupun Perceraian.

- Setor kembali.
- Temuan hasil pemeriksaan.
- Sewa eks bengkok Kelurahan.

Dari beberapa unsur pajak, retribusi maupun dari lain-lain PAD yang sah yang mengalami peningkatan, penurunan maupun tetap, Pemerintah Daerah akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi secara kontinu.

2) Dana Transfer (perimbangan)

Penganggaran dana transfer akan mengacu pada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018, dan dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum diterbitkan maka akan mengacu pada informasi resmi oleh Kementerian Keuangan, dan apabila kedua acuan tersebut belum diterbitkan maka mengacu pada alokasi tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan transfer ke daerah, terdapat 4 alokasi dana, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya.

- Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan rilis resmi pada laman Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Penganggaran DAU Tahun Anggaran 2018, diproyeksikan sama dengan perolehan pada tahun 2017 setelah Perubahan APBD 2017.
- Dana Alokasi Khusus (DAK), yang terdiri dari DAK fisik dan DAK non fisik dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan prioritas nasional. Dengan diberlakukannya ketentuan baru bahwa perolehan DAK tahun berjalan tidak dapat dijadikan dasar penganggaran tahun direncanakan, melainkan realisasi pencairan DAK tahun berjalan menjadi dasar perolehan besaran DAK tahun direncanakan, sehingga proyeksi pendapatan dari sumber DAK masih diproyeksikan Rp.0,- (nol rupiah) atau belum dianggarkan dalam RKPD 2018, dan apabila pagu DAK sudah ditetapkan dari Pemerintah Pusat akan dilakukan penyesuaian dalam KUA – PPAS APBD 2018 atau dalam R-APBD 2018. Khusus alokasi DAK Non Fisik pos belanja

Tunjangan Profesi Guru PNSD dan tambahan penghasilan guru telah dianggarkan dalam RKPD tahun 2018, dengan proyeksi sama dengan perolehan tahun anggaran 2017.

- Dana Bagi Hasil dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Untuk pendapatan dana bagi hasil pajak/ bukan pajak mengacu peraturan menteri keuangan tentang perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak/ bukan pajak ke daerah tahun anggaran 2017. Besaran penganggaran tahun 2018 diproyeksikan turun sekitar 22%, termasuk kewajiban mengembalikan lebih bayar bagi hasil bukan pajak tahun sebelumnya.

3) Dana Transfer lainnya (Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah)

- Pendapatan hibah dialokasikan sama dengan perolehan tahun 2017
- Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi untuk sementara mengacu pada pagu tahun anggaran 2017 (setelah Perubahan APBD 2017) karena belum ada penetapan perolehannya dari Pemerintah Provinsi. Khusus dana bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) telah diadakan rekonsiliasi dan penetapan besaran alokasi.
- Dana Penyesuaian otonomi khusus, terdiri dari Dana Desa meski ada kecenderungan meningkat, namun untuk sementara mengacu perolehan tahun 2017 dan apabila nantinya ada perubahan akan disesuaikan dengan pagu definitif yang tercantum dalam peraturan dari pemerintah pusat. Dana Insentif Daerah (DID) sementara dialokasikan sama dengan perolehan tahun 2017. Sedang dana Tunjangan Profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru pindah ke rekening DAK non-fisik.
- Pajak Rokok, untuk sementara juga mengacu pada pagu tahun anggaran 2017 karena belum ada penetapan perolehannya dari pusat, selain itu juga mempertimbangkan realisasi pajak rokok tahun 2017.
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, sementara mengalokasikan sama dengan anggaran tahun 2017 untuk bantuan keuangan Provinsi yang bersifat rutin setiap tahun diberikan, sedangkan Bantuan keuangan untuk pembangunan belum dialokasikan, karena belum ada keputusan dari Gubernur Jatim.

3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan hukum, HAM dan politik.

Arah kebijakan belanja pembangunan daerah dalam RKPD Kab. Magetan tahun 2018, sebagai tahun terakhir perodesasi Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 adalah optimalisasi dan pementapan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target – target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Struktur APBD akan berbeda, namun karena peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut sampai dengan saat ini belum terbit, maka Struktur APBD masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja Kabupaten Magetan untuk tahun anggaran 2018 dikelompokkan menjadi:

- 1) **Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
belanja wajib yang harus dianggarkan sebelum menganggarkan untuk program/ kegiatan lainnya, yaitu belanja gaji dan tunjangan bagi PNSD, serta pengalokasian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD.

b. Belanja Hibah

Pengalokasian belanja hibah dalam rangka penganggaran belanja wajib mengikat, seperti Bantuan Keuangan dari provinsi, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT), serta dalam rangka rangkaian tahapan Pilkada Kab. Magetan tahun 2018. Selain itu pengalokasian belanja hibah dilaksanakan secara cermat dan selektif, utamanya bagi organisasi maupun kelompok masyarakat dengan melalui tahapan penganggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan atau dalam rangka menunjang capaian kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan kemampuan pengembangan perekonomian masyarakat.

c. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukkan bagi kelompok/ anggota masyarakat, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial tersebut mempertimbangkan kriteria selektif, tidak terus menerus dan kejelasan peruntukan/ penggunaannya. Diantaranya untuk mengurangi dampak masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan bantuan anggaran pelaksanaan pendidikan dasar.

d. Belanja Bantuan Keuangan

Dialokasikan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk peningkatan kemampuan keuangan desa, sedangkan bantuan keuangan bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta dalam rangka akselerasi pembangunan desa.

Sebagaimana dimaksud pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam APBD dialokasikan dana kepada desa antara lain berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (DD) serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah sebesar 10% dari pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah Daerah juga dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa berdasarkan permohonan dari Pemerintah Desa, dengan mekanisme atau tahapan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan, dan atau prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

e. **Belanja Tidak Terduga.**

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, antara lain untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan lain sebagainya, dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan yang sifatnya mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, serta untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

2) **Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah yang bersangkutan seperti : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk pembangunan daerah dalam rangka mendukung perwujudan masyarakat Magetan yang sejahtera sesuai visi dan misi serta program prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Magetan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja langsung, serta peningkatan alokasi anggaran lebih diarahkan untuk pembiayaan program-program pembangunan yang mengarah pada upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kab. Magetan tahun 2018, penentuan pagu anggaran program/ kegiatan diarahkan dalam rangka pemantapan/penguatan kebijakan *money follow program priority* yang telah diterapkan mulai tahun 2017, yaitu penguatan fokus anggaran yang diarahkan pada program/ kegiatan yang jelas sasaran, manfaat dan kontribusi terhadap pembangunan daerah, tidak lagi berdasarkan *money follow function*, sehingga fungsi yang kurang prioritas, anggarannya harus semakin seminimal mungkin.

Perencanaan pembangunan dan anggaran juga harus dilaksanakan berdasar pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan spasial.

Holistik-tematik artinya, program yang disusun harus menitikberatkan pada keseluruhan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan (tema). Integratif artinya program harus terkoordinasi lintas SKPD terkait, saling menunjang dan mendukung, tidak tumpang tindih, tidak bekerja parsial atau sendiri-sendiri (tidak ego-sektoral) agar tujuan suatu program/kegiatan dapat tercapai sesuai tujuan pembangunan. Spasial yang artinya pembangunan dilaksanakan dengan berdasar pada daya dukung sumber daya dan ruang/ wilayah.

Dalam menentukan arah kebijakan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan sinkronisasi pendekatan antara proses perencanaan *Top down dan bottom up*. Proses *top down* dilakukan melalui penerjemahan visi misi Bupati dan penyelarasan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang sudah tertuang dalam dokumen RPMJD dan Renstra masing-masing SKPD. Dengan kata lain, setiap program dan kegiatan yang masuk dalam daftar belanja RKPD harus memiliki daya dukung atau kontribusi terhadap pencapaian visi misi bupati dan/atau target-target indikator kinerja RPJMD. Juga diselaraskan dengan program prioritas Nasional dan regional sebagai upaya harmonisasi pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Sedangkan proses *bottom up* diperoleh melalui sinkronisasi usulan pada saat Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten yang telah diselenggarakan sebelumnya. Pada saat Musrenbang kecamatan juga sudah diberikan kebijakan bahwa usulan hasil Musrenbang setiap kecamatan akan diakomodir setidaknya-tidaknya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap kecamatan.

Selain pendekatan *Bottom up* dan *top down* tersebut, program dan kegiatan dalam belanja daerah juga disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai rangkaian proses perencanaan politik.

3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA), hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah.

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pemberian pinjaman daerah serta antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Secara lengkap realisasi dan proyeksi kemampuan APBD Kab. Magetan tahun anggaran 2018, dari sisi Pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut :

**TABEL 3.14
REALISASI DAN PROYEKSI APBD KAB. MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018**

No	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2015	Realisasi APBD Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017*	Proyeksi/Target Tahun 2018
1.1	Pendapatan Asli Daerah	164.565.284.690,30	165.615.614.256,82	193.686.220.710,00	152.454.713.498,00
1.1.1	Pajak daerah	33.753.964.990,08	36.799.143.269,28	37.455.000.000,00	40.915.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	20.017.394.985,00	19.120.948.830,06	20.880.592.000,00	20.780.864.500,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.334.749.993,12	2.272.143.759,00	2.042.634.460,00	2.238.166.618,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	108.459.175.722,10	107.443.378.398,48	133.307.994.250,00	88.520.682.380,00
1.2	Dana Perimbangan	985.585.834.300,00	1.227.577.469.764,00	1.231.379.507.234,00	1.111.806.018.901,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	49.911.643.300,00	47.101.587.115,00	55.101.037.266,00	43.099.302.901,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	856.278.521.000,00	916.052.436.000,00	899.395.394.631,00	899.960.340.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	79.395.670.000,00	264.423.446.649,00	276.883.075.337,00	168.746.376.000,00
	- DAK Fisik				
	- DAK Non Fisik			207.691.706.337,00	168.746.376.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	394.776.579.836,00	277.161.192.160,00	288.305.034.668,36	293.942.589.417,36
1.3.1	Hibah	3.947.000.000,00	1.998.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi	78.068.418.884,00	88.926.125.958,00	97.233.400.668,36	69.601.855.417,36

No	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2015	Realisasi APBD Tahun 2016	Proyeksi/Target Tahun 2017*	Proyeksi/Target Tahun 2018
	dan dari pemerintah daerah lainnya				
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	282.090.755.000,00	132.243.618.000,00	169.734.334.000,00	169.734.334.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	20.842.063.000,00	39.641.320.000,00	18.337.300.000,00	1.971.800.000,00
1.3.6	Pendapatan lainnya	651.782.000,00	1.020.034.000,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	9.176.560.952,00	13.332.094.202,00	6.267.962.925,00	0,00
1.3.8	Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) APBN				49.634.600.000,00
Jumlah Pendapatan		1.544.926.944.066,30	1.670.354.276.180,82	1.713.370.762.612,36	1.558.203.321.816,36
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.046.120.780.674,00	1.152.503.173.625,00	1.113.989.873.905,00	1.122.169.804.495,10
2.1.1	Belanja Pegawai	857.168.658.159,00	871.308.319.890,00	787.295.490.140,00	785.282.272.389,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	22.727.405.000,00	36.560.065.000,00	43.791.610.000,00	55.558.152.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.427.620.000,00	4.759.120.000,00	6.775.000.000,00	816.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	161.667.121.915,00	239.834.443.335,00	272.877.773.765,00	276.513.380.106,10
2.1.8	Belanja Tak Terduga	129.975.600,00	4.122.540.000,00	3.250.000.000,00	4.000.000.000,00
2.1.9	Belanja Tanggap Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.10	Belanja Aneka Kejadian	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	542.801.103.151,29	623.416.224.424,87	633.900.093.155,00	481.118.622.493,00
2.2.1	Belanja Pegawai	24.508.825.975,21	35.432.027.391,31		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	278.634.821.968,79	301.042.948.562,69		
2.2.3	Belanja Modal	239.657.455.207,29	286.941.248.470,87		
Jumlah Belanja		1.588.921.883.825,29	1.857.999.643.237,40	1.747.889.967.060,00	1.603.288.426.988,10
Surplus / (Defisit)		(43.994.939.758,99)	(109.646.436.469,05)	(34.519.204.447,64)	(45.085.080.171,74)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	236.769.986.662,84	178.353.189.169,05	57.959.204.447,64	52.585.080.171,74
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	223.224.008.480,84	166.991.262.351,05	46.948.204.447,64	32.585.080.171,74
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	13.545.978.182,00	11.361.926.818,00	11.011.000.000,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.285.000.000,00	25.842.000.000,00	23.440.000.000,00	7.500.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	4.617.000.000,00	5.998.000.000,00	8.240.000.000,00	7.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	10.668.000.000,00	9.844.000.000,00	15.200.000.000,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto		211.484.986.662,84	152.511.189.169,05	34.519.204.447,64	45.085.080.171,74
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan		167.490.046.903,85	46.946.067.300,00	0,00	0,00

Keterangan : * Proyeksi pada Perubahan APBD 2017

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Visi Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT”

Visi dan Misi Pemerintah Daerah harus mampu diterjemahkan kedalam Arah kebijakan umum, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Untuk mewujudkan visi tersebut, akan didukung oleh berbagai misi dan program kegiatan yang sangat relevan, paling tidak ada 5 (lima) misi yang telah ditetapkan :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah;
3. Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah; dan
5. Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum.

Dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut sasaran yang hendak dicapai adalah Kesejahteraan masyarakat yang komprehensif diukur dari dimensi 6 W.

- *Wareg*

Wareg mengandung makna tercukupinya kebutuhan pangan, sandang dan papan, bukan hanya cukup dalam artian jumlah, namun dalam artian kualitas.

- *Waras*

Waras dimaknai dalam artian luas yakni sehat jasmani dan rohani, bebas dari penyakit dan cacat serta terciptanya kondisi psikologis masyarakat

yang kondusif di tengah perubahan tata nilai sosial dan budaya yang dituntut lebih kompetitif dalam menjalani kehidupannya.

- *Wasis*

Wasis dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan pendidikan baik formal maupun informal dalam rangka peningkatan SDM di masa depan.

- *Wutuh*

Wutuh dimaknai terciptanya keseimbangan jasmani dan rohani yang meliputi aspek sosial, mental dan spiritual.

- *Widodo*

Widodo dimaknai sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia di dunia, yakni selamat di dunia dan akhirat dimana pemahaman ini menempatkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sebagai tujuan antara untuk mencari bekal bagi kehidupan yang kekal di waktu nanti yang sekaligus dijadikan sebagai mekanisme pengendalian diri dari sifat tamak, rakus dan menghalalkan segala cara.

- *Waskita*

Dimaknai sebagai kemampuan pemimpin dan masyarakat untuk melihat atau memandang jauh ke depan (visioner).

Pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 berdasarkan acuan yang ada dalam RPJMD periode tahun kelima dan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan dalam forum musrenbang yang melibatkan berbagai pihak, yang kemudian diselaraskan dengan program dari Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten Magetan, regional, propinsi maupun nasional yang dihadapi, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial.

4.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah

Kebijakan umum menggambarkan hubungan antara arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja yang dipilih. Secara umum, kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan program unggulan yang merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah;

2. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan kerjasama antar daerah baik skala regional dan nasional dalam rangka mengembangkan potensi dan kekayaan lokal;
5. Melaksanakan semaksimal mungkin program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal, operasional, serta program-program yang bersifat mengikat seperti dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional;
6. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dan kegiatan reses DPRD.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kab. Magetan tahun 2018, penentuan pagu anggaran program/ kegiatan diarahkan dalam rangka pemantapan/ penguatan kebijakan *money follow program priority* yang telah mulai diterapkan mulai tahun 2017, yaitu penguatan fokus anggaran yang diarahkan pada program/ kegiatan yang jelas sasaran, manfaat dan kontribusi terhadap pembangunan daerah, tidak lagi berdasarkan *money follow function*, sehingga fungsi yang kurang prioritas, anggarannya harus semakin dikurangi.

Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan berdasar pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan spasial. Holistik-tematik artinya, program yang disusun harus menitikberatkan pada keseluruhan sebagai satu kesatuan dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memecahkan satu pokok permasalahan (tema), integratif artinya program harus terkoordinasi lintas SKPD terkait, saling menunjang dan mendukung, tidak tumpang tindih, tidak bekerja parsial atau sendiri-sendiri (tidak ego-sektoral) agar tujuan suatu program / kegiatan dapat tercapai sesuai tujuan pembangunan, serta spasial yang artinya pembangunan dilaksanakan dengan berdasar pada daya dukung sumber daya dan ruang/ wilayah.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2018 yang merupakan tahun kelima dari periodisasi RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi (agrobisnis) melalui penguatan kerjasama antar daerah dan swasta dalam rangka perluasan pasar produk

agribis, sehingga mampu meningkatkan kemampuan pasar produk agrobisnis melalui kerjasama pemasaran dan promosi antar daerah hasil produk unggulan Usaha mikro/ industri kecil, peningkatan kualitas pasar daerah dan pasar desa serta meningkatkan kualitas infrastruktur pada kawasan perdagangan dan industri.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL 4.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RPJMD KAB. MAGETAN TAHUN 2013 – 2018

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
VISI : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri dan bermartabat			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat			
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat dan aparat pemerintah daerah.	Meningkatnya kualitas sarana peribadatan dan jumlah kegiatan keagamaan <u>Indikator :</u> - Jumlah sarana peribadatan yang ditingkatkan; target 200 - Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah daerah; target 9	Melakukan pembinaan terhadap lembaga- lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan non formal dan tenaga pembimbing keagamaan, dan pembinaan aparat	<u>Urusan Sosial</u> Memberikan bantuan sarana peribadatan dan pendukungnya serta lembaga pendidikan keagamaan non formal dan tenaga pembimbing keagamaan <u>Urusan Sosial</u> Memberikan bantuan sarana peribadatan dan pendukungnya serta lembaga pendidikan keagamaan non formal dan tenaga pembimbing keagamaan <u>Urusan Penunjang bid. kepegawaian</u> Melakukan pembinaan keagamaan terhadap aparat pemerintah daerah
Mewujudkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama sehingga dapat hidup	Menurunnya angka kejadian konflik sosial (SARA) <u>Indikator :</u>	Memperkuat kehidupan demokrasi, kebhinekaan, pluralisme dan penghormatan	<u>Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</u> Mengembangkan budaya toleransi melalui fasilitasi dialog, seminar, sarasehan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
berdampingan, gotong royong dan saling menghormati. <u>Indikator :</u> Indeks toleransi indeks gotong royong	Jumlah konflik social; target <5 kasus	terhadap HAM dalam memperkuat kohesi (perekatan) sosial	<u>Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ; Urusan penunjang (Hukum)</u> Mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan demokrasi wawasan kebangsaan dan HAM melalui organisasi politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan untuk menguatkan nilai-nilai nasionalisme, demokrasi dan HAM yang multikultural dan kemajemukan sosial. <u>Urusan Pendidikan; Urusan Pemuda dan olah raga</u> Mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan budi pekerti di lembaga pendidikan formal maupun non formal sejak usia dini <u>Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Urusan penunjang (Pemerintahan umum)</u> Meningkatkan kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah, Forkopimda dan masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan dan penanganan konflik sosial.
Misi 2 : Mewujudkan pemerintahan yang baik, dan peningkatan sdm yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah			
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik <u>Indikator :</u> - Peringkat kinerja Otoda - Hasil Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah - Hasil Evaluasi LKJIP	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik <u>Indikator :</u> Indeks Kepuasan Masyarakat; target 75	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Menerapkan sistem pelayanan publik yang terstandarisasi di seluruh unit pelayanan publik Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan desa serta penyelenggaraan pelayanan publik di desa	<u>Urusan Penunjang (organisasi)</u> Menyempurnakan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah <u>Urusan Penunjang bidang kepegawaian</u> Meningkatkan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit. <u>Urusan Penunjang bidang kepegawaian</u> Meningkatkan kompetensi ASN melalui diklat struktural, teknis, fungsional serta tugas belajar. <u>Urusan Penunjang (Organisasi)</u> Menerapkan Standar Pelayanan Prima (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta merintis pengembangan e-service pada pelayanan perijinan, administrasi kependudukan, kearsipan dan perpustakaan <u>Urusan Kominfo</u> Meningkatkan kualitas pengelolaan e-government dalam rangka mendukung pelayanan publik <u>Urusan penunjang bid. keuangan</u> Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel <u>Urusan penunjang bid. perencanaan</u> Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang terarah terukur, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan <u>Urusan penunjang</u> Mengoptimalkan penawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta menerapkan sistem pengendalian internal level 2 di seluruh unit kerja <u>Urusan penunjang</u> Meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi, kolusi dan nepotisme kepada masyarakat dan aparatur pemerintah melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. <u>Urusan Kominfo</u> Membangun dan mengelola sarana pengaduan masyarakat berbasis TI Urusan Kearsipan; urusan Statistik Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan data statistik <u>Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa</u> Memberikan fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan aset dan keuangan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.
Misi 3 : Menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi pengembangan sdm serta pengelolaan sda yang berwawasan lingkungan			
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan kualitas	<u>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</u>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>pertumbuhan ekonomi</p> <p><u>Indikator :</u> Pertumbuhan ekonomi</p>	<p>produksi pertanian</p> <p><u>Indikator :</u> Nilai produksi pertanian; padi 4.000.000kw., Jagung 800.000kw., Kedelai 75.000kw., Tebu 575.000kw.</p>	<p>dan kuantitas infrastruktur pertanian</p>	<p><u>Urusan pertanian</u> Meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dalam rangka meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian dan perikanan</p>
		<p>Meningkatkan luas areal produksi pertanian</p>	<p><u>Urusan Pertanian</u> Meningkatkan kualitas jalan usaha tani/jalan produksi untuk mempermudah distribusi hasil pertanian dari daerah produksi sehingga mengurangi biaya transportasi yang bisa menurunkan daya saing produk pertanian.</p> <p><u>Urusan Pangan</u> Membangun Gudang/ lumbung pangan/padi dengan fasilitas pengolahan pasca panen untuk menampung hasil produksi pertanian sekaligus sebagai penguatan cadangan pangan.</p>
		<p>Meningkatkan produktivitas pertanian</p>	<p><u>Urusan Pertanian</u> Pemanfaatan pekarangan dan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian.</p> <p><u>Urusan PUPR; Urusan Pertanian</u> Meningkatkan/mempertahankan kepemilikan luas lahan oleh petani melalui pengendalian konversi dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</p>
		<p>Menjaga stabilitas harga produksi pada saat panen raya maupun pada saat masa tanam</p>	<p><u>Urusan Pertanian</u> Menyediakan bibit unggul, penangkaran bibit unggul, dan pengembangan desa mandiri bibit.</p> <p><u>Urusan Pertanian</u> Mengintensifkan penyuluhan pertanian, penerapan teknologi pertanian dan meningkatkan SDM pertanian melalui sekolah lapang.</p> <p><u>Urusan Pertanian</u> Menjaga kesuburan lahan pertanian dengan mendorong penggunaan pupuk organik.</p>
		<p>Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan</p>	<p><u>Urusan Pertanian; Urusan kelautan dan perikanan; Urusan Koperasi dan UKM</u> Meningkatkan akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan dengan kemudahan prosedur serta penyediaan jaminan resiko.</p> <p>Meningkatkan populasi sapi, kambing, unggas dan aneka ternak lainnya serta populasi ikan melalui penyebaran bibit unggul dengan pelatihan budidaya peternakan bagi kelompok tani, penyediaan pakan dan pelayanan kesehatan hewan.</p> <p><u>Urusan kelautan dan perikanan</u> Meningkatkan produk olahan hasil peternakan dan perikanan serta memfasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan dan perikanan.</p>
		<p>Meningkatnya industri pariwisata berbasis agro dan industri kreatif</p> <p><u>Indikator :</u> - Angka kunjungan wisata; Target 956.409orang - Waktu kunjungan wisata (length of stay); Target 3 hari</p>	<p>Mengembangkan ekosistem industri pariwisata berbasis agro dan industri kreatif</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>fasilitas bagi penyandang difabel dan berkebutuhan khusus lainnya (SIDa, Ripparda)</p> <p>Menyediakan kebutuhan dasar penanggulangan limbah dan TIK industri pariwisata berbasis agro dan industri kreatif (SIDa)</p> <p><u>Urusan Pariwisata</u> Pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan melalui pemberdayaan kelompok sadar wisata, pembinaan tenaga kerja pariwisata serta pengembangan dan penyelenggaraan event budaya/potensi lokal (Ripparda)</p> <p>Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap standar higienitas dan sertifikat halal atas produk mamin dan wisata kuliner, terutama di daerah destinasi wisata (Ripparda)</p> <p><u>Urusan Pariwisata</u> Pengembangan sistem perlindungan/ asuransi bagi wisatawan (Ripparda)</p> <p><u>Urusan Pariwisata</u> Mengintensifkan pemanfaatan CSR untuk mendukung industri pariwisata (Ripparda)</p> <p><u>Urusan Pariwisata</u> Mengoptimalkan peran kelembagaan pariwisata melalui fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah, pembinaan Pokdarwis dan asosiasi jasa wisata (Ripparda)</p>
		Mengembangkan kluster industri pariwisata berbasis agro dan industri kreatif	<p><u>Urusan Pariwisata</u> Mengembangkan kluster industri pariwisata berbasis agro dan industri kreatif</p> <p><u>Urusan PUPR, urusan Perhubungan</u> Mengembangkan aksesibilitas pariwisata yang menghubungkan antar KSP dengan arus keluar masuk wisatawan termasuk koneksitas dengan terminal, stasiun kereta api dan bandara. (Ripparda)</p>
		Mengembangkan jaringan inovasi industri pariwisata berbasis agro dan industri kreatif (SIDa)	<p><u>Urusan Kominfo</u> Mengembangkan telecenter sebagai jaringan inovasi pariwisata (SIDa)</p> <p><u>Koperasi dan UKM</u> Mendorong berkembangnya teknopreneur dengan mengembangkan pusat inovasi UKM dan wirausaha serta fasilitasi pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk wisata (SIDa/Ripparda)</p>
Meningkatnya pertumbuhan industri		Mengembangkan industri skala kecil terutama industri pengolahan hasil pertanian sehingga dapat memberi nilai tambah produk pertanian dan produk unggulan daerah lainnya	<p><u>Urusan Industri</u> Melakukan pembinaan terhadap industri kecil terkait proses produksi, produk dan pemasaran</p> <p><u>Urusan Industri</u> Meningkatkan penguasaan iptek dan inovasi dalam rangka peningkatan mutu produk</p> <p><u>Urusan Industri</u> Fasilitasi perolehan pembiayaan yang terjangkau bagi IKM</p> <p><u>Urusan Industri</u> Fasilitasi pemasaran produk IKM melalui pameran, kontak dagang dan kerjasama dengan BUMN/BUMD maupun swasta.</p>
Indikator : Jumlah industry; Target 15.999 unit			
Meningkatnya aktivitas perdagangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah serta sarana dalam rangka pemasaran produk pertanian dan produk unggulan daerah lainnya		Mengembangkan pusat-pusat perdagangan dengan mengutamakan pedagang tradisional	<p><u>Urusan Perdagangan</u> Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat) yang layak, nyaman, bersih dan sehat.</p> <p><u>Urusan Perdagangan</u> Mengadakan pembinaan terhadap PKL serta menyediakan sarana perdagangan yang representatif.</p> <p><u>Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa</u> Memfasilitasi pengembangan pasar desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa</p>
Indikator sasaran : Jumlah usaha perdagangan; Target 5.472 unit		Menjaga kualitas, ketersediaan dan keterjangkauan barang beredar dalam rangka menjamin keamanan dan kepuasan konsumen	<p><u>Urusan Perdagangan</u> Pengamanan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditas strategis lainnya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok melalui pemantauan dan pengawasan terhadap stok dan operasi pasar.</p> <p><u>Urusan Perdagangan</u></p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Pembinaan terhadap peredaran barang perdagangan baik mutu, standar maupun ukuran melalui pemantauan, pengawasan dan uji kualitas produk.
		Meningkatkan pangsa pasar lokal maupun regional bagi produk pertanian dan produk unggulan daerah	<u>Urusan Perdagangan</u> Mengembangkan jaringan perdagangan antar wilayah melalui promosi produk unggulan daerah, pasar lelang daerah dan kontak dagang
	Meningkatnya kegiatan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal	Meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing	<u>Urusan Penanaman modal</u> Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan investasi yang cepat, tepat dan tansparan
	<u>Indikator :</u> - Nilai Realisasi investasi; target 960 Milyard rupiah	Mendorong tumbuhnya usaha mikro dan koperasi	<u>Urusan Penanaman modal</u> Melakukan promosi dan kerjasama investasi baik dengan media massa, dunia usaha maupun pemerintah daerah lainnya. <u>Urusan Penanaman modal</u> Penerapan kepastian dan penegakan hukum berkaitan dengan kepastian perijinan usaha dan investasi.
			<u>Urusan Koperasi dan UMKM</u> Melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan koperasi, baik pembinaan kelembagaan, manajemen, akses permodalan maupun fasilitasi pemasaran. <u>Urusan Koperasi dan UMKM</u> Melakukan pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro sebagai alternatif pembiayaan ekonomi produktif di desa
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata untuk semua segmen.	<u>Urusan Pendidikan</u> Melaksanakan wajib belajar 9 tahun untuk menjamin seluruh anak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, serta Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal, termasuk pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus
<u>Indikator :</u> IPM (indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks daya beli)	<u>Indikator :</u> - Angka Rata-rata lama sekolah, Target Huruf, Target		<u>Urusan Pendidikan</u> Meningkatkan angka partisipasi PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak bersekolah untuk mendukung peningkatan kualitas wajib belajar 9 tahun
		Mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam mata pelajaran yang relevan di semua tingkatan sejak usia dini dalam rangka membentuk SDM yang cerdas, berdaya saing dan berperilaku baik. (nawa cita)	<u>Urusan Pendidikan</u> Meningkatkan kualitas manajemen/pengelolaan guru dengan meningkatkan kompetensi, memperbaiki distribusi dan memenuhi beban kerja
		Meningkatkan layanan pendidikan non formal bagi penduduk non usia sekolah sebagai perwujudan pembelajaran sepanjang hayat	<u>Urusan Pendidikan</u> Menuntaskan pemberantasan buta aksara bagi penduduk usia 15-59 tahun serta memberikan pendidikan non formal (ketrampilan) dalam rangka meningkatkan kualitas SDM
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat	<u>Urusan Kesehatan</u> Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia
	<u>Indikator :</u> - Angka Harapan hidup, target 72 tahun		<u>Urusan Kesehatan</u> Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat
		Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat	<u>Urusan Kesehatan</u> Meningkatkan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan <u>Urusan Kesehatan</u> Meningkatkan akses pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas <u>Urusan Kesehatan</u> Meningkatkan ketersediaan, penyebaran dan kualitas SDM kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<u>Urusan Kesehatan</u> Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi serta alat kesehatan
			<u>Urusan Kesehatan</u> Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
			<u>Urusan Kesehatan</u> Mengembangkan jaminan kesehatan secara merata dan mandiri.
			<u>Urusan Kesehatan</u> Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
		Meningkatkan upaya promosi kesehatan	<u>Urusan Kesehatan</u> Penyuluhan pola hidup sehat untuk mencegah berjangkitnya penyakit atau mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas, termasuk sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Membangun budaya prestasi, inovasi, produktif, kreatif yang berjati diri		<u>Urusan Penunjang bidang litbang</u> Mendorong lahirnya inovasi melalui pemberian penghargaan
Indikator : - Angka kemiskinan - Tingkat Pengangguran Terbuka - PDRB Perkapita, target 26,62 juta Rupiah			<u>Urusan Kominfo; urusan Perpustakaan</u> Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pengembangan budaya baca dan e-literacy, peningkatan deseminasi informasi melalui media massa, media luar ruang, media online serta pertunjukan rakyat.
			<u>Urusan Kebudayaan</u> Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai jati diri dan aset daerah.
			<u>Urusan Pemuda & Olah raga</u> Memberikan bimbingan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda serta memperkuat lembaga kepemudaan sehingga menjadi pemuda yang produktif dan mandiri.
			<u>Urusan Pemuda & Olah raga</u> Meningkatkan prestasi olahraga melalui pembinaan insan olah raga dan penyelenggaraan kompetisi yang kontinu dan berjenjang serta meningkatkan sarana dan prasarana olah raga
	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.		<u>Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</u> Meningkatkan program-program perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kualitas program Kabupaten Layak Anak.
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian fertilitas.		<u>Urusan Pengendalian penduduk dan KB</u> Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas layanan keluarga berencana.
	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan bagi masyarakat miskin		<u>Urusan Pendidikan</u> Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dasar melalui pemberian beasiswa bagi siswa miskin berprestasi serta mengembangkan pendidikan non formal
			<u>Urusan Kesehatan</u> Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan dasar dan rujukan kelas 3 melalui pemberian bantuan premi asuransi kesehatan dan penerbitan SKTM secara selektif untuk meningkatkan cakupan pelayanan, penyediaan obat dengan harga yang terjangkau untuk penduduk miskin, pelayanan ibu hamil hingga persalinan dan pasca persalinan, serta perbaikan gizi bagi ibu hamil dan balita gakin.
			<u>Urusan Sosial</u> Mengembangkan program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan hak dasar dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan PMKS lainnya
	Meningkatkan kualitas permukiman warga miskin		<u>Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman</u> Meningkatkan kualitas tempat tinggal warga miskin melalui penataan kawasan permukiman kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni yang disertai dengan perbaikan sanitasi dasar, jaringan listrik dan telekomunikasi serta penyediaan air bersih.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan kapasitas dan produktivitas maskin dan PMKS lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kemandirian	<p><u>Urusan Koperasi dan UKM; Urusan Pertanian; Urusan perikanan; Urusan perdagangan; Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa</u> Memberikan bantuan sosial berupa sarana produksi usaha ekonomi produktif disertai bimbingan ketrampilan teknis dan ketrampilan wirausaha sehingga meningkatkan daya saing maskin dalam kegiatan ekonomi produktif, memfasilitasi pemasaran hasil produksi termasuk perolehan tempat usaha di pasar, pasar desa atau lokasi PK-5 yang dilegalisasi.</p> <p><u>Urusan Koperasi dan UKM</u> Optimalisasi aset-aset produksi maskin melalui program reforma aset dan kepemilikan tanah bagi petani kecil dan usaha mikro secara selektif.</p>
		Meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengangguran dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja	<p><u>Urusan Tenaga kerja</u> Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pemberian pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja yang kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui fasilitasi perolehan sertifikat keahlian</p> <p><u>Urusan Tenaga kerja</u> Menyediakan informasi kesempatan kerja dengan mewajibkan dunia usaha memberikan informasi lowongan kerja</p> <p><u>Urusan Tenaga kerja</u> Menciptakan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang kondusif melalui pengawasan terhadap implementasi peraturan tentang ketenagakerjaan.</p>
		Mengoptimalkan pelaksanaan program transmigrasi	<u>Urusan Transmigrasi</u> Memberikan pembekalan kepada calon transmigran dengan ketrampilan yang sesuai karakteristik daerah tujuan agar mampu beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang baru.
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak dan sehat	Penataan ruang permukiman yang sesuai ketentuan zonasi	<p><u>Urusan PUPR</u> Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan sesuai kaidah tata ruang</p> <p><u>Urusan PUPR</u> Menyediakan dan menerapkan sistem informasi spasial</p>
<u>Indikator :</u> - Indeks kualitas lingkungan hidup	<p><u>Indikator :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> - Cakupan universal Acces 100-0-100 - Prosentase Rumah tangga berakses air minum, Target 75% - Prosentase Pemukiman Kumuh, target 0,60% - Prosentase Rumah tangga Bersanitasi, target 90% 2. Prosentase penanganan sampah perkotaan, target 90% 3. Prosentase perkotaan, target 25% 	Penyediaan sarana prasarana permukiman dan penataan kawasan	<p><u>Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman</u> Pemenuhan cakupan layanan dasar permukiman dan kawasan</p> <p><u>Urusan Lingkungan hidup</u> Mengelola sampah rumah tangga dengan lebih mengedepankan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah</p>
	Terwujudnya alam dan lingkungan hidup yang lestari	Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau	<p><u>Urusan Lingkungan hidup</u> Melakukan pemeliharaan dan perluasan RTH publik dengan melibatkan peran swasta dalam menyediakan RTH publik dan privat serta menerapkan regulasi tentang ketentuan luasan RTH privat.</p> <p><u>Urusan Lingkungan hidup</u> Mengembangkan hutan kota sebagai paru-paru kota serta meningkatkan jumlah tanaman tegakan melalui gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar.</p>
	<u>Indikator :</u> 1. prosentase usaha yang mentaati persyaratan pencemaran air, target 37,5%	Mengendalikan pencemaran lingkungan	<u>Urusan Lingkungan hidup</u> Pemantauan kualitas air , tanah dan udara terutama di aliran Sungai Gandong yang merupakan aliran pembuangan limbah industri
	2. prosentase usaha yang mentaati persyaratan pencemaran udara, target 100%		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3. Luas lahan kritis, target 2.614 Ha		kulit, memfasilitasi penyediaan sarana prasarana pengelolaan limbah industri serta pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan
		Merehabilitasi lingkungan hidup yang mengalami penurunan kualitas	<u>Urusan Lingkungan hidup</u> Merehabilitasi lahan kritis melalui gerakan menanam pohon tanaman keras pada lahan pertanian dengan bidang kemiringan > 40° untuk mencegah gerakan tanah longsor.
			<u>Urusan Lingkungan hidup</u> Konservasi sumber-sumber air yang mengalami penurunan fungsi melalui rehabilitasi daerah-daerah tangkapan air
		Mengelola sumber-daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan	<u>Urusan Lingkungan hidup; Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</u> <u>Urusan penunjang (SDA)</u> Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungannya serta pemberian sanksi yang tegas terhadap kegiatan yang merusak lingkungan.

MISI 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah

Meningkatkan kualitas layanan infratraktur pelayanan dasar dan infratraktur penumbuh daya saing agrobisnis	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan memadai serta ketersediaan sarana prasarana wilayah	Menyediakan infratraktur jalan, jembatan beserta pendukungnya yang layak, yang menghubungkan antar wilayah dan permukiman penduduk serta menjangkau sentra-sentra produksi pertanian dan produk unggulan daerah lainnya	<u>Urusan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u> Menyediakan fasilitas jalan, jembatan dan pendukungnya yang berkualitas, aman dan nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor, tidak bermotor maupun pejalan kaki, serta meningkatkan kualitas/kemantapan jalan Kabupaten dalam rangka mendukung pengembangan pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata
<u>Indikator :</u> Indeks infratraktur	<u>Indikator :</u> - % ketersediaan infratraktur jalan, jembatan dan pendukungnya sesuai SPM - % jalan kondisi baik, target 81,54% - %jembatan kondisi baik, target 233 buah - % Pemasangan Rambu lalin, target 85,4% - % Pemasangan marka jalan, 24,6% - % pemasangan PJU, target 80%		<u>Urusan PUPR, Urusan Perhubungan</u> Menyediakan penerangan jalan umum dan ruang publik lainnya serta rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sesuai standar kebutuhan
			<u>Urusan Perhubungan</u> Meningkatkan standar kualitas layanan angkutan melalui pembinaan serta pemantauan sarana dan prasarana transportasi serta melakukan kampanye keselamatan di jalan.

Misi 5 : Mewujudkan suasana aman dan damai melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum

Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan yang kondusif bagi keberlangsungan pembangunan	Meningkatnya situasi yang kondusif di lingkungan masyarakat	Mengembangkan kesadaran dan ketaatan hukum serta mendorong terlaksananya penegakan hukum	<u>Urusan Bag. Hukum</u> Menyusun produk hukum sebagai sarana pengaturan tata pemerintahan dan kemasyarakatan
<u>Indikator :</u> - Angka kriminalitas	<u>Indikator :</u> Jumlah pelanggaran ketertiban umum, target <100 kasus		<u>Urusan Bag. Hukum</u> Sosialisasi produk-produk hukum untuk membangun kesadaran dan ketaatan terhadap hukum
		Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban untuk mendukung stabilitas daerah dan meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban	<u>Urusan Pol PP</u> Melaksanakan upaya penegakan perda untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat
			<u>Urusan Kesbang</u> Melakukan kerjasama lintas sektoral dalam menjaga stabilitas daerah
			<u>Urusan Pol PP</u> Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
Menurunnya resiko bencana pada daerah-daerah rawan bencana	Meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat dari bencana	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mendeteksi ancaman bencana dan melakukan upaya	<u>Urusan umum dan perlindungan masyarakat (BPBD)</u> Melaksanakan pelatihan peringatan dini bencana, penanggulangan bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana, menyediakan sarana, prasarana , logistik dan SOP penanganan bencana
<u>Indikator :</u>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Jumlah bencana	<u>Indikator</u> : Jumlah lembaga/pokmas siaga bencana, target 1.920 orang	penyelamatan korban bencana.	serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD Kab. Magetan tahun 2018 harus mempertimbangkan aspek politik, yaitu perlunya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan telaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai institusi wakil rakyat, agar diperoleh sinergitas program antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan DPRD (legislatif), sehingga produk hukum yang ditetapkan telah mengikat semua pemangku kepentingan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun, pada tahun 2018 merupakan tahun ke-lima dari RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2013-2018. Pada tahun ke-lima ini sasaran pembangunan adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi agrobisnis melalui penguatan kerjasama antar daerah dan swasta dalam rangka perluasan pasar produk agrobis. Arah kebijakan ini tentunya didukung dengan program prioritas DITATA INDAH plus INSANI.

Dalam rangka terwujudnya visi Kabupaten Magetan, beberapa yang perlu mendapat perhatian, diantaranya :

1. Penyelenggaran pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang berbasis elektronik mulai dari e-planing, e-bugeting dan e-monitoring saat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Implementasi Peraturan Daerah, artinya melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.
3. Mendorong percepatan pelaksanaan perda perlindungan pemberdayaan petani
4. Mendorong pelaksanaan pendidikan yang sesuai amanah undang-undang sebesar 20 % dari APBD untuk kegiatan pendidikan sehingga bisa mewujudkan pendidikan yang murah dan tetap berkualitas serta berkarakter.
5. Mendorong terwujudnya pembangunan sarana, prasarana, dan pemasaran produk unggulan strategis dan spesifik daerah.

6. Pembangunan lapak di tempat pemasaran akhir produk unggulan Magetan.
7. Mendorong terwujudnya industri olahan produk-produk pertanian.
8. Pasar sayur sebagai sentra pasar pemasaran agro bisnis.
9. Pembentukan BUMD bergerak pariwisata
10. Peningkatan nilai tambah pertanian berbasis pasar
11. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit dr. Sayidiman dan puskesmas.
12. Peningkatan sarana dan prasarana PDAM, serta meninjau kembali kebijakan tarif PDAM dan kemungkinan pemerian subsidi.
13. Peningkatan pembangunan infrastruktur menuju destinasi pariwisata sebagai pendobrak pembangunan ekonomi
14. Peningkatan klas jalan desa dan jalan kabupaten
15. Penampilan seni budaya pada hari-hari libur di wilayah pariwisata
16. Mendorong dana desa tidak sekedar fokus pada pembangunan fisik tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
17. Peningkatan retribusi galian C dengan catatan tidak merusak lingkungan, meninjau besaran retribusi parkir, retribusi pariwisata.
18. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu adanya pendataan potensi yang riil sekaligus untuk menciptakan transparansi.
19. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi dan PBI dan PBI-D dikarenakan masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang belum memperoleh haknya atas jaminan kesehatan.
20. Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan di fasilitas di Kabupaten Magetan. Untuk memenuhi tuntutan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas maka akreditasi pada fasyankes primer harus segera dituntaskan.
21. Masalah pertambahan jumlah penduduk, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengantisipasi berbagai hal dan perlu ditangani secara utuh, holistik dan komprehensif.
22. Pengembangan ekonomi, ketersediaan data dan informasi menjadi sangat penting dalam upaya menggali sumber-sumber ekonomi produktif yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
23. Dorongan BUMD industri kulit milik Kabupaten Magetaan

24. Peningkatan UKM dan IKM industri lokal maupun non lokal dalam rangka menyerap tenaga kerja.
25. Perencanaan dan penyelenggaraan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir RPJMD tahun 2013-2018, bahwa berdasarkan platform pemerintah berusaha menjadikan Magetan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dengan perwujudan good governance, SDM yang profesional, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Tahun ke-lima atau tahun terakhir RPJMD tahun 2013-2018, diharapkan visi “terwujudnya kesejahteraan masyarakat magetan yang adil, mandiri dan bermartabat” telah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Magetan secara keseluruhan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Memerhatikan hal tersebut dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang berkembang, pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2018 yang fokus pada perencanaan sesuai dengan RPJMD tahun 2013-2018 sebagai ujung tombak pembangunan Magetan.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Magetan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan terwujudnya pemerintah yang baik, bersih, SDM yang profesional, transparan dan akuntabel yang berbasis elektronik mulai dari e-planing, e-bugeting, e-monitoring saat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
2. Pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan berbagai kegiatan, diantaranya :
 - Optimalisasi pola penganggaran pembangunan
 - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan PAD
 - Optimalisasi aset mulai dari penataan, penertiban, dan pemanfaatannya
 - Meningkatkan sarana prasarana promosi investasi
 - Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
 - Peningkatan infrastruktur sarana prasarana transportasi
 - Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, dan
 - Penyerapan tenaga kerja

3. Bidang pendidikan, meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas mutu pendidikan dan kemudahan akses layanan dasar program ini penting namun program lain yang dicarikan solusinya tentang penganggaran untuk kegiatan belajar mengajar pada sekolah-sekolah terkait keluarnya peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.
4. Bidang pertanian selain meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta penguatan produk olahan yang mempunyai keunggulan kompetitif dengan didukung pembangunan pertanian berbasis agrowisata, program lain yang perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat pada umumnya dan sebagai penghasil dari kebutuhan pangan, maka program pertanian yang perlu mendapatkan perhatian serius diantaranya :
 - Swasembada pangan
 - Peningkatan sdm petani menjadi petani profesional
 - Revitalisasi pertanian dan menjadikan pertanian sebagai lokomotif pembangunan menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani
 - Fasilitasi teknologi hasil pertanian dan kemudahan dalam mendapatkan saprodi untuk menunjang produktivitas petani
 - Peningkatan populasi ternak, sapi, kambing, ayam, itik dan lain-lain.
 - Penguatan saluran irigasi melalui optimalisasi saluran irigasi yang sudah ada dan penambahan saluran irigasi
5. Bidang pariwisata merupakan andalan magetan dan melihat strategisnya sektor pariwisata diperlukan kebijakan dan program untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata agar dapat mengejar ketertinggalan dibanding daerah lain, maka kebijakan dan program serta kegiatan destinasi wisata untuk menghindari stagnasi dan kejenuhan para wisatawan yang datang patut dipikirkan untuk meningkatkan kenyamanan dan memberi fasilitas yang memadai seperti akses jalan yang memadai dan mudah dijangkau serta penyediaan lahan parkir yang cukup
6. Bidang industri dan perdagangan, program ini untuk diarahkan pada industri berbasis pertanian, kulit, bambu dan yang lain yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional dan nasional. Program ini perlu didorong dan dibina untuk makin berkembang dan maju sehingga mampu mandiri,

memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha melalui bantuan pembangunan infrastruktur, perijinan dan bantuan teknis disamping pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah.

7. Bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana layanan masyarakat yang belum maksimal, dan peningkatan aksi penanggulangan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata khususnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kelas 3 untuk masyarakat miskin, serta peningkatan kapasitas dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Bidang infrastruktur, kinerja pembangunan infrastruktur yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai sesuai visi kabupaten magetan tahun 2018 sepenuhnya belum tercapai, karena peluang yang ada belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Disamping itu pemerintah untuk menyediakan Infrastruktur pelayanan umum dasar dan infrastruktur daya saing agrobisnis, program kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kelas jalan yang ada.
9. Bidang pengentasan kemiskinan, upaya pengentasan kemiskinan selain menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, juga menggunakan pendekatan holistik untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan mata pencaharian.

4.4 Kebijakan Pembangunan Daerah

4.4.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

Kondisi perekonomian Kabupaten Magetan tidak bisa terlepas dari kondisi perekonomian nasional. Berdasarkan kondisi pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami pelambatan di berbagai sektor, mempengaruhi target capaian kinerja utama pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2018.

Dalam RPJMD Prov. Jatim dan RPJMN Nasional tahun 2018, ditetapkan asumsi-asumsi ekonomi sebagai berikut :

TABEL 4.2
ASUMSI PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PROVINSI

URAIAN	RKP NASIONAL 2018	RKPD PROVINSI 2018	KET.
1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	7,5	8,01 – 8,10	
2. PDRB Perkapita (Ribu Rp.)	64.721	-	
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	74,39 – 74,69	
4. Angka kemiskinan	7,5 – 8,5	10,70 – 10,20	
5. Indeks Gini	-	0,347 – 0,344	
6. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6 – 5,1	3,92 – 3,83	
7. Inflasi (%)	3,5	-	

Sedangkan Sinkronisasi program prioritas dalam RKP Nasional, RKPD Prov. Jatim dan RKPD Kab. Magetan tahun 2018, sebagai berikut :

TABEL 4.3
SIMKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN TAHUN 2018

Prioritas Urusan	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten
I. Pendidikan	a. Pendidikan Vokasi b. Peningkatan kualitas guru	a. Optimalisasi Pembangunan SMK Mini dalam menghadapi MEA b. Bosda SMK Mini c. Peningkatan kemampuan vokasional dan profesional Lulusan SMK d. Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Peningkatan sarana dan prasana pendidikan b. Penyediaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah jenjang SD Dan SMP c. peningkatan kualitas mutu pendidikan d. Bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu e. Peningkatan kualitas pendidik non-PNS
II. Kesehatan	a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit c. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	a. Pengembangan Taman Posyandu b. Pengendalian Penyakit Kusta c. Pengendalian HIV dan AIDS d. Pengendalian Penyakit TBC	a. penyediaan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin b. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah c. Melaksanaakn akreditasi Puskesmas d. Mewujudkan pogram kabupaten layak anak
III. Perumahan Dan Permukiman	a. Penyediaan Perumahan Layak b. Air Bersih dan Sanitasi	a. Penurunan Angka Backlog Perumahan b. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni c. Penyediaan Air Bersih di daerah rawan Air d. Peningkatan layanan pengelolaan Sampah	a. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni c. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Miskin
IV. Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata	a. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) d. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja e. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi	a. Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata b. Peningkatan dan pemantapan struktur Ruang c. Pengembangan Kawasan Agro Industri d. Pengembangan Industri dan Perdagangan	a. Mengembangkan jaringan pemasaran Usaha mikro/ industri kecil. b. Peningkatan kualitas pasar daerah dan pasar desa. c. Meningkatkan kualitas infrastruktur pada kawasan perdagangan dan industri. d. pembinaan industri kecil menengah (IKM). e. pengembangan obyek wisata unggulan, pengembangan agrowisata dan desa wisata menuju kota agropolitan. f. Penguatan investasi pihak swasta dalam bidang pengembangan kepariwisataan
V. Ketahanan Energi	a. EBT dan Konservasi Energi b. Pemenuhan Kebutuhan Energi	Meningkatkan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan	
VI. Ketahanan Pangan	a. Peningkatan Produksi pangan b. Pembangunan sarana dan prasarana	a. Efisiensi Mekanisme Pertanian b. Peningkatan Indeks Pertanaman	a. Pembangunan sarana/ prasarana pertanian, penyediaan bibit unggul dan penanganan

	pertanian (termasuk irigasi)	c. Pembangunan Waduk/Embung	<p>pasca panen</p> <p>b. Pengembangan produktivitas bidang peternakan dan perikanan.</p> <p>c. Pengembangan produk olahan hasil pertanian dan pembangunan pertanian berbasis agrowisata.</p>
VII. Penanggulangan Kemiskinan	<p>a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran</p> <p>b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar</p> <p>c. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi</p>	<p>a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>b. Pengembangan Koperasi dan UMKM</p>	<p>a. Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan bagi UKM</p> <p>b. Penyelenggaraan pendampingan program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan PMKS</p> <p>c. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.</p> <p>d. Fasilitasi kerjasama usaha dengan pihak ke III terhadap produk unggulan desa</p>
III. Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman	<p>a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda)</p> <p>b. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika</p>	<p>a. Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Selatan Jawa Timur</p> <p>b. Pengembangan Pelabuhan Multipurpose</p> <p>c. Pengembangan Sistem Aplikasi pemerintahan terintegrasi</p>	<p>a. Pembangunan infrastruktur daerah.</p> <p>b. Peningkatan jalan kabupaten, jalan antar kecamatan dan jalan antar desa.</p> <p>c. Peningkatan fasilitas bidang perhubungan</p>
IX. Pembangunan Wilayah	<p>a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal</p> <p>b. Pembangunan Perdesaan</p> <p>c. Reforma Agraria</p> <p>d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)</p> <p>e. Percepatan Pembangunan Papua</p>	<p>a. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di daerah tertinggal</p> <p>b. Meningkatkan responsivitas dalam menangani Bencana pada Tanggap Darurat Bencana di Jawa Timur</p>	<p>a. Kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pemasaran produk unggulan daerah.</p>
X. Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan	<p>a. Penguatan Pertahanan</p> <p>b. Stabilitas Politik dan Keamanan</p> <p>c. Kepastian Hukum</p> <p>d. Reformasi Birokrasi</p>	<p>a. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat</p> <p>b. Peningkatan Toleransi Sosial</p>	<p>a. Meningkatkan kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah, Forkopimda dan masyarakat dalam deteksi dini, pencegahan dan penangan konflik sosial.</p> <p>b. Peningkatan kualitas bidang pelayanan kepada masyarakat</p>

4.4.2 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Magetan

Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magetan, dalam pelaksanaan program pembangunan daerah tahun 2018 sebagai tahun terakhir perodesasi Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 agar mencapai hasil yang maksimal, secara kontinu tetap dilaksanakan melalui optimalisasi 8 program prioritas sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan keunggulan wilayah Kabupaten Magetan yaitu pendidikan, pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, kesehatan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, atau disingkat dengan akronim DITATA INDAH plus INSANI, dengan titik berat pada sektor pertanian.

1. Bidang Pendidikan

diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasana pendidikan serta peningkatan kualitas mutu pendidikan dan kemudahan akses layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, melalui program kegiatan prioritas:

- Penyediaan anggaran administrasi perkantoran bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)
- Rehabilitasi dan pemeliharaan gedung sekolah pendidikan dasar (SD & SMP)
- Peningkatan kualitas pendidik non-PNS

2. Bidang Pertanian

diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta penguatan produk olahan pertanian yang mempunyai keunggulan kompetitif, didukung pembangunan pertanian berbasis agrowisata, melalui program kegiatan prioritas :

- Penyediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen
- Penyediaan sarana/prasarana pertanian seperti jalan usaha tani (JUT), jaringan irigasi tersier (JIT), alat mekanisasi pertanian
- Pembangunan/ pemeliharaan sumur-sumur P2AT dan embung pertanian
- Pengembangan produktivitas bidang peternakan dan perikanan.
- Pengembangan produk olahan hasil pertanian dan pembangunan pertanian berbasis agrowisata.

3. Bidang Pariwisata

diarahkan pada pengembangan kawasan wisata sarangan, mengembangkan event-event dan destinasi wisata baru serta diperkuat dengan pengembangan agrowisata, melalui program kegiatan prioritas :

- pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan di kawasan wisata sarangan dan telaga wahyu
- pengembangan obyek agrowisata dan desa wisata guna mendukung Magetan menuju kota agropolitan
- Penguatan investasi pihak swasta dalam bidang pengembangan kepariwisataan

4. Bidang Industri dan Perdagangan

diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar arus distribusi barang serta ekspansi pasar, melalui program kegiatan prioritas :

- Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pelatihan ketrampilan, dan fasilitasi promosi produk IKM.
- Rehabilitasi pasar daerah dan pasar desa
- Pengembangan olahan produk lokal unggulan, misal : janggelan, kelinci, dll, dengan didukung penyediaan sarpras sentra pemasaran produk unggulan.

5. Bidang Kesehatan

diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata untuk seluruh penduduk, khususnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kelas 3 untuk masyarakat miskin, serta peningkatan kapasitas rumah sakit umum daerah, melalui program kegiatan prioritas:

- Penyediaan jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin
- Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah
- Rehabilitasi puskesmas beserta jaringannya
- Melaksanakan akreditasi Puskesmas

6. Bidang infrastruktur

diarahkan untuk menyediakan infrastruktur pelayanan umum yang berkualitas dan infrastruktur penumbuh daya saing agrobisnis, melalui program kegiatan prioritas :

- Pembangunan jalan twinroad Maospati – Sukomoro (lanjutan)
- Peningkatan jalan kabupaten, jalan antar kecamatan dan jalan antar desa.
- Pembukaan akses jalan baru pasar sayur (lanjutan)

- Perencanaan Pembangunan gedung Sekretariat Daerah di eks hotel semeru
- Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
- Rehabilitasi saluran air dan jaringan irigasi pengairan
- Peningkatan fasilitas bidang perhubungan
- Pembangunan alun-alun Kab. Magetan (lanjutan)
- Pembangunan Stadion Yosonegoro (lanjutan)

7. Pengentasan Kemiskinan

diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin serta pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa, melalui program kegiatan prioritas :

- Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan bagi UKM
- Penyelenggaraan pendampingan program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan PMKS
- Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Miskin
- Fasilitasi kerjasama usaha dengan pihak ke III terhadap produk unggulan desa
- Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

Selain Program DITATA INDAH plus INSANI yang menjadi prioritas pembangunan Kab. Magetan, hal mendasar yang tetap menjadi perhatian adalah pembangunan bidang aparatur (birokrasi pemerintahan), sebagai unsur pelaksana pembangunan daerah. Tanpa didukung birokrasi yang berkualitas, pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah tidak akan berjalan lancar, dan pencapaian target pembangunan sulit dicapai. Pembangunan bidang pemerintahan meliputi peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan, pemantapan penataan organisasi perangkat daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan PNS melalui penganggaran Tunjangan Perbaikan penghasilan (TPP).

Sementara itu, titik ungu pembangunan tahun 2018 dengan tema pembangunan pencapaian pertumbuhan ekonomi (agrobisnis) melalui penguatan kerjasama antar daerah dan swasta dalam rangka perluasan

pasar produk agribis, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pasar produk agrobisnis. Fokus prioritas sesuai arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

1. Kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pemasaran produk unggulan daerah.
2. Mengembangkan jaringan pemasaran Usaha mikro/ industri kecil melalui fasilitasi promosi dan kerjasama dengan BUMD / BUMN maupun swasta.
3. Peningkatan kualitas pasar daerah dan pasar desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan desa
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur pada kawasan perdagangan dan industri, serta infrastruktur yang mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa

Secara rinci hubungan antara sasaran, strategi, arah kebijakan dengan Bidang urusan dan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.4
SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KAB MAGETAN

No	Bidang urusan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1	Bidang Pertanian	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	Mengembangkan usaha pertanian terpadu berbasis agrobisnis	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program pengembangan budidaya perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
2	Bidang Pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	Menguatkan sektor pariwisata yang didukung sektor pertanian berwawasan lingkungan	Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan kemitraan pariwisata
3	Bidang Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	Menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dengan mengarusutamakan green economy	Program perencanaan pembangunan ekonomi

No	Bidang urusan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
4	Bidang Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	Mengembangkan pusat-pusat perdagangan dengan mengutamakan pedagang tradisional	Program pembinaan pedagang kali lima dan asongan Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
5	Bidang Industri	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan lainnya	Program pengembangan industri kecil dan menengah Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program pengembangan sentra-sentra industri
6	Bidang Ketahanan Pangan	Terwujudnya stabilitaspangan dan energi utama	Melakukan pemantauan stok dan distribusi pangan serta menyediakan stok komoditas dan kebutuhan pokok	Program pengembangan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan Program penganekaragaman dan keamanan pangan
7	Bidang UMKM	Meningkatkan kegiatan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM dan koperasi, baik pembinaan kelembagaan, manajemen, akses permodalan maupun fasilitasi pemasaran	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
8	Bidang Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	Mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan PMKS Memberikan bimbingan dan ketrampilan bagi pencari kerja untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang menyerap tenaga kerja Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dalam rangka menyiapkan peserta didik menjadi wirausaha baru Melakukan pembinaan pemerintahan dan kelembagaan desa serta memberikan bantuan stimulan untuk menumbuhkan swadaya masyarakat	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pembinaan anak terlantar Program peningkatan kesempatan kerja Program pendidikan menengah Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program wilayah terpadu antar desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
9	Bidang Pendidikan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun (termasuk pendidikan inklusif) dan meningkatkan kualitas pendidikan usia dini melalui penyediaan sarana, prasarana, serta tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas Menyelenggarakan pendidikan non formal serta menuntaskan pemberantasan buka aksara	Program pendidikan anak usia dini Program wajib belajar pendidikan dasar Program pendidikan menengah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan Program management pelayanan pendidikan Program pendidikan non formal
10	Bidang Kesehatan	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penyediaan sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan obata-obatan serta tenaga kesehatan yang kompeten dan	Program upaya kesehatan masyarakat Program obat dan perbekalan kesehatan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

No	Bidang urusan	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
			memadai.	Program pemberdayaan sumberdaya kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya
			menyempurnakan pelaksanaan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
11	Bidang lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas permukiman yang layak dan sehat	Pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan Melakukan pemeliharaan dan perluasan RTH publik dengan melibatkan peran swasta dalam menyediakan RTH publik dan privat serta menerapkan regulasi tentang ketentuan luasan RTH privat	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Program peningkatan pengendalian polusi Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
12	Bidang Infrastruktur Bina Marga dan Cipta Karya	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan memadai	Menyediakan fasilitas jalan, jembatan dan pendukungnya yang berkualitas, aman dan nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor, tidak bermotor maupun pejalan kaki Membangun sistem drainase yang meminimalisir genangan air Menyediakan penerangan jalan umum secara optimal Menyediakan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan sesuai standar kebutuhan Meningkatkan standar kualitas layanan angkutan	Program peningkatan jalan dan jembatan Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Program pembangunan turap/talud/bronjong Program pembangunan infrastruktur pedesaan Program peningkatan sarana dan prasarana kebina margaan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan dan pelayanan angkutan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
13	Bidang Infrastruktur Pengairan	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan jaringan irigasi	Menyediakan prasarana penyedia dan penampung air baku Melakukan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta pembinaan terhadap petani pemakai air	Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program prioritas yang ditetapkan adalah dalam upaya mencapai arah kebijakan yang telah ditentukan, sehingga ditetapkan target capaian kinerja pembangunan daerah dalam RKPD 2018 sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL 4.5
TARGET CAPAIAN KINERJA RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2018

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
INDIKATOR MAKRO			
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,4	5,4	.
PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)	26,62	26,62	
PDRB per kapita ADHK (Rp. Juta)			
PDRN perkapita ADHK (Th. 2000 Rp. juta)	7,401	7,401	
Tingkat inflasi (%)	4-5	4-5	
Angka kemiskinan (%)	7,17	10,41	
Angka pengangguran terbuka (%)	2,56	2,56	
IPM	71,56	72,55	
INDIKATOR PELAYANAN UMUM			
Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Pendidikan			
Angka melek huruf	100	100	Dinas Dikpora
Angka rata-rata lama sekolah	12 thn	12 thn	Dinas Dikpora
Angka partisipasi kasar			
- Anak usia dini	55,68%	55,68%	Dinas Dikpora
- SD/MI	111,62	111,62	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	101,37	101,37	Dinas Dikpora
- SMA/SMK/MA			Dinas Dikpora
Angka Partisipasi Murni			
- SD/MI	100	100	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	95	95	Dinas Dikpora
- SMA/SMA/SMK/MA	-		Dinas Dikpora
Angka putus sekolah			
- SD/MI	0,02	0,02	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	0,02	0,02	Dinas Dikpora
- SMA/SMK/MA	-		Dinas Dikpora
Angka kelulusan			
- SD/MI	100%	100%	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	100%	100%	Dinas Dikpora
- SMA/SMK/MA	100%		Dinas Dikpora
Angka melanjutkan			
- Dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	100%	Dinas Dikpora
- Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	95%	95%	Dinas Dikpora
Ruang kelas kondisi baik :			
- SD/MI	85,00%	85,00%	Dinas Dikpora
- SMP/MTs	100%	100%	Dinas Dikpora
- SMA/SMK/MA	100%		Dinas Dikpora
Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4	100%	100%	Dinas Dikpora
Jumlah gedung SMP/MTs yang memiliki Lab. IPA	90%	90%	Dinas Dikpora
Persentase SD/ MI berakreditasi B (RPJMN)	78%	78%	Dinas Dikpora
Persentase SMP/ MTs berakreditasi B (RPJMN)	75%	75%	Dinas Dikpora
Kesehatan			
Angka usia harapan hidup	72	72	Dinas Kesehatan
Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	23	23	Dinas Kesehatan
Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	14	14	Dinas Kesehatan
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	102	102	Dinas Kesehatan

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	32	32	Dinas Kesehatan
Persentase balita gizi buruk	<1%	<1%	Dinas Kesehatan
Prosentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	88%	88%	Dinas Kesehatan
Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (RPJMN)	92,5	92,5	Dinas Kesehatan
Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kelahiran terlatih	90	90	Dinas Kesehatan
Jumlah Jumlah Kecamatan yang memiliki Puskesmas yang terakreditasi (RPJMN)	18	18	Dinas Kesehatan
Jumlah Kecamatan memiliki Puskesmas minimal 5 jenis tenaga kesehatan (RPJMN)	22	22	Dinas Kesehatan
Prevelansi Tuberculosis / TB (RPJMN)			
Persentase balita gizi buruk	0,46	0,46	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	90	90	Dinas Kesehatan
Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	224	224	Dinas Kesehatan
Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	88	88	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2	≥ 2	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan dan Penanganan pneumonia balita	100	100	Dinas Kesehatan
Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria	0	0	Dinas Kesehatan
Angka kejadian malaria per 1000 penduduk	<1	<1	Dinas Kesehatan
Prevalensi HIV/AIDs (%) dari total populasi	<0,5	<0,5	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	Dinas Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk	0,3	0,3	Dinas Kesehatan
Rasio tenaga medis persatuan penduduk:			
Perawat	0,84	0,84	Dinas Kesehatan
Bidan	0,55	0,55	Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100	100	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif	85	85	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi	90	90	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95	95	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standart pelayanan antenatal	100%	100%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standart pelayanan persalinan	100%	100%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standart pelayanan kesehatan bayi baru	100%	100%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan balita sesuai standart pelayanan balita	100%	100%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standart pelayanan skrining kesehatan usia pendidikan dasar	100%	100%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standart skrining kesehatan usia produktif	100%	100%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standart skrining kesehatan usia lanjut	100%	100%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standart pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	100%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes militus sesuai standart pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	100%	100%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang gangguan jiwa	100%	100%	Dinas Kesehatan

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
sesuai standart pelayanan kesehatan kesehatan jiwa			
Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standart pelayanan kesehatan TB	80%	80%	Dinas Kesehatan
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standart pelayanan pemeriksaan HIV	100%	100%	Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah			
Gawat Darurat			
Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	ATLS & ACLS (Dokter 100%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	ATLS & ACLS (Dokter 100%) BTLS & BCLS (Perawat 100%)	RSUD Dr. Sayidiman
Ketersediaan tim penanggulangan bencana	ADA (Tim Disaster RS)	ADA (Tim Disaster RS)	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	4 menit	4 menit	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Kematian pasien ≤ 24 jam	1/1000	1/1000	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	90%	90%	RSUD Dr. Sayidiman
Rawat Jalan			
Dokter Spesialis pemberi pelayanan di Poliklinik	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketersediaan Pelayanan	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	K. Saraf K.Paru K.Dalam K.Bedah K.Anak K.Mata K.Kebidanan K. Gigi dan Mulut K. Kulit dan Kelamin K. THT K. DOTS K. VCT K. Umum	RSUD Dr. Sayidiman
Jam buka Pelayanan	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	07.30 s/d 12.30 Setiap Hari Kerja kecuali Jum'at: 08.00 - 11.00 WIB	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu tunggu di rawat jalan	± 20 menit	± 20 menit	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	95%	95%	RSUD Dr. Sayidiman
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Rawat Inap			
Pemberi Palayanan di Rawat Inap	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Jam Visite Dokter Spesialis	07.30-14.00	07.30-14.00	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Infeksi Pasca Operasi	0	0	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Infeksi Nosokomial	0	0	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/ kematian	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Kematian pasien > 48 jam	0,24%	0,24%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Pulang Paksa	1%	1%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pasien	95,00%	95,00%	RSUD Dr. Sayidiman
Rawat Inap TB:		100%	RSUD Dr. Sayidiman
a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%		RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNGUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	75%	75%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Bedah Sentral</u>			
Waktu tunggu operasi elektif	1 hari	1 hari	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu tunggu operasi cito	30 menit	30 menit	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian Kematian di meja operasi	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Komplikasi anaestesi karena overdosis, reaksi anaestesi dan salah penempatan endotracheal tube	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Persalinan dan Perinatologi</u>			
Kejadian kematian ibu karena persalian	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	a. 0.076% b. 0.0196% c. 0%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	70%	70%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan persalinan dengan operasi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Kemampuan menangani BBLR (\leq 2500 gr)	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	20%	20%	RSUD Dr. Sayidiman
Keluarga Berencana:			RSUD Dr. Sayidiman
a. Presentase KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten (dr SpOG, dr SpB, dr SpU, dr umum terlatih)	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	80%	80%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Intensif</u>			
Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
Pemberi pelayanan Unit Intensifi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Pelayanan Unit Intensif	85%	85%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Radiologi</u>			
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	45 menit	45 menit	RSUD Dr. Sayidiman
Pelaksana Ekspertisi	95%	95%	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	0,70%	0,70%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	80%	80%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Laboratorium Patologi Klinik</u>			
Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	130 mnt	130 mnt	RSUD Dr. Sayidiman
Pelaksana Ekspertisi	Dokter Sp. PK.	Dokter Sp. PK.	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan pelanggan	90%	90%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Rehabilitasi Medik</u>			
Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	85%	85%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Farmasi</u>			
Waktu tunggu pelayanan			RSUD Dr. Sayidiman
a. Obat Jadi	25 menit	25 menit	RSUD Dr. Sayidiman
b. Obat Racikan	45 menit	45 menit	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Obat	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Kepuasan Pelanggan	80%	80%	RSUD Dr. Sayidiman
Penulisan resep sesuai dengan formularium	98%	98%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)</u>			

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNGUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
Ada anggota Tim PPI yang terlatih	65%	65%	RSUD Dr. Sayidiman
Tersedia APD di setiap instalasi/ departement	60%	60%	RSUD Dr. Sayidiman
Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/ HAI (Health Care Associated Infections) di RS (minimum 1 parameter)	65%	65%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Gizi</u>			
Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	18%	18%	RSUD Dr. Sayidiman
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Transfusi Darah</u>			
Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi	100% terpenuhi	RSUD Dr. Sayidiman
Kejadian reaksi transfusi	0%	0%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Pelayanan GAKIN</u>			
Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Rekam Medis</u>			
Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	98%	98%	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	7 menit	7 menit	RSUD Dr. Sayidiman
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	14 menit	14 menit	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Limbah Pengelolaan</u>			
Baku mutu limbah cair	20,3% 65% 15 6,79	20,3% 65% 15 6,79	RSUD Dr. Sayidiman
Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Administrasi dan Manajemen</u>			
Tindak Lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	95%	95%	RSUD Dr. Sayidiman
Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	57%	57%	RSUD Dr. Sayidiman
Cost Recovery	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	1 jam	1 jam	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Ambulance/ Mobil Jenazah</u>			
Waktu Pelayanan ambulance/mobil jenazah	24 jam	24 jam	RSUD Dr. Sayidiman
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/mobil jenazah di Rumah Sakit	30 menit	30 menit	RSUD Dr. Sayidiman
Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	Sesuai ketentuan daerah	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Pemulasaran Jenazah</u>			
Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaran jenazah	1 jam	1 jam	RSUD Dr. Sayidiman
<u>Laundry</u>			
Tidak Adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
<u>PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT</u>			
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	30 menit	30 menit	RSUD Dr. Sayidiman

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNGUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	100%	RSUD Dr. Sayidiman
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Prosentase jalan kabupaten kondisi baik	81,54%	81,54%	Dinas PU PR
Jumlah jembatan kondisi baik	233	286	Dinas PU PR
Rasio jaringan irigasi kondisi baik	72,25%	72,25	Dinas PU PR
Dokumen RTRW	ada	Ada	Dinas PU PR
Dokumen RDTRK	18	18	Dinas PU PR
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
Rumah tangga pengguna air bersih	75%		Dinas Perkim
Rumah tangga bersanitasi	90%		Dinas Perkim
Prosentase rumah layak huni	100%	98%	Dinas Perkim
Prosentase permukiman layak huni	100%	100%	Dinas Perkim
Persentase luas kawasan kumuh	0,60%	0,60%	Dinas Perkim
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	16%		Dinas Perkim
Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan	24%	16%	Dinas Perkim
Ket entraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
Rasio Poskaming per desa/kelurahan	6,40%	6,40%	Sat Pol PP& Damkar
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)	0,01%	0,01%	Sat Pol PP& Damkar
Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman, keindahan)	95%	95%	Sat Pol PP& Damkar
Rasio penegakan perda/jumlah pelanggaran perda	98%	98%	Sat Pol PP& Damkar
Jumlah lembaga/kelompok masyarakat siaga bencana terlatih (orang)	417	417	BPBD
Rasio penegakan perda/jumlah Cakupan layanan bencana Kebakaran (SPM)	80%	80%	Sat Pol PP& Damkar
Tingkat Respon Time Kebakaran (SPM)	75%	75%	Sat Pol PP& Damkar
Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri			
Persentase LSM, Ormas, dan OKP yang dibina	100%	100%	Bakesbangpol
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	6	6	Bakesbangpol
Sosial			
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,64%	4,64%	Dinsos
Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	4,57%	4,57%	Dinsos
Prosentase PMKS yang mendapatkan jaminan sosial	65%	65%	Dinsos
Prosentase korban bencana yang mendapat bantuan social (SPM)	100%	100%	Dinsos
Prosentase korban bencana yang dievakuasi (SPM)	100%	100%	Dinsos
Pelayanan Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar			
Tenaga Kerja			
Angka partisipasi angkatan kerja	70,11%	70,11%	Disnaker
Tingkat pengangguran terbuka	3%	3%	Disnaker
Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek aktif	56,21%	56,21%	Disnaker
Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)	3,50%	3,50%	Disnaker
Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM)	2,50%	2,50%	Disnaker
Besaran pekerja/ buruh yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (SPM)	7,5%	7,5%	Disnaker
Prosentase Pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan (SPM)	70%	70%	Disnaker
Besaran pemeriksaan perusahaan (SPM)	100%	100%	Disnaker
Besaran pengujian peralatan perusahaan (SPM)	3,5%	3,5%	Disnaker

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
Rasio KDRT	0,10%	0,10%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	Dinas PPKB & PPPA
Partisipasi angkatan kerja perempuan	88	88	Dinas PPKB & PPPA
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit	25%	25%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	25%	25%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	26%	26%	Dinas PPKB & PPPA
Pangan			
Ketersediaan energi dan protein perkapita	65%	65%	Dinas TPHPKP
Penguatan cadangan pangan	70%	100%	Dinas TPHPKP
Skor pola pangan harapan	90%	90%	Dinas TPHPKP
Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	80%	100%	Dinas TPHPKP
Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	74%	90%	Dinas TPHPKP
Penanganan kerawanan pangan	65%	65%	Dinas TPHPKP
Pertanahan			
Persentase rekomendasi ijin lokasi yang diberikan	100%	100%	Dinas Perkim
Lingkungan hidup			
Persentase penangan sampah perkotaan	90%	90%	Dinas LH
Ruang terbuka hijau perkotaan	25%	16%	Dinas Perkim
Luas lahan kritis/lahan kritis tertangani	2.614	2.614	Dinas LH
Prosentase usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara	37,5%	37,5%	Dinas LH
Prosentase usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang menaati persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara	100%	100%	Dinas LH
Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	Dinas LH
Kependudukan dan catatan sipil			
Prosentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	100%	100%	Dispendukcapil
Presentase penduduk berakta kelahiran	80	80	Dispendukcapil
Presentase anak berakte kelahiran	85	85	Dispendukcapil
Persentase keluarga ber KK	100	100	Dispendukcapil
Pemberdayaan masyarakat desa			
Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	207	207	Dinas PMD
Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK	252	252	Dinas PMD
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera			
Laju pertumbuhan penduduk	<1,19%	<1,19%	Dinas PPKB & PPPA
Angka Kelahiran	<2,3%	<2,3%	Dinas PPKB & PPPA
Rasio akseptor KB	74,65	74,65	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan peserta KB aktif	74,65	74,65	Dinas PPKB & PPPA
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	28%	28%	Dinas PPKB & PPPA

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
Anmetneed kebutuhan Keluarga berencana (KB) yang tidak terpenuhi	10%	10%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	77%	77%	Dinas PPKB & PPPA
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	77%	77%	Dinas PPKB & PPPA
Perhubungan			
Load factor	0,56	0,56	Dishub
Jumlah uji kir angkutan umum	1460	1460	Dishub
Prosentase uji kir angkutan umum	92	92	Dishub
Prosentase pemasangan rambu lalu lintas	85,4	85,4	Dishub
Prosentase pemasangan marka jalan	24,6	24,6	Dishub
Penerangan jalan umum	80%	100%	Dinas PU PR
Komunikasi dan informatika			
Jumlah pemberitaan melalui :			
- Media massa	230	230	Dinas Kominfo
- Media luar ruang	60	60	Dinas Kominfo
Prosentase SKPD yang menyediakan data di website resmi	100%	100%	Dinas Kominfo
Jumlah pertunjukan rakyat	6	6	Dinas Kominfo
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan telecenter	10	10	Dinas Kominfo
Desiminasi Informasi (SPM) :			
- media cetak	30	30	Dinas Kominfo
- Radio	60	60	Dinas Kominfo
- Televisi	15	15	Dinas Kominfo
- Media online	365	365	Dinas Kominfo
- pertunjukan rakyat	6	6	Dinas Kominfo
- media tatap muka	36	36	Dinas Kominfo
- Media luar ruang	60	60	Dinas Kominfo
- Media tercetak/ rekam	1	1	Dinas Kominfo
Koperasi, usaha kecil dan menengah			
Persentase koperasi aktif	86	86	Dinkop & UM
Jumlah UKM non BPR/KLM	1.194	1.194	Dinkop & UM
Jumlah BPR/LKM	184	184	Dinkop & UM
Penanaman modal			
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	Dinas PM & PTSP
Jumla nilai investasi berskala lokal (non PMDN/PMA) dalam juta	960.000	960.000	Dinas PM & PTSP
terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	40 kl	40 kl	Dinas PM & PTSP
Kepemudaan dan olah raga			
Jumlah klub olah raga	28	28	Dinas Parbud
Jumlah gedung olah raga	30	30	Dinas Parbud
Jumlah gedung olah raga	30	30	Dinas Parbud
Jumlah organisasi pemuda aktif	290	290	Dinas Dikpora
Jumlah kegiatan/ kompetisi olah raga	30	30	Dinas Dikpora
Statistik			
Buku kabupaten dalam angka	Ada	Ada	Dinas Kominfo
Buku PDRB kabupaten magetan	Ada	Ada	Dinas Kominfo
Kecamatan dalam angka	18	18	Dinas Kominfo
Kebudayaan			
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2	2	Dinas Parbud
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	7	Dinas Parbud
Cakupan kajian seni	50%	50%	Dinas Parbud
Cakupan fasilitas seni	57,14%	57,14%	Dinas Parbud
Cakupan gelar seni	100%	100%	Dinas Parbud
Misi kesenian	100%	100%	Dinas Parbud
Cakupan SDM kesenian	37,5%	37,5%	Dinas Parbud
Cakupan tempat seni	100%	100%	Dinas Parbud

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNGUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
Cakupan organisasi seni	100%	100%	Dinas Parbud
Perpustakaan			
Jumlah perpustakaan	845	845	Dinas Arpus
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	30.000	30.000	Dinas Arpus
Koleksi buku yang tersedia	83.000	83.000	Dinas Arpus
kearsipan			
Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100%	100%	Dinas Arpus
PELAYANAN URUSAN PILIHAN			
Kelautan dan perikanan			
Budidaya ikan (ton)	1,772.6	1,772.6	Disnakan
Konsumsi ikan (Kg/Kapita/th)	20.09	16,65	Disnakan
Pembudidaya ikan (orang)	2,8	2,8	Disnakan
Jumlah unit pembenihan (UPR)	52	52	Disnakan
Produksi Perikanan Tangkap (PUD) (ton)	40.33	40.33	Disnakan
Pertanian			
Jumlah produksi hasil pertanian			
- Padi (kw)	4.000.000	4.000.000	Dinas TPHPKP
- Jagung (kw)	800.000	1.042.720	Dinas TPHPKP
- Kedelai (kw)	75.000	75.000	Dinas TPHPKP
- Tebu (kw)	575.000	464.464	Dinas TPHPKP
Jumlah produksi peternakan			
- Sapi (ekor)	200.000	125.000	Disnakan
- Kambing (ekor)	49.000	49.000	Disnakan
- Ayam (ekor)	8.500.000	8.500.000	Disnakan
- Telur (Kg)	19.000.000	19.000.000	Disnakan
Energi dan sumber daya mineral			
Jumlah titik pemasangan energi alternatif terbarukan (biogas)	110	110	Bag. Adm. SDA
Pariwisata			
Angka kunjungan wisata	956.409	956.409	Dinas Parbud
Length of stay	2	2	Dinas Parbud
Jumlah PAD sektor wisata (Rp juta)	9.251.550	9.251.550	Dinas Parbud
Perdagangan			
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4	4	Dinas Perindag
persentase pasar tradisional kondisi baik	80%	80%	Dinas Perindag
Perindustrian			
Pertumbuhan industri	15.999	15.999	Dinas Perindag
Cakupan bina kelompok pengrajin	52	52	Dinas Perindag
Ketransmigrasian			
Jumlah transmigran ditempatkan (KK)	90	90	Dinas Naker
FOKUS URUSAN PENUNJANG			
Perencanaan			
Tingkat keselarasan Renstra dengan RPJMD	100%	100%	Bappeda Litbang
Tingkat keselarasan Renja dengan RKPD	100%	100%	Bappeda Litbang
Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	100%	100%	Bappeda Litbang
Tingkat keselarasan Renja dengan Renstra	100%	100%	Bappeda Litbang
Keuangan			
Prosentase belanja pegawai (RPJMN)	46%	46%	BPPKAD
Prosentase belanja modal (RPJMN)	13%	13%	BPPKAD
Prosentase pajak/ retribusi daerah terhadap total pendapatan (RPJMN)	3,5%	3,5%	BPPKAD
Kepegawaian			
Tingkat pendidikan aparatur (S1, S2, S3)	69%	69%	BKD
Pendidikan dan Pelatihan			
Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	260	260	BKD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	250	250	BKD
Prosentase pejabat yang mengikuti fit and proper test	975	0	BKD

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA		SKPD PENANNUNG JAWAB
	TAHUN AKHIR RPJMD (TAHUN 2018)	RKPD 2018	
Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar/ijin belajar	1.310	1.310	BKD
Jumlah pejabat yang mengikuti assesment	90	90	BKD
Penelitian dan Pengembangan			
Jumlh produk inovasi	3	3	Bappeda Litbang
Fungsi penunjang lainnya			
Peringkat kinerja penyelenggaraan otoda	<50	<50	Bag. Pemerintahan
Hasil evaluasi Lakip	CC	B	Bag. Organisasi
Hasil predikat pemeriksaan/ pengawasan pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	Inspektorat
Skor Indeks Kepuasan masyarakat	75	75	Bag. Organisasi
Prosentase penerapan SPM di OPD	75%	75%	Bag. Organisasi

4.2.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan Daerah

1. E-Planning

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Permasalahan utama dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah adalah inkonsistensi, yang pertama inkonsistensi antara perencanaan pada level kabupaten dengan wilayah yang lebih tinggi (Provinsi dan Pusat) atau wilayah yang lebih rendah (Kecamatan dan Desa/Kelurahan), yang kedua inkonsistensi antar dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD, dan yang ketiga inkonsistensi antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta pagu indikatif kegiatan. Selain ketiga hal tersebut, sulitnya melakukan kategorisasi program dan kegiatan juga menjadi penyebab ketidakefektifan rencana program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan prioritas pembangunan tahun berkenaan.

Permasalahan tersebut akan terus dihadapi apabila tidak dilakukan terobosan dan inovasi. Untuk itu, pengembangan sebuah sistem teknologi informasi untuk membantu proses pendataan pada setiap tahapan perencanaan perlu dilakukan dengan membuat manajemen pembangunan secara modern menggunakan sistem teknologi informatika sebagai sarana mempermudah operasi sistem pembangunan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Bappeda Litbang Kab. Magetan berkomitmen menyusun sistem aplikasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penganggaran (E-Planning) yang dinamakan Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). E-Planning tersebut merupakan sistem yang dikembangkan menggunakan teknologi informasi agar dapat diakses dimanapun berada dan bersifat interaktif, sebagai alat untuk mengentry kegiatan dan anggaran juga untuk melakukan proses perencanaan secara baik dan benar.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD/ E-Planning) Kabupaten Magetan dikembangkan dalam penyusunan RKPD, KUA-PPAS, KUPA-PPAS Perubahan, dan RKPD Perubahan, agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dengan adanya alat bantu SIPPD dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan. Mulai tahun 2017 untuk penyusunan anggaran tahun 2018, Aplikasi SIPPD Kab. Magetan akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan penyusunan Pra-RKA (Pra Rencana Kerja dan Anggaran), sehingga diketahui secara lebih rinci rencana penggunaan anggaran tiap kegiatan, sehingga lebih membantu Bapepda Litbang melakukan verifikasi anggaran.

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penggunaan aplikasi SIPPD antara lain :

- a. Menjaga konsistensi program/kegiatan dalam dokumen RKPD/ KUA-PPAS dengan dokumen perencanaan lain sehingga kegiatan dan anggaran yang direncanakan sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- b. Mengakomodasi berbagai pendekatan perencanaan yang meliputi pendekatan Teknokratis, Partisipatif, Politis, Top-Down dan Bottom Up sehingga tercipta harmoni perencanaan dan pengendalian.
- c. Proses verifikasi dan analisis Program/kegiatan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien karena setiap usulan memiliki informasi lengkap dan terperinci baik input, output, lokasi, serta daya dukung terhadap target capaian prioritas pembangunan daerah.
- d. Proses input program/kegiatan dan pengolahan data baik oleh SKPD maupun Tim Bappeda serta penyusunan laporan hasil analisis dapat dilakukan lebih fleksibel, tidak terbatas tempat dan waktu kapanpun dimanapun selama terhubung jaringan internet.
- e. Penyusunan laporan secara manual yang sebelumnya memakan waktu lama dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat.

- f. BAPPEDA Litbang dapat membuat batasan pagu indikatif untuk setiap SKPD sesuai dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, kepentingan dan prioritas daerah.
- g. Terdapat menu analisis bagi pemangku kepentingan agar dapat dengan cepat memahami kesesuaian rencana yang telah disusun terhadap visi misi, prioritas, sasaran dan lokasi.

2. Penganggaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD

Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan di Indonesia mengacu kepada sistem pemberian gaji dasar yang sangat rendah, serta tidak secara langsung menyesuaikan dinamika perubahan inflasi dan biaya hidup dari tahun ke tahun. Selain itu, dengan tingkat inflasi Indonesia yang relatif tinggi, berdampak terhadap semakin lemahnya daya beli masyarakat, termasuk PNS. Dengan sistem penggajian sekarang ini, mayoritas PNS di Indonesia akan merasa sulit untuk mendukung pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari setiap bulannya, walaupun dalam kategori hidup sederhana.

Sistem penggajian ini diyakini merupakan salah satu penyebab timbulnya korupsi. Bentuk korupsi tersebut adalah dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan aturan hukum yang lemah untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup.

Selama ini, kebijakan pemberian honorarium kepada PNS hanya terbatas kepada PNS yang terlibat pada kegiatan proyek, pada unit kerja teknis tertentu yang justru menimbulkan ketimpangan dan berpotensi menyulut kecemburuan antar PNS. Kondisi tersebut mengakibatkan demotivasi kerja bagi sebagian besar PNS. Cara yang diterapkan hampir sama yaitu dengan memberikan tambahan pendapatan secara merata kepada seluruh pegawai. Pemberian tambahan pendapatan tersebut dimaksud supaya tidak menimbulkan kecemburuan diantara PNS.

Berdasarkan realita tersebut diatas, meski sudah tertinggal dari kabuapten/ kota yang lain, maka Pemerintah Kabupaten Magetan mulai tahun anggaran 2018 menganggarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi PNS daerah.

Dengan diberlakukannya kebijakan TPP bagi PNS daerah Kab. Magetan diharapkan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan tersebut bersifat rutin diterima pegawai per-bulan sehingga menumbuhkan keyakinan pegawai dalam

menetapkan perencanaan kebutuhan hidupnya. Disisi lain pemberian tambahan penghasilan diarahkan agar seluruh PNS termasuk pegawai pada garis depan pelayanan agar dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai standar prosedur baku (SOP) yang ditetapkan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

Penyusunan rencana program dan kegiatan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2018 lebih diarahkan pada program-program prioritas daerah dan pencapaian target-target indikator kinerja yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018, dan dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Program prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Magetan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pemenuhan/ pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan, mendukung program strategis nasional dan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah kab. Magetan, diantaranya :

- a. Penyediaan Alokasi Dana Desa (ADD), 10% Dana perimbangan setelah dikurangi DAK, ditambah 10% pajak dan retribusi daerah.
- b. Pengalokasian dana BPJS ketenagakerjaan bagi PNS
- c. Penyertaan modal PDAM, BPRS dan Bank UMKM Jatim
- d. Penyediaan dana Pilkada Kab. Magetan tahun 2018
- e. Mewujudkan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau
- f. Penguatan pembangunan pertanian dan pencapaian swasembada pangan
- g. Penguatan pembangunan infrastruktur daerah
- h. Percepatan penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran, serta masalah sosial lainnya
- i. Pengembangan bidang kepariwisataan sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah
- j. Pembangunan ekonomi daerah berbasis pengembangan ekonomi lokal
- k. Pengalokasian anggaran untuk mengakomodir usulan Musrenbang Kecamatan minimal 500 juta rupiah tiap Kecamatan.

Selanjutnya, Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 sebagai tahun terakhir perodesasi Perubahan RPJMD Kab. Magetan tahun 2013 – 2018 adalah optimalisasi dan pemantapan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target – target kinerja pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

B. Program Strategik tahun 2018

- Pengembangan produk olahan hasil pertanian dan pembangunan pertanian berbasis agrowisata, diintegrasikan dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Magetan (Peraturan Bupati Magetan Nomor 52 tahun 2016).
- Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (PBI Pusat dan PBI Daerah)
- penguatan investasi dari BUMN dan swasta dalam bidang pengembangan kepariwisataan.
- Penganggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) jenjang SD dan SMP, selanjutnya pihak sekolah dilarang mengadakan pungutan kepada siswa.
- Pengembangan olahan produk lokal unggulan, misal : janggolan, kelinci, dll, dengan didukung penyediaan sarpras sentra pemasaran produk unggulan daerah.
- Peningkatan pelayanan kesehatan melalui sistem informasi pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dengan penerapan E-WARAS BEBAS BIAYA.
- Reformasi Kualitas layanan kesehatan, khususnya peningkatan kualitas petugas pelayanan kesehatan.
- Pengadaan tanah untuk relokasi Lingkungan Industri Kulit (LIK) oleh swasta.
- Pembangunan lanjutan jalan twinroad Maospati – Sukomoro dan Pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dengan penerapan “ROAD MANAGEMENT SYSTEM”, Kabupaten merapkan pengelolaan pembangunan jalan dengan sistem pembiayaan kerjasama APBN.
- Pengalokasian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD.

C. Program Pengentasan Kemiskinan & Penurunan angka pengangguran terbuka

Angka kemiskinan Kab. Magetan yang masih diatas 11 % dan tingkat pengangguran terbuka masih diatas 3 %, diperlukan program *holistic - thematic* (program lintas OPD) untuk merumuskan penanganannya, yaitu diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan pemerintahan desa untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa, melalui program kegiatan prioritas :

- Pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan bagi UKM

- Penyelenggaraan pendampingan program perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan PMKS
- Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Miskin dari APBN
- Subsidi pembangunan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan sistem hibah air minum dari APBN melalui program Pengelolaan Air Munium Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
- Fasilitasi kerjasama usaha dengan pihak ke III terhadap produk unggulan desa
- Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

Sedangkan rekapitulasi Belanja Langsung RKPD Tahun 2018 untuk setiap Perangkat Daerah, program dan kegiatan SKPD secara lengkap dan rinci tertuang dalam buku lampiran II RKPD tahun 2018 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen ini.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan RKPD tahun 2018 ini dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan daerah, menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait demi mewujudkan arah dan tujuan pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Magetan, selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD tahun 2018, sebagai dasar dalam penyusunan Renja dan RKA-SKPD, serta menjadi pedoman penyusunan APBD tahun 2018.

Hal-hal lain yang secara substansial terjadi perubahan pada tahun berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2018, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tetap berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 46 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 OKTOBER 2017

REKAPITULASI PLAFOND ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PLAFOND (Rp.)
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	71.494.925.000
2	DINAS KESEHATAN	133.447.862.187
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100.793.072.793
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	5.771.250.000
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.985.796.000
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.754.650.000
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.223.950.150
8	DINAS SOSIAL	2.101.500.000
9	DINAS TENAGA KERJA	3.887.384.000
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.208.507.200
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.152.275.000
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.267.000.000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.945.380.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	4.328.240.000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.850.000.000
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2.745.000.000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.308.000.000
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1.104.000.000
19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6.320.850.000
20	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	21.695.148.500
21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	6.836.100.000
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8.746.000.000
23	BAGIAN PEMERINTAHAN	992.750.000
24	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.357.500.000
25	BAGIAN HUKUM	936.050.000
26	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.282.500.000
27	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	630.500.000
28	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	1.564.935.000
29	BAGIAN ORGANISASI	906.950.000
30	BAGIAN UMUM	11.594.660.000
31	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	893.000.000
32	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	826.500.000
33	SEKRETARIAT DPRD	17.546.500.000
34	KECAMATAN MAGETAN	3.827.204.000
35	KECAMATAN NGARIBOYO	393.000.000
36	KECAMATAN PANEKAN	785.413.000
37	KECAMATAN PLAOSAN	1.162.285.000
38	KECAMATAN SIDOREJO	385.000.000
39	KECAMATAN PONCOL	748.238.000
40	KECAMATAN PARANG	772.000.000
41	KECAMATAN MAOSPATI	1.650.380.700
42	KECAMATAN BARAT	1.189.775.363
43	KECAMATAN KARTOHARJO	382.000.000

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PLAFOND (Rp.)
44	KACAMATAN KARANGREJO	1.121.727.000
45	KECAMATAN KARAS	393.000.000
46	KECAMATAN SUKOMORO	772.025.000
47	KECAMATAN KAWEDANAN	1.520.099.600
48	KECAMATAN TAKERAN	752.674.000
49	KECAMATAN NGUNTORONADI	390.000.000
50	KECAMATAN BENDO	755.248.000
51	KECAMATAN LEMBEYAN	790.382.000
52	INSPEKTORAT	3.145.125.000
53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.291.000.000
54	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7.247.660.000
55	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	7.145.650.000
JUMLAH		481.118.622.493

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BESERTA PAGU PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	3.966.200.000				1.402.400.000
1.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (Untuk Kantor induk, kantor UPTD dan 1 SKB dan 1 UPT GOR, dan seluruh SDN & SMPN)	3.966.200.000	DAU/ DBH Pusat			1.402.400.000
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	350.000.000				540.000.000
1.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	1 jenis (1 set mebeluer)	0	DAU/ DBH Pusat			0
1.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	20 unit (1 Dikpora, 18 UPTD pendidikan dan 1 SKB, 1 UPT GOR)	40.000.000	DAU/ DBH Pusat			65.000.000
1.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten	12 bulan (6 unit roda 4, 120 unit roda 2)	40.000.000	DAU/ DBH Pusat			75.000.000
1.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah pengadaan sarpras untuk kantor	Kabupaten, kec. BARAT	2 UNIT kantor (1 SKB Maospati 1 UPTD Karangrejo)	270.000.000	DAU/ DBH Pusat			400.000.000
1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35.000.000				200.000.000
1.01.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Penyusunan Data analisis Jabatan Fungsional tertentu untuk Guru dan JFT lainnya	Kabupaten	68 Lembaga (39 Lembaga SMP, 10 DPK dan 18 UPTD)	0	DAU/ DBH Pusat			50.000.000
1.01.05.007	Penilaian Angka Kredit Pejabat fungsional	Jumlah Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Kabupaten	1500 orang ()	35.000.000	DAU/ DBH Pusat			150.000.000
1.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	70.000.000				150.000.000
1.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pendataan Aset	Kabupaten	555 Lembaga (SD, SMP dan UPTD Kecamatan)	70.000.000	DAU/ DBH Pusat			150.000.000
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK usia dini		49,48 %	2.225.000.000				2.930.000.000
1.01.15.018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan alat Permainan Edukatif (APE)	Kabupaten	50 Paket ()	150.000.000	DAU/ DBH Pusat			210.000.000
1.01.15.059	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase pembayaran insentif untuk pendidik PAUD	Kabupaten, kec. MAOSPATI	100 % (1000 orang pendidik PAUD non formal)	2.050.000.000	DAU/ DBH Pusat			2.420.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.15.065	Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah sosialisasi dan lomba PAUD	Kabupaten	2 kegiatan (HAN (tingkat Kabupaten dan Provinsi), dan forum bunda PAUD, HR forum PAUD Kabupaten (45 orang))	0	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
1.01.15.068	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pemenuhan Biaya Team Managemen Kabupaten	Kabupaten, kec. SIDOREJO	12 bulan ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD/MI, APM SMP/MTs		100 %	53.198.100.000			9.960.000.000	
1.01.16.3	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah RKB yang dibangun	Kecamatan, Kabupaten	1 Unit ((SMP 2 Panekan))	210.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.01.16.010	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang UKS yang dibangun	Kabupaten, kec. NGARIBOYO	1 unit (SMP 4 Magetan)	195.000.000	DAU/ DBH Pusat		250.000.000	
1.01.16.018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan alat lab komputer dan praktek IPA	Kabupaten, kec. PLAOSAN, kec. NGARIBOYO	2 Paket ()	855.000.000	DAU/ DBH Pusat		2.000.000.000	
1.01.16.020	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah siswa kurang mampu yang terbantu	Kabupaten, kec. PONCOL, kec. PLAOSAN, kec. NGARIBOYO	3200 siswa ()	540.000.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
1.01.16.023	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	jumlah sekolah yang dipelihara	kec. BARAT, Kabupaten	1 lembaga (SDN Unggulan)	0	DAU/ DBH Pusat		250.000.000	
1.01.16.041	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	Kabupaten, kec. KAWEDANAN, kec. BARAT, kec. PONCOL	6 unit (SD Unggulan, SMP 1 Parang (2 unit), SMP 1 Lembeyan (2 unit) dan)	243.500.000	DAU/ DBH Pusat		225.000.000	
1.01.16.044	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab	Kabupaten, kec. LAMBEYAN, kec. PONCOL, kec. PLAOSAN, kec. NGARIBOYO	15 kelas ()	50.000.000	DAK	Persiapan BU DAK 50JT	1.500.000.000	
1.01.16.058	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan kesiswaan	Kabupaten	6 kegiatan (OSN, O2SN, FLSN, FLS2N, Siswa Berprestasi, PORSENI)	270.000.000	DAU/ DBH Pusat		700.000.000	
1.01.16.062	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	Jumlah Ruang Kelas yang terbangun	Kabupaten	7 kelas ()	0	DAU/ DBH Pusat		1.750.000.000	
1.01.16.063	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	Prosentase Tersaluranya dana bos tepat waktu, tepat sasaran pada jenjang SD dan SMP	Kabupaten	100 % (560 Lembaga Jenjang SD dan SMP)	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
1.01.16.068	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah penyelenggaraan Paket B setara SMP	Kabupaten	8 kelompok (15 Kelompok(15 Penyelenggara 90 tutor/12 bulan)	40.000.000	DAU/ DBH Pusat		260.000.000	
1.01.16.	Pembinaan kelembagaan dan	Jumlah pelaksanaan Regrouping	Kabupaten	1 kegiatan ()	0	DAU/ DBH		150.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
069	manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Sekolah Dasar				Pusat			
1.01.16.070	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah pembinaan atlet olahraga	Kabupaten	60 atlet ()	0	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
1.01.16.073	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah sosialisasi informasi pendidikan dasar	Kabupaten	60 guru ()	0	DAU/ DBH Pusat		25.000.000	
1.01.16.076	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah pelaksanaan akreditasi sekolah	Kabupaten	100 Lembaga ()	60.000.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
1.01.16.080	Pelaksanaan Ujian Akhir SMP	Jumlah siswa mengikuti kegiatan try out dan ujian sekolah	Kabupaten	6386 siswa ()	375.000.000	DAU/ DBH Pusat		450.000.000	
1.01.16.090	Pelaksanaan Ujian Akhir SD	Jumlah siswa mengikuti UAS SD	Kabupaten	7500 siswa ()	375.000.000	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	
1.01.16.092	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (SD)	Jumlah kegiatan kreatifitas siswa SD tingkat Kabupaten dan Propinsi	Kabupaten	3 kegiatan (Lomba OSN, FLS2N, O2SN)	125.000.000	DAU/ DBH Pusat		250.000.000	
1.01.16.098	Pengembangan Pendidikan Inklusif	Jumlah pelaksanaan Pendidikan ABK sesuai dengan Ketunaannya.	Kabupaten	100 Lembaga (-100 Lembaga SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif) -200 Guru Pembimbing Khusus)	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
1.01.16.099	Pekan seni pelajar	Jumlah Lomba pekan seni siswa	Kabupaten	2 kegiatan (tingkat SD dan SMP)	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
1.01.16.100	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	Prosentase penyaluran Dana BOS dari APBN ke Sekolah	Kabupaten	100 persen ()	49.634.600.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.01.17	Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA		80,35 persen	50.000.000			60.000.000	
1.01.17.063	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Jumlah pelaksanaan kelompok belajar paket C	Kabupaten	6 kelompok (9 tutor dan 6 penyelenggara)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat	Terselenggaranya program paket C setara SMA	60.000.000	
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Prosentase melek huruf		100 %	227.000.000			660.000.000	
1.01.18.1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal lolos seleksi lomba Jambore PTK-PNF	Kabupaten	45 orang ()	70.000.000	DAU/ DBH Pusat		80.000.000	
1.01.18.4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah keikutsertaan lembaga PKBM dalam pameran Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi Jawa	Kabupaten	40 UNIT (40 PKBM)	40.000.000	DAU/ DBH Pusat		75.000.000	
1.01.18.5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah Pelatihan Ketrampilan WB purna KF	Kabupaten	20 kelompok ()	45.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.01.18.7	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Prosentase ketersediaan database pendidikan nonformal	Kabupaten	100 persen (235 desa/ Kelurahan)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		80.000.000	
1.01.18.8	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Terlaksananya pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	Kabupaten	30 orang (30 orang)	0	DAU/ DBH Pusat		65.000.000	
1.01.18	Pengembangan kurikulum, bahan ajar	Terselenggaranya Pelatihan	Kabupaten	40 orang (40 orang)	0	DAU/ DBH		50.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
9	dan model pembelajaran pendidikan non formal	Penyusunan KTSP bagi Tutor Pendidikan kesetaraan				Pusat			
1.01.18.011	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal	Prosentase tersalurinya operasional Lembaga Mitra Bidang Paud dan PNF	Kabupaten	100 persen (10 Forum (30 Orang))	36.000.000	DAU/ DBH Pusat		90.000.000	
1.01.18.014	Pemberantasan Buta Aksara	Jumlah pelaksanaan kegiatan Penuntasan pemberantasan Buta Aksara	Kabupaten	58 kelompok (578 WB)	11.000.000	DAU/ DBH Pusat		220.000.000	
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase guru berpendidikan S1/Akta IV		99 %	4.797.125.000			5.527.125.000	
1.01.201	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah pelaksanaan seleksi Sertifikasi Pendidik	Kabupaten	315 orang (Guru belum sertifikasi)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		75.000.000	
1.01.203	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standart Kompetensi	Kabupaten	1 kegiatan (120 orang Guru dan Kepala Sekolah berprestasi)	45.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
1.01.208	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Prosentase penyaluran honorarium pendidik GTT/ PTT	Kabupaten	100 persen (345 orang K2 GTT, PTT dan 1007 Non SK Bupati)	4.602.125.000	DAU/ DBH Pusat		4.602.125.000	
1.01.209	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pelatihan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten	1 kegiatan (target 70 orang Operator)	0	DAU/ DBH Pusat		50.000.000	
1.01.2010	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah kegiatan Penilaian sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Kabupaten	1 kegiatan (Kinerja Kepala Sekolah 850 orang)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		75.000.000	
1.01.2011	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Kabupaten	621 orang (operator 621 orang)	0	DAU/ DBH Pusat		125.000.000	
1.01.2014	Akreditasi Sekolah	Jumlah pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan PNF	Kabupaten	50 lembaga ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	
1.01.2017	Pelatihan bagi Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS	Terpenuhinya pendidik PAUD yang kredibel	Kabupaten	300 orang (300 guru PAUD yang Profesional)	0	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan yang ditangani		1276 lembaga	300.000.000			1.440.000.000	
1.01.221	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah pelaksanaan Try Out Pra UNPK dan UNAS Pendidikan kesetaraan paket b dan C	Kabupaten	2 kegiatan ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		40.000.000	
1.01.225	Pembinaan Dewan Pendidikan	Prosentase pelaksanaan tupoksi komite sekolah	Kabupaten	100 persen ()	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
1.01.229	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah penyusunan Dokumen perencanaan, kinerja, dan pelaporan	Kabupaten	4 Dokumen (LKJIP, Renja, Renstra, PK (Perjanjian Kinerja))	0	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	
1.01.2210	Peningkatan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan	- Jumlah penyusunan buku Profil Pendidikan dan sistem Informasi pendidikan di Kab. Magetan	Kabupaten	2 kegiatan (75 Exsmplar buku Profil pendidikan dan Sistem informasi	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Pendidikan di Kab. Magetan)					
1.01.22.014	Pembinaan UKS SD/MI; SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	Jumlah Sosialisasi UKS pada siswa	Kabupaten	600 lembaga ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
1.01.22.015	Seleksi Calon Kepala Sekolah	Jumlah Calon Kepala sekolah mengikuti seleksi	Kabupaten	260 orang ()	0	DAU/ DBH Pusat		750.000.000	
1.01.24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	25.000.000			25.000.000	
1.01.24.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kegiatan ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		25.000.000	
2.13.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda				225.000.000			975.000.000	
2.13.15.1	Pendataan potensi kepemudaan	Jumlah kegiatan seleksi Paskibraka	Kabupaten	2 kegiatan (74 orang Paskibraka kabupaten dan 2 orang paskibraka tingkat propinsi)	225.000.000	DAU/ DBH Pusat		350.000.000	
2.13.15.2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Terwujudnya Pelajar yang tertib PBB	Kabupaten	50 peleton (50 peleton pelajar SMA/SMK)	0	DAU/ DBH Pusat		50.000.000	
2.13.15.9	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	Terwujudnya KUPP yang produktif dan maju	Kabupaten	50 KUPP (50 KUPP)	0	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
2.13.15.010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	monitoring program hibah	Kabupaten	555 lembaga (serapan anggaran sesuai juknis)	0	DAU/ DBH Pusat		75.000.000	
2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Cakupan pembinaan pemuda		100 persen	65.000.000			1.330.000.000	
2.13.16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Terwujudnya organisasi yang aktif dan dinamis	Kabupaten	22 unit (4 unit organisasi kemahasiswaan, 16 Organisasi pelajar, 1 unit Organisasi KNPI, 1 unit Kwarcab Magetan)	0	DAU/ DBH Pusat		950.000.000	
2.13.16.2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan	Kabupaten	1 kegiatan (350 pemuda se Kab. Magetan)	45.000.000	DAU/ DBH Pusat		350.000.000	
2.13.16.7	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor	Kabupaten	1 kegiatan (3 juara pemuda pelopor tingkat kabupaten)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		30.000.000	
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Cakupan cabang olah raga yang dibina		100 persen	756.500.000			6.825.000.000	
2.13.20.1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Terpilihnya atlet-atlet pelajar prestasi	Kabupaten	150 orang (150 Atlet SMP/MTs,SMA/SMK)	0	DAU/ DBH Pusat		400.000.000	
2.13.20.3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat	Kabupaten	1 kegiatan (Parade surya Senja dan Atraksi Drum Band Tingkat SD/MI, SMP/MTs)	67.500.000	DAU/ DBH Pusat		400.000.000	
2.13.20.4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah pembinaan atlet Pelajar Prestasi	Kabupaten	600 atlet ()	250.000.000	DAU/ DBH Pusat		400.000.000	
2.13.20.5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kegiatan Meningkatkan rasa Nasionalisme dan kesegaran	Kabupaten	1 kegiatan (150 Masyarakat Kab. Magetan dan luar	108.000.000	DAU/ DBH Pusat		400.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Jasmani		Magetan)					
2.13.20 6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah kegiatan kompetisi olahraga pelajar	Kabupaten	1 kegiatan (700 pelajar SMP/MTs dan SMA/SMK se-Kab. Magetan)	270.000.000	DAU/ DBH Pusat			500.000.000
2.13.20. 011	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan (Gerak Jalan Brawijaya)	Kabupaten	1 kegiatan (50 Pelajar SMA/SMK, ORMAS, TNI, POLRI se Kab. Magetan)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			100.000.000
2.13.20. 013	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	Terpilihnya Wasit dan Pelatih Olahraga yang Profesional di Kab. Magetan	Kabupaten	140 wasit dan pelatih (70 wasit dan 70 pelatih olahraga)	0	DAU/ DBH Pusat			10.000.000
2.13.20. 014	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Kabupaten		0	DAU/ DBH Pusat	Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat		450.000.000
2.13.20. 016	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya	Terwujudnya Organisasi yang aktif dan dinamis dengan kerjasama lembaga KONI	Kabupaten		0	DAU/ DBH Pusat			4.095.000.000
2.13.20. 017	Pendampingan Pembinaan Cabang Olah raga Berprestasi (PPLPD Tenis Meja)	Jumlah cabor Berprestasi di Cabor yang memperoleh pendampingan	Kabupaten	1 cabor (Tenis Meja)	36.000.000	DAU/ DBH Pusat			70.000.000
2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Terbangunnya sarana olhrg stad dan gdg badminton,Jumlah sarana olah raga yang dipelihara,Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan perala		,4 sarana,42 kelompok	5.205.000.000				600.000.000
2.13.21 2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang dibangun	kec. MAGETAN	1 unit (Lanjutan Pembangunan stadion Yosonegoro)	5.000.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.13.21 4	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan Prasarana Olah raga yang dibangun	Kabupaten, kec. KARANGREJO, kec. SIDOREJO, kec. PLAOSAN	1 lokasi (kec. Plaosan)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			200.000.000
2.13.21 7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana dan Prasarana olahraga yang dipelihara	Kabupaten	2 gedung (GOR Ki Mageti dan GOR Mini Bulutangkis)	180.000.000	DAU/ DBH Pusat			400.000.000
JUMLAH DIKPORA					71.494.925.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS KESEHATAN									
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	1.000.000.000			0	
1.02.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (administrasi perkantoran pada Dinas Kesehatan dan Jaringannya sesuai kebutuhan selama 12 bulan. HR K2 (4 orang), jasa keamanan 6 orang, jasa kebersihan 4 orang, jasa pengemudi 2 orang)	1.000.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	345.000.000			0	
1.02.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	2 jenis (1 meubelair paket (meja kursi dan almari))	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten	2 jenis (Jumlah gedung kantor sejumlah 2 jenis)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten	15 mobil ()	220.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	3 jenis (ac, printer, cctv)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				35.000.000			0	
1.02.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kabupaten	5 kali (Bimtek jабfung perawat 60 orang ; jабfung bidan 60 orang ; jабfung pengelola obat 50 orang ; jабfung sanitarian dan lab 50 orang; manajemen puskesmas 60 orang)	35.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Prosentase kecukupan alkes di puskesmas & jaringan,Ketersediaan obat perkapita pertahun		75 %,Rp. 180,00 perkapita	1.525.000.000			0	
1.02.15.001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Kabupaten	3 jenis (Pengadaan Obat, Reagen dan BMHP sejumlah 3 Paket)	25.000.000	DAK	persiapan BU DAK 25JT	0	
1.02.15.002	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas mendapatkan alat kesehatan	Kabupaten	22 puskesmas ()	1.500.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.15.008	Pengelolaan Obat E-Logistik	Jumlah pelaksanaan Pengelolaan Obat E Logistik di Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan	Kabupaten	12 bulan (Pengelolaan Obat E Logistik di Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase pelayanan rujukan,Prosentase pelayanan		100 %,100 %	15.633.555.000			0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		kesehatan sesuai SPM dan MDGs							
1.02.16.2	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan ; Kegiatan P3K Insidental (PHBN, Even khusus, Olah raga)	Kabupaten	10 Pos PAM (Kegiatan PAM Hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru serta P3K Lainnya sejumlah 10 Pos PAM); 1200 OH ()	200.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah pelaksanaan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan gudang farmasi dan lab. kesehatan	Kabupaten	12 bulan (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan 12 bulan)	150.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.015	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	Prosentase pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar (retribusi)	Kabupaten	100 % (Prosentase pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar (retribusi) sebesar 100%)	821.040.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.16.016	Penyediaan jasa sarana kesehatan	Jumlah UPTD yang dipenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatannya agar sesuai standar	Kabupaten	23 UPTD (perawatan dan standarisasi alkes, isi ulang oksigen, sarana pencegahan penyakit infeksius, jasa pembakaran sampah medis, pemeliharaan software di UPTD)	1.044.960.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.16.021	Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur	Jumlah tenaga medis/ paramedis program Icon Gubernur yang menerima hr	Kabupaten	109 orang (109 perawat @ Rp.1.4500 per bulan Pembayaran Honor 109 Perawat Ponkesdes (asumsi anggaran sharing dr BK Prov 109 org x 1.4500 x 12 bulan = 1.896.6000,-) dan Honor 2 orang Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar (asumsi anggaran sharing dr BK Prov 2)	2.690.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.022	Pelayanan Kesehatan Matra	Jumlah CJH yang mendapat pelayanan kesehatan	Kabupaten	356 orang (356 orang CJH yang difasilitasi)	110.000.000	DBH Pajak Rokok		0	
1.02.16.023	Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia	Persentase cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif; Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan; Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Kabupaten	100 % (Cakupan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sebesar 100%); 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan sebesar 100%); 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	300.000.000	DBH Pajak Rokok		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				sebesar 100%)					
1.02.16. 024	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi	Persentase cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil; Persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin; Persentase cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Persentase cakupan pelayanan kesehatan balita; Jumlah angka kematian ibu; Jumlah angka Kematian Bayi	Kabupaten	100 % (Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 100%); 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 100%); 100 % (Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%); 100 % (Cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 100%); 70 per 1000 KH (Angka Kematian Ibu sebesar < 70/1000 KH); 23 per 10 KH (Angka kematian Bayi sebesar < 23/10 KH)	700.000.000	DBH Pajak Rokok			0
1.02.16. 026	Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD)	Persentase capaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)	kec. NGARIBOYO	70 % (Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) 70%)	1.700.000.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)			0
1.02.16. 027	Pelayanan kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)	Persentase capaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)	Kabupaten	70 % (Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) 70%)	3.264.580.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)			0
1.02.16. 028	Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)	Persentase capaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)	kec. KAWEDANAN	70 % (Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) 70%)	1.940.000.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)			0
1.02.16. 029	Pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)	Persentase capaian SPM Kesehatan (SPM BLUD)	kec. KARANGREJO	70 % (Pencapaian SPM Kesehatan (SPM BLUD) 70%)	1.530.175.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)			0
1.02.16. 030	Jaminan Persalinan	Jumlah Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) bagi bumil dan bufas	Kabupaten	2 RTK (2 RTK di dekat RSUD Sayyidiman Magetan dan 1 di dekat RSU Sudono)	0	DAK Non Fisik			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.02.16.031	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan	Kabupaten	12 bulan (Pelaksanaan BOK Rujukan UKM Sekunder Dinas Kesehatan 12 bulan)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.032	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah penyehat tradisional yang dibina	Kabupaten	200 Orang (50 orang untuk pengobat tradisional ramuan, 150 orang untuk pengobat tradisional ketrampilan (pijat))	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.033	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo	Jumlah pelaksanaan penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo	kec. MAGETAN	12 bulan (Untuk LTA (listrik, telpon,air) internet, jasa kebersihan, keamanan, pengemudi di Puskesmas Candirejo)	51.900.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.034	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto	Jumlah pelaksanaan penyediaan operasional dan pemeliharaan di Puskesmas Sidokerto	kec. SIDOREJO	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi di Puskesmas Sidokerto)	60.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.035	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan	Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Plaosan dan jaringannya	kec. PLAOSAN	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	75.700.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.036	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung	Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sumberagung dan jaringannya	kec. PLAOSAN	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	54.500.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.037	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol	Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Poncol dan jaringannya	kec. PONCOL	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	56.200.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.038	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang	Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Parang dan jaringannya	kec. PARANG	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	56.400.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.039	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan	Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tladan dan jaringannya	kec. KAWEDANAN	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	55.900.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.040	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan	Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Lembeyan dan jaringannya	kec. LAMBAYAN	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	59.100.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.041	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran	Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Takeran dan jaringannya	kec. TAKERAN	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	63.640.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.042	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji dan jaringannya	kec. NGUNTORONADI	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	64.400.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.16.043	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo	tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Bendo dan jaringannya	kec. BENDO	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	63.400.000	DAU/ DBH Pusat		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.02.16.044	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati	tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Maospati dan jaringannya	kec. MAOSPATI	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	87.200.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.02.16.045	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung	tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Ngujung dan jaringannya	kec. MAOSPATI	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	69.560.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.02.16.046	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tebon	tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Tebon dan jaringannya	kec. BARAT	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	54.400.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.02.16.047	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo	tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo dan jaringannya	kec. KARTOHARJO	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	54.500.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.02.16.048	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji	tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Taji dan jaringannya	kec. KARAS	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	58.100.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.02.16.049	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro	tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sukomoro dan jaringannya	kec. SUKOMORO	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	71.100.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.02.16.050	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo	tercukupinya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo dan jaringannya	kec. BARAT	12 bulan (untuk LTA, internet, kebersihan, keamanan, pengemudi)	51.800.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.02.16.051	Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo	tercukupinya BOK Puskesmas Ngariboyo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. NGARIBOYO	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik			0
1.02.16.052	Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo	tercukupinya BOK Puskesmas Candirejo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. MAGETAN	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik			0
1.02.16.053	Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan	tercukupinya BOK Puskesmas Panekan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. PANEKAN	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik			0
1.02.16.054	Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto	tercukupinya BOK Puskesmas Sidokerto (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. SIDOREJO	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik			0
1.02.16.055	Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan	tercukupinyan BOK Puskesmas Plaosan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. PLAOSAN	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik			0
1.02.16.056	Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung	tercukupinya BOK Puskesmas Sumberagung (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. PLAOSAN	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik			0
1.02.16.057	Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol	tercukupinya BOK Puskesmas Poncol (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. PONCOL	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik			0
1.02.16.058	Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang	tercukupinya BOK Puskesmas Parang (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. PARANG	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.02.16.059	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan	tercukupinya BOK Puskesmas Kawedanan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. KAWEDANAN	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.060	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan	tercukupinya BOK Puskesmas Tladan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. KAWEDANAN	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.061	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan	tercukupinya BOK Puskesmas Lembeyan (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. LAMBHEYAN	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.062	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran	tercukupinya BOK Puskesmas Takeran (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. TAKERAN	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.063	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji	tercukupinya BOK Puskesmas Gorang Gareng Taji (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. NGUNTORONADI	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.064	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo	tercukupinya BOK Puskesmas Bendo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. BENDO	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.065	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati	tercukupinya BOK Puskesmas Maospati (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. MAOSPATI	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.066	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung	tercukupinya BOK Puskesmas Ngujung (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. MAOSPATI	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.067	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon	tercukupinya BOK Puskesmas Tebon (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. BARAT	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.068	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo	tercukupinya BOK Puskesmas Kartoharjo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. KARTOHARJO	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.069	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo	tercukupinya BOK Puskesmas Karangrejo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. KARANGREJO	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.070	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji	tercukupinya BOK Puskesmas Taji (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. KARAS	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.071	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro	tercukupinya BOK Puskesmas Sukomoro (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. SUKOMORO	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.072	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo	tercukupinya BOK Puskesmas Rejomulyo (Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kec. BARAT	12 bulan (terlaksananya upaya preventif dan promotif di puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.16.073	Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK di Dinas Kesehatan; Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK di Dinas	Kabupaten	12 bulan (Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK di Dinas Kesehatan 12 bulan); 12 bulan	0	DAK Non Fisik		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Kesehatan		(Pelaksanaan Dukungan Manajemen BOK di Dinas Kesehatan 12 bulan)					
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Prosentase TPM yang memenuhi syarat		76 %	210.000.000			0	
1.02.17 1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah peserta penyuluhan keamanan obat, makanan ,kosmetika dan bahan berbahaya	Kabupaten, kec. PLAOSAN	3690 orang (3690 peserta penyuluhan keamanan obat, makanan ,kosmetika dan bahan berbahaya di Kabupaten Magetan dan daerah wisata Sarangan)	110.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.17 2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah ritel yang dipantau keamanan pangan di wilayah Kabupaten Magetan	Kabupaten	450 ritel (450 ritel yang dipantau pada momen lebaran dan tahun baru)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan rumah tangga sehat,Cakupan Desa Siaga Aktif		81 %,100 %	1.300.000.000			0	
1.02.19 1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Cakupan Rumah Tangga Sehat	Kabupaten, kec. PONCOL	56 % (102.175 Rumah tangga sasaran di Kabupaten Magetan (survey PHBS))	800.000.000	DBH Pajak Rokok		0	
1.02.19 3	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif	Kabupaten	100 % (235 Desa/kelurahan siaga aktif)	500.000.000	DBH Pajak Rokok		0	
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah anak sekolah yang diberi tambahan gizi,Prevalensi balita kekurangan gizi		,0,40 %	500.000.000			0	
1.02.20 2	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Prosentase balita gizi buruk; Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan; Cakupan pemberian MP-ASI balita Gakin umur 6-24 bulan ; Prosentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	Kabupaten	100 % (Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan sebesar 100%); 100 % (Cakupan pemberian MP-ASI balita keluarga miskin umur 6-24 bulan sebesar 100%); 85 % (Prosentase balita ditimbang berat badannya (D/S) sebesar 85%)	500.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase penduduk mengakses jamban sehat,Jumlah desa/kel melaksanakan STBM,Prosentase penduduk memiliki akses air minum ,Jumlah desa/kel ODF		100 %,55 desa,100 %,235 desa	2.017.294.687			0	
1.02.21 1	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Prosentase penduduk menggunakan jamban sehat; Jumlah Desa/ Kelurahan ODF ; Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	Kabupaten	100 % (400 unit stimulan jamban); 235 desa/kelurahan (Jumlah Desa/ Kelurahan ODF sebanyak 235 desa/kelurahan); 55	1.017.294.687	DBH Pajak Rokok		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				desa/kelurahan (Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM sejumlah 55 desa/kelurahan)					
1.02.21 2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Prosentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas; Prosentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas; Prosentase TPS/ TPA memenuhi syarat; Prosentase Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat; Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat	Kabupaten	100 % (Prosentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas sebesar 100%); 100 % (Prosentase pemusnahan sampah padat medis puskesmas sebesar 100%); 100 % (Prosentase TPS/ TPA memenuhi syarat sebesar 100%); 87 % (Prosentase Tempat - Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat sebesar 87%); 78 % (Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat sebesar 78 %)	1.000.000.000	DBH Pajak Rokok			0
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prosentase pencegahan & penanggulangan penyakit		100 %	3.905.000.000				0
1.02.22 5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka kejadian malaria per 1000 penduduk; Penemuan dan penanganan penderita diare; Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita; Menurunkan angka kecacatan akibat kusta; Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD; Prosentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar; Prosentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Kabupaten	100 % (Penemuan dan penanganan penderita diare sebesar 100%); 100 % (Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita sebesar 100%); 5 % (Menurunkan angka kecacatan akibat kusta sebesar < 5%); 100 % (Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD sebesar 100%); 80 % (Prosentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 80%); 100 % (Prosentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100%)	1.845.000.000	DBH Pajak Rokok			0
1.02.22 6	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Jumlah kelompok resiko tinggi tertular HIV	Kabupaten	12 kelompok (12 kelompok yang mendapatkan	40.000.000	DBH Pajak Rokok			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				pembinaan dan penjangkaran HIV)					
1.02.22 8	Peningkatan imunisasi	Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap; Jumlah puskesmas dengan rantai dingin vaksin efektif; Prosentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan imunisasi tambahan lengkap	Kabupaten	92 % (Jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebesar 92%); 22 puskesmas (pemantauan ranati dingin vaksin di 22 puskesmas); 92 % (Prosentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan imunisasi tambahan lengkap sebesar 92%)	300.000.000	DBH Pajak Rokok			0
1.02.22 9	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Cakupan AFP per 1000 penduduk < 15 tahun; Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Kabupaten	2 orang (Cakupan AFP per 1000 penduduk < 15 tahun sebesar lebih dari sama dengan 2 orang); 100 % (Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sebesar 100%)	150.000.000	DBH Pajak Rokok			0
1.02.22. 012	Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular	Prosentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; Prosentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; Prosentase penduduk 15 - 59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu; Prosentase deteksi dini kanker serviks pada WUS	Kabupaten	100 % (Prosentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%); 100 % (Prosentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100 %); 100 % (Prosentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 100%); 100 % (Prosentase penduduk 15 - 59 tahun yang dilakukan skrining faktor resiko PTM pada kelompok tertentu sebesar 100 %); 30 % (Prosentase deteksi dini kanker serviks pada WUS sebesar 30 %)	1.570.000.000	DBH Pajak Rokok			0
1.02.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Prosentase puskesmas & jaringannya dlm kondisi baik		100 %	2.825.000.000				0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya								
1.02.257	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Pengadaan IPAL Puskesmas	Kabupaten	5 unit (Pengadaan IPAL Puskesmas sejumlah 5 Unit)	2.775.000.000	DBH Pajak Rokok			0
1.02.25.028	Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	Rehabilitasi/Pembangunan Sedang/Berat Puskesmas Taji (UGD dan Ruang Bersalin); Relokasi Puskesmas Plaosan dan Puskesmas Sumberagung (Rawat Jalan)	kec. KARAS, kec. PLAOSAN, kec. BARAT	3 Puskesmas (Rehabilitasi/Pembangunan Sedang/Berat Puskesmas sejumlah 3 Puskesmas)	50.000.000	DAK	Rehabilitasi/ Pembangunan Sedang/Berat Puskesmas Taji (UGD dan Ruang Bersalin); Relokasi Puskesmas Tebon dan Puskesmas Sumberagung (Rawat Jalan) diusulkan melalui anggaran DAK Fisik tahun 2018		0
1.02.28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase penduduk miskin terlayani jaminan kesehatan		100 persen	37.577.220.000				0
1.02.281	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah	Kabupaten	100 % (Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah sebesar 100%)	6.150.000.000	DAU/ DBH Pusat	Pembayaran iuran PBID Rp. 13.24800,- (480 jiwa x Rp. 230,- x 12 bulan) dan pembayaran Klaim Jamkesda dari Puskesmas dan Rumah Sakit senilai Rp. 5.77000,-		0
1.02.28.011	Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)	Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS	Kabupaten	100 % (Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS sebesar 100%)	3.264.108.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)			0
1.02.28.013	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo	kec. MAGETAN	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di	1.265.000.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Puskesmas Candirejo 12 bulan)		BLU Puskesmas (Dinkes)			
1.02.28.014	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto	kec. SIDOREJO	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto)	779.240.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.015	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan	kec. PLAOSAN	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Plaosan)	1.115.040.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.016	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung	kec. PLAOSAN	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung 12 bulan)	414.920.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.017	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol	kec. PONCOL	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol 12 bulan)	814.660.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.018	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang	kec. PARANG	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang 12 bulan)	1.568.600.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.019	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan	kec. KAWEDANAN	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan 12 bulan)	738.760.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.020	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan	kec. LAMBEBAN	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan 12 bulan)	1.163.800.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	Pelayanan Jaminan Kesehatan	kec. TAKERAN	12 bulan (Pelayanan	1.325.720.000	Dana		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
021	(Kapitasi) di Puskesmas Takeran	Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran		Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran)		Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)			
1.02.28.022	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji	kec. NGUNTORONADI	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji 12 bulan)	547.492.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.023	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo	kec. BENDO	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo 12 bulan)	1.518.000.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.024	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati	kec. MAOSPATI	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati 12 bulan)	1.265.000.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.025	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung	kec. MAOSPATI	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung 12 bulan)	495.880.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.026	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon	kec. BARAT	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon 12 bulan)	829.840.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.027	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo	kec. KARTOHARJO	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo 12 bulan)	779.240.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.028	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji	kec. KARAS	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Taji 12 bulan)	1.214.400.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
						(Dinkes)			
1.02.28.029	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro	kec. SUKOMORO	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro 12 bulan)	1.113.200.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.030	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo	kec. BARAT	12 bulan (Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo 12 bulan)	364.320.000	Dana Kapitasi, Non-Kapitasi, dan BLU Puskesmas (Dinkes)		0	
1.02.28.031	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (DBHCHT)	Cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin Pemeirntah Daerah	Kabupaten	100 persen ()	2.000.000.000	DBHCHT		0	
1.02.28.032	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (pajak rokok)	cakupan pelayanan kesehatan yang dijamin Pemeirntah daerah	Kabupaten	100 persen ()	8.850.000.000	DBH Pajak Rokok		0	
1.02.36	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Cakupan kunjungan pasien yang dijamin pemerintah		100 %	1.125.000.000			0	
1.02.36.1	Pengembangan Manajemen Perencanaan Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan anggaran tersusun sesuai standar	Kabupaten	7 dokumen (7 dokumen (DPA, DPPA, LKJIP, Renja, Perubahan Renja, SAKIP, PK))	135.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.36.2	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan	Kabupaten	3 dokumen (3 dokumen (Profil kesehatan, Dinas Kesehatan dalam angka, SPM bidang kesehatan))	40.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.36.3	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dinilai	Kabupaten	22 puskesmas (Jumlah puskesmas yang dinilai kinerjanya 22 puskesmas, dan puskesmas memenuhi standart 22 puskesmas)	300.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.36.4	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mendapat pendampingan akreditasi puskesmas	Kabupaten	9 puskesmas ()	550.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.02.36.5	Akreditasi Puskesmas	Pendampingan Akreditasi Puskesmas	Kabupaten	9 Puskesmas (Pendampingan Akreditasi Puskesmas 9 Puskesmas)	0	DAK Non Fisik		0	
1.02.36.6	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah sakit yang dibina	Kabupaten	6 RS/RSK (Pembinaan fasilitas kesehatan rujukan 2 RS/ 4 RSK (RSUD,RSIA samudera husada, RSIA sekar wangi, RSIA melati, RSIA bakti persada, RS efram harsana))	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.02.37	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	Rasio dokter per seribu penduduk,Rasio perawat per seribu penduduk,Rasio Bidan per seribu penduduk		0,3 ,0,84 ,0,55	100.000.000				0
1.02.37 1	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah SK yang diterbitkan,; Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan tingkat kabupaten; Jumlah nakes berijin di kabupaten Magetan	Kabupaten	250 SK (250 SK fungsional yang diterbitkan); 8 orang (8 tenaga kesehatan teladan tingkat kabupaten yang ber SK bupati); 912 orang (Jumlah nakes berijin di kabupaten Magetan sejumlah 912 orang)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.02.53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Jumlah kawasan tanpa asap rokok,Jml fasilitas perawatan kesehatan akibat dampak rokok		1 kawasan,0 unit	1.750.000.000				0
1.02.53 4	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah penyediaan/ pemeliharaan sarana yan kes bagi masyarakat	Kabupaten	2 paket ()	1.750.000.000	DBHCHT			0
1.02.56	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	60.000.000				0
1.02.56 1	SUrvey Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kabupaten	23 Lokasi (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terlaksana di 23 lokasi)	60.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
JUMLAH DINKES					69.908.069.687				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH									
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase pelayanan rujukan, Prosentase Pelayanan kesehatan yang sesuai SPM dan		,100 %	61.000.000.000				0
1.02.16.012	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dalam rangka mencapai SPM dan MDG's	Kabupaten	12 bulan ()	61.000.000.000	BLUD			0
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosentase tpeuhinya sarana&prasarna RS ssuai SPM		81,6 %	25.000.000				0
1.02.26.018	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan	Kabupaten	10 Jenis ()	25.000.000	DAK			0
1.02.53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan	Jumlah sarana&prasaran pelayanan kesehatan		1	2.514.792.500				0
1.02.534	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah pengadaan/pemelharaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Kabupaten	3 jenis ()	2.514.792.500	DBHCHT			0
JUMLAH RSUD					63.539.792.500				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	1.928.000.000			2.600.000.000	
1.03.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (ATK, MAMIN, SPPD, LISTRIK, DST...)	1.928.000.000	DAU/ DBH Pusat		2.600.000.000	
1.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	6.225.000.000			13.550.000.000	
1.03.02.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kabupaten, kec. PANEKAN	5 lokasi (DED Eks semeru , rehab Rumdin sekda, kantor BPPKAD, Rumah singgah, commad centre)	4.000.000.000	DAU/ DBH Pusat		10.000.000.000	
1.03.02.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten		0	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	1 jenis ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
1.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	12 bulan ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
1.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten	12 bulan ()	300.000.000	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	
1.03.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten	12 bulan ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		50.000.000	
1.03.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi	Kabupaten, kec. PLAOSAN, kec. BENDO	7 lokasi (rehabilitasi gedung kantor)	1.750.000.000	DAU/ DBH Pusat		3.000.000.000	
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				270.000.000			270.000.000	
1.03.05.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kabupaten	1 kegiatan ()	220.000.000	DAU/ DBH Pusat		220.000.000	
1.03.05.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kabupaten	1 kegiatan ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		50.000.000	
1.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	50.000.000			0	
1.03.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan	Kabupaten	12 bulan ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.07	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Panjang jalan yang ditingkatkan		55 km	28.561.072.793			20.000.000.000	
1.03.07.1	Peningkatan Jalan Kabupaten	Jumlah jalan yang di tingkatkan	Kabupaten	11 lokasi ()	12.300.000.000	DAU/ DBH Pusat		20.000.000.000	
1.03.07.2	Peningkatan Jalan (DAK)	Jumlah peningkatan jalan kabupaten	Kabupaten	4 lokasi ()	50.000.000	DAK		0	
1.03.07.3	Pengadaan Bahan Bangunan	Jumlah pemenuhan bahan bangunan penunjang kegiatan	Kabupaten	3 paket ()	10.853.072.793	DAU/ DBH Pusat		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.03.075	Peningkatan jalan poros desa	Jumlah jalan poros desa yang di tingkatkan	Kabupaten, kec. MAGETAN, kec. KARANGREJO, kec. PARANG, kec. SUKOMORO, kec. TAKERAN, kec. BENDO, kec. KARAS, kec. PONCOL, kec. SIDOREJO, kec. KARTOHARJO, kec. NGARIBOYO, kec. PLAOSAN, kec. LAMBEYAN	30 lokasi ()		5.358.000.000	DAU/ DBH Pusat		0
1.03.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Prosent jrngn yg menghub pusat produksi wil kab/ko		99 %		10.000.000.000			20.000.000.000
1.03.15.010	Pembangunan Jalan Kabupaten	Jumlah Jalan Kabupaten yang di bangun	Kabupaten	2 lokasi ()		10.000.000.000	DAU/ DBH Pusat		20.000.000.000
1.03.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase jalan kabupaten/kota yang dilengkapi sa,Prosent jln kab/kota yg dilngkapi sluran drainase		75 %,75 %		2.200.000.000			5.000.000.000
1.03.163	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah saluran drainase yang di bangun	Kabupaten	21 lokasi ()		2.200.000.000	DAU/ DBH Pusat		5.000.000.000
1.03.17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun		14,27 km		1.650.000.000			7.000.000.000
1.03.173	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah talud jalan yang di bangun	Kabupaten	23 lokasi ()		1.650.000.000	DAU/ DBH Pusat		7.000.000.000
1.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	tingkat kondisi jln & jmbtn kab/kota baik/sedang		81 %		23.089.000.000			16.000.000.000
1.03.183	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah pemelahaaraan jalan Kabupaten	Kabupaten	31 lokasi ()		10.100.000.000	DAU/ DBH Pusat		12.500.000.000
1.03.184	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang di pelihara	Kabupaten	1 lokasi ()		4.200.000.000	DAU/ DBH Pusat		0
1.03.18.010	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	Jumlah pemeliharaan jalan kabupaten	Kabupaten	4 lokasi ()		50.000.000	DAK		0
1.03.18.013	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan (Karya Bhakti TNI)	Persentase jalan berkondisi baik	Kabupaten	100 % ()		400.000.000	DAU/ DBH Pusat		0
1.03.18.017	Pemeliharaan Jalan Kelurahan dan Kabupaten	Jumlah jalan kelurahan & Kabupaten yang dipelihara	Kabupaten	50 lokasi ()		4.067.000.000	DAU/ DBH Pusat	Pemeliharaan Jalan Kelurahan dan Kabupaten	0
1.03.18.021	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah I	Jalan Kabupaten yang di pelihara	Kabupaten	75 % (pemeliharaan rutin jalan)		350.400.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000
1.03.18.022	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah II	Jalan Kabupaten yang di pelihara	Kabupaten	75 % (pemeliharaan rutin jalan)		484.800.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.03.18.023	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah III	Jalan Kabupaten yang di pelihara	Kabupaten	75 % (pemeliharaan rutin jalan)	384.000.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
1.03.18.024	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah IV	Jalan Kabupaten yang di pelihara	Kabupaten	75 % (pemeliharaan rutin jalan)	468.000.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
1.03.18.025	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah V	Jalan Kabupaten yang di pelihara	Kabupaten	75 % (pemeliharaan rutin jalan)	434.400.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
1.03.18.026	Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah VI	Jalan Kabupaten yang di pelihara	Kabupaten	75 % (pemeliharaan rutin jalan)	350.400.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
1.03.18.028	Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Jumlah pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Kabupaten	12 bulan ()	300.000.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
1.03.18.029	Rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur jalan perbatasan	Jumlah jalan perbatasan berkondisi baik	Kabupaten	1 lokasi ()	1.500.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Cakupan inspeksi jalan dan jembatan		100 %	50.000.000			100.000.000	
1.03.201	Inspeksi kondisi jalan	Jumlah data kondisi jalan	Kabupaten	1 jenis ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
1.03.22	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	jml sistem informasi database jln&jembatan		1 unit	50.000.000			200.000.000	
1.03.221	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	jumlah penyusunan data base jalan	Kabupaten	1 dokumen ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	
1.03.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	pngadaan & pmliharaan sarpras kebinamargaan, Jml PJU yg terpelihara&terbangun		7 unit, 2500 unit	14.250.000.000			17.500.000.000	
1.03.234	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah pengadaan alat berat	Kabupaten	2 unit ()	0	DAU/ DBH Pusat		1.500.000.000	
1.03.236	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Pengadaan alat ukur laboratorium kebinamargaan	Kabupaten	12 bulan ()	200.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.23010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Pemeliharaan alat - alat berat	Kabupaten	100 % (Pemeliharaan alat-alat berat)	150.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.23012	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	Kabupaten	12 bulan ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.23015	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah pemeliharaan jaringan PJU	Kabupaten	12 bulan ()	13.800.000.000	DAU/ DBH Pusat		16.000.000.000	
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase jaringan irigasi kondisi baik		69,25 %	6.690.000.000			4.800.000.000	
1.03.241	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah penyusunan data perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Kabupaten	2 Dokumen ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.24013	Rehabilitasi pintu air	Jumlah rehabilitasi pintu air	Kabupaten	4 lokasi (rehabilitasi pintu air)	200.000.000	DAU/ DBH Pusat		400.000.000	
1.03.24015	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah Pengamanan aset pengairan dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui kegiatan	Kabupaten	6 UPTD PPTM ()	150.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		operasi dan pemeliharaan							
1.03.24.016	Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah pelaksanaan pembinaan HIPPA/GHIPA	Kabupaten	8 HIPPA/GHIPA ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.24.025	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi	Terpeliharanya prasarana jaringan irigasi	Kabupaten	5 lokasi (pemeliharaan jaringan irigasi)	1.000.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.24.028	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lain	Kabupaten	1 kegiatan (Meningkatnya partisipasi masyarakat)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.24.029	Pembangunan Jaringan Drainase dan Springkler				0	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.24.034	Rehabilitasi Dam dan Prasarana Irigasi	DAM dan Irigasi yang di rehabilitasi	Kabupaten	3 lokasi (rehabilitasi dam dan irigasi)	900.000.000	DAU/ DBH Pusat			3.000.000.000
1.03.24.038	Rehabilitasi Saluran	Jumlah saluran yang di rehabilitasi	Kabupaten	6 lokasi (rehabilitasi saluran)	1.390.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.24.042	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Jejeruk	Terpeliharanya jaringan irigasi	Kabupaten	1 UPTD PPTM (Pemeliharaan rutin)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.24.043	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Bringin	Terpeliharanya jaringan irigasi	Kabupaten	1 UPTD PPTM (Pemeliharaan rutin)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat			350.000.000
1.03.24.044	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gandong	Terpeliharanya jaringan irigasi	Kabupaten	1 UPTD PPTM (Pemeliharaan rutin)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat			350.000.000
1.03.24.045	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Gonggang	Terpeliharanya jaringan irigasi	Kabupaten	1 UPTD PPTM (pemeliharaan rutin)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat			350.000.000
1.03.24.046	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Taji	Terpeliharanya jaringan irigasi	Kabupaten	1 UPTD PPTM (pemeliharaan rutin)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat			350.000.000
1.03.24.047	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi di Wilayah UPTD PPTM Purwodadi	Terpeliharanya jaringan irigasi	Kabupaten	1 UPTD PPTM (pemeliharaan rutin)	0	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.24.058	Rehabilitasi dan peningkatan Jaringan Irigasi II	Peningkatan kinerja jaringan irigasi	Kabupaten, kec. BENDO, kec. KARTOHARJO, kec. LAMBEYAN	9 lokasi (Peningkatan kinerja jaringan irigasi)	1.500.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.24.061	Rehabilitasi Jaringan Irigasi I (DAK Tambahan)	Peningkatan kinerja jaringan irigasi	Kabupaten	20 Lokasi ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.24.069	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi I (DAK)	Peningkatan kinerja jaringan irigasi	Kabupaten	20 lokasi (peningkatan jaringan irigasi)	0	DAK			0
1.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	tersedianya air baku u memenuhi kebutuhan pokok sehari2, Kcukupan air di Jaringn Irigasi (MH, MK I, MK II)		100 %,100; 99,94; 87,55 %	3.650.000.000				1.500.000.000
1.03.25.6	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	Meningkatnya distribusi penyediaan air baku	Kabupaten	4 lokasi (distribusi penyediaan air baku)	1.000.000.000	DAU/ DBH Pusat			1.500.000.000
1.03.25.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pendamping PAMSIMAS)	Terlaksananya monev PAMSIMAS	Kabupaten	100 % (Monev PAMSIMAS)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.25.023	Rehabilitasi/perbaikan saluran dan tembok pengaman	saluran dan tembok pengaman yang di perbaiki	Kabupaten	4 lokasi (perbaikan saluran dan tembok pengaman)	650.000.000	DAU/ DBH Pusat			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.03.25.031	Pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah	Sumur - sumur air tanah yang di bangun/rehab	Kabupaten	5 lokasi (pembangunan/rehabilitasi sumur-sumur air tanah)	1.900.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase rumah tinggal bersanitasi		90 %	50.000.000			0	
1.03.271	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat	Kabupaten	4 lokasi (sarana dan prasarana air minum)	0	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.275	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum	Terwujudnya pembinaan teknik pengelolaan air minum	Kabupaten	100 % (Pembinaan teknik pengelolaan air minum)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	% jringan irigasi yg mmliki pot rawan bencana		4,5 %	100.000.000			250.000.000	
1.03.28.012	Mitigasi Bencana Alam				0	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.28.014	Penanganan Kerusakan Akibat Daya Rusak Air	Persentase Penanganan JI akibat daya rusak air	Kabupaten	20 % ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		250.000.000	
1.03.38	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	30.000.000			0	
1.03.381	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey IKM	Kabupaten	1 kegiatan ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.39	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase kecukupan Perda RTRW		100 persen	1.450.000.000			0	
1.03.395	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah dokumen RDTR	Kabupaten	2 dokumen (dokumen RDTR)	950.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.39.011	Revisi rencana tata ruang	Penyusunan Revisi RTRW	Kabupaten	2 Dokumen ()	500.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.41	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase bangunan ber-IMB			300.000.000			0	
1.03.415	Pengawasan pemanfaatan ruang	jumlah pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang	Kabupaten	12 bulan ()	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.419	Kegiatan Pembinaan jasa konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa KOnstruksi	Kabupaten	12 bulan ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
1.03.41.010	Pengawasan dan pengendalian bangunan	Jumlah pengawasan dan pengendalian bangunan	Kabupaten	12 bulan ()	175.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
JUMLAH DPU PR					100.593.072.793				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
1.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	420.000.000				379.000.000
1.04.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten	12 Bulan (Honor THL, Lembur, SPPD Dalam & Luar Daerah, ATK, Telfon, Air, Listrik, Surat Kabar, Mamin Rapat, Materai, Peralatan Kebersihan, Internet, Publikasi, Penggandaan, Pajak KB)	420.000.000	DAU/ DBH Pusat			379.000.000
1.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	611.250.000				180.000.000
1.04.02.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Kabupaten	1 unit (truck tangki air)	376.250.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.04.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	15 unit ()	105.000.000	DAU/ DBH Pusat			100.000.000
1.04.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kabupaten	12 bulan ()	35.000.000	DAU/ DBH Pusat			40.000.000
1.04.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas	Kabupaten	12 bulan (8 unit)	70.000.000	DAU/ DBH Pusat			40.000.000
1.04.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten	12 bulan ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	20.000.000				0
1.04.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kabupaten	1 kegiatan ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.03.35	Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum			200.000.000				0
1.03.35.2	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jalan, Jembatan dan Fasilitasnya	Jumlah penyediaan sistem informasi pertanahan	Kabupaten	1 Kegiatan ()	200.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		99,50 %	600.000.000				2.450.000.000
1.04.15.1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah RTLH yang dibangun	Kabupaten	6 unit ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			2.450.000.000
1.04.15.4	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kabupaten	1 Kegiatan ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.04.15.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Program	Kabupaten	100 Persen ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.04.15.010	Penataan Jalan Lingkungan Pemukiman	Jumlah Penataan jalan Lingkungan Pemukiman	kec. MAGETAN	1 Kegiatan ()	300.000.000	DAU/ DBH Pusat			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	ckupan lingk shat & aman yg ddkung srpras utilitas		98 %	300.000.000				0
1.04.16 7	Penyediaan Sarana Perumahan Terutama bagi MBR	Penyediaan sarana prasarana perumahan bagi MBR	Kabupaten	403 Unit ()	300.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.04.20	Program pengelolaan areal pemakaman	Cakupan pelayanan pemakaman penduduk		100 %	300.000.000				291.000.000
1.04.20 7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	kec. MAGETAN, kec. PANEKAN, kec. PLAOSAN, kec. KAWEDANAN	8 kegiatan ()	300.000.000	DAU/ DBH Pusat			291.000.000
2.05.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase RTH persatuan satuan luas wiyah/HPL HGB, Jumlah RPK yang dibangun		30 persen, 1 unit	3.300.000.000				0
2.05.24 5	Penataan RTH	Jumlah penataan RTH perkotaan	Kabupaten, kec. BARAT	4 Lokasi (3 lokasi di kecamatan, 1 lokasi untuk alun2 magetan)	2.650.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.05.24 6	Pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan ruang terbuka hijau	Kabupaten	12 bulan ()	400.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.05.24. 011	Perawatan Taman dan Pohon Ayoman	Jumlah perawatan taman dan pohon ayoman	Kabupaten	12 bulan ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.05.24. 012	Rehabilitasi taman	Jumlah kegiatan perbaikan taman	Kabupaten	2 kegiatan ()	200.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				0
4.01.24 3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Kabupaten	1 kegiatan ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
JUMLAH DINAS PERKIM					5.771.250.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	390.069.000				0
1.05.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	kec. MAGETAN	12 bulan (sppd, ATK, biaya listrik & telp, Hr. PPID pembantu)	390.069.000	DBH Prov.			0
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	186.900.000				0
1.05.025	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas roda 2 untuk menunjang kegiatan operasional; Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 4 untuk menunjang kegiatan operasional	Kabupaten		0	DBH Prov.			0
1.05.029	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten	2 jenis (4 unit Air Conditioner (AC) dan 1 papan nama)	26.000.000	DBH Prov.			0
1.05.02.011	Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Komputer, Printer, dan kelengkapannya	Kabupaten	2 jenis (PC 2 unit Laptop 1 unit Printer 2)	25.000.000	DBH Prov.			0
1.05.02.012	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	Jumlah pengadaan alat komunikasi	Kabupaten	13 Unit (Rig 3 unit Handy Talky (HT) 10 unit)	35.000.000	DBH Prov.			0
1.05.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung/kantor	Kabupaten	12 bulan (Jasa petugas kebersihan)	8.400.000	DBH Prov.			0
1.05.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Kabupaten	33 unit (7 unit R6, 5 unit R4, 21 unit R2)	92.500.000	DBH Prov.			0
1.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur				100.100.000				0
1.05.032	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Seragam Satpol PP dan Damkar	kec. MAGETAN	3 jenis (- pakaian pataka 10 stel - sepatu PDL 106 buah - Kaos lapangan 106 buah)	100.100.000	DBH Prov.			0
1.04.19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan kebakaran		90 %	473.141.000				0
1.04.195	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar Kualifikasi	Kabupaten	21 Personil ()	69.500.000	DBH Prov.			0
1.04.19.010	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah rehabilitasi kantor pelayanan pemadam kebakaran	Kabupaten	4 jenis (- 6 tandon air - 12 selang - 6 unit kendaraan diservis - 6 unit suku cadang)	300.000.000	DBH Prov.			0
1.04.19.011	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran (DAK)				0	DAU/ DBH Pusat			0
1.04.19.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah pengadaan sarana prasarana penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kabupaten	2 unit (penambahan peralatan (2 nozle otomatis dan selang 2,5dim 30	78.641.000	DBH Prov.			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				meter))					
1.04.19.014	Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana pemadam kebakaran	Kabupaten		25.000.000	DBH Prov.			0
1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat		100 %	2.380.296.000				0
1.05.151	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan HUT Satpol PP, Jambore Satpol PP dan Kerjasama Antar Satpol PP wilayah Perbatasan	Kabupaten	3 kegiatan (3 Kegiatan (HUT Satpol PP, Jambore Satpol PP dan Kerjasama Antar Satpol PP wilayah Perbatasan))	155.000.000	DBH Prov.			0
1.05.154	Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah Pengamanan Wilayah	Kabupaten	12 bulan (Pengamanan Hari Besar Agama, Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan dan Pengawasan Pejabat dan tamu VIP/VVIP, Pengamanan Insidentil)	194.000.000	DBH Prov.			0
1.05.158	Pengendalian Pengamanan Pilkada	Jumlah pengamanan rangkaian acara Pilkada; Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pengamanan Pilkada	Kabupaten	12 bulan (Pengamanan rangkaian pemilihan Gubernur Jatim, Rangkaian Pemilihan Bupati Magetan); 1 kegiatan ()	1.801.569.000	DBH Prov.			0
1.05.15011	Peningkatan kemampuan pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan peningkatan kemampuan SDM Personil Satpol PP dan Damkar	Kabupaten	1 Kegiatan (1 Kegiatan (Orientasi lapang Anggota Satpol PP dan Damkar))	50.000.000	APBD			0
1.05.15012	Penegakan Peraturan Daerah dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan Penyidikan/Penyelidikan, penyuluhan hukum dan pembinaan pelaku pelanggaran Perda; Jumlah Publikasi Peraturan Daerah Magetan	Kabupaten	4 Kegiatan (114 kegiatan (Giat penyelidikan/deteksi dini pelanggaran perda), 2 Kegiatan (Penebangan baleho/reklame besar), 2 kegiatan (penyidikan/pemberkasas perkara), 1 kegiatan (penyuluhan Hukum)); 11 lokasi (11 buah papan Publikasi Perda)	179.727.000	DBH Pajak Rokok			0
1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3		95 %	435.290.000				0
1.05.161	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Perda	Kabupaten	336 kali (Penertiban : Tempat Hiburan Ilegal 24 Keg, Tindak Asusila 60 Keg, Bangunan Liar 24 keg, PSK 12 Keg, Anjal Gepeng 36 Keg, Reklame 120 Keg, Tambang Liar 24 Keg	100.000.000	DBH Prov.			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Pelajar 12 Keg PNS 12 Keg Patroli Wilayah 12 Keg)					
1.05.16 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten	12 bulan ()	10.000.000	DBH Prov.		0	
1.05.16 6	Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan ORMAS	Jumlah Pengamanan Hari Besar dan Perayaan Kegiatan Ormas	Kabupaten	12 Bulan ()	325.290.000	DBH Prov.		0	
1.05.23	Program Mengintensifkan Penanganan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000			0	
1.05.23 1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey IKM	Kabupaten	1 Kegiatan (Nilai IKM minimal 70)	20.000.000	DBH Prov.		0	
JUMLAH SATPOL PP & DAMKAR					3.985.796.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	220.000.000				410.000.000
1.05.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (ATK, Jasa Telepon, Air, Listrik, Mamin Rapat, Surat Kabar, SPPD, Kebersihan dan Keamanan)	220.000.000	DBH Prov.	-		410.000.000
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	215.000.000				270.000.000
1.05.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten	5 unit (1 unit laptop, 1 unit rak peralatan, 2 unit hardisk external dan 1 unit papan nama kantor)	40.000.000	DBH Prov.	-		45.000.000
1.05.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten	12 bulan (Jumlah perawatan Gedung/ Gudang Kantor, tempat parkir, taman serta pengecatan pagar dan gedung/ gudang)	25.000.000	DBH Prov.	-		35.000.000
1.05.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten	12 bulan (Jumlah perawatan Kendaraan Dinas Operasional meliputi, Servis, Penggantian Suku Cadang, BBM, Pelumas/ Olie dan Pajak 1 unit R6, 4 unit R4, 1 unit R3 dan 9 unit R2)	125.000.000	DBH Prov.	-		160.000.000
1.05.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah perawatan peralatan kantor	Kabupaten	12 bulan (Genset, Gergaji Mesin, Perahu Karet, Komputer/ Printer, Kelistrikan/ Elektronik)	25.000.000	DBH Prov.	-		30.000.000
1.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				20.000.000				30.000.000
1.05.05.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis bagi Sumber Daya Aparatur	Kabupaten	8 OK (Jumlah aparatur terampil dan siap pakai dalam Pengadministrasian dan Penanganan Kebencanaan)	20.000.000	DBH Prov.	-		30.000.000
1.05.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang tertangani	Cakupan korban bencana alam yang tertangani		100 %	1.284.650.000				1.785.000.000
1.05.22.1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah, pembinaan desa tangguh bencana dan peningkatan kompetensi dasar manajemen bencana	Kabupaten	3 kegiatan (3 Kali (1. di 42 sekolah, 2. di 15 desa, dan 1 kegiatan peningkatan kompetensi dasar manajemen bencana))	237.650.000	DBH Prov.	-		510.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.05.22 3	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam	Kabupaten	24 unit (1 unit GPS darat, 4 unit alat pemadam, 1 paket modif kenadaraan Penanggulangan Bencana (PB), 10 unit headlamp, 5 unit lampu emergency, 1 unit laptop dan 1 unit IPS/ Power Supply (PB), 1 unit kamera)	93.050.000	DBH Prov.	-		200.000.000
1.05.22 5	Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Tim SAR	Jumlah pelatihan anggota Tim SAR dalam penanganan bencana	Kabupaten	2 kali (Kemampuan dan kapasitas anggota Tim SAR meningkat)	200.000.000	DBH Prov.	-		210.000.000
1.05.22 6	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan psikologis pasca bencana	Kabupaten	40 kali (Meningkatnya fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana)	100.000.000	DBH Prov.	-		110.000.000
1.05.22 7	Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah pelaksanaan kegiatan tanggap darurat	Kabupaten	12 bulan (dengan perkiraan dalam satu tahun terjadi kurang lebih 60 kejadian bencana (isidentil))	135.000.000	DBH Prov.	-		200.000.000
1.05.22 8	Posko siaga bencana	Jumlah kegiatan Posko siaga bencana	Kabupaten	12 bulan (1 hari 3 shift @ 3 orang ganti transport untuk 3240 ok @ Rp. 600,00)	210.000.000	DBH Prov.	-		250.000.000
1.05.22 9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana	Kabupaten	12 bulan (Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintah dalam penanganan pasca bencana)	20.000.000	DBH Prov.	-		25.000.000
1.05.22. 010	Pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana	Jumlah pelaksanaan pelatihan Jitu Pasma	Kabupaten	4 kali (Terwujudnya kemampuan mengkaji kebutuhan pasca bencana secara cepat, tepat dan terpadu)	100.000.000	DBH Prov.	-		110.000.000
1.05.22. 011	Pendataan, Pengolahan dan Pendistribusian Informasi Kebencanaan Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi)	Jumlah informasi kebencanaan yang berhasil didata, diolah dan didistribusikan Pusdalops	Kabupaten	12 bulan (Perlengkapan kebutuhan database dan pemeliharaan jaringan Pusdalops, seperti seragam, papan data, data base, komputer, printer, tv, hp, meja kursi dan pemeliharaan jaringan)	188.950.000	DBH Prov.	-		170.000.000
1.05.23	Program Mengintensifkan Penanganan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000				15.000.000
1.05.23 1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen survey indeks kepuasan masyarakat	Kabupaten	1 kali (1 Kali dengan skor 75)	15.000.000	DBH Prov.	-		15.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
JUMLAH BPBD						1.754.650.000			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Ketersediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi, Tersedianya jasa & pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan, 12 bulan	300.000.000				0
1.05.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	300.000.000	DBH Prov.			0
1.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	115.000.000				830.000.000
1.05.02.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan roda 4 dan roda 2 (1 roda 4 dan 2 roda 2)	Kabupaten		0	DBH Prov.			560.000.000
1.05.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	1 unit (filling cabinet)	20.000.000	DBH Prov.			35.000.000
1.05.02.011	Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Laptop	Kabupaten	1 unit ()	10.000.000	DBH Prov.			45.000.000
1.05.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pengecatan dan perbaikan ringan bangunan gedung	Kabupaten	1 lokasi ()	25.000.000	DBH Prov.			50.000.000
1.05.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kabupaten	29 unit ()	50.000.000	DBH Prov.			125.000.000
1.05.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kabupaten	42 unit ()	10.000.000	DBH Prov.			15.000.000
1.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	16.000.000				10.000.000
1.05.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen (renja, RKT, lakip, perjanjian kinerja. monev bappeda, monev adbang, lppd, review renja, laporan keuangan semester dan tahunan)	Kabupaten	10 dokumen ()	16.000.000	DBH Prov.			10.000.000
1.05.23	Program Mengintensifkan Penanganan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000				15.000.000
1.05.23.1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen IKM	Kabupaten	3 dokumen (skor IKM 75)	15.000.000	DBH Prov.			15.000.000
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase konflik yg menimbulkan dampak negatif, Jmlh PHBN, Hari jd Kab Magetan dan Prov		30 %, 16 kali	645.450.000				955.000.000
1.05.17.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Rapat FKUB dan pembinaan umat beragama	Kabupaten	7 kali ()	92.500.000	DBH Prov.			145.000.000
1.05.17.2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah terlaksananya pertemuan antar pelaku ekonomi di Kab. Magetan	Kabupaten	1 kali ()	25.000.000	DBH Prov.			60.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.05.17 3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah terlaksananya sosialisasi pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa di masyarakat	Kabupaten	1 kali ()	25.000.000	DBH Prov.		60.000.000	
1.05.17 4	Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)	Jumlah terlaksananya rakor yang membahas informasi yang berpotensi konflik di masyarakat yang dihadiri anggota Kominda	Kabupaten	12 kali ()	472.950.000	DBH Prov.		600.000.000	
1.05.17 5	Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Pembauran Kebangsaan	Kabupaten	3 kali ()	30.000.000	DBH Prov.		90.000.000	
1.05.18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase kenakalan remaja		20 %	92.500.000			250.000.000	
1.05.18 2	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Seminar, talks show, diskusi dan pendidikan wawasan kebangsaan	Kabupaten	3 kali ()	92.500.000	DBH Prov.		250.000.000	
1.05.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pemberdayaan masy desa utk tertib dan aman		100 %	340.000.000			475.000.000	
1.05.19 1	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah terlaksananya pertemuan FKDM dan sosialisasi deteksi dini dan cegah dini di masyarakat	Kabupaten	4 kali ()	100.000.000	DBH Prov.		150.000.000	
1.05.19 3	Sosialisasi Keamanan Dalam Negeri	Jumlah pertemuan kamdagri	Kabupaten	5 kali ()	240.000.000	DBH Prov.		325.000.000	
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Prosentase konflik politik		0 %	700.000.150			1.940.000.000	
1.05.21 1	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah penyuluhan kepada Masyarakat	Kabupaten	3 kali ()	117.327.150	DBH Prov.		700.000.000	
1.05.21 3	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah Rakor antar Lembaga pemerintah, ormas, LSM, Toga, Tomas, dan Organisasi profesi	Kabupaten	1 kali ()	25.000.000	DBH Prov.		70.000.000	
1.05.21 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Pemantauan keberadaan ormas dan LSM	Kabupaten	12 kali ()	15.000.000	DBH Prov.		30.000.000	
1.05.21 6	Penelitian berkas bantuan keuangan partai politik	Jumlah penelitian persyaratan pencairan banpol	Kabupaten	20 proposal ()	20.000.000	DBH Prov.		40.000.000	
1.05.21 7	Penyuluhan kepada partai politik	Jumlah penyuluhan kepada Parpol	Kabupaten	1 kali ()	20.000.000	DBH Prov.		40.000.000	
1.05.21 8	Desk Pilkada Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi tim desk pilkada Kab Magetan 2018	Kabupaten	3 bulan ()	360.342.800	DBH Prov.		1.000.000.000	
1.05.21. 013	Pembinaan Organisasi Masyarakat	Jumlah Pertemuan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten	1 kali ()	25.000.000	DBH Prov.		60.000.000	
1.05.21. 016	Pemantauan Politik Daerah	Jumlah laporan pemantauan politik daerah	Kabupaten	12 bulan ((dalam rangka Pilkada 2018))	117.330.200	DBH Prov.		0	
JUMLAH BAKESBANGPOL					2.223.950.150				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS SOSIAL									
1.02.24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Jumlah peserta sunatan masal		180 anak	140.000.000				0
1.02.24 4	Pelayanan sunatan masal	Jumlah peserta sunatan massal	Kabupaten	180 anak ()	140.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	320.000.000				0
1.06.01. 020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (ATK, Perjalanan Dinas, Mamin Rapat, 1 penjaga malam, 1 petugas kebersihan, 1 orang sopir)	320.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	210.000.000				340.000.000
1.06.02. 011	Pengadaan komputer/laptop	Jumlah pengadaan komputer, printer dan laptop	Kabupaten	3 Unit (Komputer 1 unit, Printer 1 unit, Laptop 1 Unit)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
1.06.02. 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten	2 Unit Gedung (Gedung Kantor Dinsos dan Gedung Karang Taruna)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat			40.000.000
1.06.02. 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten	6 Unit (Kendaraan dinas operasional, Rescue, tangki air, mobil jenazah)	80.000.000	DAU/ DBH Pusat			125.000.000
1.06.02. 031	Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/ berkala TMP Yudonegoro	Kabupaten	12 Bulan (Pembersihan TMP Yudhonegoro, HR juru kunci, tenaga kebersihan, rabat, perataan tanah (urug pasir), pagar,)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			175.000.000
1.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				10.000.000				20.000.000
1.06.05 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kabupaten	10 Orang (10 orang PNS)	10.000.000	DAU/ DBH Pusat			20.000.000
1.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	25.000.000				45.000.000
1.06.06 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten	8 Dokumen (Renja, LKPJ, LKjJP, LPPD, Monev Renja, Lap. Kemiskinan, Lap. Pengadaan Barang/Jasa)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			45.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				20.000.000
4.01.24 3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan IKM	Kabupaten	1 kegiatan (dokumen laporan survey)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			20.000.000
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	Cakupan bantuan keluarga miskin		100 %	540.000.000				970.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya								
1.06.154	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kabupaten	50 KK (Pelatihan ketrampilan dan pemberan bantuan sarana usaha, pemberian sembako untuk fakir miskin)	150.000.000	DAU/ DBH Pusat			300.000.000
1.06.158	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah keluarga miskin di sekitar makam leluhur yang mendapat bantuan sembako dan peserta sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan	Kabupaten	730 orang (430 KK fakir miskin di sekitar makam leluhur, 300 peserta sosialisasi)	90.000.000	DAU/ DBH Pusat			120.000.000
1.06.15.010	Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan	Kabupaten	10 Kelompok (10 kelompok (@ 10 orang) peserta pelatihan ketrampilan yang diberikan bantuan sarana usaha (5 kelompok perbengkelan dan 5 kelompok keripik ketela/ kerupuk))	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			250.000.000
1.06.15.011	Pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan PKH secara optimal	Kabupaten	18 Kecamatan (Pelaksana, pendamping dan penerima PKH)	200.000.000	DAU/ DBH Pusat			300.000.000
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS yg mendapat bantuan sosial		5,87 %	250.000.000				150.000.000
1.06.162	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten	30 Orang (30 Peserta sosialisasi korban KDRT)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			75.000.000
1.06.163	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten	100 Orang (sosialisasi tentang penyakit HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA 100 orang dari tokoh masyarakat, tokoh agama, anak sekolah di 2 Kecamatan)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			75.000.000
1.06.16.010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial serta fakir miskin yang menerima bantuan	Kabupaten	670 orang ()	200.000.000	DAU/ DBH Pusat	Bantuan sembako untuk korban bencana alam/bencana sosial dan untuk fakir miskin		0
1.06.17	Program pembinaan anak terlantar	Cakupan anak terlantar yang tertangani		7,41 %	70.000.000				300.000.000
1.06.172	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan	Kabupaten	100 Orang (bimbingan dan pelatihan ketrampilan bagi anak/remaja bermasalah)	70.000.000	DAU/ DBH Pusat			300.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				sebanyak 50 orang dan 50 orang tetirah)					
1.06.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase Penyandang cacat mampu latih tertangani		11,86 %	120.000.000			300.000.000	
1.06.18 3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan	Kabupaten	50 Orang (pelatihan bagi Penyandang Cacat mampu latih yang mendapat pelatihan ketrampilan)	120.000.000	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	
1.06.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Prosentase lanjut usia terlantar yang tertangani		11,03 %	50.000.000			100.000.000	
1.06.19 8	Pendampingan operasional bantuan langsung tunai untuk lanjut sosial	Jumlah pendataan updating data lanjut usia terlantar	Kabupaten	220 Orang (220 orang lanjut usia terlantar)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
1.06.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Prosentase penyandang pnyakit sosial yg tertangani		50 %	81.500.000			200.000.000	
1.06.20 4	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah penyandang penyakit sosial dan orang terlantar	Kabupaten	150 Orang (Pengiriman ke panti rehabilitasi bagi penyandang penyakit sosial dan pemulangan ke daerah bagi orang terlantar)	81.500.000	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	
1.06.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jml Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial tertangani		2.599 orang	185.000.000			500.000.000	
1.06.21 2	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah kegiatan ekpose	Kabupaten	1 Kegiatan (Pameran pada Hari Jadi Kabupaten Magetan dan ekspose kegiatan di media massa)	35.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
1.06.21 3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peserta pelatihan	Kabupaten	72 Orang (72 orang peserta pemantapan PSM, 18 TKSk melaksanakan pendampingan di 18 kecamatan serta updating data PBI JKN di 18 kecamatan)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	
1.06.21 4	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah lembaga peserta pelatihan dan bimbingan	Kabupaten	50 lembaga (Pelatihan ketrampilan untuk Karang Taruna dan bimbingan bagi Karang wredha)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
4.01.50	Program Pembinaan Mental Spiritual				80.000.000			80.000.000	
4.01.50 3	Peningkatan kualitas pelayanan Hibah kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan	jumlah calon penerima hibah	Kabupaten, kec. MAOSPATI	250 sasaran (tercukupinya kelengkapan syarat calon penerima hibah)	80.000.000	DAU/ DBH Pusat		80.000.000	
JUMLAH DINSOS					2.101.500.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS TENAGA KERJA									
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	270.000.000				0
2.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)	270.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	55.000.000				0
2.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	7 unit (7 unit R2)	0	DAU/ DBH Pusat			0
2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	2 unit (1 unit Laptop, & 1 unit printer)	0	DAU/ DBH Pusat			0
2.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung sarana pelayanan yang di pelihara	Kabupaten	1 unit gedung ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	3 unit (3 unit R4)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	20.000.000				0
2.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Kabupaten	5 Dokumen (SAKIP, LAKIP, Renstra, Renja)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				0
4.01.24.03	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan IKM	Kabupaten	1 Kegiatan (Skor IKM 80)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		8,91 persen	30.000.000				0
2.01.15.02	Pembangunan balai latihan kerja	Jumlah penyusunan dokumen	kec. SUKOMORO	2 Dokumen (Dokumen FS dan DED untuk pembangunan BLK)	0	DAU/ DBH Pusat			0
2.01.15.03	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah LPKS yang mendapat pembinaan	kec. MAGETAN	28 LPK Swasta (28 LPK swasta)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Pengangguran Terbuka		2,56 persen	105.000.000				25.000.000
2.01.16.02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah pelaksanaan administrasi bursa tenaga kerja online	Kabupaten	12 bulan (2 kali koordinasi luar daerah dan HR tim, perlengkapan AK1)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			25.000.000
2.01.16.06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah pencari kerja, BKK, UP3CTKI, PPTKIS dan aparatur pemerintah yang di latih	Kabupaten	800 orang (HR, sosialisasi, kelengkapan administrasi dan fasilitasi 5 kube)	85.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani		0,14 persen	60.000.000				0
2.01.17.01	Pengendalian dan pembinaan lembaga	Jumlah penanganan kasus bidang	Kabupaten	8 kasus (8 kasus TKI)	10.000.000	DAU/ DBH			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	penyalur tenaga kerja	ketenagakerjaa		bermasalah)		Pusat			
2.01.17 4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah pengusaha/pekerja yang mendapatkan sosialisasi	Kabupaten	60 orang (fasilitasi penetapan UMK dan sosialisasi)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.01.17 5	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan terkait penerapan norma ketenagakerjaan	Kabupaten	72 Perusahaan (72 perusahaan yang dibina terkait syarat kerja)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.01.53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	Pembangunan BLK, Jumlah kube yang dibina		100 persen, 15 kube	3.032.384.000			0	
2.01.53 1	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah tenaga kerja dan masyarakat yang mendapat pelatihan keterampilan kerja	Kabupaten	180 orang (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa)	3.032.384.000	DBHCHT		0	
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan		30 kk	295.000.000			0	
3.08.15 2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah KSAD yang terselesaikan	Kabupaten	4 KSAD (KSAD Sumatera selatan, OKI, Bulungan, Gorontalo)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.08.15 5	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah calon transmigran yang di kirim	Kabupaten	20 KK (20 KK di 4 Kabupaten)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.08.15 6	Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	Jumlah peserta sosialisasi ketransmigrasian	Kabupaten	70 orang (70 peserta di 2 kelompok)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
JUMLAH DISNAKER					3.887.384.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	319.200.000				400.000.000
2.05.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. MAGETAN	12 bulan (ATK, listrik, telp, air, mamin, sppd)	319.200.000	DAU/ DBH Pusat			400.000.000
2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	775.807.200				780.000.000
2.05.02.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	kec. MAGETAN	3 unit (3 unit roda 3 pengangkut sampah)	110.425.000	DAU/ DBH Pusat			400.000.000
2.05.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	kec. MAGETAN	8 Unit (1 unit loker, 1 unit almari arsip, hardisk 1 unit, printer 3unit, audio 1 buah, meja kursi kantor 1 set)	40.082.200	DAU/ DBH Pusat			300.000.000
2.05.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten	2 kegiatan (1 paket taman, 1 paket gedung kantor)	543.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.05.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	kec. MAGETAN	12 bulan (6 unit R4, 13 unit R2)	82.300.000	DAU/ DBH Pusat			80.000.000
2.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				45.000.000				110.000.000
2.05.05.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	kec. MAGETAN	3 orang ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			50.000.000
2.05.05.2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	kec. MAGETAN	2 kali ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			60.000.000
2.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	30.000.000				535.000.000
2.05.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	kec. MAGETAN	5 dokumen ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			35.000.000
2.05.06.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun	kec. MAGETAN	1 jenis ()	10.000.000	DAU/ DBH Pusat			500.000.000
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani		80 %	4.185.000.000				6.185.000.000
2.05.15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah penyediaan sarpras pengelolaan persampahan	Kabupaten	2 jenis (1 paket sarpras persampahan, 2 kelengkapan bangunan TPS 3R)	175.000.000	DAU/ DBH Pusat			25.000.000
2.05.15.4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	kec. MAGETAN	12 bulan (operasionalisasi sarpras persampahan 7 roda 3, 9 truk, 3 pick up)	2.700.000.000	DAU/ DBH Pusat			3.000.000.000
2.05.15.011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pelaksanaan gerakan 3R dalam pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat	kec. MAGETAN, kec. PLAOSAN, kec. KARANGREJO	12 bulan ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			100.000.000
2.05.15.	Pemeliharaan TPS dan Transfer Depo	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan	kec. MAGETAN	6 lokasi (pembuatan TPS 3	175.000.000	DAU/ DBH			350.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
013	Sampah	TPS dan transfer Depo sampah		unit, pemeliharaan 3 TPS)		Pusat			
2.05.15.015	Pembangunan Infrastruktur TPA	Jumlah pembangunan Infrastruktur TPA	kec. MAGETAN	1 paket (PEMBANGUNAN IPLT)	735.000.000	DAU/ DBH Pusat		1.800.000.000	
2.05.15.017	Pengadaan sarana pengangkutan sampah	Jumlah pengadaan prasarana pengangkutan sampah	kec. MAGETAN	4 unit (container sampah)	200.000.000	DAU/ DBH Pusat		800.000.000	
2.05.15.018	Rehabilitasi TPA	Jumlah pelaksanaan rehabilitasi TPA	kec. MAGETAN	1 kegiatan (petak baru)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		110.000.000	
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pencemaran udara, air dan tanah		35 %	1.233.000.000			1.055.000.000	
2.05.16.1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	kec. MAGETAN, kec. PANEKAN	3 kegiatan (1 kali pelatihan, 1 kali sosialisasi, 1 kali pembinaan)	233.000.000	DAU/ DBH Pusat		250.000.000	
2.05.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan	kec. MAGETAN	39 titik pantau (data kualitas udara, uji kualitas air)	80.000.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
2.05.16.4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	kec. MAGETAN	1 sosialisasi ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		90.000.000	
2.05.16.7	Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan	kec. MAGETAN	2 kegiatan (3 kali sosialisasi, 10 rakor)	45.000.000	DAU/ DBH Pusat		60.000.000	
2.05.16.012	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah penyusunan dokumen kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	kec. MAGETAN	1 dokumen ()	700.000.000	DAU/ DBH Pusat		135.000.000	
2.05.16.014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup	kec. MAGETAN	3 kali ()	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		120.000.000	
2.05.16.022	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan	Jumlah penyediaan sarpras lingkungan	kec. MAGETAN	2 jenis (20 unit hidroponik, 80 unit biopori)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		250.000.000	
2.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	% konservasi sbg fungsi pelestarian lingk		90 %	500.500.000			1.025.000.000	
2.05.17.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah penanaman pohon untuk penghijauan di sekitar mata air dan lahan kritis	kec. MAGETAN	1500 batang ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	
2.05.17.5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah penyusunan dokumen rencana aksi daerah gas rumah kaca	kec. MAGETAN	1 dokumen ()	45.500.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
2.05.17.7	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah pembuatan talud sumber mata air	kec. MAGETAN	2 lokasi ()	200.000.000	DAU/ DBH Pusat		250.000.000	
2.05.17.9	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Jumlah dokumen yang disusun	kec. MAGETAN	1 dokumen (pemetaan ijin lingkungan)	45.000.000	DAU/ DBH Pusat		75.000.000	
2.05.17.010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah pelaksanaan pelestarian satwa	kec. MAGETAN	1 paket kegiatan (Pelestarian satwa khas magetan)	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
2.05.17.014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah dokumen yang disusun	kec. MAGETAN	1 dokumen (kelestarian lingkungan hidup)	35.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan kelengkapan data informasi lingkungan		90 %	265.000.000			375.000.000	
2.05.19 2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen yang disusun	kec. MAGETAN	2 dokumen (1 dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD) dan 1 dokumen indeks Pengelolaan kualitas lingkungan Hidup Daerah kab.magetan (IPKLHD))	65.000.000	DAU/ DBH Pusat		75.000.000	
2.05.19 7	Koordinasi Penilaian Adiwiyata	Jumlah pelaksanaan bintek dan seleksiterlaksananya pembinaan	kec. MAGETAN	4 jenis kegiatan (4 kali seleksi, 1 kali bintek sosialisasi dan evaluasi sekolah adiwiyata)	200.000.000	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	
2.05.20	Program peningkatan pengendalian polusi	prosentase prasarana pengendalian pencemaran		86 %	385.000.000			350.000.000	
2.05.20 4	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah pelaksanaan pembangunan instalasi IPAL	kec. MAGETAN	1 kegiatan (instalasi IPAL lindi TPA milangasri)	320.000.000	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	
2.05.20 5	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	kec. MAGETAN	3 kali ()	65.000.000	DAU/ DBH Pusat		50.000.000	
2.05.27	Program mengintensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000			35.000.000	
2.05.27 1	Suevey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey IKM	kec. MAGETAN	5 kali ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		35.000.000	
2.05.53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Tani yang dibina		21 kelompok	450.000.000			250.000.000	
2.05.53 1	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah pelaksanaan pelatihan	kec. MAGETAN	2 kali (pelatihan pengelolaan sampah dan bank sampah)	450.000.000	DBHCHT		250.000.000	
JUMLAH DINAS LH					8.208.507.200				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	600.000.000				0
2.06.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (Kelengkapan administrasi perkantoran, kebutuhan rutin, 1 THL, jasa kebersihan, jasa keamanan)	600.000.000	DAU/ DBH Pusat	Pemenuhan Kebutuhan Rutin Kegiatan Kantor		0
2.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	590.000.000				50.000.000
2.06.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Kabupaten	12 unit (Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli (server, AC portable 2 unit, 4 unit komputer, 4 laptop, 1 alat rekam KTP, printer 1 unit))	200.000.000	DAU/ DBH Pusat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli		0
2.06.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Kabupaten	4 unit (Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat	Pemeliharaan Rutin berkala Gedung kantor		50.000.000
2.06.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Kabupaten	18 unit (4 mobil roda empat, 14 kendaraan roda dua)	140.000.000	DAU/ DBH Pusat	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas		0
2.06.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten	12 bulan ()	15.000.000	DAU/ DBH Pusat	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor		0
2.06.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah bangunan kantor yang direhab	Kabupaten	2 unit (selokan dan kamar mandi)	185.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.000.000				0
2.06.05.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Karyawan yang Mengikuti Bimtek	Kabupaten	42 Orang (Jumlah Karyawan yang Mengikuti Bimtek (2 bimtek ADB dan bimtek reguler))	15.000.000	DAU/ DBH Pusat	Pendidikan dan Pelatihan Formal		0
2.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	25.000.000				0
2.06.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang dibuat	Kabupaten	10 dokumen ((SAKIP, LAKIP, LKPJ , LPPD ,dll))	25.000.000	DAU/ DBH Pusat	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang mempunyai KTP, KK, Akta K		KTP : 100%, KK : 100%, Akte Kelahiran : 80%	897.275.000				583.975.001
2.06.15.9	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah penerbitan akta capil	Kabupaten	19000 akta (190 akta kelahiran dan akta kematian yang diterbitkan)	182.275.000	DAU/ DBH Pusat	Pengembangan Database Kependudukan		98.500.000
2.06.15.010	Penyusunan kebijakan kependudukan	Jumlah buku profil kependudukan	Kabupaten	150 buku ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.06.15.012	Sosialisasi Kebijakan kependudukan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Kependudukan	Kabupaten	542 Orang (542 Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Kependudukan warga magetan. untuk 18 kecamatan dan 235 desa/ kelurahan)	90.000.000	DAU/ DBH Pusat	Sosialisasi Kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas		79.000.000
2.06.15.017	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan penerbitan dokumen	Kabupaten	12 bulan (pelayanan penerbitan dokumen (KTP, KK, surat pindah))	230.000.000	DAU/ DBH Pusat	Meningkatkan tertib dokumen administrasi kependudukan		250.000.000
2.06.15.018	Pemeliharaan Jaringan Komputer	Jumlah jaringan SIAK yang terpelihara	Kabupaten	19 Lokasi (19 lokasi (1 dispenduk, 18 kecamatan))	100.000.000	DAU/ DBH Pusat	Ketersediaan Jaringan SIAK		0
2.06.15.020	Pengelolaan data arsip elektronik Akta Catatan Sipil	Jumlah Arsip Capil yang dikelola secara Elektronik	Kabupaten	14000 arsip ()	0	APBD	Pengelolaan arsip Capil secara Elektronik		156.475.000
2.06.15.021	Pengelolaan Data Arsip Elektronik KK dan KTP	Jumlah Data Arsip KK dan KTP yang dikelola secara Elektronik	Kabupaten	39000 berkas ()	195.000.000	DAU/ DBH Pusat	Pengelolaan Data Arsip KK dan KTP		1
2.06.15.022	Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO)	Capaian Standart Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kabupaten	1 dokumen ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat	Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan		0
2.06.16	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	25.000.000				20.000.000
2.06.16.1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Indek Kepuasan Masyarakat yang dilakukan	Kabupaten	75 % ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat	Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat		20.000.000
JUMLAH DISDUK CAPIL					2.152.275.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	310.000.000				335.000.000
2.07.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	310.000.000	DAU/ DBH Pusat			335.000.000
2.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	72.000.000				110.000.000
2.07.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten	12 bulan (pembangunan papan nama kantor)	12.000.000	DAU/ DBH Pusat			35.000.000
2.07.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten	17 unit (Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (2 mobil roda 4, 15 roda dua))	60.000.000	DAU/ DBH Pusat			75.000.000
2.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	15.000.000				26.000.000
2.07.06.3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah jenis laporan yang disusun	Kabupaten	6 jenis (Tersusunnya RKA/DPA, pelaporan, SIMDA, SIPP, LKPJ dan Lakip)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat	-		26.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan pembinaan lembaga desa		100 %	930.000.000				1.285.000.000
2.07.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Pokjanal Posyandu)	Jumlah wilayah yang mengikuti bimbingan teknis	Kabupaten	235 desa (Bintek aplikasi sistem informasi posyandu untuk 235 desa)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			100.000.000
2.07.15.015	Pelatihan RT, RW, LPM dan Aparatur	Jumlah Desa yang mengikuti pelatihan	Kabupaten	207 desa ()	0	DAU/ DBH Pusat			75.000.000
2.07.15.019	Peningkatan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan implementasi 10 program pokok PKK	Kabupaten	235 desa ()	800.000.000	DAU/ DBH Pusat			850.000.000
2.07.15.023	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Pembekalan BPD dan Kades)	Jumlah Desa yang mengikuti pembekalan BPD	Kabupaten	207 desa (414 orang)	40.000.000	DAU/ DBH Pusat			100.000.000
2.07.15.026	Penyuluhan Kesehatan Anak Balita (PMT-AS)	Jumlah anak yang memperoleh PMT-AS	Kabupaten	200 anak (Peningkatan hasil evaluasi pembelajaran (kecerdasan) anak)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			100.000.000
2.07.15.027	Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM Mandiri Pedesaan	Jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi	Kabupaten	15 kecamatan ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			60.000.000
2.07.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang diberdayakan		114 lembaga	230.000.000				1.220.000.000
2.07.16.5	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	Jumlah pameran yang diikuti	Kabupaten	2 event pameran (1 pameran pada hari jadi Kab Magetan dan pameran provinsi expo)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			200.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.07.16.016	Pelatihan Pemasarakan dan Pemanfaatan TTG	Jumlah pelaksanaan pelatihan	Kabupaten	1 kegiatan (20 peserta dari masyarakat yang mempunyai potensi menjahit dan bordir)	40.000.000	DAU/ DBH Pusat		75.000.000	
2.07.16.017	Dana Pendampingan Desa Mandiri Energi/DME	Jumlah kegiatan pelatihan energi bio gas	Kabupaten	1 kegiatan (100 peserta rumah tangga ternak)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		50.000.000	
2.07.16.019	Pelatihan Pengelola Pasar Desa	Jumlah peserta pelatihan	Kabupaten	15 Orang (Pelatihan pengelola pasar desa dan lomba pasar desa)	10.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
2.07.16.020	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Pilot Project Profil Desa dan Kelurahan)	Jumlah dokumen monev	Kabupaten	1 dokumen (Data dasar profil desa/kelurahan dari 235 desa/kelurahan)	0	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
2.07.16.023	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UPKU	jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Kabupaten	1 kegiatan (pengelola UPKU 100 desa)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat		20.000.000	
2.07.16.027	Fasilitasi Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang dibangun	kec. KARAS	1 pasar ()	5.000.000	DAU/ DBH Pusat		500.000.000	
2.07.16.035	Pilot Project Fasilitasi Pembentukan BUMDes	Jumlah desa yang di monev	Kabupaten	75 peserta (Terfasilitasinya inisiasi pembentukan BUMDes di desa)	80.000.000	DAU/ DBH Pusat		175.000.000	
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Nilai swadaya masyarakat		933.977.550 rupiah	620.000.000			1.355.000.000	
2.07.17.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Stimulanasi partisipasi masy dalam membangun Desa/kel	Kabupaten	18 desa (Terpilihnya 6 desa/kel terbaik di Kab. Magetan)	95.000.000	DAU/ DBH Pusat		85.000.000	
2.07.17.2	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa (BBGR)	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti musyawarah BBGR	Kabupaten	23 desa/kel ()	80.000.000	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	
2.07.17.5	Pengembangan Sistim Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP)	presentasi data pengembangan SMPP	Kabupaten, kec. LAMBEYAN, kec. PONCOL, kec. KAWEDANAN, kec. SIDOREJO, kec. PLAOSAN, kec. KARAS, kec. NGUNTORONADI, kec. MAOSPATI	207 desa (peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam sisitem pembangunan desa)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		80.000.000	
2.07.17.7	Pengendalian Alokasi Dana Desa (ADD) Tingkat Kabupaten	Jumlah Desa yang dimonev	Kabupaten	207 desa (Untuk evaluasi hasil capaian pembangunan desa dan rencana tindak lanjut)	70.000.000	DAU/ DBH Pusat		225.000.000	
2.07.17.013	Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren	Jumlah orang/santri yang mengikuti kegiatan	Kabupaten	15 peserta/santri ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		40.000.000	
2.07.17.018	Akselerasi Pembangunan Pedesaan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa	Kabupaten	207 desa (BK Prov dan BK Kab.)	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		75.000.000	
2.07.17.019	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan	Jumlah pelaksanaan sambang desa	Kabupaten	4 kali desa beda (peningkatan pelayanan	240.000.000	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Pemerintah Desa			aparatur pemerintah daerah pada masyarakat)					
2.07.17.020	Jalin Matra	Jum;ah pemfasilitasi pemberian bantuan keuangan RTSM	Kabupaten	1 kegiatan ()	10.000.000	DAU/ DBH Pusat		350.000.000	
2.07.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	% aparatur pemerintah desa yg mendapat pembinaan		100 %	90.000.000			245.000.000	
2.07.185	Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat	Jumlah kader yang mengikuti pelatihan	Kabupaten	36 orang (Kader Pemberdayaan Masyarakat)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		30.000.000	
2.07.187	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah pelaksanaan lomba pro poor Award	Kabupaten	1 kegiatan (3 kategori)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		15.000.000	
2.07.188	Pembekalan BPD	Jumlah BPD yang mengikuti pembekalan	Kabupaten	207 desa ()	0	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
2.07.189	Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah pengelola administrasi desa yang dilatih	Kabupaten	207 desa (perangkat desa di 207 desa di 18 kecamatan se kabupaten magetan)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
JUMLAH DINAS PMD					2.267.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran		12 Bulan	457.680.000				0
2.08.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	457.680.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	360.000.000				0
2.08.02.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang dilakukan pengembangan	Kecamatan, kec. MAOSPATI	1 Balai Penyuluhan KB (Kec. Kawedanan)	20.000.000	DAK	Pengembangan Balai Penyuluhan KB		0
2.08.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten, kec. LAMBEYAN	5 unit (komputer 3 unit, printer 2 unit)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.08.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung dan peralatan kantor yang dipelihara	Kabupaten, kec. NGUNTORONADI, kec. BARAT, kec. LAMBEYAN	19 gedung (1 gedung DPPKB, 18 balai penyuluhan)	165.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.08.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kabupaten	8 unit (Selain untuk pemeliharaan kendaraan roda 4, juga untuk biaya perpanjangan STNK dan pajak kendaraan bermotor roda 2)	125.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0				0
2.08.05.4	Pengembangan SDM Tenaga Lini Lapangan	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM	Kabupaten	112 orang ()	0	DAU/ DBH Pusat			0
2.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100 %	0				0
2.02.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Kabupaten	8 jenis (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), Renja Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, Feed Back Laporan Bulanan Program KKBPK, Data Basis Program KKBPK)	0	DAU/ DBH Pusat	Untuk mencapai laporan capaian kinerja yang optimal diperlukan dana yang cukup		0
2.02.06.4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan semesteran dan akhir tahun DPPKB DAN PPPA yang dihasilkan	Kabupaten	30 buku/dokumen ()	0	DAU/ DBH Pusat			0
2.02.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Pemenuhan Kriteria Kota Layak Anak		80 %	90.000.000				0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.02.153	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kabupaten	18 kecamatan (Jumlah Sosialisasi KLA dan Jumlah Gugus Tugas di 18 Kecamatan)	90.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.02.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Korban KDRT yang mendapat penanganan		100 %	105.000.000			0	
2.02.167	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen Evaluasi PUG	Kabupaten	1 Dokumen (Prosentase dari jumlah OPD yang ada di kabupaten magetan)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.02.16.010	Operasional P2T-P2A Tingkat Kabupaten	Jumlah layanan korban kekerasan	Kabupaten	150 orang ()	85.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.02.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase korban KDRT yang mendapat bantuan		66,67 %	10.000.000			0	
2.02.17.010	Penyusunan Database Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Dokumen Database Korban KDRT	Kabupaten	1 dokumen ()	10.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.02.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Angka partisipasi perempuan di lembaga		70 %	40.000.000			0	
2.02.181	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peserta kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi anggota dasawisma	Kabupaten	40 orang (pelatihan membuat kue kering dan pemberian alat bagi organisasi perempuan)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.02.184	Kegiatan bimbingan manajemen usaha abagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi Pengusaha Industri Rumahan (PIR)	Kabupaten	30 peserta ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.02.186	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kader P2W-KSS	Kabupaten	110 kader ()	0	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.15	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif		77 %	275.000.000			0	
2.08.151	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Prosentase ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes dan Jejaring	Kabupaten	100 persen (Terpenuhinya Alat dan Kontrasepsi KB sesuai kebutuhan)	0	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.152	Pelayanan KIE	Jumlah dokumen hasil capaian kinerja PPKB dan PPPA	Kabupaten	8 dokumen (LPPD, RENJA, RENSTRA, LKJIP, RFK, RKA, LAPORAN UMPAN BALIK PROGRAM PPKB DAN PPPA, DATA BASIS)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat	Kegiatan yang dilaksanakan berupa evaluasi capaian kinerja Program PPKB dan PPPA	0	
2.08.153	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah peserta Pap Smear yang dilayani	Kabupaten	850 orang ()	70.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.155	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta Rakerda Program KKBPK	Kabupaten, kec. LAMBEBAN	200 orang (Peserta terdiri Dinas Lintas Sektor, Tokoh Masyarakat, Kader KB, PIK Remaja, Pramuka Saka Kencana, Petugas KB di Lapangan)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat	Meliputi kegiatan Rakerda Program KKBPK	0	
2.08.15	Percepatan Revitalisasi Program KB	Jumlah Kegiatan Yang Mendukung	Kabupaten	6 Kegiatan ()	70.000.000	DAU/ DBH		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
6		Program KB untuk harganas, TNI manunggal, HKG, BBGRM, Bulan bakti IBI, kampung KB				Pusat			
2.08.15 7	Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK)	Jumlah peserta pembinaan	Kabupaten	80 Orang (Kader Pria)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.15 8	Sosialisasi Program Keluarga Berencana	Jumlah Sosialisasi Program KB (melalui siaran di radio dan publikasi media cetak luar ruang)	Kabupaten	25 siaran ()	40.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Pernikahan Usia Dini		33 Pasangan	25.000.000			0	
2.08.16 1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah remaja/Pramuka yang mendapat pembinaan	Kabupaten	200 Remaja/Pramuka ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.17	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase akseptor yang terlayani		100 %	75.000.000			0	
2.08.17 2	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah Akseptor Yang Dilayani	Kabupaten	500 akseptor ()	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Prosentase Desa/Kelurahan Yang memiliki IMP/PPKBD		100 %	1.250.700.000			0	
2.08.18 2	Pembinaan dan peningkatan pengelolaan administrasi kelompok UPPKS	Jumlah kelompok peserta pelatihan dan jumlah anggota Pokjanis yang menerima honor	Kabupaten	235 Desa (235 Desa serta tim Pokjanis Yang Menerima Honor)	280.000.000	DAU/ DBH Pusat	Kegiatan terdiri dari pembinaan kelompok UPPKS dan pemberian honor bagi Tim Pokjanis KUKM	0	
2.08.18 3	Pengembangan potensi PPKBD	Jumlah kader yang menerima honor	Kabupaten	1375 kader (235 PPKBD dan 1140 Sub PPKBD)	880.700.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.18 6	Pendataan Keluarga Sejahtera	Jumlah dokumen updating hasil pendataan keluarga dan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Kabupaten	2 dokumen (Setiap Desa memiliki dokumen Pendataan keluarga dan GDPK)	90.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Cakupan PIK Remaja yang Berstrata Tegar		24 %	25.000.000			0	
2.08.20 1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah peserta sosialisasi	Kabupaten	180 peserta (Peserta 180 orang dalam rangka pembentukan PIK Remaja)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.23	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga				0			0	
2.08.23 1	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah kader kelompok Bina Keluarga yang dilatih	Kabupaten	144 kader (Peserta pelatihan terdiri 72 kader BKL dan 72 kader BKR dari 18 kecamatan)	0	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Prosentase kelompok BKB Percontohan		12 %	180.000.000			0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.08.24 1	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah kader kelompok BKB yang menerima honor	Kabupaten	235 kader ()	180.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.08.25	Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB	Tercapainya TFR 2,33		2,33 angka	37.000.000			0	
2.08.25 2	Pengadaan sarana pengolahan dan pelaporan data/informasi bidang keluarga berencana	Jumlah pengadaan dekstop all in one dan printer	Kecamatan	5 unit/paket (Terdiri dari 5 dekstop all in one dan 5 printer)	4.000.000	DAK		0	
2.08.25 3	Peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan serta kelengkapan sarana kerja, penggerakan dan pembinaan program KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan Bantuan Operasional KB	Kabupaten	18 Balai Penyuluhan (Sesuai dengan Juknis DAK Non Fisik. BOKB diperuntukkan bagi balai penyuluhan KB dan untuk distribusi alokon dari Kabupaten ke Faskes)	25.000.000	DAK		0	
2.08.25 4	Pengadaan Sarana Kerja PKB / PLKB dan Koordinator Lapangan KB	Jumlah pengadaan sarana kerja/smartphone bagi Petugas Lapangan KB	Kecamatan	36 unit ()	8.000.000	DAK	Sarana kerja berupa smartphone untuk meningkatkan kualitas Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK secara online	0	
2.08.26	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			0	
2.08.26 1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey Kepuasan Masyarakat	Kabupaten	1 Kegiatan (Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan UPTD PKS di Kecamatan kepada masyarakat)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
JUMLAH DINAS PPKB & PPPA					2.945.380.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PERHUBUNGAN									
2.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	970.000.000				0
2.09.01.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor	kec. SUKOMORO	12 bulan ()	170.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.09.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran	kec. SUKOMORO	12 bulan ()	800.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	267.240.000				385.000.000
2.09.02.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	kec. SUKOMORO		0	DAU/ DBH Pusat			0
2.09.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten		92.240.000	DAU/ DBH Pusat			150.000.000
2.09.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	JUMLAH PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	kec. SUKOMORO		0	DAU/ DBH Pusat			0
2.09.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	JUMLAH KENDARAAN DINAS YANG DIPELIHARA	kec. SUKOMORO		75.000.000	DAU/ DBH Pusat			135.000.000
2.09.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor	kec. SUKOMORO	1 gedung ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			100.000.000
2.09.03	Program peningkatan disiplin aparatur				36.000.000				55.000.000
2.09.03.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	JUMLAH PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPANNYA	kec. SUKOMORO		36.000.000	DAU/ DBH Pusat			55.000.000
2.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				50.000.000				210.000.000
2.09.05.1	Pendidikan dan pelatihan formal	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN; peningkatan SDM aparatur	kec. SUKOMORO	4 orang (mengikuti diklat dari kementerian); 85 orang ((Manajemen Training))	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			210.000.000
2.09.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	20.000.000				0
2.09.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	kec. SUKOMORO		20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				0
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kali ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan prasarana dan fasilitas LLAJ kondisi baik		88 persen	360.000.000				340.000.000
2.09.16.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	JUMLAH SERVICE, SUKU CADANG DAN KALIBRASI ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR	kec. SUKOMORO	6 alat uji (6 alat uji)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			50.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.09.16 2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	JUMLAH PEMELIHARAAN BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	kec. SUKOMORO		70.000.000	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	
2.09.16 4	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	JUMLAH TERMINAL YANG DIPELIHARA	kec. KAWEDANAN	2 TERMINAL (2 TERMINAL)	90.000.000	DAU/ DBH Pusat		90.000.000	
2.09.16 5	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana perlengkapan jalan	JUMLAH SARANA PERLENGKAPAN jalan YANG DIPELIHARA	Kabupaten	12 bulan (12 BULAN)	150.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Rasio load faktor		0,56 rasio	465.000.000			80.000.000	
2.09.17 2	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	JUMLAH KEIKUTSERTAAN WTN	Kabupaten	1 (1 KALI)	85.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.09.17 6	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	JUMLAH TERMINAL YANG ADA PETUGAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN setiap hari	Kabupaten	2 terminal (2 UNIT TERMINAL)	220.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.09.17. 010	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	JUMLAH PENYELENGGARA ANGKUTAN LEBARAN BUS BALIK GRATIS	Kabupaten	1 kali (1 KALI)	40.000.000	DAU/ DBH Pusat		40.000.000	
2.09.17. 011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	JUMLAH SURVEY ANGKUTAN ORANG DAN BARANG	Kabupaten	2 kali (2 SURVEY)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.09.17. 014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	JUMLAH PELAKSANAAN SOSIALISASI BERLALU LINTAS	Kabupaten	3 kali (3 KEGIATAN)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.09.17. 015	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah seleksi PEMILIHAN AWAK KENDARAAN DAN PEMBINAAN PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM	Kabupaten	2 kegiatan ()	40.000.000	DAU/ DBH Pusat		40.000.000	
2.09.18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	% tersedianya halte yg dilayani ankt umum dlm tray		92 persen	420.000.000			120.000.000	
2.09.18 2	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal	JUMLAH TERMINAL YANG DIBANGUN	Kabupaten	1 terminal (terminal parang)	420.000.000	DAU/ DBH Pusat		120.000.000	
2.09.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Prosentase tersedianya rambu, marka, quadril, Jumlah PJU yang terpelihara dan terbangun		60,15 persen,0 unit	1.320.000.000			760.000.000	
2.09.19 1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	JUMLAH PENGADAAN RAMBU LALU LINTAS	Kabupaten	180 buah (180 BUAH)	200.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.09.19 3	Pengadaan pagar pengaman jalan	pengadaan pagar pengaman tepi jalan	Kabupaten	116 meter (panjang pengadaan pagar pengaman tepi jalan)	200.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.09.19 7	Pengadaan dan pemasangan warning lamp	JUMLAH PENGADAAN PEMASANGAN WARNING LAMP	Kabupaten	10 unit (10 UNIT)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
2.09.19 8	Pengadaan dan pemasangan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan	Jumlah pengadaan alat pengendali dan pengaman pemakai jalan	Kabupaten	4 unit ATCS (4 ATCS)	0	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	
2.09.19 9	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan	PELAKSANAAN PENGAMANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS	Kabupaten	12 bulan (12 BULAN)	325.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.09.19.	Pemeliharaan Marka Jalan	Tersedianya perlengkapan jalan	Kabupaten	1500 meter persegi	300.000.000	DAU/ DBH		335.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
011				(pengecatan marka jalan)		Pusat			
2.09.19.012	Pengumpulan dan Analisis Database Lalulintas	JUMLAH SURVEY LALU LINTAS DAN PARKIR	Kabupaten	2 Data Base (2 DATA BASE)	70.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.09.19.013	Pengadaan Zona Selamat Sekolah	JUMLAH PENGADAAN ZONA SELAMAT SEKOLAH	Kabupaten	4 lokasi (4)	125.000.000	DAU/ DBH Pusat		125.000.000	
2.09.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase angkutan umum yang diuji KIR		92 persen	400.000.000			450.000.000	
2.09.202	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pengadaan alat kelengkapan uji kendaraan	kec. SUKOMORO	4 set (6000 buku uji, 26000, plat uji, stiker tanda samping 13000, 5 set perlengkapan uji, 2 unit, 1 orang operator alat)	400.000.000	DAU/ DBH Pusat		450.000.000	
JUMLAH DISHUB					4.328.240.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	400.000.000				650.000.000
2.10.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (pembayaran telpon, listrik, air, SPPD, ATK, penggandaan, mamin.)	400.000.000	DAU/ DBH Pusat			650.000.000
2.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	245.000.000				800.000.000
2.10.02.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Kabupaten	3 unit (kendaraan roda dua)	75.000.000	DAU/ DBH Pusat			400.000.000
2.10.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	3 jenis (filling cabinet 2, almari 1, meja eselon IV 5 unit, Meja Eselon II 1 unit, Meja Tamu 1 set, Meja kursi staf 7 unit, komputer 3, laptop 2, printer 2)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			200.000.000
2.10.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	1 unit (eternit, kanopi, cat)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			100.000.000
2.10.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten	9 unit ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			100.000.000
2.10.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	20.000.000				20.000.000
2.10.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Kabupaten	9 dokumen ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			20.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				20.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kali (Survey IKM Kominfo)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			20.000.000
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	cakupan pngembangan,pberdayaan kel informasi d Kec		50 %	235.000.000				450.000.000
2.10.15.2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah layanan pendukung berbasis smart city	Kabupaten	3 layanan (jumlah layanan pendukung smart city)	115.000.000	DAU/ DBH Pusat			150.000.000
2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) dan telecenter yang dibina	Kabupaten	8 kelompok (telecenter=6, KIM=10)	120.000.000	DAU/ DBH Pusat			300.000.000
2.10.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	cakupan binaan bidang kominfo		60 %	50.000.000				75.000.000
2.10.17.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta pelatihan bidang kominfo	Kabupaten	6 kali (pelatihan bidang kominfo (KIM, perangkat desa, UMKM))	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			75.000.000
2.10.18	Program kerjasama informasi dengan	Jumlah distribusi informasi		165 kali,195 kali	230.000.000				475.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	mas media	melalui media, Jumlah iklan yang diexpose di media massa dan publ							
2.10.18 1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	jumlah update informasi pembangunan daerah	Kabupaten	365 kali (Updating informasi Pembangunan Kabupaten)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	
2.10.18 3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah media penyuluhan	Kabupaten	7 media informasi (Pameran, pemutaran film, siaran keliling, sarasehan, leaflet, spanduk, baleho, website desa, massive media branding Kabupaten)	130.000.000	DAU/ DBH Pusat		175.000.000	
2.10.20	Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	cakupan jaringan TIK pemkab, tingkat kematangan KAMI		100 %	1.240.000.000			415.000.000	
2.10.20 1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah	Jumlah CPE (unit, sub unit, UPTD) yang terkoneksi	Kabupaten	110 CPE (Pemasangan FO OPD dalam kota, penambahan sambungan CPE ke UPTD)	225.000.000	DAU/ DBH Pusat		400.000.000	
2.10.20 2	Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah	Jumlah bandwidth untuk pelayanan website, SIM online dan internet Kabupaten	Kabupaten	100 Mbps (Pengadaan bandwidth dan fasilitas data center Kabupaten)	1.000.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.10.20 3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah OPD yang dimonitoring	Kabupaten	46 OPD (Monitoring pelaksanaan e-Gov)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat		15.000.000	
2.14.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	cakupan data statistik indikator pemb. daerah		100 %	230.000.000			350.000.000	
2.14.15 1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	jumlah OPD yang dibina dibidang statistik	Kabupaten	46 OPD ()	75.000.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
2.14.15 2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Dokumen data dasar Kabupaten Magetan, Data dasar kecamatan, potensi ekonomi Kabupaten Magetan	Kabupaten	3 dokumen ()	155.000.000	DAU/ DBH Pusat		200.000.000	
2.15	Persandian				30.000.000			100.000.000	
2.15.15	Program Pengembangan Persandian	Cakupan penanganan persandian		100 %	30.000.000			100.000.000	
2.15.15 1	Penyelenggaraan Persandian	Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan pengamanan informasi	Kabupaten	46 OPD (Layanan keamanan informasi)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
4.01.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah jam siaran LPPL Radio		19 jam/hari	150.000.000			150.000.000	
4.01.23 3	LPPL Radio Magetan Indah	Jumlah jam siaran	Kabupaten	7248 jam ()	150.000.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
JUMLAH DISKOMINFO					2.850.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO									
2.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	390.000.000				0
2.11.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	390.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase jml ketersediaan sarana prsrna aparatur,Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		1 unit,100 %	204.000.000				0
2.11.02.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Kabupaten		0	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.02.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kabupaten	1 unit ()	0	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	5 unit (Almari Besi 2, Filling Cabinet 3)	0	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.02.8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Kabupaten	1 unit ()	0	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten	10 unit (Printer 3, Laptop 2, Kamera 1, LCD 1, CCTV 3)	70.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.02.010	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Kabupaten	15 unit (Kursi 10, Almari 5)	0	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.02.021	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kabupaten	1 unit ()	15.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	1 unit ()	35.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	7 unit (Roda 4 : 3, Roda 2 : 4)	84.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	10.000.000				0
2.11.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten	10 dokumen ()	10.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.19	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				0
2.11.19.1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kali ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	jumlah UKM non BPR/LKM		950 orang	165.000.000				0
2.11.15.2	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti sosialisasi kebijakan tentang UM	Kabupaten	120 orang ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.11.15.6	Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kop dan UM yang mengikuti rapat koordinasi	Kabupaten	40 Usaha Mikro ()	0	DAU/ DBH Pusat			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		pengembangan UKM							
2.11.15 8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UM yang mengikuti pelatihan manajemen akuntansi	Kabupaten	120 orang ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.15 9	Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah	Jumlah UM yang mengikuti pelatihan proses produksi	Kabupaten, kec. SIDOREJO	80 orang ()	85.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	cakupan UMKM yang mendapatkan pelatihan		100 %	487.530.000			0	
2.11.16 1	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Jumlah UM yang mengikuti temu usaha	Kabupaten	40 Usaha Mikro ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.16 3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UM yang mengikuti fasilitasi kemitraan	Kabupaten	450 Usaha Mikro ()	165.830.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.16 5	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah UM yang mendapatkan fasilitas promosi hasil produksi	Kabupaten	10 orang ()	19.200.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.16 6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Kabupaten, kec. PLAOSAN	200 Usaha Mikro ()	60.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.16 7	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen koperasi/KUD	Kabupaten	400 Orang ()	125.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.16 8	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah	Jumlah UM yang Mengikuti Sosialisasi HAKI; Jumlah UMKM yang didaftarkan HAKI	Kabupaten	80 Usaha Mikro (); 8 UMKM ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.16. 010	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah UM yang dimonitoring untuk di kelompokkan	Kabupaten	80 Usaha Mikro ()	17.500.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	cakupan UMKM yg mendapatkan fasilitas permodalan		100 %	932.000.000			0	
2.11.17 1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah UM yang mengikuti sosialisasi informasi permodalan	Kabupaten	120 Usaha Mikro ()	45.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.17 5	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UM penerima dana pemerintah yang terpantau	Kabupaten	150 Usaha Mikro ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.17 7	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah UM yang melakukan jaringan kemitraan	Kabupaten	240 orang ()	60.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.17 8	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Jumlah UM Industri rumah tangga yang mendapatkan pelatihan	Kabupaten, kec. NGARIBOYO, kec. SIDOREJO	120 Usaha Mikro ()	60.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.17 9	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	jumlah UM yang mengikuti promosi	Kabupaten	45 Usaha Mikro ()	305.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.17. 010	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	Jumlah anggota kopwan yang pelatihan ketrampilan	Kabupaten	50 orang ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.17. 016	Fasilitasi Pengembangan UKM	Jumlah UM yang mendapatkan bantuan program	Kabupaten, kec. SIDOREJO, kec. PANEKAN	80 Usaha Mikro ()	412.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas	Prosentase koperasi kategori		18,25 %	286.470.000			0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Kelembagaan Koperasi	sehat							
2.11.18 3	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti rapat koordinasi	Kabupaten		0	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.18 4	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah Koperai/LKM yang mengikuti penyuluhan tentang prinsip prinsip koperasi	Kabupaten	80 Koperasi ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.18 5	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Kabupaten	215 Orang ()	70.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.18 6	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti jaringan kerjasama usaha koperasi	Kabupaten	300 Orang ()	125.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.18 7	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek	Kabupaten	100 Koperasi ()	41.470.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.18 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang dimonev	Kabupaten	15 Koperasi ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.11.51	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro	Jumlah petani tembakau yang dibina			0			0	
2.11.51 5	Pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan / atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau	Jumlah kelompok petani tembakau yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau mengesahkan badan hukum kelompok petani tembakau	Kabupaten	51 kelompok ()	0	DBHCHT		0	
2.11.53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi, dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi Tani Tembakau yang dibina		1 kop	250.000.000			0	
2.11.53 1	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah anggota kelompok petani tembakau yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	Kabupaten	350 Orang ()	250.000.000	DBHCHT		0	
JUMLAH DINKOP UM					2.745.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	530.000.000				0
2.12.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan.)	530.000.000	DAU/ DBH Pusat	Belanja rutin untuk mendukung operasional dan kelancaran pelaksanaan tugas.		0
2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	318.000.000				0
2.12.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor hasil pengadaan.	Kabupaten	3 unit; paket (2 unit AC, 1 papan nama Dinas, 1 mesin fotokopi)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk mendukung pelaksanaan tugas.		0
2.12.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor hasil pengadaan.	Kabupaten	12 unit (1 unit mesin fax, 10 unit microphone + sound sistem)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat	Sarana pelaksanaan tugas.		0
2.12.02.010	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur hasil pengadaan.	Kabupaten	15 unit; set (6 unit meja kerja, 6 unit kursi kerja, 1 rak arsip mobile; 2 set sofa.)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.12.02.011	Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan komputer, printer	Kabupaten	14 unit (5 unit PC, 5 unit printer, 4 unit ups,)	45.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk peningkatan operasional pelaksanaan tugas sebagai Organisasi Perangkat Daerah baru.		0
2.12.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara.	Kabupaten	1 unit (1 unit gedung kantor yang dipelihara.)	33.000.000	DAU/ DBH Pusat	Agar gedung kantor tetap terpelihara.		0
2.12.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara.	Kabupaten	15 unit (4 unit R4; 6 unit R2.)	80.000.000	DAU/ DBH Pusat	Agar kendaraan dinas/operasional tetap terpelihara.		0
2.12.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara.	Kabupaten	55 unit (55 unit perlengkapan kantor yang dipelihara.)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat	Agar perlengkapan gedung kantor tetap terpelihara.		0
2.12.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara.	Kabupaten	50 unit (50 unit peralatan kantor yang dipelihara.)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat	Agar peralatan kantor tetap		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
							terpelihara dengan baik.		
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	40.000.000				0
4.01.24 1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat selama waktu tertentu.	Kabupaten	12 bulan (Penanganan pengaduan masyarakat selama 12 bulan.)	10.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat.		0
4.01.24 3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kali (skor IKM 76,5)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
4.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase aparatur yang mendapatkan bimtek/diklat			0				0
4.07.05 4	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan mental dan fisik	Kabupaten	40 orang (40 orang aparatur)	0	DAU/ DBH Pusat	Untuk meningkatkan mental dan fisik aparatur.		0
4.07.05. 013	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah gelar budaya kerja yang dilaksanakan.	Kabupaten	1 kali (1 kali di Kabupaten Magetan)	0	DAU/ DBH Pusat	Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.		0
2.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur				15.000.000				0
2.12.03 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian Korpri	Kabupaten	40 stel (40 stel pakaian Korpri.)	0	DAU/ DBH Pusat	Untuk meningkatkan disiplin dan kebanggaan aparatur selaku anggota Korpri.		0
2.12.03 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian dinas khusus	Kabupaten	40 stel (Pakaian dinas khusus sejumlah 40 stel.)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan citra yang baik kepada masyarakat.		0
2.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	30.000.000				0
2.12.06 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun.	Kabupaten	4 dokumen (3 dokumen perencanaan, 1 dokumen pelaporan kinerja.)	10.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan.		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.12.06 2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun.	Kabupaten	1 dokumen (1 dokumen laporan keuangan semesteran.)	10.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk peningkatan sistem pelaporan keuangan.		0
2.12.06 4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun.	Kabupaten	1 dokumen (1 dokumen laporan keuangan akhir tahun.)	10.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk meningkatkan sistem pelaporan keuangan.		0
2.12.06. 015	Survey Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan.	Kabupaten	1 kali (1 kali Survey Kepuasan Masyarakat)	0	DAU/ DBH Pusat	Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat.		0
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	cakupan potensi yg dipromosikan		100 %	685.000.000				0
2.12.15 5	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang disusun.	Kabupaten		0	DAU/ DBH Pusat	Agar terselenggaranya perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang efektif.		0
2.12.15 6	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah koordinasi dan kerjasama penanaman modal.	Kabupaten	3 kali ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan investor sehingga meningkatkan investasi di Kabupaten Magetan.		0
2.12.15 8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.	Kabupaten	12 bulan (Kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal selama 12 bulan.)	10.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk pengendalian penanaman modal agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		0
2.12.15	Peningkatan kualitas SDM guna	Jumlah aparatur yang mengikuti	Kabupaten	10 orang (10 orang	25.000.000	DAU/ DBH	Untuk		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
9	peningkatan pelayanan Investasi	diklat penanaman modal dan PTSP.		aparatur penanaman modal dan PTSP.)		Pusat	meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM aparatur penanaman modal dan PTSP.		
2.12.15.010	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran investasi dan pelayanan publik.	Kabupaten	8 kali (8 kali pameran investasi dan pelayanan publik.)	450.000.000	DAU/ DBH Pusat	Sebagai sarana untuk mempromosikan potensi daerah dan peluang investasi.		0
2.12.15.012	Pembangunan Tempat Reklame	Jumlah tempat reklame yang dibangun.	Kabupaten	5 unit (5 unit tempat reklame.)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat	Sebagai sarana promosi dan penyampaian informasi.		0
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	realisasi investasi		Rp 960 M	610.000.000				0
2.12.163	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah peta potensi investasi yang dibuat.	Kabupaten	1 dokumen (1 dokumen peta potensi investasi.)	150.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk memberikan gambaran, pedoman dan arahan investasi yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan investasi di Kabupaten Magetan. Merupakan tugas pokok dalam penyelenggaraan penanaman modal Daerah.		0
2.12.164	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah aplikasi sistem informasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan yang dikembangkan.	Kabupaten	2 aplikasi (1 aplikasi SIMPADU, 1 aplikasi sistem perizinan online.)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk mendukung percepatan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
							melalui E-Service.		
2.12.16 6	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.	Kabupaten	12 bulan (12 bulan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.)	170.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk operasional dan peningkatan pelayanan perizinan dan nonperizinan.		0
2.12.16 7	Kajian kebijakan penanaman modal	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang disusun	Kabupaten	4 dokumen (4 Perbup tentang penanaman modal)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk menetapkan kebijakan dan regulasi penanaman modal dan PTSP.		0
2.12.16 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan nonperizinan	Kabupaten	12 bulan (Monitoring, evaluasi dan pelaporan perizinan dan nonperizinan selama 12 bulan.)	10.000.000	DAU/ DBH Pusat	Dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta penggalan pelayanan perizinan dan nonperizinan.		0
2.12.16. 014	Rakor dan Sosialisasi Penanaman Modal, Investasi dan Kerjasama antar Daerah	Jumlah rakor penanaman modal yang dilaksanakan.	Kabupaten	1 kali (1 kali rakor penanaman modal.)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat	Sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder penanaman modal.		0
2.12.16. 016	Sosialisasi Kebijakan Investasi	Jumlah paket sosialisasi melalui baliho, kalender, poster, leaflet, booklet, dan media massa (cetak, elektronik, online).; Jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka.	Kabupaten	6 paket (1 paket baliho, 1 paket kalender, 1 paket poster, 1 paket leaflet, 1 paket booklet, 1 paket sosialisasi melalui media massa (media cetak, elektronik dan online).); 6 kali (6 kali sosialisasi tatap muka.)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat	Sebagai sarana sosialisasi dan informasi kepada masyarakat.		0
3.05.18	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi				20.000.000				0
3.05.18 3	Koordinasi pengembangan energi alternatif	Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan energi	Kabupaten	3 kali (3 kali kegiatan koordinasi pengembangan panas bumi)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk mengembangk n potensi		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
							pemanfaatan panas bumi.		
4.07.51	Program Standarisasi Pelayanan Publik				60.000.000				0
4.07.51 1	Penguatan Mutu Pelayanan Publik	Jumlah paket kegiatan penguatan mutu pelayanan publik.	Kabupaten	1 paket (1 paket kegiatan implementasi ISO 9001:2015.)	60.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk meningkatkan standar dan mutu pelayanan.		0
JUMLAH DPM PTSP					2.308.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN									
2.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan	428.500.000			405.000.000	
2.17.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	428.500.000	DAU/ DBH Pusat		405.000.000	
2.17.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	92.000.000			975.000.000	
2.17.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten	46 buah (25 almari arsip, filling kabinet, rak buku, AC)	0	DAU/ DBH Pusat		225.000.000	
2.17.02.010	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Kabupaten	91 buah (Rak Buku dan Meja Kursi Eselon II,III,IV)	0	DAU/ DBH Pusat		175.000.000	
2.17.02.011	Pengadaan Komputer, Printer dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan komputer/ printer	Kabupaten	6 unit (3 komputer, 2 printer, 1 laptop)	0	DAU/ DBH Pusat		125.000.000	
2.17.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksaian perawatan gedung kantor	Kabupaten	12 bulan (pengecatan, perbaikan plafon, perbaikan kamar mandi)	0	DAU/ DBH Pusat		300.000.000	
2.17.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	13 unit (6unit R4, 7unit R2)	92.000.000	DAU/ DBH Pusat		150.000.000	
2.17.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000.000			0	
2.17.05.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimtek	Kabupaten	56 OPD (Bimbingan Teknis Aplikasi dan pengelolaan kearsipan)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.17.15	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000			25.200.000	
2.17.15.1	Indeks kepuasan masyarakat	Jumlah Responden atas pelayanan Arpus	Kabupaten	18 Kecamatan ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		25.200.000	
1.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah koleksi buku pustaka, pengunjung		jumlah buku pustaka : 830, pengunjung : 300	345.000.000			1.009.538.000	
1.01.21.1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah Peserta lomba bercerita dan lomba uji cerdas tingkat SD/MI	Kabupaten	40 Orang ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		25.000.000	
1.01.21.2	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah pelaksanaan pelayanan Perpustakaan Umum Menetap	Kabupaten	12 bulan ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		247.500.000	
1.01.21.3	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa / Kelurahan	Kabupaten	60 peserta ()	45.000.000	DAU/ DBH Pusat		50.000.000	
1.01.21.5	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Desa yang mendapat Pelayanan Perpustakaan Keliling	Kabupaten	18 Kecamatan ()	45.000.000	DAU/ DBH Pusat		190.000.000	
1.01.21.9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah Pengadaan Buku Perpustakaan	Kabupaten	2122 eksemplar ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		287.038.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.01.21.011	Penataan dan Pengolahan Buku Perpustakaan	Jumlah Pengolahan Bahan Pustaka	Kabupaten	11498 eksemplar ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		135.000.000	
1.01.21.012	Pemeliharaan Bahan Pustaka	Jumlah Gedung yang dilaksanakan kegiatan fumigasi	Kabupaten	2 unit ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat		75.000.000	
2.18.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Prosentase arsip yang masuk database		100 %	35.000.000			301.075.000	
2.18.151	Pembangunan data base informasi kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi Data Base Informasi Kearsipan	Kabupaten	42 OPD ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat		211.075.000	
2.18.155	Pengadaan sarana penyimpanan	Jumlah sarana penyimpanan Arsip Daerah	Kabupaten	660 buah ()	15.000.000	DAU/ DBH Pusat		90.000.000	
2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	% SKPD,desa/ kel mnerapkan pnglolaan arsip scr baku		100 %	63.500.000			80.000.000	
2.18.162	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah dokumen arsip dinamis dan statis yang ditangani	Kabupaten	24 meter lari ()	63.500.000	DAU/ DBH Pusat		80.000.000	
2.18.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Cakupan monitoring arsip desa/kelurahan		100 %	30.000.000			0	
2.18.173	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah Kegiatan monev dan - pelaporan data	Kabupaten	60 OPD ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.18.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan sosialisasi keArsipan		100 %	65.000.000			52.800.000	
2.18.183	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah peserta sosialisasi kearsipan	Kabupaten	56 OPD ()	65.000.000	DAU/ DBH Pusat		52.800.000	
JUMLAH DINAS ARPUS					1.104.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
3.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran		12 bulan	800.000.000				0
3.02.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (penyediaan administrasi perkantoran selama 12 bulan, jasa kebersihan, jasa keamanan)	800.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	160.000.000				200.000.000
3.02.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan roda 2	Kabupaten	12 unit (Pengadaan kendaraan roda 2 untuk operasional lapangan)	0	DAU/ DBH Pusat	Untuk operasional ke Lapangan		0
3.02.02.011	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Kabupaten	3 jenis (kursi, lemari dan ac)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Kabupaten	19 unit ()	75.000.000	DAU/ DBH Pusat			150.000.000
3.02.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	4 Unit (Sound system, Jaringan listrik, Jaringan air, mesin potong rumput)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat			20.000.000
3.02.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kabupaten	5 Unit (Komputer dan Printer, AC, Jaringan Telepon / Internet)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			30.000.000
3.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				30.000.000				75.000.000
3.02.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pelatihan	Kabupaten	35 orang ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			75.000.000
3.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	20.000.000				50.000.000
3.02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Perencanaan	Kabupaten	6 Dokumen (LKPJ, LPPD, LKjIP, Monev Renja, Renstra, SIPD)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			50.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				20.000.000
4.01.24.003	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya survey IKM	Kabupaten	1 Kegiatan (Terlaksananya survey IKM)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			20.000.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan fasilitasi seni		100 %	500.000.000				800.000.000
2.16.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelestarian adat budaya daerah	Kabupaten	4 kegiatan ()	500.000.000	DAU/ DBH Pusat			800.000.000
2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan gelar seni		100 %	159.125.000				748.200.000
2.16.16.004	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah peserta pelatihan/ sosialisasi	Kabupaten	25 Orang (Pelatihan Waranggono)	0	DAU/ DBH Pusat			30.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.16.16 5	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah juru pelihara cagar budaya	Kabupaten	18 orang ()	59.125.000	DAU/ DBH Pusat		618.200.000	
2.16.16 6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah pelaksanaan pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Kabupaten	8 Event (8 Event hiburan bagi pengunjung di tempat wisata)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan kajian seni		67 %	575.000.000			220.000.000	
2.16.17 1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pelaksanaan pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah	Kabupaten, kec. PLAOSAN, kec. MAGETAN	8 pagelaran (TMII, GSBD, Hari Kemerdekaan, Hari Jadi, Pawai Budaya Kabupaten, Pawai Budaya Provinsi, Hiburan Di Petilasan Dewi Sri, Fasilitas Hiburan)	575.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
2.16.17 5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah pelaksanaan festival seni budaya	Kabupaten	3 kali (seni karawitan tingk. kabupaten, purnama berkreasi, karya tari tingkat provinsi)	0	DAU/ DBH Pusat		220.000.000	
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata		956.409 orang	1.048.000.000			415.000.000	
3.02.15 1	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah pelaksanaan study analisa pasar	Kabupaten	2 kegiatan (Pelaksanaan study analisa pasar di Kota Batu dan Jogjakarta)	0	DAU/ DBH Pusat		100.000.000	
3.02.15 3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	jumlah kerjasama pemaketan destinasi pariwisata dan jumlah pemasangan iklan di luar kota	Kabupaten	1 kegiatan ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.02.15 4	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah pengembangan ekonomi kreatif kepariwisataan	Kabupaten	5 Kegiatan (Festival makanan khas, Lomba design batik pring, Pelatihan pelaku ekraf, Video clip kepariwisataan, Event lebaran, natal dan tahun baru)	0	DAU/ DBH Pusat		315.000.000	
3.02.15 5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kabupaten	8 kegiatan (Terlaksananya gebyar labuhan sarangan, pameran, pemilihan duta wisata bagus dyah, pemilihan raka raki, dan fasilitas bagus dyah pada acara2 di dalam/luar, Terlaksananya festival makanan khas jatim,)	998.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata		20 destinasi	2.968.725.000			6.769.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.02.16 1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah event wisata yang dilaksanakan	Kabupaten	3 Kegiatan (event wisata lebaran, natal, tahun baru)	568.725.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.02.16 2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Kabupaten, kec. PONCOL	2 kegiatan (parkir bertingkat dan paving sekitar telaga sarangan)	2.300.000.000	DAU/ DBH Pusat		3.769.000.000	
3.02.16 6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlaj Pendampingan, pembinaan dan pengembangan Desa Wisata	Kabupaten	4 Desa (Pendampingan, pembinaan dan pengembangan Desa Wisata)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.02.16 8	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Lanjutan)	Jumlah amenitas di obyek wisata	Kabupaten	5 Paket (Penataan kawasan wisata (bedak,Pedestrian, Gardu pandang))	50.000.000	DAK		3.000.000.000	
3.02.17	Program pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku wisata		1400 orang	40.000.000			0	
3.02.17 3	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah duta wisata yang dibina	Kabupaten	100 Orang (Pemilihan Duta Wisata Bagus Dyah)	0	DAU/ DBH Pusat		0	
3.02.17 7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Pelaku wisata yang dibina	Kabupaten	60 orang (Jasa Hotel, kuda, perahu, PKL, biro wisata dll)	40.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
JUMLAH DINAS PARBUD					6.320.850.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN									
3.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	1.000.000.000				0
3.03.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan (pelayanan)	1.000.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	1.240.000.000				0
3.03.02.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan ruang kantor	Kabupaten	1 unit ()	460.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor untuk BPP dan Kecamatan	Kabupaten	13 unit (kursi 10, LCD 1, Printer 2)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	2 unit (kantor dinas dan CPP)	410.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten	80 unit (roda 4 = 6, roda 2 = 74)	275.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor Yang Dipelihara	Kabupaten	5 unit ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Mebeler yang dipelihara	Kabupaten	25 unit (meja tamu 5, almari 10 dan kursi 10)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.27	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				0
3.03.27.1	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Survey IKM	Kabupaten	1 kali (Survey kepuasan masyarakat)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.03.17	Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Ketersedian energi dan protein perkapita, Penanganan daerah rawan pangan, Penguatan cadangan pangan		65 %,65 %,70 %	430.000.000				0
2.03.17.1	Penguatan Cadangan Pangan	Jumlah stok cadangan pangan kabupaten	Kabupaten, kec. SIDOREJO	25 ton (untuk stok cpp, analis neraca bahan makanan, analis SKPG, intervensi rawan pangan, pengembangan pekarangan)	430.000.000	DBH Pajak Rokok			0
2.03.18	Program Distribusi dan Akses Pangan	pemantauan dan pengumpulan harga pangan		80 %	90.000.000				0
2.03.18.1	Peningkatan Ketersediaan Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan	jumlah penyusunan dokumen informasi pasokan harga dan akses pangan	Kabupaten	54 dokumen (monitoring harga pasar, komoditas tanaman pangan, horti dan perkebunan serta pendampingan usaha daerah bidang ketahanan pangan)	90.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
2.03.19	Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	skor pola pangan harapan		85 %	260.000.000				0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.03.19 2	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Jumlah peningkatan skor pola pangan harapan	Kabupaten	88 skor (analisis, pengembangan teknologipangan lokal, uji lab, sosialisasi B2SA, bantuan ibu hamil menyusui, bantuan promosi pangan lokal untuk anak SD)	260.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	cakupan binaan gabungan kelompok tani		96,1 %	1.066.000.000				0
3.03.15 3	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah gapoktan dan poktan yg mendapat pembinaan	Kabupaten	340 kelompok (230 gapoktan + 110 (kelompok tani, kelompok lumbung, kelompok LDPM, PUPM))	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.15 6	Pengembangan Agrobisnis Tanaman Hias dan Bio Farmaka	Jumlah Pengembangan areal tanaman hias dan Biofarmaka	Kabupaten	4 ha ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.15 8	Pengembangan Agribisnis Buah-Buahan	jumlah pengadaan saprodi tanaman buah bernilai ekonomi tinggi	Kabupaten, kec. BARAT, kec. LAMBEBAN, kec. PANAKAN, kec. PLAOSAN, kec. SIDOREJO	13680 unit (benih buah 13.500 btang, benih melon 180sachet)	286.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.15. 011	Agrobisnis Sayur - Sayuran	Jumlah Pengadaan Benih Sayur-sayuran	Kabupaten, kec. KAWEDANAN, kec. NGUNTORONADI	2400 kg (bawang putih, bawang merah, cabe)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.15. 012	Pengembangan dan pengadaan bibit buah buahan	Jumlah Pengadaan Saprodi buah-buahan	Kabupaten, kec. BARAT	2400 unit ()	400.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase ketersediaan pangan		90 %	1.394.000.000				0
3.03.16 2	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Jumlah Dokumen Data Statistik Pertanian	Kabupaten	23 dokumen (statistik pertanian kec.=18, statistik pertanian kab.=1, laporan tribulan=4)	125.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.16. 012	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Pengadaan Peralatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Kabupaten, kec. SIDOREJO, kec. BARAT, kec. NGARIBOYO	5 unit (mesin perontok padi=1, mesin pembuat tepung umbi=1 dan....)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.16. 022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Sekolah Lapang GAP	Kabupaten	2 kelompok ()	0	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.16. 029	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	jumlah pengembangan areal tanaman perkebunan	Kabupaten	100 ha (janggalan=20 ha cengkeh=40 ha kelapa= 40 ha)	179.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.16. 033	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Pasca Panen	jumlah pengadaan peralatan pasca panen	Kabupaten, kec. SUKOMORO	2 unit (alat packing janggalan=1, mesin pengolah kurmelo=1 (dikonfirmasi lagi))	180.000.000	DAU/ DBH Pusat			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.03.16.036	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi	Jumlah Pengadaan Sarana Produksi Padi	Kabupaten, kec. BENDO	6000 kg (benih padi=6000 kg)	400.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.16.037	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Jagung	Jumlah pengadaan sarana produksi jagung	Kabupaten	1500 kg (jagung)	150.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.16.038	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Aneka Kacang	Jumlah Pengadaan Sarana Produksi Aneka Kacang	Kabupaten	1250 kg (benih kacang= 1.250kg)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.16.039	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ubi Jalar	Jumlah pengadaan sarana produksi ubi jalar	Kabupaten	10000 kg (ubi jalar)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.16.040	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Kedelai	Jumlah pengadaan sarana produksi kedelai	Kabupaten	1000 kg (benih kedelai)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Promosi hasil prod. pertanian/perkebunan		8 kali	1.080.000.000			0	
3.03.17.7	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah promosi unggulan daerah di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Kabupaten	8 kali (hari krida pertanian, hari pangan sedunia, hari jadi, event promosi=5 kali)	525.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.17.014	Penyediaan Sarana dan Prasarana Agrowisata	Jumlah sarpras yang dibangun di lokasi agrowisata	Kabupaten	2 unit (agrowisata srogo (kel. tawanganom) dan plaosan)	555.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	index perindeks pertanian		2,5 kali/th	12.354.600.000			0	
3.03.18.2	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah pengadaan sarana dan prsarana pertanian	Kabupaten, kec. BENDO, kec. LAMBAYAN, kec. PARANG, kec. PLAOSAN, kec. PONCOL, kec. SIDOREJO	5 unit (cultivator=3, hand tractor=2)	192.500.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.18.3	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Titik jalan usaha tani yang di rehabilitasi; ddd	Kabupaten, kec. BARAT, kec. BENDO, kec. KARANGREJO, kec. KARAS, kec. KAWEDANAN, kec. MAGETAN, kec. MAOSPATI, kec. NGARIBOYO, kec. NGUNTORONADI, kec. PANEKAN, kec. PLAOSAN, kec. PONCOL, kec. SIDOREJO, kec. SUKOMORO, kec. TAKERAN	16 unit ()	2.637.500.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.18.8	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (lanjutan)	Jumlah peserta pelatihan di bidang pengendalian OPT	Kabupaten	50 orang ()	67.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.03.18.9	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air	jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier	kec. BENDO, kec. KARTOHARJO, kec. KAWEDANAN, kec. LAMBEBAN, kec. MAOSPATI, kec. NGUNTORONADI, Kabupaten, kec. PANEKAN, kec. PLAOSAN, kec. SIDOREJO, kec. SUKOMORO, kec. TAKERAN, kec. KARANGREJO	40 unit ()	3.740.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.18.011	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya pertanian	jumlah pengadaan alsintan dan saprodi	Kabupaten	2 unit (hand tractor=1 cultivator =1)	0	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.18.012	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian	Jumlah titik JIT dan JUT yang dibangun	Kabupaten	20 titik (JIT dan JUT)	4.995.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.18.013	Pendampingan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Jumlah pengawasan JIT APBN dan pemetaan LP2B	Kabupaten	109 desa (18 kecamatan)	622.600.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.18.014	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air dan Lahan (DAK)	Jumlah JUT dan saluran air yang dibangun	Kabupaten, kec. BARAT, kec. LAMBEBAN, kec. NGUNTORONADI		50.000.000	DAK			0
3.03.18.022	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi budidaya perkebunan	Jumlah pengadaan sarana prasarana teknologi budidaya pertanian (bibit)	Kabupaten		50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	produksi sayuran dan buah-buahan		sayur=55.352, buah=49.242 ton	1.375.000.000				0
3.03.19.2	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	jumlah penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk	Kabupaten, kec. NGARIBOYO	60 kios ()	140.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.19.3	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	luas areal pengembangan benih unggul	Kabupaten	21 ha (padi=20 ha, kentang=1 ha)	550.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.19.8	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Jumlah sarana pengendalian OPT ramah lingkungan	Kabupaten	3604 unit (rumah burung hantu=50, handsprayer=50, trikoderma=500kg, corine=1.500 liter, vertisilium=1.500 liter, gerakan pengendalian OPT=4 kali)	150.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.19.012	Pengembangan Kawasan Jeruk Keprok	Jumlah bantuan benih Jeruk Keprok	Kabupaten	6000 batang (benih jeruk keprok 6000 batang)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.19.013	Pengembangan Kawasan Pamelon	Jumlah bantuan benih Pamelon	Kabupaten	16000 batang (benih pamelon 160 batang)	150.000.000	DAU/ DBH Pusat			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.03.19.014	Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Buah Unggulan Daerah	Jumlah bantuan bibit stowbery	Kabupaten	6000 batang (bantuan benih stowbery=6000)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.19.017	Penyediaan sarana produksi perkebunan	luas areal tanaman perkebunan	Kabupaten	15 ha ()	35.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	peningkatan kompetensi penyuluh		176 orang	383.000.000			0	
3.03.203	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh yg mengikuti diklat teknis	Kabupaten	176 orang (penyuluh PNS=61, THLTBPP=71, penyuluh swadaya=44)	383.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.03.51	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Bidang Pertanian	Tahapan pemurnian bahan baku, Jumlah petani tembakau yang dibina		Uji coba tanam ,140 orang	1.002.548.500			0	
3.03.511	Standardisasi kualitas bahan baku	Tersedianya prasarana jalan produksi area tanaman tembakau dan green house	Kabupaten		432.750.000	DBHCHT		0	
3.03.514	Penanganan panen dan pasca panen bahan baku	Tersedianya peralatan panen dan pasca panen tembakau	Kabupaten		457.798.500	DBHCHT		0	
3.03.515	Pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan / atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau	jumlah kelompok tani	Kabupaten	10 kelompok ()	112.000.000	DBHCHT		0	
JUMLAH DINAS TPHPKP					21.695.148.500				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN									
3.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		12 Bulan	600.000.000				0
3.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan (penyediaan operasional untuk listrik, telephone, air, tenaga penjaga/kebersihan/resepsionis/pengemudi, perjalanan dinas, ATK, barang cetak, mamin rapat)	600.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	317.000.000				0
3.01.02.005	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Kabupaten	1 Unit (1 roda 3)	40.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten	3 unit (1 unit ATS genset, 1 unit Papan SO, 1paket Handy Talky (HT))	35.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan perkantoran	Kabupaten	1 unit (1 unit almari sliding,)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.02.010	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan meubelair	Kabupaten	15 Unit (10 unit kursi kerja, 1 meja tamu, 4 unit meja pertemuan bawah.)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.02.011	Pengadaan komputer, printer dan perlengkapannya	jumlah pengadaan komputer, printer dan perlengkapannya	Kabupaten	21 unit (1 unit laptop, 2 unit LED monitor, 5 unit printer, 1 unit hard disk internal, 4 bh mouse, 4 keybord, 2 buah flasdisk, penataan jaringan LAN, 2 unit UPS)	27.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	14 unit (kantor induk, 2 RPH, BBI, KAD, Puskesmas, Lab dan Klinik, BLP, pos IB=6 unit)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kabupaten	11 unit (7 unit kendaraan roda 4, 4 unit roda3)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kabupaten	80 unit (80 unit (AC split/standing/komputer, printer, laptop, mesin, jaringan, televisi, sound sistem)	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.27	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				0
3.03.27.001	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat	Kabupaten	1 kali ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah produksi ikan		1772,6 Ton	1.779.000.000				0
3.01.20.3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang dibina	Kabupaten	205 Orang ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.20.6	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas usaha Perikanan Budidaya	Jumlah pembangunan kolam budidaya ikan	Kabupaten	6 unit ()	904.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.20.7	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenuhan Ikan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pembenuhan ikan unit pembenuhan rakyat	Kabupaten	4 unit ()	400.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.20.8	Penyediaan sarana statistik perikanan	jumlah Penyediaan sarana statistik perikanan	Kabupaten	16 unit ()	0	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.20.9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional BBI	Jumlah produksi benih ikan di BBI yang berkualitas	Kabupaten	715000 ekor ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.20.10	Pengembangan bibit ikan unggul dan sarana prasarana pembenuhan ikan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pembenuhan ikan	Kabupaten	2 paket (pengadaan induk ikan unggul)	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.20.11	Pengembangan Kemitraan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya	Jumlah kelompok tersalur bantuan budidaya perikanan	Kabupaten, kec. LAMBEYAN, kec. PLAOSAN	16 kelompok (pakan dan benih ikan)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap		40,33 Ton	50.000.000				0
3.01.21.1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	jumlah pengadaan benih ikan yang ditebarkan diperairan umum	Kabupaten	140000 ekor (pembelian benih ikan)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan pembinaan kepada pembudidaya ikan		18,40 %	100.000.000				0
3.01.22.2	Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan SDM Bidang Perikanan	Jumlah peserta kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM bidang perikanan	Kabupaten	100 Orang (Study lapang)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Angka konsumsi ikan		16,65 %	125.000.000				0
3.01.23.2	Gerakan Peningkatan Konsumsi Ikan (Gemarikan)	jumlah peserta gerakan peningkatan konsumsi ikan(GEMARIKAN)	Kabupaten	220 orang (kader posyandu yg terbina dan UKM perikanan)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.01.23.3	Peningkatan Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan	jumlah kelompok pengolah hasil perikanan yang dibina	Kabupaten	20 kelompok ()	25.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Derajat kesehatan ternak		80 %	250.000.000				0
3.03.21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah jenis kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Kabupaten	3 jenis (obat, vaksin desinfektan, tenaga penjaga lab dan puskesmas)	250.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi ternak		Jumlah populasi ternak ekor	2.075.000.000				0
3.03.22.2	Pembangunan sarana dan prasarana	jumlah jenis pembangunan sarana	Kabupaten	6 jenis (sarpras, elektronik,	480.000.000	DAU/ DBH			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	pembibitan ternak	dan prasarana pembibitan ternak		pembangunan pagar lanjutan, rehab kandang, rehab ruang pertemuan, 8 sarpras IB)		Pusat			
3.03.22 2	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah ternak yang mengikuti pembibitan dan perawatan ternak	Kabupaten	578 ekor (10 sapi perah pengadaan baru, perawatan 568 ternak)	420.000.000	DAU/ DBH Pusat	Untuk peningkatan produksi ternak BLP, peningkatan populasi ternak di kab. Magetan melalui Inseminasi Buatan (UPSUS SIWAB), dan pengadaan bibit ternak untuk replacement (penggantian) ternak sapi potong dan sapi perah di BLP-54 ekor		0
3.03.22 5	Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak	jumlah jenis pakan yang diuji lab di BLP	Kabupaten	5 jenis (5 jenis pakan ternak)	200.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.22 8	Pengembangan agribisnis peternakan	jumlah pengadaan hijauan makanan ternak (HMT)	Kabupaten	293 ton ()	185.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.22. 011	Bimbingan dan Rekomendasi Tehnis Usaha Peternakan	jumlah kelompok ternak yang mendapatkan pembinaan permodalan.	Kabupaten	102 klp ()	70.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.22. 013	Bantuan ternak kambing bibit kepada kelompok ternak	jumlah kelompok ternak yang tersalurkan bantuan modal kambing	Kabupaten, kec. SUKOMORO, kec. PANEKAN	20 kelompok ()	180.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.22. 021	Bantuan Peralatan Peternakan	jumlah kelompok ternak yang mendapatkan bantuan peralatan peternakan	Kabupaten, kec. NGARIBOYO, kec. NGUNTORONADI	3 kelompok ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.22. 023	Penyebaran dan Pengembangan Aneka Ternak	jumlah kelompok ternak yang mendapatkan bantuan aneka ternak	Kabupaten, kec. SIDOREJO	17 kel ()	460.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.22. 025	Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi Betina	JUmlah Petani Ternak sapi Betina yang dikembangkan	Kabupaten	15 Kelompok ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Produksi hasil ternak		Jumlah produk peternakan Ton	1.210.000.000				0
3.03.23 3	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah sarana dan prasarana pemasaran produksi hasil peternakan yang dibangun	Kabupaten	2 unit (sarana dan prasarana pemasran produksi peternakan (outlet	180.000.000	DAU/ DBH Pusat			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				mobile/ motor r3 modif))					
3.03.23 5	Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	jumlah promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah	Kabupaten	4 kali (hari krida, festival olahan kelinci, hari jadi, musrenbang, dll)	150.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23 6	Penyuluhan pemasaran produksi peternakan	jumlah peserta sosialisasi pemasaran produksi peternakan	Kabupaten	51 orang (sosialisasi keamanan pangan asal hewan dan penyembelihan hewan qurban)	60.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23 7	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat	jumlah pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat	Kabupaten		0	DAK			0
3.03.23 8	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Jumlah pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	Kabupaten	24 kali (pelaporan informasi harga dilakukan setiap 2 minggu sekali)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23. 015	Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan	jumlah kecamatan yang menjadi sasaran Inventarisasi dan Pendataan Pelaku Usaha Peternakan	Kabupaten	18 kec (pedataan pelaku usaha ternak sapi, kambing, domba)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23. 022	Bantuan ternak untuk pemberdayaan masyarakat peternak	jumlah kelompok peternak yang mendapatkan bantuan dan pelatihan ternak sapi	Kabupaten, kec. LAMBEBAN, kec. PLAOSAN, kec. PONCOL	4 kelompok ()	320.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23. 026	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	jumlah dokumen pendataan penyakit hewan dan pembuatan peta penyakit hewan	Kabupaten	10 buku (monitoring dan pengambilan sample)	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23. 027	Promosi dan Penyuluhan Hasil Produksi Peternakan Masyarakat	jumlah kegiatan Promosi dan Penyuluhan Hasil Produksi Peternakan Masyarakat	Kabupaten	2 Kali (promosi dan kontes ternak)	200.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23. 028	Rehab Rumah Potong Hewan (RPH) SNI di Kabupaten Magetan	jumlah rumah potong hewan yang direhab	Kabupaten	1 unit ()	0	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23. 029	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Peternakan	jumlah dokumen data statistik peternakan	Kabupaten	4 dokumen ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23. 030	Operasionalisasi RPH	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana operasional RPH	Kabupaten	12 bulan (honor tim, honorarium penjaga dan dokter hewan dan penyediaan sarpras (keranjang daging, 2 gerobak kotoran, pisau), pengadaan bahan kimia)	135.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.23. 031	Pengembangan Kemitraan Usaha Sapi Kereman	Jumlah Petani Ternak sapi Kereman yang dikembangkan	Kabupaten	20 Kelompok ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.03.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Cakupan pembinaan terhadap kelompok ternak		3,80 %	100.100.000				0
3.03.24 4	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	jumlah kelompok peserta pelatihan teknologi tepat guna	Kabupaten, kec. PANEKAN, kec.	39 kelompok (Untuk pelatihan kelompok ternak	100.100.000	DAU/ DBH Pusat			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
			LAMBEBAN, kec. SIDOREJO	dan Petugas IB)					
3.03.53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian	Jumlah kelompok penerima program DBHCT		28 Kelompok	210.000.000				0
3.03.53 1	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah kelompok tani ternak yang dibina melalui program DBHCT	Kabupaten	20 kelompok ()	210.000.000	DBHCT			0
JUMLAH DISNAKAN					6.836.100.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
3.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	726.000.000				0
3.06.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah pelaksanaan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	726.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase ketersediaan sarpras		100 %	255.000.000				0
3.06.02.3	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yg dibangun	Kabupaten	1 gedung ()	0	DAU/ DBH Pusat			0
3.06.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten	11 jenis (5 handsprayer, 3 mesin ketik listrik, 3 printer, 2 notebook, 2 PC, 2 kipas angin, 34 kursi rapat, 2 kursi pejabat, 1 AC, 16 mesin ketik elektrik, 2 filling kabinet.)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.06.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	1 Gedung ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.06.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten	22 Unit ()	75.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.06.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	7 jenis (3 AC, 5 mesin ketik, 5 komputer, 17 notebook, 20 gerobak, 15 printer, 5 kursi pejabat)	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				55.000.000				0
3.06.05.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yg ikut diklat/pendampingan SP	Kabupaten	26 PNS (25 peserta pendampingan SOP dan 1 petugas tera)	55.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.07.26	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				0
3.07.26.1	Survey IKM	Jumlah survey IKM	Kabupaten	1 Kali ()	20.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Prosentase barang dagang yg tdk sesuai ketentuan		5 %	390.000.000				50.000.000
3.06.15.4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Jumlah UTTP yang ditera	Kabupaten	6000 Unit ()	350.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.06.15.6	Pengawasan peredaran Pupuk bersubsidi	Jumlah pengawasan (monitoring) peredaran/penyaluran pupuk bersubsidi; Jumlah rapat evaluasi pengawasan peredaran pupuk bersubsidi	Kabupaten	4 Kali (); 3 kali ()	40.000.000	DAU/ DBH Pusat			50.000.000
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	PDRB sektor perdagangan		4.137.21000 Rp	5.790.000.000				565.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.06.18 3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pelaksanaan pasar murah dan pujasera	Kabupaten	6 Kali ()	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		125.000.000	
3.06.18 4	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah sosialisasi IKM/UKM/pedagang	Kabupaten	2 Kali ()	35.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.18 5	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk mengikuti pasar lelang dan misi dagang	Kabupaten	50 pedagang ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.18 6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah monitoring harga sembako	Kabupaten	52 Kali (monitoring untuk 5 pasar)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.18 9	Pemeliharaan Gedung Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara	kec. MAGETAN	1 pasar (penggantian instalasi listrik dan pengecatan pasar baru magetan)	100.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.18. 012	Operasionalisasi Pasar	Penyediaan sarana prasarana pasar	Kabupaten	12 bulan (Tenaga kebersihan/operasional pasar, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, tenaga kebersihan penunjang adipura, jasa retribusi parkir, kekurangan jasa retribusi parkir tahun lalu)	950.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.18. 013	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pasar Tradisional	Jumlah pasar tradisional yang memiliki dokumen lingkungan	Kabupaten	2 Pasar ()	40.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.18. 016	Rehabilitasi Pasar	Jumlah pasar yang direhab	Kabupaten, kec. BARAT	9 Pasar ()	3.150.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.18. 018	Pembangunan Pasar Hewan	Pembangunan Pasar	kec. BARAT	2 kegiatan (pasar hewan dan burung kecamatan barat)	550.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.18. 019	Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan pameran	Kabupaten	12 Kali ()	400.000.000	DAU/ DBH Pusat		440.000.000	
3.06.18. 020	Pemeliharaan Pasar Hewan	Rehab Pasar Hewan Gorang-gareng	Kabupaten	1 pasar (rehab pasar hewan)	400.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.18. 022	Revitalisasi Pasar (DBHCHT)	revitalisasi Pasar Takeran	Kabupaten		0	DBHCHT		0	
3.06.19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan PK5 yang dibina		90 %	60.000.000			0	
3.06.19 1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan	Kabupaten	90 orang ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.19 7	Pendataan Pedagang Kaki Lima	Jumlah PK5 yang didata	Kabupaten	2 Kecamatan ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat		0	
3.06.55	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Bidang Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pengumpulan informasi peredaran		11 kali	90.000.000			0	
3.06.55 2	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di	Jumlah lokasi monitoring hasil tembakau yang tidak dilekati pita	Kabupaten	18 Kecamatan ()	90.000.000	DBHCHT		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	peredaran atau tempat penjualan eceran	cukai							
3.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	30.000.000				0
3.07.06 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan yang tersedia	Kabupaten	9 dokumen (lap. keuangan, DPA & RKA, DPA & RKA Perubahan, Laporan Akhir Kegiatan, Renja, LKJIP, LKPJ dan LPPD)	15.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.07.06 6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah laporan monev	Kabupaten	4 laporan ()	15.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.07.15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	% pningkatan produksi IKM atas implementasi iptek		100 %	250.000.000				150.000.000
3.07.15 4	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah IKM yg memperoleh sertifikat HKI/merk	Kabupaten	6 KUB ()	120.000.000	DAU/ DBH Pusat			150.000.000
3.07.15 6	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan pembinaan, diklat dan bantuan peralatan	Kabupaten, kec. NGARIBOYO	2 KUB ()	130.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.07.16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Kontribusi sektor industri pada PDRB		14,06 %	220.000.000				250.000.000
3.07.16 1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah KUB yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan uji coba produk	Kabupaten, kec. SIDOREJO	8 KUB (bantuan peralatan)	220.000.000	DAU/ DBH Pusat			250.000.000
3.07.17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Prosentase IKM yang menerapkan teknologi produksi		1,75 %	330.000.000				0
3.07.17 1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang mendapat pembinaan	Kabupaten	8 KUB ()	0	DAU/ DBH Pusat			0
3.07.17 2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah Kelompok IKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan dan pelayanan teknologi melalui bimtek dan bantuan sarana prasarana	Kabupaten, kec. KARANGREJO, kec. KAWEDANAN, kec. MAGETAN	74 IKM ()	280.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.07.17 3	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi perolehan SNI dan HKI	Kabupaten	40 IKM ()	50.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.07.18	Program penataan struktur industri	Terbangunnya kawasan LIK II		100 %	0				0
3.07.18 2	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	jumlah kawasan LIK II yang dibangun	Kabupaten	1 kawasan (pengadaan tanah untuk kawasan industri LIK)	0	DAU/ DBH Pusat			0
3.07.19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra IKM potensial		10 sentra	30.000.000				0
3.07.19 2	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan IKM	Kabupaten	18 Kecamatan ()	30.000.000	DAU/ DBH Pusat			0
3.07.23	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah kelompok alih profesi		57 kelompok	500.000.000				0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
		yang dibina							
3.07.23 7	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah masyarakat terdampak pada lingkungan sosial IHT yang dibina	Kabupaten	120 Orang/IKM ()	500.000.000	DBHCHT			0
JUMLAH DINAS PERINDAG					8.746.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BAGIAN PEMERINTAHAN									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	250.000.000				250.000.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan ()	250.000.000	PAD			250.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	0				0
4.01.02.011	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya	Kabupaten	2 Unit (1 PC, dan 1 printer)	0	PAD			0
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	150.000.000				0
4.01.06.5	Penyusunan LPPD dan Penyelenggaraan EKPPD	Jumlah Dokumen LPPD dan Dokumen EKPPD Kabupaten Magetan; Jumlah Dokumen LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Kabupaten	3 Dokumen ()	150.000.000	PAD			0
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan layanan kedinasan KDH dan WKDH		100 %	55.000.000				0
4.01.16.2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri yang terfasilitasi	Kabupaten	25 Kegiatan ()	30.000.000	PAD			0
4.01.16.6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah kegiatan rapat APKASI yang terfasilitasi	Kabupaten	1 Kegiatan (Terselenggaranya kegiatan rapat APKASI)	0	PAD			0
4.01.16.9	Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dokumen Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	Kabupaten	2 Dokumen ()	25.000.000	PAD			0
4.01.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan kerjasama antar pemerintah daerah		5 kerjasama	35.000.000				0
4.01.25.1	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	Jumlah Perjanjian Kerjasama di lingkup BKAD	Kabupaten	2 PKS (KARISMAPAWIROGO)	35.000.000	PAD			0
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah dok penataan daerah yang disusun		1 dok	150.000.000				150.000.000
4.01.27.3	Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Magetan	Kabupaten	4 Dokumen (Tersedianya Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi di Kabupaten Magetan)	150.000.000	PAD			150.000.000
4.01.28	Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Pemerintahan Kecamatan/Desa/Kelurahan		46 kec/ke/desa	352.750.000				385.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	/Kecamatan/desa	yang							
4.01.28 9	Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bagian Pemerintahan)	Jumlah kegiatan Korsik dalam upacara PHBN di Kabupaten Magetan	Kabupaten	16 Kegiatan ()	250.000.000	PAD			250.000.000
4.01.28. 017	Pembekalan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah aparatur kecamatan dan kelurahan yang mengikuti pembekalan	Kabupaten	100 Orang ()	40.000.000	PAD			55.000.000
4.01.28. 025	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah fasilitasi dan bimtek penyelenggaraan PATEN;	Kabupaten, kec. NGARIBOYO	54 Orang ()	32.750.000	PAD			50.000.000
4.01.28. 026	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Kabupaten	46 kecamatan;kelurahan ()	30.000.000	PAD			30.000.000
JUMLAH BAG. PEMERINTAHAN					992.750.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	146.500.000				0
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	tJumlah pelayanan jasa administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	146.500.000	PAD			0
4.01.28	Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa	Jml Keg Pembinaan kesadaran bernegara & bernegara		2 kali	50.000.000				0
4.01.28.023	Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara (Bantuan Propinsi)	Jumlah kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim	Kabupaten	1 kali ()	50.000.000	BK Prov			0
4.01.50	Program Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah lembaga keagamaan dan tempat peribadatan y,Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan		200 buah,46 kali	2.161.000.000				0
4.01.501	Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Umat Beragama	Jumlah peringatan hari besar agama, fasilitasi urusan Haji, kegiatan keagamaan dan MTQ	Kabupaten	33 kali ()	1.076.000.000	PAD			0
4.01.504	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan PHBN dan Hari Jadi Kabupaten	Kabupaten	15 kegiatan ()	1.085.000.000	PAD			0
JUMLAH BAG. ADM. KESRA					2.357.500.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BAGIAN HUKUM									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	175.000.000				
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	175.000.000	PAD			
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	25.000.000				
4.01.02.036	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	Kabupaten	2 unit (untuk pengadaan printer dan almari)	25.000.000	PAD			
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				27.400.000				
4.01.05.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek penyusunan produk hukum daerah/Perdes	Kabupaten	50 orang ()	27.400.000	PAD			
4.01.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan penyelesaian Raperda, Perbub&Kep Bub,		100 %	498.600.000				
4.01.26.1	Koordinasi kerjasama permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan	Jumlah naskah perjanjian kerjasama daerah yang diproses	Kabupaten	8 dokumen ()	45.890.000	PAD			
4.01.26.2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyusunan raperda/perda, Perbup dan Keputusan Bupati	Kabupaten	3 jenis dokumen (8 Perda/Raperda, 50 Perbup, 200 Keputusan Bupati)	109.600.000	PAD			
4.01.26.3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi rancangan produk hukum daerah (raperda)	Kabupaten	3 kali ()	85.000.000	PAD			
4.01.26.4	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten	3 kali ()	140.000.000	PAD			
4.01.26.5	Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah penyebarluasan produk hukum daerah	Kabupaten	2 jenis buku (200 buku buletin, 400 buku himpunan lembaran daerah)	99.276.000	PAD			
4.01.26.6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Jumlah produk hukum yang dikaji	Kabupaten	5 dokumen ()	18.834.000	PAD			
4.01.28	Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten /Kecamatan/desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan pembinaan Kadarkum, Jumlah koordinasi kegiatan RANHAM		12 kec/ke/desa,1 kali	210.050.000				
4.01.28.010	Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum	Jumlah desa binaan keluarga sadar hukum (kadarkum	Kabupaten	12 desa ()	180.000.000	PAD			
4.01.28.028	Rencana Aksi Nasional dan Hak Asasi Manusia	Jumlah Penyusunan laporan Ranham	Kabupaten	5 laporan ()	30.050.000	PAD			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
JUMLAH BAG. HUKUM						936.050.000			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	130.000.000				140.000.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah Pelayanan Administrasi perkantoran	kec. MAGETAN	12 bulan ()	130.000.000	PAD	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi perkantoran		140.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	50.000.000				80.000.000
4.01.02.036	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah pengadaan sarana dan Prasarana Kantor	kec. MAGETAN	1 paket (7 unit)	50.000.000	PAD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		80.000.000
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				64.000.000				120.000.000
4.01.05.5	Bimbingan teknis peningkatan pengelolaan manajemen kegiatan pembangunan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan / Manajemen Kegiatan Pembangunan	kec. MAGETAN	100 orang (Bimbingan Teknis Pengelolaan / Manajemen Kegiatan Pembangunan)	64.000.000	PAD	Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan Manajemen Kegiatan Pembangunan		120.000.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	715.000.000				750.000.000
4.01.06.9	Penyusunan Standart satuan harga	Jumlah penyusunan Standar Satuan Harga	kec. MAGETAN	2 dokumen (Standar Satuan Harga Barang / Jasa dan Standar Biaya Jasa Penunjang Kegiatan)	380.000.000	PAD	Penyusunan Standar Satuan Harga		400.000.000
4.01.06.010	Penyusunan Dokumen Persiapan pelaksanaan APBD	Jumlah penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD	kec. MAGETAN	3 dokumen (Pedoman Pelaksanaan APBD, Verifikasin DPA dan DPPA-SKPD)	85.000.000	PAD	Penyusunan Dokumen Persiapan Pelaksanaan APBD		100.000.000
4.01.06.012	Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik	jumlah pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik	kec. MAGETAN	12 bulan ()	250.000.000	PAD	Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik		250.000.000
4.01.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase realisasi fisik dan keuangan		Prosentase realisasi fisik : 100%, keuangan : 93% %	323.500.000				550.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.01.20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan SKPD	kec. MAGETAN	12 kali (Monitoring kegiatan pembangunan SKPD)	50.000.000	PAD	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		85.000.000
4.01.20. 016	Penyusunan Laporan Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP)	jumlah penyusunan Laporan Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP) berbasis web	kec. MAGETAN	12 laporan ()	160.000.000	PAD	Penyusunan Laporan Sistem Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (SISMONTEP)		265.000.000
4.01.20. 017	Pembinaan jasa konstruksi	Jumlah kegiatan pembinaan jasa konstruksi	kec. MAGETAN	3 kegiatan (pelatihan jasa konstruksi, update SIPJAKI, Peyusunan Perundang-undnagan jasa konstruksi)	113.500.000	PAD	Pembinaan Jasa Konstruksi		200.000.000
JUMLAH BAG. ADBANG					1.282.500.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM								
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	140.000.000				170.000.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah penyediaan jasa administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	140.000.000	PAD			170.000.000
1.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah koordinasi penyediaan & pengelolaan air baku		2 kali	130.000.000				165.000.000
1.03.25.7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah penyusunan database sumur gali	Kabupaten	1 dokumen ()	100.000.000	PAD			125.000.000
1.03.25.030	Koordinasi, Evaluasi dan Pengelolaan air tanah	jumlah kegiatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan air tanah	Kabupaten	2 kegiatan ()	30.000.000	PAD			40.000.000
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Koordinasi pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		1 Kali	30.000.000				70.000.000
1.03.26.8	Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya air	Kabupaten	2 kegiatan ()	30.000.000	APBD			70.000.000
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jml koord & evaluasi Program pengembangan		2 kali	20.000.000				20.000.000
1.03.27.012	Koordinasi dan evaluasi peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	jumlah kegiatan koordinasi, evaluasi, pendataan dan sosialisasi peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Kabupaten	2 kegiatan ()	20.000.000	PAD			20.000.000
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Jumlah koordinasi dan evaluasi pengendalian banjir		1 kali	20.000.000				20.000.000
1.03.28.016	Koordinasi dan evaluasi pengendalian banjir	Jumlah kegiatan koordinasi, evaluasi, pendataan dan sosialisasi pengendalian banjir	Kabupaten	2 kegiatan ()	20.000.000	PAD			20.000.000
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				20.000.000				20.000.000
2.05.15.022	Koordinasi dan evaluasi pengelolaan persampahan	jumlah kegiatan koordinasi, evaluasi dan pendataan pengelolaan persampahan	Kabupaten	2 kegiatan ()	20.000.000	PAD			20.000.000
2.05.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)		100 %	20.000.000				35.000.000
2.05.17.016	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyusunan data perkembangan potensi dan pengelolaan sumber daya alam	Kabupaten	1 dokumen ()	20.000.000	PAD			35.000.000
2.05.24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Koordinasi pengembangan RTH		2 kali	20.000.000				20.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.05.24 1	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH	jumlah kegiatan koordinasi dan evaluasi kinerja pengelolaan RTH	Kabupaten	2 kegiatan ()	20.000.000	PAD		20.000.000	
3.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jml Koord pengembangan budidaya perikanan		2 kali	30.000.000			40.000.000	
3.01.20. 016	Koordinasi dan evaluasi pengembangan budidaya perikanan darat	jumlah kegiatan koordinasi dan evaluasi pengembangan budidaya perikanan darat	Kabupaten	2 kegiatan ()	30.000.000	PAD		40.000.000	
3.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Jumlah koordinasi peningkatan ketahanan pangan		1 kali	30.500.000			50.000.000	
3.03.16. 024	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	jumlah kegiatan koordinasi dan evaluasi peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Kabupaten	2 kegiatan ()	30.500.000	PAD		50.000.000	
3.03.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jml koor.peningk. prod.pertanian/perkebunan		2 kali	30.000.000			50.000.000	
3.03.19 1	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	jumlah kegiatan penyusunan pedoman dan penyuluhan terpadu peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Kabupaten	2 kegiatan ()	30.000.000	PAD		50.000.000	
3.03.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Koordinasi peningk. prod. hasil peternakan		2 kali	30.000.000			35.000.000	
3.03.22. 024	Koordinasi dan evaluasi peningkatan produksi peternakan	jumlah kegiatan koordinasi dan evaluasi peningkatan produksi peternakan	Kabupaten	2 kegiatan ()	30.000.000	PAD		35.000.000	
3.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Jml Koord pengemb, pengelolaan & konservasi		1 kal	0			200.000.000	
3.03.26 1	Kajian ilmiah pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumber daya air	Tercukupinya kebutuhan kegiatan kajian ilmiah, penyusunan naskah akademis dan draf Raperda tentang pengelolaan sumber daya air selama 1 tahun	Kabupaten	1 dokumen (kajian ilmiah, penyusunan naskah akademis dan draf Raperda tentang pengelolaan sumber daya air)	0	PAD		200.000.000	
3.05.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Jumlah Wilayah Usaha Pertambangan		2 Lokasi	50.000.000			90.000.000	
3.05.15 4	Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	jumlah kegiatan koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan	Kabupaten	2 kegiatan ()	50.000.000	PAD		50.000.000	
3.05.15 6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercukupinya kebutuhan kegiatan koordinasi, evaluasi/monitoring, sosialisasi dan pelaporan bidang pertambangan selama 1 tahun	Kabupaten	4 kegiatan (Koiordinasi, evaluasi/moniitoring, sosialisasi dan pelaporan)	0	PAD		40.000.000	
3.05.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan	Cakupan pnertiban thd keg rkyt yg brpot mrsak ligk		100 %	16.000.000			20.000.000	
3.05.16 1	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	jumlah kegiatan pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	Kabupaten	3 monev ()	16.000.000	PAD		20.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
3.05.18	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi	Jumlah koordinasi		5 jenis (biogas, biofuel, PLTS, elpiji, BBM)	44.000.000			100.000.000	
3.05.18 3	Koordinasi pengembangan energi alternatif	jumlah kegiatan koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pengembangan potensi energi alternatif	Kabupaten	2 kegiatan ()	27.000.000	PAD		75.000.000	
3.05.18 4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi BBM dan LPG	jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi BBM dan LPG bersubsidi	Kabupaten	1 kegiatan ()	17.000.000	PAD		25.000.000	
JUMLAH BAG. ADM. SDA					630.500.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN									
1.06.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	cakupan bantuan kel. miskin		100 %	310.000.000				0
1.06.15.010	Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah pelaksanaan money raskin	Kabupaten	12 bulan ()	310.000.000	PAD			0
2.11.15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	jumlah UKM non BPR/LKM		950 ukm	29.065.000				0
2.11.15.8	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah money kegiatan penyaluran KUR	Kabupaten	4 kali ()	29.065.000	PAD			0
2.12.17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	jml tunggakan KEK yg terbayar		541.069.639 rupiah	20.000.000				0
2.12.17.2	Penagihan dan Evaluasi Pelaksanaan KEK Intan Pesada	Jumlah Tunggakan KEK Intan Pesada yang Terbayar	Kabupaten	100000000 Rupiah ()	20.000.000	PAD			0
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	koordinasi pengendalian inflasi		12 kali	110.000.000				0
3.06.18.021	Pengendalian Inflasi Daerah	jumlah Monitoring perkembangan inflasi	Kabupaten	12 kali ()	110.000.000	PAD			0
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	143.570.000				165.000.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan jasa admisnitrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	143.570.000	PAD			165.000.000
4.01.54	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Bidang Perekonomian	jml peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai		300 orang	952.300.000				0
4.01.54.1	Kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan / atau pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	Kabupaten	300 orang ()	952.300.000	DBHCHT			0
JUMLAH BAG. ADM. PEREKONOMIAN					1.564.935.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BAGIAN ORGANISASI									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tersedianya peralatan administrasi perkantoran		12 bulan	140.000.000				0
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	140.000.000	PAD			0
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	0				0
4.01.02.011	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Printer	Kabupaten		0	PAD			0
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang memahami Materi BinteK		75 %	141.950.000				0
4.01.05.013	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pelaksanaan BinteK	Kabupaten	4 kali (BinteK SOP, BinteK Budaya Kerja, Lomba Risalah Budaya Kerja di Kabupaten dan Propinsi)	141.950.000	PAD			0
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100 %	320.000.000				0
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	Kabupaten	3 jenis (Sakip, Raperbub Pelayanan Publik, Dokumen Reformasi Birokrasi, Pendampingan Penyusunan SOP SKPD)	320.000.000	PAD			0
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	30.000.000				0
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey SKM	Kabupaten	2 paket (SKM Sekretariat Daerah Dan Rekapitulasi SKM Kabupaten)	30.000.000	PAD			0
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase Evaluasi SOTK dan Tugas Fungsi SKPD		100 %	150.000.000				0
4.01.27.4	Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK dan TUSI	Kabupaten	56 SKPD ()	150.000.000	PAD			0
4.01.47	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Prosentase Jabatan Yang Dianalisis		100 %	125.000.000				0
4.01.47.6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah kegiatan analisis jabatan	Kabupaten	56 SKPD ()	100.000.000	PAD			0
4.01.47.015	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah SKPD Yang Dilaksanakan Monev	Kabupaten	56 SKPD (Monev Penyusunan SOP, SP, SKM dan SPM)	25.000.000	PAD			0
JUMLAH BAG. ORGANISASI					906.950.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BAGIAN UMUM									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	5.500.000.000				0
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan jasa administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	5.500.000.000	PAD			0
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	2.878.160.000				0
4.01.02.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	6 unit (6 unit R2)	130.000.000	APBD			0
4.01.02.6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan, pendopo dan rumah dinas	Kabupaten	4 paket (Rumah Dinas Bupati, Ruang Kerja Bupati, pendopo surya graha, rumah dinas sekda,)	726.660.000	PAD			0
4.01.02.012	Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	jumlah pengadaan dan perbaikan peralatan kantor	Kabupaten	3 jenis (pengadaan jaringan baru telepon, sound system, perbaikan jaringan telepon)	105.000.000	PAD			0
4.01.02.020	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah pemeliharaan rumah jabatan pendopo surya graha	Kabupaten	2 jenis (pemeliharaan bangunan dan taman)	250.000.000	PAD			0
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung setda	Kabupaten	3 gedung (pemeliharaan bangunan dan taman)	421.500.000	PAD			0
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional di lingkup sekretariat dan KDH/WKDH	Kabupaten	12 bulan (34 unit R4 dan 51 unit R2 2)	1.200.000.000	PAD			0
4.01.02.027	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kabupaten	6 paket (peralatan elektronika, service peralatan dapur, service aquarium, service meubelair, laras gamelan, service genset)	45.000.000	PAD			0
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan kelengkapan pakaian dinas bagi aparatur		100%	2.591.500.000				0
4.01.03.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya bagi PNSD dan KDH/WKDH	Kabupaten	4 jenis (1 tahun pakaian dinas sekpri, 1 paket tanda jabatan KDH/WKDH, 100 buah atribut/id card, pakaian dinas karyawan/karyawati 11.500 potong (atasan putih))	2.552.500.000	PAD			0
4.01.03.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pengadaan pakaian khusus untuk KDH/WKDH	Kabupaten	3 jenis (pakaian olahraga, batik dan pakaian adat tradisional)	39.000.000	PAD			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000.000				0
4.01.05.011	Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan studi banding, workshop dan sosialisasi	Kabupaten	3 kali ()	25.000.000	PAD			0
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan layanan kedinasan KDH dan WKDH		100 %	600.000.000				0
4.01.166	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah penyediaan pelayanan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya bagi KDH/ WKDH	Kabupaten	12 bulan ()	500.000.000	PAD			0
4.01.167	Peningkatan kapasitas kepala daerah dan wakil kepala daerah	jumlah kegiatan peningkatan kapasitas untuk KDH/WKDH	Kabupaten	12 bulan (kegiatan studi banding, kunker, workshop, bimtek, dll)	100.000.000	PAD			0
JUMLAH BAG. UMUM					11.594.660.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL									
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jmlh baliho, spanduk, leaflet, poster, dokumentasi dan sosialisasi PPID		60; 65; 2000; 2000 exemplar,200;1 kali	261.000.000				700.000.000
2.10.15 3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	jumlah kegiatan publikasi program pemerintah	Kabupaten	4 jenis (baliho 50 buah, spanduk 60 buah, poster 1000 dan leaflet 1000)	75.000.000	PAD	peminaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi		350.000.000
2.10.15 6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	jumlah dokumentasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan	Kabupaten	350 kali (dokumentasi audio dan visual)	93.000.000	PAD	pengkajian dan pengembangan sitem informasi		350.000.000
2.10.15 7	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi Daerah	jumlah penyusunan dokumen informasi publik SKPD	Kabupaten	56 SKPD ()	93.000.000	PAD	penyelenggaraa n dan pengelolaan informasi daerah		0
2.10.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Jumlah informasi yang diekspose di media masa		120 kali,	394.000.000				1.500.000.000
2.10.18 2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Ekspose informasi pelaksanaan pembangunan Pemkab melalui media cetak dan elektronikt	Kabupaten	120 kali ()	394.000.000	PAD	penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah		1.500.000.000
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	193.000.000				350.000.000
4.01.01. 020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah pelayanan jasa administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	193.000.000	PAD			350.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	30.000.000				150.000.000
4.01.02. 036	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah pengadaan sapras kantor	Kabupaten	3 unit (1 pengadaan baterai drone, 1 kamera digital, 1 kamera video)	30.000.000	PAD			150.000.000
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				15.000.000				100.000.000
4.01.05. 011	Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	jumlah pelaksanaan diklat singkat/kursus/workshop	Kabupaten	1 kali (mengirimkan peserta ke acara diklat/bintek)	15.000.000	PAD	terfasilitasinya aparatur melalui diklat singkat/kursus, workshop		100.000.000
JUMLAH BAG. HUMAS & PROTOKOL					893.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan adminstrasi perkantoran		12 bulan	225.000.000				225.000.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	kec. MAGETAN	12 bulan ()	225.000.000	PAD	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran		225.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	127.500.000				150.000.000
4.01.02.036	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor	kec. MAGETAN	22 buah (8 laptop, 5 printer, 2 speaker, 3 kursi tunggu tamu, 3 lemari arsip, 1 AC)	127.500.000	PAD	Pengadaan sarana dan prasarana kantor		150.000.000
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				275.000.000				275.000.000
4.01.05.012	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	jumlah Pejabat Pengadaan Yang Dinilai Angka Kreditnya	kec. MAGETAN	16 orang ()	75.000.000	PAD	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional		75.000.000
4.01.05.013	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	jumlah peserta Bimtek	kec. MAGETAN	170 orang ()	200.000.000	PAD	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		200.000.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	179.000.000				200.000.000
4.01.06.011	Pemantapan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah	Jumlah pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	kec. MAGETAN	12 bulan ()	179.000.000	PAD	Terfasilitasinya Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		200.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				20.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM yang dilaksanakan	Kabupaten	1 kali ()	20.000.000	PAD			20.000.000
JUMLAH BAG. PBJ					826.500.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
SEKRETARIAT DPRD									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	1.448.433.750				0
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Ketersediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	1.448.433.750	DBH Prov.			0
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	771.050.000				0
4.01.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan pengadaan gedung kantor	Kabupaten	4 jenis (4 bh kursi kerja pimpinan, 5 bh meja kerja staf , 3 bh kaca rias, korden 2 ruang (pimpinan dan transit))	0	DBH Prov.			0
4.01.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten	4 jenis (60 plakat, 2 screen proyektor, 2 mic wirrles, kabel AV)	50.000.000	DBH Prov.			0
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung yang dipelihara	Kabupaten	1 gedung (1 paket pengecatan/perbaikan gedung dan pagar halaman)	150.000.000	DBH Prov.			0
4.01.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan / mobil jabatan	Kabupaten	12 bulan (4 unit R4)	250.550.000	DBH Prov.			0
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas/Ops	Kabupaten	12 bulan (45 unit R4)	213.000.000	DBH Prov.			0
4.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	4 jenis (7 unit AC central, 21 unit AC split, 2 unit jaringan listrik dan 2 unit jaringan air)	75.000.000	DBH Prov.			0
4.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubeluer yang dipelihara	Kabupaten	3 jenis (35 bh kursi rapat, 15 bh meja kerja, 1 stel meja kursi tamu)	7.500.000	DBH Prov.			0
4.01.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kator yang dipelihara	Kabupaten	8 jenis (18 laptop, 25 set komputer, 2 unit foto copi, 2 Audio Visual, 5 kamera, 2 handy cam, pabx dan internet)	25.000.000	DBH Prov.			0
4.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur				173.625.000				0
4.01.03.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten	3 jenis (45 stel psh, 45 stel psr/pdh lengan panjang dan 1 stel psl)	173.625.000	DBH Prov.			0
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				40.000.000				0
4.01.05.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah PNS yuang mengikuti Bimtek	Kabupaten	9 orang ()	40.000.000	DBH Prov.			0
4.01.15	Program peningkatan kapasitas	Prosentase Raperda yg disahkan		100 %	14.793.399.700				0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
	lembaga perwakilan rakyat daerah	jadi Perda							
4.01.15 1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda yang dibahas dan disahkan menjadi perda kab magetan	Kabupaten	20 perda ()	5.838.399.700	DBH Prov.			0
4.01.15 2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah RDP yang dilaksanakan	Kabupaten	80 kali ()	70.000.000	DBH Prov.			0
4.01.15 3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang dilaksanakan	Kabupaten	185 kali ()	5.750.000.000	DBH Prov.			0
4.01.15 4	Rapat-rapat paripurna	Jumlah terlaksananya rapat rapat paripurna	Kabupaten	65 kali ()	250.000.000	DBH Prov.			0
4.01.15 5	Kegiatan Reses	Jumlah keg reses anggota dewan yang dilaksanakan	Kabupaten	3 kali (untuk masing masing anggota dewan)	1.500.000.000	DBH Prov.			0
4.01.15 6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah keg kunker dalam daerah yang dilaksanakan	Kabupaten	36 kali ()	70.000.000	DBH Prov.			0
4.01.15 7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah keg bintek anggota dewan yang dilaksanakan	Kabupaten	2 kali ()	750.000.000	DBH Prov.			0
4.01.15 9	Penyediaan tenaga ahli dan advokasi anggota dewan	Jumlah penyediaan tenaga ahli DPRD	Kabupaten	12 bulan (8 fraksi masing2 1 orang)	215.000.000	DBH Prov.			0
4.01.15. 012	Penyampaian Visi Misi dan Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah penyampaian visi misi calon KDH/Wakil KDH dan pelantikan KDH/Wakil KDH terpilih	Kabupaten	2 Kegiatan ()	350.000.000	DBH Prov.			0
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	19.991.550				0
4.01.24 3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kali ()	19.991.550	DBH Prov.			0
4.01.32	Program Kerjasama dengan Mas Media	informasi keg. DPRD yang diekspos di media		25 kali	300.000.000				0
4.01.32 1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah informasi yang diekspos media cetak dan media elektronik	Kabupaten	90 kali ()	300.000.000	DBH Prov.			0
JUMLAH SET. DPRD					17.546.500.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
INSPEKTORAT									
4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	205.000.000				210.772.000
4.02.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan pelayanan jasa administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	205.000.000	DBH Prov.	Tercapainya kebutuhan barang dan jasa perkantoran		210.772.000
4.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kelancaran kegiatan dengan fasilitas ,Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		28 unit,100 %	145.000.000				225.000.000
4.02.02.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kabupaten	2 unit (2 unit R2)		DBH Prov.	Terpenuhinya kelancaran kegiatan dengan fasilitas yang baik dan layak		0
4.02.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	2 jenis (20 kursi, 3 buah almari)	50.000.000	DBH Prov.	Terpenuhinya kelancaran kegiatan dengan fasilitas yang baik dan layak		75.000.000
4.02.02.011	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah pengadaan komputer	Kabupaten	2 unit (2 Laptop)	15.000.000	DBH Prov.	terpenuhinya kelancaran tugas dministrasi		50.000.000
4.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	12 bulan (7 unit R4,22unit R2)	80.000.000	DBH Prov.	Jumlah BBM dan suku cadang kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun		100.000.000
4.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya hasil kegiatan penilaian angka kredit ,kelancaran karier Pejabat Fungsional		21 Orang,21 orang	15.000.000				25.000.000
4.02.05.012	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	Jumlah pelaksanaan penilaian angka kredit	Kabupaten	21 orang ()	15.000.000	DBH Prov.	Kelancaran karier Pejabat Fungsional		25.000.000
4.02.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Opini BPK		WTP opini	2.015.125.000				1.925.000.000
4.02.20.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Prosentase ketaatan pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten	100 persen (56 SKPD)	950.000.000	DBH Prov.	Tercapainya ketaatan terhadap		1.000.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
							peraturan		
4.02.202	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	Kabupaten	50 buah ()	140.125.000	DBH Prov.	Tercapainya kepuasan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat		250.000.000
4.02.207	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	jumlah koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi	Kabupaten	12 bulan (untuk kegiatan komprehensif, dan kegiatan2 dgn APH)	475.000.000	DBH Prov.	Terlaksananya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi		350.000.000
4.02.208	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	jumlah tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan	Kabupaten	6 Kali ()	140.000.000	DBH Prov.	Terselesaikannya tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan		175.000.000
4.02.20.011	Review Laporan Keuangan Daerah	jumlah review laporan LKPD	Kabupaten	56 SKPD ()	25.000.000	DBH Prov.	Tersusunnya laporan LKPD yang baik		40.000.000
4.02.20.012	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah reвью laporan capaian kinerja	Kabupaten	1 kali (LKJIP 56 SKPD)	30.000.000	DBH Prov.	Terukurannya atas capaian kinerja atas kegiatan selama 1 tahun		30.000.000
4.02.20.018	Review Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah SAKIP yang Direview	Kabupaten	56 SKPD ()	20.000.000	DBH Prov.	Jumlah SAKIP yang Direview		30.000.000
4.02.20.020	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan	Porsentase tindak lanjut rekomendasi temuan APIP dan BPK	Kabupaten	100 persen ()	0	DBH Prov.			30.000.000
4.02.20.021	Review Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah review pengadaan barang dan jasa	Kabupaten	56 SKPD ()	10.000.000	DBH Prov.	Terlaksananya pengadaan Barang dan jasa yang tertib efektif dan efisien		20.000.000
4.02.20.022	Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	jumlah pelaksanaan review perencanaan pembanunan dan penganggaran	Kabupaten	9 kali (review RPJMD, Renja & Renja Perubahan, RKPD & RKPD Perubahan, KUA-PPAS dan KUPA_PPAS Perubahan, RKA & RKA Perubahan)	225.000.000	DBH Prov.			0
4.02.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Cakupan pmenuhan tnaga fungsional pengawas&auditor		70 persen	350.000.000				350.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.02.21 1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	jumlah peserta pelatihan tenaga pengawas/ auditor	Kabupaten	39 orang ()	350.000.000	DBH Prov.	Terdidiknya tenaga pengawas/ auditor yg profesional		350.000.000
4.02.22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya SOP bidang pengawasan		4 SOP	15.000.000				30.000.000
4.02.22 2	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	jumlah penyusunan SOP tupoksi	Kabupaten	4 SOP (SOP Pengawasan Inspektorat)	15.000.000	DBH Prov.	Terciptanya kepastian pelaksanaan tugas bidang pengawasan		30.000.000
4.02.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	400.000.000				190.000.000
4.02.24 3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM	Kabupaten	1 paket (skor 75)	15.000.000	DBH Prov.	Tersedianya data IKM		15.000.000
4.02.24 4	Pencegahan dan Penghapusan Pungutan Liar (Pungli)	jumlah kasus dan pengaduan masyarakat tentang pungutan liar yang ditangani	Kabupaten	24 kasus ()	385.000.000	DBH Prov.	Terselesainya pengaduan masyarakat tentang adanya pungutan liar		175.000.000
JUMLAH INSPEKTORAT					3.145.125.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
4.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran		12 bulan	700.000.000				0
4.03.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Ketersediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	700.000.000	DBH Prov.			0
4.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 persen	264.000.000				0
4.03.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan kendaraan dinas	Kabupaten		0	DBH Prov.			0
4.03.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	6 jenis (filling (5), lemari (2), rak arsip (2), kursi es 3 (1), lemari gambar (1), , CPU (1))	55.000.000	DBH Prov.			0
4.03.02.011	Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya	jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya	Kabupaten	3 jenis (PC (3), Laptop (2), Printer (3))	84.000.000	DBH Prov.			0
4.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten	1 gedung ()	30.000.000	DBH Prov.			0
4.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional y	Kabupaten	12 bulan (roda dua (14 unit), roda empat (3 unit))	65.000.000	DBH Prov.			0
4.03.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dipelihara	Kabupaten	4 jenis (komputer/laptop (7 unit),printer (5 unit), AC (6 unit), mesin fotocopy (1 unit))	20.000.000	DBH Prov.			0
4.03.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah jenis meubelair kantor yang dipelihara	Kabupaten	2 jenis (meja dan kursi)	10.000.000	DBH Prov.			0
4.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	prosentase aparatur yang mengikuti bimtek/diklat		100 persen	80.000.000				0
4.03.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah PNS yang mengikuti diklat formal	Kabupaten	3 orang ()	30.000.000	DBH Prov.			0
4.03.05.003	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	Kabupaten	43 orang ()	50.000.000	DBH Prov.			0
4.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	35.000.000				0
4.03.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	Kabupaten	3 jenis dokumen ()	35.000.000	DBH Prov.			0
4.07.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat		75	25.000.000				0
4.07.24.003	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kali ()	25.000.000	DBH Prov.			0
4.03.15	Program pengembangan data/informasi	Prosentase keterisian database perenc.pemb daerah		100 persen	100.000.000				0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.03.15 2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah	Kabupaten	100 % (pengisian data oleh SKPD dalam aplikasi SIPD)	100.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.15. 017	Pengelolaan data/informasi pembangunan daerah	jumlah dokumen data untuk kebutuhan perencanaan	Kabupaten		0	DBH Prov.		0	
4.03.16	Program Kerjasama Pembangunan	jumlah kerjasama pembangunan		5 kerjasama	140.000.000			0	
4.03.16 4	Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Jumlah laporan pelaksanaan DAK	Kabupaten	1 dokumen ()	140.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	jumlah dokumen perencanaan wilayah strategis		1 dokumen	105.000.000			0	
4.03.18 2	Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	jumlah dokumen Perda RTRW yang disusun	Kabupaten		0	DBH Prov.		0	
4.03.18 7	Koordinasi dalam Pemecahan Masalah Tata Ruang	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan koordinasi oleh BKPRD dan penguatan kelembagaan Tim BKPRD	Kabupaten	1 dokumen ()	105.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	cakupan monitoring sanitasi perkotaan		100 persen	375.000.000			0	
4.03.19 7	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	jumlah dokumen data Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten		0	DBH Prov.		0	
4.03.19 9	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	jumlah dokumen laporan pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi serta penguatan kelembagaan pokja sanitasi	Kabupaten	1 dokumen (dokumen rp2kpkp)	375.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	cakupan bimtek SDM perencanaan pembangunan		100 persen	200.000.000			0	
4.03.20 3	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	jumlah aparatur perencana pembangunan yang mengikuti Bimtek	Kabupaten	150 orang (bimtek renstra- renja untuk aparatur perencana di SKPD)	200.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	cakupan proses perencanaan pembangunan		100 %	3.450.000.000			1.195.000.000	
4.03.21 4	Penetapan RPJPD	Jumlah naskah akademik perubahan RPJPD	Kabupaten		0	DBH Prov.		0	
4.03.21 5	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD Tahun 2018-2023	Kabupaten	1 dokumen ()	540.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.21 6	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD	Kabupaten	1 kali ()	235.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.21 7	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen Naskah akademik Perda RPJMD 2018-2023	Kabupaten	1 dokumen ()	75.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.21 8	Penyusunan rancangan RKPD	jumlah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Kabupaten	3 dokumen (dokumen Ranwal RKPD 2019, rancangan RKPD 2019 dan	440.000.000	DBH Prov.		460.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				RKPD Perubahan 2018)					
4.03.21 9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	Kabupaten	4 kali (musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional)	400.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.21. 010	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	Kabupaten	1 dokumen (Dokumen RKPD 2019)	150.000.000	DBH Prov.		250.000.000	
4.03.21. 012	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Penyusunan dokumen LKPJ	Kabupaten	2 dokumen (Dokumen LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan)	550.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.21. 013	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah	Kabupaten	2 dokumen (monev Renja, monev RKPD)	310.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.21. 014	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	prosentase integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan penganggaran dan pelaporan	Kabupaten	100 % (pemeliharaan aplikasi SIPP, Penyusunan Modul RPJMD dan Renstra)	415.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.21. 015	Penyusunan KUA-PPAS	jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA PPAS Perubahan	Kabupaten	4 dokumen (dok. rancangan KUA-PPAS, dok. rancangan KUA-PPAS perubahan, dok. KUA-PPAS, dan dok KUA-PPAS perubahan)	335.000.000	DBH Prov.		485.000.000	
4.03.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	jumlah dok. perencanaan pemb. ekonomi		5 dokumen	700.000.000			0	
4.03.22 1	Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Kabupaten	2 dokumen (Dokumen Pencana Pembangunan Industri Daerah (REPIDA) Kab. Magetan dan kajian PAD)	650.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.22 4	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	jumlah dokumen koordinasi pembangunan ekonomi	Kabupaten	1 dokumen (dokumen hasil koordinasi bidang ekonomi)	40.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.22 8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monev bidang ekonomi	Kabupaten	1 dokumen ()	10.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.23	Program perencanaan sosial dan budaya	jumlah dok. perencanaan sosial budaya		3 dokumen	872.000.000			0	
4.03.23 3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	jumlah laporan koordinasi bidang sosial budaya	Kabupaten	1 dokumen (dokumen P3BM)	185.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.23 4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Kabupaten	1 dokumen (monev bidang sosbud)	15.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.23 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok	jumlah dokumen monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok	Kabupaten	1 dokumen ()	35.000.000	DBH Pajak Rokok		0	
4.03.23. 010	Fasilitasi dan koordinasi program penanganan kemiskinan	jumlah dokumen kinerja TKPK	Kabupaten	2 dokumen (dokumen LP2KD dan kinerja TKPK)	245.000.000	DBH Prov.		0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.03.23.011	Pendataan Rumah Tangga Miskin	jumlah dokumen update data rumah tangga miskin	Kabupaten	1 dokumen ()	267.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.23.012	Penyusunan Sistim Informasi Data Sosial Budaya	jumlah sistem informasi sosial budaya	Kabupaten	1 aplikasi (maintenance aplikasi e-bpjs)	125.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	jumlah dok. perencanaan praswil dan SDA		1 dokumen	350.000.000			0	
4.03.24.2	Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	jumlah dokumen perencanaan SDA dan LH	Kabupaten	1 dokumen (masterplan persampahan)	350.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.25	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	cakupan monitoring daerah rawan bencana		100 persen	235.000.000			0	
4.03.25.1	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	jumlah dokumen perencanaan penanganan bencana	Kabupaten	1 dokumen ()	200.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.25.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan monitoring daerah rawan bencana	Kabupaten	1 laporan ()	35.000.000	DBH Prov.		0	
4.03.26	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan	jumlah dok. sarana & prasarana pemerintahan		1 dokumen	85.000.000			0	
4.03.26.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen koordinasi bidang pemerintahan	Kabupaten	1 dokumen (, dok. data sarpras bid. pemerintahan)	85.000.000	DBH Prov.		0	
4.07.31	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	Jml klaster Sistem Inovasi Daerah, Jml penelitian & pengembangan iptek		3 klaster, 1 dokumen	575.000.000			0	
4.07.31.1	Pengembangan Inovasi Teknologi	jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi	Kabupaten	1 kali ()	75.000.000	DBH Prov.		0	
4.07.31.3	Penyusunan Kajian Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	jumlah kajian yang disusun	Kabupaten	1 dokumen (kajian pengembangan wisata dan prasarana pendukung wisata kab magetan)	250.000.000	DBH Prov.		0	
4.07.31.6	Penyusunan Kajian Bidang Inovasi dan Teknologi	jumlah kajian bidang inovasi dan teknologi	Kabupaten	1 dokumen (kajian aplikasi e-gov dalam rangka mendukung smart city)	250.000.000	DBH Prov.		0	
JUMLAH BAPPEDA LITBANG					8.291.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
4.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	624.805.000				0
4.04.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan jasa administrasi perkantoran	kec. MAGETAN	12 bulan ()	624.805.000	DBH Prov.			0
4.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	270.500.000				70.000.000
4.04.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	kec. MAGETAN	4 jenis (5 lemari kayu, 3 white board, 10 kursi, 2 lemari besi)	50.000.000	DBH Prov.			70.000.000
4.04.02.011	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Printer dan kelengkapannya	kec. MAGETAN	8 jenis (Printer=4, kabel, kabel UTP cat.6, konektor RJ 45 cat.6, tang crimping, mouse optik warless, keyboard warless, flashdisk)	27.500.000	DBH Prov.			0
4.04.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang dirawat	kec. MAGETAN	1 gedung (Pengecatan gedung, pemeliharaan taman, pemeliharaan kamar mandi, pemeliharaan atap, perbaikan lantai, perbaikan pintu (slot,engsel))	50.000.000	DBH Prov.			0
4.04.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	kec. MAGETAN	12 bulan (roda 4=12, roda 2=81)	143.000.000	DBH Prov.			0
4.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang mengikuti bimtek/diklat			100.000.000				0
4.04.05.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	kec. MAGETAN	15 orang (Kursus / Pelatihan)	100.000.000	DBH Prov.			0
4.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yg			45.000.000				0
4.04.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	kec. MAGETAN	3 jenis dokumen (dokumen perencanaan, Laporan kinerja dan Keuangan)	20.000.000	DBH Prov.			0
4.04.06.7	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Tercapainya laporan rekonsiliasi PAD	kec. MAGETAN	12 bulan ()	25.000.000	DBH Prov.			0
4.04.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	25.000.000				25.000.000
4.04.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Survey IKM	Kabupaten	1 kali ()	25.000.000	DBH Prov.			25.000.000
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	% penyelesaian dokumen pengelolaan keuangan DH		100 %	2.119.265.000				500.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.04.17 3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah penyusunan Dokumen Kebijakan Akuntansi Bagan Akun Standar (BAS)	kec. MAGETAN	1 dokumen ()	100.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17 6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	jumlah perda tentang APBD yang disusun	kec. MAGETAN	6 dokumen (PERDA APBD dan PERBUP Penjabaran APBD)	305.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17 8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	jumlah pelaksanaan penyusunan perda perubahan APBD	kec. MAGETAN	6 dokumen (PERDA APBD dan PERBUP Penjabaran Perubahan APBD)	315.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah penyusunan dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	kec. MAGETAN	1 dokumen ((nota pengantar LKD, LRA, Neraca, LPE, LO, LAK, CALK, Jawaban Pemerintah SILPA))	275.000.000	DBH Prov.			275.000.000
4.04.17. 013	penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya SPD dan Kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi SIMDA	kec. MAGETAN	56 SKPD (56 SKPD)	85.355.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 020	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan	kec. MAGETAN	7000 Dokumen SP2D (dua kali rekon 8500 Dokumen SP2D)	164.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 022	Intensifikasi Penerimaan TP/TGR	Jumlah Kasus Kerugian Daerah yang ditangani	kec. MAGETAN	20 Kasus (20 Kasus)	30.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 024	Pemantapan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Bimtek	kec. MAGETAN	400 Orang (sosialisasi pengelola keuangan daerah)	75.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 025	Pengelolaan dana transfer ke Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Dana, Transfer ke Pemerintah Pusat dan Pemprov	kec. MAGETAN	40 Dokumen ()	200.000.000	DBH Prov.			225.000.000
4.04.17. 026	Pengelolaan administrasi gaji dan Rekonsiliasi Gaji PNS	Jumlah Dokumen Daftar Gaji; jumlah dokumen SKPP; jumlah rekon	kec. MAGETAN	55 skpd (); 250 SKPP (); 1 kali ()	182.210.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 055	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi APBD semesteran	kec. MAGETAN	2 dokumen ()	75.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 057	Optimalisasi pengelolaan keuangan PPKD	Jumlah Pencairan Dana Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan	kec. MAGETAN	1660 berkas ()	47.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 063	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	jumlah sosialisasi pedoman penyusunan APBD	kec. MAGETAN	1 kali (100 orang)	75.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 068	Asistensi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah SKPD yang mendapat asistensi dari BPKP dan BPPKAD	kec. MAGETAN	56 SKPD ()	115.700.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 070	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemerintah Pusat	kec. MAGETAN	150 Orang ()	75.000.000	DBH Prov.			0
4.04.17. 075	Peningkatan SDM Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peserta Pengelolaan Keuangan Daerah	kec. MAGETAN	110 Orang ()	0	DBH Prov.			0
4.04.48	Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah	% pencatatan, penghapusan dan pengajuan sertifikat asset daerah		100 %	901.990.000				375.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.04.48 1	Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Jumlah penyusunan dokumen aset	kec. MAGETAN	4 jenis (BII, Pajak kendaraan, papa aset, dokumen pemanfaatan BMD)	450.000.000	DBH Prov.			0
4.04.48 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RK-BMD dan RKP-BMD)	Jumlah dokumen RKBMD dan RKP-BMD yang disusun	kec. MAGETAN	1 dokumen ()	35.000.000	DBH Prov.			0
4.04.48 4	Penghapusan Aset Daerah	jumlah pelaksanaan penghapusan aset	kec. MAGETAN	1 tahap ()	50.000.000	DBH Prov.			0
4.04.48 5	Penyusunan Laporan Semesteran	jumlah dokumen laporan semesteran yang tersusun	kec. MAGETAN	47 dokumen ()	30.000.000	DBH Prov.			0
4.04.48 6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016	kec. MAGETAN	50 Orang ()	0	DBH Prov.			0
4.04.48 8	Pensertifikatan Tanah	Jumlah Aset Tetap Tanah Pemkab. Magetan yang diamankan	kec. MAGETAN	10 sertifikat (10 sertifikat)	86.990.000	DBH Prov.			0
4.04.48. 010	Rekonsiliasi Aset Daerah	jumlah buku penerimaan dan pengeluaran barang	kec. MAGETAN	46 dokumen ()	150.000.000	DBH Prov.			200.000.000
4.04.48. 011	Inventarisasi Aset Daerah	jumlah aset bangunan yang terinventarisasi	kec. MAGETAN	150 unit ()	100.000.000	DBH Prov.			175.000.000
4.04.49	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	jml PAD		119.037.642.186 rupiah	3.161.100.000				1.930.000.000
4.04.49 2	Penyediaan Barang Cetak dan Sarana Pemungutan PAD	Jumlah pengadaan alat pungut PAD	kec. MAGETAN	99719 Blok ()	1.000.000.000	DBH Prov.			0
4.04.49 3	Pemutakhiran Data Pendapatan Asli Daerah	jumlah obyek pajak yang di data	kec. MAGETAN	25000 obyek pajak ()	550.000.000	DBH Prov.			0
4.04.49 4	Pemeliharaan/Operasional Basis Data PBB dan BPHTB serta Aplikasi Simpada	jumlah update aplikasi	kec. MAGETAN	2 aplikasi (Sismapada dan Sismiop)	35.000.000	DBH Prov.			55.000.000
4.04.49 6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	jumlah data potensi pajak baru	kec. MAGETAN	10 dokumen ()	222.890.000	DBH Prov.			300.000.000
4.04.49 7	Sosialisasi Perpajakan	jumlah kegiatan sosialisasi perpajakan	kec. MAGETAN	2 kegiatan ()	203.210.000	DBH Prov.			300.000.000
4.04.49 9	Optimalisasi Pemungutan Pendapatan Daerah	prosentase pemungutan PAD	kec. MAGETAN	95 % (95%)	1.150.000.000	DBH Prov.			1.275.000.000
JUMLAH BPPKAD					7.247.660.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH									
4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	393.000.000				0
4.05.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 bulan ()	393.000.000	DBH Prov.			0
4.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	175.000.000				0
4.05.02.025	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas oprasional	Kabupaten		0	DBH Prov.			0
4.05.02.029	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pelaksanaan Pengadaan peralatan gedung kantor; Tercapainya pelaksanaan kegiatan pengadaan (1 pesawat telepon,7 kursi beroda,3 meja kerja,3 laptop,1 printer)	Kabupaten	16 Unit (3 laptop, 6 kursi beroda, 1 pesawat telepon, 5 meja kerja,1 Printer); 15 unit ()	55.000.000	DBH Prov.			0
4.05.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kabupaten	12 bulan (3 unit R4, 8 unit R2)	90.000.000	DBH Prov.			0
4.05.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Kabupaten	11 jenis (PC, Laptop, printer, finger print, AC, scaner, pesawat telepon, wireless,LCD, meubeluer, penghancur kertas))	30.000.000	DBH Prov.			0
4.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur				314.400.000				0
4.05.03.001	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin sippo yang terpasang	Kabupaten	19 unit (untuk UPTD Pendidikan)	239.400.000	DBH Prov.			0
4.05.03.009	Sosialisasi Peningkatan Disiplin PNS	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kabupaten	2 kali (sosialisasi kepegawaian 150 orang dan sosialisasi kinerja aparatur 150 orang)	75.000.000	DBH Prov.	satu kegiatan dilaksanakan 2 sosialisasi (sosialisasi kepegawaian dan kinerja aparatur)		0
4.05.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Jumlah aparatur yang pindah/purna tugas		449 orang	80.000.000				0
4.05.04.004	Penyelesaian SK Pensiun	Jumlah usulan pensiun	Kabupaten	450 SK ()	80.000.000	DBH Prov.			0
4.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				20.000.000				0
4.05.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	Kabupaten	3 jenis dokumen ()	20.000.000	DBH Prov.	Untuk menunjang kegiatan Perencanaan		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SKPD untuk mencukupi permintaan tugas yang amat padat		
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	20.000.000				0
4.01.24 3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kegiatan (skor 75)	20.000.000	DBH Prov.			0
4.05.46	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase pejabat struktural ikut diklatpim, jumlah aparatur ikuti prajabatan, jumlah PNS peserta diklat		75,93 %, ,6,5 %	3.494.250.000				0
4.05.46 1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat Prajabatan	Kabupaten	200 orang ()	500.000.000	DBH Prov.	bila ada kegiatan Rekrutmen tahun 2017 dan target prajabatan mengikuti hasil seleksi CPNS		0
4.05.46 2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pelaksanaan Diklatpim	Kabupaten	3 kegiatan (Diklat Pim Eselon II = 2 orang, Eseln III = 15 orang, Eselon IV = 28 orang)	1.585.000.000	DBH Prov.			0
4.05.46 3	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang /jasa	Kabupaten	80 orang ()	170.000.000	DBH Prov.	Dilaksanakan pelatihan sebelum Ujian dilaksanakan secara online		0
4.05.46 4	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat Fungsional	Kabupaten	45 orang ()	450.000.000	DBH Prov.	Untuk mengakomodir usulan pelatihan, sosialisasi dan Bintek PNS dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur		0
4.05.46. 010	Pembekalan CPNS	Jumlah peserta pembekalan	Kabupaten	200 orang ()	27.750.000	DBH Prov.	Bila ada rekrutmen CPNS tahun 2017 dan target pembekalan disesuaikan		0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
							dengan hasil seleksi CPNS		
4.05.46.011	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan Sumber Daya aparatur	Kabupaten	2 kegiatan (ESQ Training 65 orang Kepala SKPD dan pembekalan kewirausahaan 250 orang PNS menjelang purna tugas)	612.000.000	DBH Prov.	Ada 2 target : 1. Pembinaan Mental Fisik bagi Kepala SKPD 2. Pembekalan bagi PNS menjelang Purna Tugas		0
4.05.46.012	Bimbingan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah pelaksanaan bimtek tugas dan fungsi	Kabupaten	2 kegiatan (Bimtek Pengelolaan Aset Daerah dan Bintek Pelayanan Prima)	149.500.000	DBH Prov.			0
4.05.47	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah aparatur yang dibina		10.588 orang	2.614.000.000				85.000.000
4.05.47.2	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah pelamar yang lulus seleksi pengadaan CPNS	Kabupaten	200 orang (Bila ada kegiatan Rekrutemen CPNS tahun 2017)	675.000.000	DBH Prov.	Bila ada kegiatan Rekrutemen CPNS tahun 2017		0
4.05.47.4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah penerbitan SK kenaikan pangkat	Kabupaten	1750 orang ()	100.000.000	DBH Prov.	Dengan adanya UU No.5 Tahun 2014 bertambahnya usulan kenaikan pangkat dan adanya penambahan personil pada Tim Proses KP		0
4.05.47.5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah Sistem informasi yang dibangun	Kabupaten	1 buah (E-PERSONAL 8.671 data PNS)	150.000.000	DBH Prov.	di tahun 2018 akan dilaksanakan E PERSONAL bagi Aparatur Kab Magetan		0
4.05.47.7	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	Jumlah penerbitan SK ijin belajar dan tugas belajar	Kabupaten	75 orang ()	5.000.000	DBH Prov.			0
4.05.47.8	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah aparatur yang mendapat penghargaan satyalencana	Kabupaten	100 orang ()	65.000.000	DBH Prov.			0
4.05.47.9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin aparatur	Kabupaten	15 kasus ()	50.000.000	DBH Prov.			0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.05.47.011	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah aparatur yang mendapat bantuan tugas belajar	Kabupaten	20 orang (Pemberian Beasiswa bagi PNS tugas belajar dengan Indeks S1 = 1 orang Indeks @ 1000 S2 = 10 orang Indeks @ 1300 Dokter Spesialis = 9 orang Indeks @ 2000)	330.000.000	DBH Prov.			0
4.05.47.012	Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Peserta yang lulus seleksi pra IPDN	Kabupaten	3 orang ()	15.000.000	DBH Prov.			0
4.05.47.017	Pengelolaan pegawai Non PNS	Jumlah penyelesaian administrasi data pegawai non PNS	Kabupaten	578 orang ()	25.000.000	DBH Prov.			0
4.05.47.018	Penyusunan Formasi Pegawai Negei Sipil	Jumlah formasi PNS	Kabupaten	1992 formasi ()	45.000.000	DBH Prov.			0
4.05.47.035	Pengukuhan dan Penerbitan SK PNS	Jumlah PNS yang disumpah dan penerbitan SK PNS	Kabupaten	138 orang ()	16.000.000	DBH Prov.	Bila ada Rekrutmen CPNS Tahun 2017		0
4.05.47.036	Pengelolaan Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah keterisian jabatan struktural dan fungsional ; Jumlah pejabat yang mengikuti asesment	Kabupaten	6650 orang (jumlah pejabat struktural dan fungsional yang dikelola. di dalamnya ada anggaran untuk honor panel ' - Biaya Asesment kompetensi bagi pejabat eselon II, III dan IV sejumlah 90 orang Indeks @ 1000 ' - Biaya Koordinasi dengan KSN, Menpan & RB, Pemprov Ja); 90 orang ()	1.043.000.000	DBH Prov.			0
4.05.47.040	Fasilitasi Penerbitan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai dan Tabungan Pensiun	Jumlah penerbitan karis/karsu, karpeg dan taspen	Kabupaten	500 kartu ()	10.000.000	DBH Prov.			0
4.05.47.041	Penilaian kinerja aparatur	jumlah dokumen penilaian prestasi kinerja PNS	Kabupaten	63 dokumen ()	85.000.000	DBH Prov.			85.000.000
4.05.50	Program Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan		1 kali	35.000.000				0
4.05.50.4	Pembinaan Mental dan Rohani aparatur	jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani aparatur	Kabupaten	1720 orang ()	35.000.000	DBH Prov.			0
JUMLAH BKD					7.145.650.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN MAGETAN									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 Bulan	448.336.000			12 Bulan	448.336.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. MAGETAN	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	429.081.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	429.081.000
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	kec. MAGETAN	12 kali ()	19.255.000	PAD		12 kali ()	19.255.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	53.100.000			100 %	53.100.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	kec. MAGETAN	1 unit gedung ()	10.000.000	PAD		1 unit gedung ()	10.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	kec. MAGETAN	12 bulan (1 unit R4, 6 unit R2)	43.100.000	PAD		12 bulan (1 unit R4, 6 unit R2)	43.100.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya laporan capaian kinerja SKPD,		26 Laporan,	30.840.000			26 Laporan,	30.840.000
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	kec. MAGETAN	3 dokumen ()	30.840.000	PAD		3 dokumen ()	30.840.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	10.000.000			75 skor	10.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	kec. MAGETAN	1 Kegiatan ()	10.000.000	PAD		1 Kegiatan ()	10.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jml Keg pemberdayaan masyarakat kelurahan		9 kegiatan	3.284.928.000			9 kegiatan	3.284.928.000
4.01.33.1	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Magetan	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat di Kelurahan Magetan	kec. MAGETAN	12 bulan ()	250.299.000	PAD		12 bulan ()	250.299.000
4.01.33.2	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Selosari	Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelayanan masyarakat Kelurahan Selosari	kec. MAGETAN	12 bulan ()	231.575.000	PAD		12 bulan ()	231.575.000
4.01.33.3	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tambran	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat di kelurahan Tambran	kec. MAGETAN	12 Bulan ()	103.823.000	PAD		12 Bulan ()	103.823.000
4.01.33.4	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kepolorejo	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat di kelurahan Kepolorejo	kec. MAGETAN	12 bulan ()	111.653.000	PAD		12 bulan ()	111.653.000
4.01.33.5	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kebonagung	Jumlah pelaksanaan jass pelayanan masyarakat di kelurahan Kebonagung	kec. MAGETAN	12 Bulan ()	133.247.950	PAD		12 Bulan ()	133.247.950

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.01.33.6	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tawanganom	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat di kelurahan Tawanganom	kec. MAGETAN	12 Bulan ()	122.145.200	PAD		12 Bulan ()	122.145.200
4.01.33.7	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Bulukerto	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat di kelurahan Bulukerto	kec. MAGETAN	12 Bulan ()	219.140.900	PAD		12 Bulan ()	219.140.900
4.01.33.8	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Mangkujayan	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat di kelurahan Mangkujayan	kec. MAGETAN	12 Bulan ()	90.295.900	PAD		12 Bulan ()	90.295.900
4.01.33.9	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sukowinangun	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat di kelurahan Sukowinangun	kec. MAGETAN	12 Bulan ()	106.395.000	PAD		12 Bulan ()	106.395.000
4.01.33.031	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Magetan	Jumlah pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Magetan	kec. MAGETAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	112.901.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	112.901.000
4.01.33.032	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Selosari	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Selosari	kec. MAGETAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	155.925.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	155.925.000
4.01.33.033	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tambran	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Tambran	kec. MAGETAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	249.127.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	249.127.000
4.01.33.034	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kepolorejo	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Kepolorejo	kec. MAGETAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	262.525.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur	262.525.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
								lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	
4.01.33. 035	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kebonagung	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Kebonagung	kec. MAGETAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	213.652.050	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	213.652.050
4.01.33. 036	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tawanganom	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Tawanganom	kec. MAGETAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	254.104.800	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	254.104.800
4.01.33. 037	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Bulukerto	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Bulukerto	kec. MAGETAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	136.109.100	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	136.109.100
4.01.33. 038	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangkujayan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Mangkujayan	kec. MAGETAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	267.604.100	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	267.604.100
4.01.33. 039	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Sukowinangun	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Sukowinangun	kec. MAGETAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	264.405.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan,	264.405.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
								intensifikasi PBB)	
JUMLAH KEC. MAGETAN						3.827.204.000			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN NGARIBOYO									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan jasa adm. perkantoran		12 bulan	275.500.000			12 bulan	275.500.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. NGARIBOYO	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	275.500.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	275.500.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	102.500.000			100 %	102.500.000
4.01.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	kec. NGARIBOYO	7 Unit (1 unit AC, 2 meubeleur, 1 laptop, 2 meja resepsionis, 1 kulkas)	30.000.000	PAD		10 Unit ()	30.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung/kantor	kec. NGARIBOYO	1 unit gedung ()	25.000.000	PAD		1 unit gedung ()	25.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	kec. NGARIBOYO	12 bulan ()	47.500.000	PAD		12 bulan ()	47.500.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	5.000.000			100%	5.000.000
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan	kec. NGARIBOYO	3 jenis dokumen ()	5.000.000	PAD		3 jenis dokumen ()	5.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	10.000.000			75 skor	10.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	kec. NGARIBOYO	1 Kegiatan (skor IKM 75)	10.000.000	PAD		1 Kegiatan (skor IKM 75)	10.000.000
JUMLAH KEC. NGARIBOYO					393.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN PANEKAN									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	279.500.000			12 bulan	279.500.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. PANEKAN	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	264.500.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	264.500.000
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan desa.	kec. PANEKAN	16 Desa ()	15.000.000	PAD		16 Desa ()	15.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	77.000.000			100 %	77.000.000
4.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	kec. PANEKAN	3 Unit (1 Unit CPU dan 2 Unit Laptop)	20.000.000	PAD)	20.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	kec. PANEKAN	1 unit gedung ()	10.000.000	PAD		1 unit gedung ()	10.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	kec. PANEKAN	8 unit (1 unit R-4 7 unit R-2.)	47.000.000	PAD		8 unit (1 unit R-4 7 unit R-2.)	47.000.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	10.000.000			100%	10.000.000
4.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, capaian kinerja dan keuangan	kec. PANEKAN	74 dokumen ()	10.000.000	PAD		74 dokumen ()	10.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	14.500.000			75 skor	14.500.000
4.01.24.003	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	kec. PANEKAN	1 Kegiatan (skor IKM 75,60)	14.500.000	PAD		1 Kegiatan (skor IKM 75,60)	14.500.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jml Keg pemberdayaan masyarakat kelurahan		1 kegiatan	404.413.000			1 kegiatan	404.413.000
4.01.33.001	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat	kec. PANEKAN	12 bulan ()	344.211.500	PAD		12 bulan ()	344.211.500
4.01.33.010	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Panekan	Jumlah pelaksanaan pelayanan masyarakat kelurahan Panekan	kec. PANEKAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	60.201.500	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	60.201.500
JUMLAH KEC. PANEKAN					785.413.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN PLAOSAN									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	272.500.000			12 bulan	272.500.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. PLAOSAN	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	250.500.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	250.500.000
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	kec. PLAOSAN	60 Kali ()	22.000.000	PAD		60 Kali ()	22.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	81.500.000			100 %	81.500.000
4.01.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	kec. PLAOSAN	3 Unit (sound system, printer dotmatrik, laptop)	19.000.000	PAD			19.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	kec. PLAOSAN	1 Unit gedung ()	20.000.000	PAD		1 Unit gedung ()	20.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	kec. PLAOSAN	12 Bulan ()	42.500.000	PAD		12 Bulan ()	42.500.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	6.000.000			100%	6.000.000
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	kec. PLAOSAN	12 Dokumen ()	6.000.000	PAD		12 Dokumen ()	6.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM	kec. PLAOSAN	1 Kegiatan ()	15.000.000	PAD		1 Kegiatan ()	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jml Keg pemberdayaan masyarakat kelurahan		2 Kegiatan	787.285.000			2 Kegiatan	787.285.000
4.01.33.011	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Plaosan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan masyarakat kelurahan Plaosan	kec. PLAOSAN	10 Kegiatan ()	172.469.450	PAD		10 Kegiatan ()	172.469.450
4.01.33.012	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sarangan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan masyarakat Kelurahan Sarangan	kec. PLAOSAN	8 Kegiatan ()	120.310.000	PAD		8 Kegiatan ()	120.310.000
4.01.33.041	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Plaosan	Jumlah pelayanan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan Plaosan	kec. PLAOSAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	216.326.550	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan	216.326.550

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
								infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	
4.01.33. 042	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Sarangan	Jumlah pelayanan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan sarangan	kec. PLAOSAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	278.179.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	278.179.000
JUMLAH KEC. PLAOSAN					1.162.285.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN SIDOREJO									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	271.000.000			12 Bulan	271.000.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. SIDOREJO	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	271.000.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	271.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	87.500.000			100 %	87.500.000
4.01.02.020	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	kec. SIDOREJO	1 jenis (1 laptop)	5.000.000	PAD			5.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	kec. SIDOREJO	1 unit (Pintu pagar untuk menunjang keamanan)	35.000.000	PAD			35.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	kec. SIDOREJO	7 Unit (1 unit R4 6 unit R2)	47.500.000	PAD		7 Unit (1 unit R4 6 unit R2)	47.500.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	10.000.000			100%	10.000.000
4.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	kec. SIDOREJO	8 dokumen ()	10.000.000	PAD		8 dokumen ()	10.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	16.500.000			75 skor	16.500.000
4.01.24.003	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	kec. SIDOREJO	1 Paket (skor IKM 76)	16.500.000	PAD	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di kantor Kecamatan Sidorejo	1 Paket (skor IKM 76)	16.500.000
JUMLAH KEC. SIDOREJO					385.000.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN PONCOL									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkan, Jumlah monev yang dilakukan ke desa,		12 bulan, 7 kali,	284.437.500			12 bulan, 7 kali,	284.437.500
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan adminisrasi perkantoran	kec. PONCOL	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	265.010.500	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	265.010.500
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke Desa se Kecamatan Poncol	kec. PONCOL	7 kali ()	19.427.000	PAD		7 kali ()	19.427.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	72.303.500			100 %	72.303.500
4.01.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	kec. PONCOL	5 unit (tangga, laptop, printer, bendera rampel, pigura)	24.753.500	PAD			24.753.500
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	kec. PONCOL	12 bulan ()	32.800.000	PAD		12 bulan ()	32.800.000
4.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	kec. PONCOL	12 bulan ()	14.750.000	PAD		12 bulan ()	14.750.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	3.260.000			100%	3.260.000
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	kec. PONCOL	8 Dokumen ()	3.260.000	PAD		8 Dokumen ()	3.260.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM	kec. PONCOL	1 Paket ()	15.000.000	PAD		1 Paket ()	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan		1 kegiatan	373.237.000			1 kegiatan	373.237.000
4.01.33.013	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Alastuwo	Jumlah penyelenggaraan pelayanan masyarakat Kelurahan Alastuwo	kec. PONCOL	12 Bulan ()	131.766.000	PAD		12 Bulan ()	131.766.000
4.01.33.043	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Alastuwo	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Alastuwo	kec. PONCOL	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	241.471.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan,	241.471.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
								intensifikasi PBB)	
JUMLAH KEC. PONCOL						748.238.000			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN PARANG									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	270.500.000			12 bulan	270.500.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. PARANG	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	270.500.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	270.500.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur			97.500.000				97.500.000
4.01.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	kec. PARANG	7 unit (1 unit papan pengumuman, 1 unit AC, 1 unit Printer ,1 unit Komputer , 1 unit sound System, 1 set gorden, 1 unit TV)	30.000.000	PAD			30.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	kec. PARANG	1 unit gedung (pengecatan dan plavon)	20.000.000	PAD			20.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	kec. PARANG	7 unit (1 unit R-4 6 unit R-2)	47.500.000	PAD		7 unit (1 unit R-4 6 unit R-2)	47.500.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	4.000.000			100%	4.000.000
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	kec. PARANG	3 dokumen (dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan)	4.000.000	PAD		3 dokumen (dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan)	4.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM	kec. PARANG	1 kegiatan (skor IKM 79)	15.000.000	PAD		1 kegiatan (skor IKM 79)	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jml Keg pemberdayaan masyarakat kelurahan		1 Kegiatan	385.000.000			1 Kegiatan	385.000.000
4.01.33.014	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Parang	Jumlah Kegiatan Pelayanan Masyarakat	kec. PARANG	12 Bulan	75.000.000	PAD		12 Bulan	75.000.000
4.01.33.044	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Parang	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan	kec. PARANG	7 kegiatan (PBB , PKK , PHBN/ PHBI , Pemeliharaan Kendaraan Dinas , Belanja Modal , Rehab Balai Kelurahan , Pembangunan Gapura Lingkungan Ngepeh)	310.000.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur	310.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
								lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	
JUMLAH KEC. PARANG						772.000.000			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN MAOSPATI									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	350.000.000			12 bulan	350.000.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. MAOSPATI	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	350.000.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	350.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	48.500.000			100 %	48.500.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	kec. MAOSPATI	1 unit gedung (Pengecoran atap gedung)	3.500.000	PAD			3.500.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	kec. MAOSPATI	7 unit (1 Unit R-4 6 Unit R-2)	45.000.000	PAD		7 unit (1 Unit R-4 6 Unit R-2)	45.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	12.500.000			75 skor	12.500.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	kec. MAOSPATI	1 Kegiatan ()	12.500.000	PAD		1 Kegiatan ()	12.500.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jml Keg pemberdayaan masyarakat kelurahan		3 Kegiatan	1.239.380.700			3 Kegiatan	1.239.380.700
4.01.33.021	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Maospati	Jumlah pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan Maospati	kec. MAOSPATI	12 Bulan ()	160.000.000	PAD		12 Bulan ()	160.000.000
4.01.33.022	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Mranggen	Jumlah pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan Mranggen	kec. MAOSPATI	12 Bulan ()	160.000.000	PAD		12 Bulan ()	160.000.000
4.01.33.023	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kraton	Jumlah pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan Kraton	kec. MAOSPATI	12 Bulan ()	150.000.000	PAD		12 Bulan ()	150.000.000
4.01.33.051	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Maospati	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Maospati	kec. MAOSPATI	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	247.172.700	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	247.172.700
4.01.33.052	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mranggen	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Mranggen	kec. MAOSPATI	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	227.208.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	227.208.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
4.01.33. 053	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kraton	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Mranggen	kec. MAOSPATI	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	295.000.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	295.000.000
JUMLAH KEC. MAOSPATI					1.650.380.700				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN BARAT									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran,,		12 bulan,12 bulan,	251.500.000			12 bulan,12 bulan,	251.500.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. BARAT	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	251.500.000	PAD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	251.500.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	139.500.000			100 %	139.500.000
4.01.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	kec. BARAT	9 Unit ()	15.000.000	PAD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	9 Unit ()	15.000.000
4.01.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	kec. BARAT	3 Unit ()	20.000.000	PAD	Pengadaan peralatan gedung kantor	3 Unit ()	20.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	kec. BARAT	1 Unit gedung ()	57.000.000	PAD	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit gedung ()	57.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	kec. BARAT	8 Unit ()	47.500.000	PAD	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8 Unit ()	47.500.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey Indek Kepuasan Masyarakat	kec. BARAT	1 Kegiatan ()	15.000.000	PAD	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	1 Kegiatan ()	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jml Keg pemberdayaan masyarakat kelurahan		2 Kegiatan	783.775.363			2 Kegiatan	783.775.363
4.01.33.024	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tebon	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tebon	kec. BARAT	12 Bulan ()	110.901.500	PAD	Penyelenggaraa n Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tebon	12 Bulan ()	110.901.500
4.01.33.025	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Mangge	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Mangge	kec. BARAT	12 Bulan ()	141.942.837	PAD	Penyelenggaraa n Pelayanan Masyarakat kelurahan Mangge	12 Bulan ()	141.942.837
4.01.33.054	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tebon	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tebon	kec. BARAT	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat,	270.799.500	PAD	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN,	270.799.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)			Kelurahan Tebon	pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	
4.01.33.055	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangge	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Mangge	kec. BARAT	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	260.131.526	PAD	Pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Mangge	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	260.131.526
JUMLAH KEC. BARAT					1.189.775.363				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN KARTOHARJO									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	302.310.000			12 bulan	302.310.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. KARTOHARJO	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	296.310.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	296.310.000
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	kec. KARTOHARJO	6 kali (2 verifikasi, 4 monitoring)	6.000.000	PAD		6 kali (2 verifikasi, 4 monitoring)	6.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	58.990.000			100 %	58.990.000
4.01.02.010	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	kec. KARTOHARJO	1 Unit ()	3.000.000	PAD		1 Unit ()	3.000.000
4.01.02.011	Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya	Jumlah Pengadaan komputer dan printer	kec. KARTOHARJO	2 unit (1 unit komputer, 1 unit printer)	8.000.000	PAD			8.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	kec. KARTOHARJO	7 unit (1 unit R-4 6 unit R-2)	46.490.000	PAD		7 unit (1 unit R-4 6 unit R-2)	46.490.000
4.01.02.036	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Pengadaan Sarpras Kantor	kec. KARTOHARJO	1 jenis ((2 unit kipas angin))	1.500.000	PAD		1 jenis ((2 unit kipas angin))	1.500.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	6.700.000			100%	6.700.000
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen capaian kinerja dan keuangan	kec. KARTOHARJO	6 Dokumen ()	6.700.000	PAD		6 Dokumen ()	6.700.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	14.000.000			75 skor	14.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey IKM	kec. KARTOHARJO	1 kegiatan (skor IKM 74)	14.000.000	PAD		1 kegiatan (skor IKM 74)	14.000.000
JUMLAH KEC. KARTOHARJO					382.000.000				382.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KACAMATAN KARANGREJO									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	261.051.000			12 bulan	261.051.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. KARANGREJO	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	252.051.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	252.051.000
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	kec. KARANGREJO	12 Bulan ()	9.000.000	PAD		12 Bulan ()	9.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	94.449.000			100 %	94.449.000
4.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	kec. KARANGREJO	8 Unit ()	30.000.000	PAD		8 Unit ()	30.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	kec. KARANGREJO	12 Bulan ()	48.775.000	PAD		12 Bulan ()	48.775.000
4.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana gedung kantor	kec. KARANGREJO	1 unit gedung ()	15.674.000	PAD		1 unit gedung ()	15.674.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	10.500.000			100%	10.500.000
4.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja	kec. KARANGREJO	15 Dokumen ()	10.500.000	PAD		15 Dokumen ()	10.500.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.003	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey IKM	kec. KARANGREJO	1 Kegiatan (skor IKM 74)	15.000.000	PAD		1 Kegiatan (skor IKM 74)	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan		2 kegiatan	740.727.000			2 kegiatan	740.727.000
4.01.33.026	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Karangrejo	Jumlah penyelenggaraan pelayanan masyarakat Kelurahan Karangrejo	kec. KARANGREJO	12 Bulan ()	53.811.000	PAD		12 Bulan ()	53.811.000
4.01.33.027	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Manisrejo	Jumlah pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan Manisrejo	kec. KARANGREJO	12 Bulan ()	82.053.000	PAD		12 Bulan ()	82.053.000
4.01.33.056	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Karangrejo	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Karangrejo	kec. KARANGREJO	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	319.613.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan,	319.613.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
								intensifikasi PBB)	
4.01.33. 057	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Manisrejo	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Karangrejo	kec. KARANGREJO	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	285.250.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	285.250.000
JUMLAH KEC. KARANGREJO					1.121.727.000				1.121.727.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN KARAS									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan adminstrasi perkantoran		12 bulan	289.000.000			12 bulan	289.000.000
4.01.01. 020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. KARAS	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	274.000.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	274.000.000
4.01.01. 021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi	kec. KARAS	11 Desa ()	15.000.000	PAD		11 Desa ()	15.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	89.000.000			100 %	89.000.000
4.01.02 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	kec. KARAS	5 unit (1 unit laptop, 1 unit CPU, 3 unit printer)	22.500.000	PAD			22.500.000
4.01.02. 022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	kec. KARAS	1 unit gedung (perbaikan gedung kantor)	25.000.000	PAD		1 unit gedung (perbaikan gedung kantor)	25.000.000
4.01.02. 024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	kec. KARAS	7 unit (1unit R4 6 unit R2)	41.500.000	PAD		7 unit (1unit R4 6 unit R2)	41.500.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24 3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	jumlah pelaksanaan IKM	kec. KARAS	1 Kegiatan (Skor IKM)	15.000.000	PAD	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	1 Kegiatan (Skor IKM)	15.000.000
JUMLAH KEC. KARAS					393.000.000				393.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN SUKOMORO									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	292.000.000			12 bulan	292.000.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kec. SUKOMORO	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	292.000.000	PAD	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	292.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	75.000.000			100 %	75.000.000
4.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	kec. SUKOMORO	4 jenis (1 AC, 2 kursi tunggu, 2 tv, 1 almari)	25.000.000	PAD			25.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pelaksanaan perawatan gedung kantor	kec. SUKOMORO	1 kegiatan (pengecatan)	5.000.000	PAD		1 kegiatan	5.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	kec. SUKOMORO	7 Unit (1 unit R4 6 unit R2)	45.000.000	PAD		7 Unit (1 unit R4 6 unit R2)	45.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.003	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan IKM	kec. SUKOMORO	1 Kegiatan ()	15.000.000	PAD		1 Kegiatan ()	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan		1 kegiatan	390.025.000			1 kegiatan	390.025.000
4.01.33.028	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Tinap	Jumlah pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan Tinap	kec. SUKOMORO	12 bulan ()	71.275.000	PAD		12 bulan ()	71.275.000
4.01.33.058	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Tinap	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan tinap	kec. SUKOMORO	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	318.750.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	318.750.000
JUMLAH KEC. SUKOMORO					772.025.000				772.025.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN KAWEDANAN									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan adminstrasi perkantoran		12 bulan	294.645.000			12 bulan	294.645.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa dan pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	kec. KAWEDANAN	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	267.870.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	267.870.000
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monev dan pendampingan ke Desa/kelurahan se Kecamatan Kawedanan	kec. KAWEDANAN	12 bulan (20 desa/ kelurahan)	26.775.000	PAD		12 bulan (20 desa/ kelurahan)	26.775.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	67.855.000			100 %	67.855.000
4.01.02.019	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Pengadaan peralatan kantor	kec. KAWEDANAN	2 unit (Ac, almari)	18.000.000	PAD		3 unit ()	18.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana gedung kantor	kec. KAWEDANAN	1 unit ()	7.652.000	PAD		1 unit ()	7.652.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	kec. KAWEDANAN	12 bulan (1 unit R4, 5 unit R2)	42.203.000	PAD		12 bulan (1 unit R4, 5 unit R2)	42.203.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	3.500.000			100%	3.500.000
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	kec. KAWEDANAN	3 jenis dokumen ()	3.500.000	PAD		3 jenis dokumen ()	3.500.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.03	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	kec. KAWEDANAN	1 Kegiatan ()	15.000.000	PAD		1 Kegiatan ()	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan		3 kegiatan	1.139.099.600			3 kegiatan	1.139.099.600
4.01.33.017	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Kawedanan	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan	kec. KAWEDANAN	12 bulan ()	71.400.000	PAD		12 bulan ()	71.400.000
4.01.33.018	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Sampung	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Sampung	kec. KAWEDANAN	12 bulan ()	83.000.000	PAD		12 bulan ()	83.000.000
4.01.33.019	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Rejosari	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Rejosari	kec. KAWEDANAN	12 bulan ()	79.895.400	PAD		12 bulan ()	79.895.400
4.01.33.047	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Kawedanan	Jumlah kegiatan pengembangan dan pembinaan masyarakat	kec. KAWEDANAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur	301.559.200	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan	301.559.200

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				lokal kelurahan, intensifikasi PBB)				masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	
4.01.33. 048	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Sampung	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	kec. KAWEDANAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	295.702.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	295.702.000
4.01.33. 049	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Rejosar	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat	kec. KAWEDANAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	307.543.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	307.543.000
JUMLAH KEC. KAWEDANAN					1.520.099.600				1.520.099.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN TAKERAN									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	279.500.000			12 bulan	279.500.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan jasa administrasi perkantoran	kec. TAKERAN	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	279.500.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	279.500.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	72.500.000			100 %	72.500.000
4.01.02.022	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	kec. TAKERAN	2 jenis (1 laptop 1 printer)	9.000.000	PAD			9.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	kec. TAKERAN	1 kegiatan ()	16.000.000	PAD		1 kegiatan ()	16.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan operasional dinas	kec. TAKERAN	12 bulan (1 unit R4, 7 unit R2)	47.500.000	PAD		12 bulan (1 unit R4, 7 unit R2)	47.500.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	8.000.000			100%	8.000.000
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	kec. TAKERAN	3 jenis ()	8.000.000	PAD		3 jenis ()	8.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.03	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey IKM	kec. TAKERAN	1 Kegiatan ()	15.000.000	PAD		1 Kegiatan ()	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jml Keg pemberdayaan masyarakat kelurahan		1 kegiatan	377.674.000			1 kegiatan	377.674.000
4.01.33.016	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Takeran	Jumlah pelaksanaan pelayanan masyarakat Kelurahan	kec. TAKERAN	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	129.472.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	129.472.000
4.01.33.046	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Takeran	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat kelurahan	kec. TAKERAN	5 kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	248.202.000	PAD		5 kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	248.202.000
JUMLAH KEC. TAKERAN					752.674.000				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN NGUNTORONADI									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantora,		Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran 12 bulan,	274.000.000			Tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran 12 bulan,	274.000.000
4.01.01.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah pelaksanaan jasa admnistrasi perkantoran	kec. NGUNTORONADI	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	254.000.000	PAD	Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan ()	254.000.000
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terpenuhinya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	kec. NGUNTORONADI	12 Bulan (Terpenuhinya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan)	20.000.000	PAD		12 Bulan (Terpenuhinya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan)	20.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor, Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		12 bulan, 100 %	96.000.000			12 bulan, 100 %	96.000.000
4.01.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	kec. NGUNTORONADI	4 jenis (2 laptop, printer, almari, kursi)	21.000.000	PAD			21.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	kec. NGUNTORONADI	2 gedung (pintu gerbang dan musholla)	30.000.000	PAD			30.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	kec. NGUNTORONADI	12 bulan (1 unit R4, 6 unit R2)	45.000.000	PAD		12 bulan (1 unit R4, 6 unit R2)	45.000.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	5.000.000			100%	5.000.000
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan	kec. NGUNTORONADI	3 jenis dokumen ()	5.000.000	PAD		3 jenis dokumen ()	5.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.3	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	kec. NGUNTORONADI	1 paket ()	15.000.000	PAD		1 paket ()	15.000.000
JUMLAH KEC. NGUNTORONADI					390.000.000				390.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN BENDO									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	286.000.000			12 bulan	286.000.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,	kec. BENDO	12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK, Honor K2)	271.000.000	PAD		12 bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK, Honor K2)	271.000.000
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengeolaan keuangan desa	kec. BENDO	180 kali ()	15.000.000	PAD		180 kali ()	15.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	75.000.000			100 %	75.000.000
4.01.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	kec. BENDO	5 jenis (laptop, printer, kursi plastik, lemari besi, backdrop)	27.500.000	PAD			27.500.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	kec. BENDO	1 unit gedung ()	0	PAD		1 unit gedung ()	0
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	kec. BENDO	12 bulan (1 unit R4, 6 unit R2)	47.500.000	PAD		12 bulan (1 unit R4, 6 unit R2)	47.500.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	5.000.000			100%	5.000.000
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan keuangan	kec. BENDO	3 jenis dokumen ()	5.000.000	PAD		3 jenis dokumen ()	5.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	kec. BENDO	1 paket (skor IKM 78)	15.000.000	PAD		1 paket (skor IKM 78)	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan		1 kegiatan	374.248.000			1 kegiatan	374.248.000
4.01.33.020	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Bendo	Jumlah pelaksanaan jasa pelayanan masyarakat Kelurahan Bendo	kec. BENDO	12 bulan ()	115.000.000	PAD		12 bulan ()	115.000.000
4.01.33.050	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Bendo	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Bendo	kec. BENDO	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	259.248.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan,	259.248.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
								intensifikasi PBB)	
JUMLAH KEC. BENDO						755.248.000			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
KECAMATAN LEMBEYAN									
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa&pelayanan admnistrasi perkantoran		12 bulan	281.500.000			12 bulan	281.500.000
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	kec. LAMBEYAN	12 Bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	271.500.000	PAD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan (administrasi perkantoran, Operasional PATEN, PHBN, PHBI, PKK)	271.500.000
4.01.01.021	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan Monev ke Desa	kec. LAMBEYAN	36 Kali (Monev ADD, DD dan APBDes di 9 desa masing2 4 kali)	10.000.000	PAD		36 Kali (Monev ADD, DD dan APBDes di 9 desa masing2 4 kali)	10.000.000
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana prasarana aparatur		100 %	95.500.000			100 %	95.500.000
4.01.02.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan kantor	kec. LAMBEYAN	4 jenis (Kursi Rapat, Notebook 2, Kipas angin, almari arsip)	20.000.000	PAD	Terpenuhinya peralatan penunjang kegiatan perkantoran		20.000.000
4.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung	kec. LAMBEYAN	3 kegiatan (Pengecatan genting kantor, Gudang Arsip dan pasang teralis)	28.000.000	PAD			28.000.000
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	kec. LAMBEYAN	12 bulan (1 unit R4, 6 unit R2)	47.500.000	PAD		12 bulan (1 unit R4, 6 unit R2)	47.500.000
4.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% penyelesaian laporan capaian kinerja & keuangan		100%	3.000.000			100%	3.000.000
4.01.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, Laporan kinerja dan keuangan	kec. LAMBEYAN	8 dokumen ()	3.000.000	PAD		8 dokumen ()	3.000.000
4.01.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		75 skor	15.000.000			75 skor	15.000.000
4.01.24.3	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat	kec. LAMBEYAN	1 paket (Skor SKM 77)	15.000.000	PAD		1 paket (Skor SKM 77)	15.000.000
4.01.33	Program Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan		1 kegiatan	395.382.000			1 kegiatan	395.382.000
4.01.33.015	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Kelurahan Lembeyan Kulon	Jumlah penyediaan jasa pelayanan masyarakat kelurahan	kec. LAMBEYAN	12 bulan (administrasi perkantoran)	77.000.000	PAD	Kegiatan pelayan masyarakat menjadi lebih baik	12 bulan (administrasi perkantoran)	77.000.000
4.01.33.045	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kelurahan Lembeyan Kulon	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kelurahan Lembeyan Kulon	kec. LAMBEYAN	5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN, pemberdayaan masyarakat,	318.382.000	PAD		5 jenis kegiatan (PKK, PHBI/ PHBN,	318.382.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
				pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)				pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur lokal kelurahan, intensifikasi PBB)	
JUMLAH KEC. LEMBEYAN						790.382.000			

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002